



Center for Sustainable Development Goals Studies  
Gedung CISRAL UNPAD  
Jl. Dipatiukur No. 46, Bandung, 40132  
Jawa Barat, Indonesia

 [sdgcenter@unpad.ac.id](mailto:sdgcenter@unpad.ac.id)

 [SDGsCenterUnpad](https://www.facebook.com/SDGsCenterUnpad)

 [@SDGsCenterUnpad](https://twitter.com/SDGsCenterUnpad)

 [SDGs Center Unpad](https://www.youtube.com/SDGsCenterUnpad)

 <http://sdgcenter.unpad.ac.id>

Buku dengan judul “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi” ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami kompleksitas konsep serta tantangan implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Buku ini memberikan penjelasan tentang hubungan SDGs dengan konsep pembangunan berkelanjutan, tentang Indikator serta masing-masing Tujuan dan Target SDGs yang terkumpul di dalam Pilar Sosial, Ekonomi dan Lingkungan yang didukung oleh Pilar Tata Kelola. Buku ini juga menjelaskan tentang Strategi pelaksanaan SDGs, termasuk Strategi Pelaksanaannya di Indonesia.

Secara ringkas, isi dari buku terbagi ke dalam lima bagian:

- BAGIAN I LATAR BELAKANG DAN SEJARAH, menjelaskan Latar Belakang Sejarah dan Proses Penyusunan SDGs; Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia: Pencapaian dan Pekerjaan Rumah yang Tersisa
- BAGIAN II KONSEP, INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KESIAPAN NEGARA-NEGARA, menjelaskan Konsep dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Indikator Pencapaian SDGs; Kesiapan Negara-negara dalam Pelaksanaan SDGs
- BAGIAN III FOKUS AREA MENURUT PILAR SOSIAL EKONOMI - LINGKUNGAN DAN TATA KELOLA, menjelaskan Pembangunan Manusia; Ekonomi Hijau; Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati; Institusi dan Tata Kelola untuk SDGs
- BAGIAN IV STRATEGI PENCAPAIAN SDGs, menjelaskan Reorientasi Fokus Pencapaian SDGs Indonesia; Pentingnya Pendekatan Holistik dan Terintegrasi; Pemenuhan Syarat Cukup dan Perlu
- BAGIAN V TANTANGAN KELEMBAGAAN DAN IMPLEMENTASI, menjelaskan Reformasi Kelembagaan SDGs di Tingkat Global; Kelembagaan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia; Mengintegrasikan SDGs ke Dalam Rencana Pembangunan; Pentingnya Pelibatan Semua Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)



ISBN 978-602-439-313-7



TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA:  
KONSEP, TARGET DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

Armida Salsiah Alisjahbana  
Endah Murniningtyas



# TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA:

## KONSEP, TARGET DAN STRATEGI IMPLEMENTASI



Armida Salsiah Alisjahbana  
Endah Murniningtyas



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  
AGENDA:

*“Alongside continuing development priorities such as poverty eradication, health, education and food security and nutrition, it sets out a wide range of economic, social and environmental objectives. It also promises more peaceful and inclusive societies. It also, crucially, defines means*

*(UN Outcome Document on Sustainable Development Goals, 2015)*

VISI BERSAMA (SHARED VISION)  
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN:

Komprehensif: berlandaskan pada tiga pilar, yaitu Pilar Ekonomi, Sosial dan Lingkungan serta didukung Pilar Tata Kelola (*Governance*);  
Tematik: terdiri dari 17 Tujuan (*Goals*);

Holistik dan terintegrasi: ke 17 Tujuan tidak berdiri sendiri, namun saling terkait dan terintegrasi;

Inklusif: tidak ada pihakpun yang tertinggal (*no one left behind*);

Kolaborasi (*partnership*): membutuhkan kerjasama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, dunia usaha, LSM, universitas dan masyarakat.

**TUJUAN  
PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN  
DI INDONESIA:**

**KONSEP TARGET DAN STRATEGI IMPLEMENTASI**

**KATA SAMBUTAN:  
Prof. Dr. Emil Salim**

**Armida Salsiah Alisjahbana  
Endah Murniningtyas**



Copyright@2018  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Cetakan 2, 2018  
Diterbitkan oleh Unpad Press  
Grha Kandaga, Gedung Perpustakaan Unpad Jatinangor, Lantai I  
Jl. Ir. Soekarno km 21 Bandung 45363  
Telp. (022) 84288888 ext 3806  
e-mail : [press@unpad.ac.id](mailto:press@unpad.ac.id) / [pressunpad@gmail.com](mailto:pressunpad@gmail.com)  
<http://press.unpad.ac.id>  
Anggota IKAPI dan APPTI

Tata Letak : Megananda  
Desainer Sampul : Ade Maulana

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Armida Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep,  
Target dan Strategi Implementasi / Penulis, Armida Salsiah  
Alisjahbana, Endah Murniningtyas ; , --Cet. 2 – Bandung; Unpad  
Press; 2018

xviii, 319 h.; 16 x 24 cm

ISBN 978-602-439-313-7

I. Judul II. Armida Salsiah Alisjahbana

# KATA SAMBUTAN

## APA-BAGAIMANA SDGs

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 38 tahun 1983 menugaskan Sekretaris Jenderal PBB membentuk "*World Commission on Environment and Development*" (WCED) yang dipimpin oleh Mrs. Gro Harlem Brundtland, Perdana Menteri Norwegia, selaku Ketua dan Dr. Mansour Khalid, Menteri Luar Negeri Sudan selaku Wakil Ketua untuk kemudian memilih 21 anggota Komisi yang mencakup wakil-wakil negara berkembang dan negara maju.

Tugas Komisi ini merumuskan "*global agenda for change*", mencakup (1) strategi lingkungan jangka panjang pembangunan abad ke 21; (2) menyarankan pola pembangunan yang memperhitungkan hubungan timbal balik antara penduduk, sumber daya alam, lingkungan dan pembangunan ekonomi; (3) menyarankan cara yang lebih baik bagi komunitas internasional menanggapi tantangan lingkungan; (4) ikut bantu persepsi bersama mengenai *issue* lingkungan jangka panjang serta langkah tindak yang dibutuhkan mengembangkan lingkungan dalam agenda kerja dasawarsa-dasawarsa akan datang serta menjelmakan sasaran aspiratif masyarakat dunia.

Selama 1984-1987 komisi berkonsultasi dalam *public hearing* dengan pihak pemerintahan, dunia usaha, kalangan politik, lembaga swadaya masyarakat, penduduk lokal asli (*indigenous*) di berbagai penjuru dunia, sehingga memperoleh gambaran yang cukup representatif

tentang tantangan permasalahan yang dihadapi yang dirangkum dalam laporan WCED: "*Our Common Future*".

Dalam laporan WCED inilah tercetuslah dalam rumusan "*Sustainable Development*", bahwa "*humanity has the ability to make development sustainable -- to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*" *Sustainable development* adalah suatu proses perubahan dengan eksploitasi sumber daya alam, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan institusi dibangun agar serasi konsisten dengan kebutuhan masa depan maupun masa kini. Dan ini pada hakekatnya membutuhkan sebagai prasyarat: kemauan politik yang kuat.

Lima tahun kemudian, setelah laporan WCED "*Our Common Future*" tersebar di dunia, tumbuh usaha mewujudkan pola pembangunan berkelanjutan menjadi operasional. Berbagai prakarsa berkembang di bidang penanganan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Semuanya bermuara pada Konferensi *United Nations Environment and Development* (UNCED) pada Juni 1992 yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil, 20 tahun sesudah Konferensi *Summit* Lingkungan Pertama di Stockholm, Swedia, Juni 1972 yang melahirkan lembaga *United Nations Environment Program* (UNEP) berkedudukan di Nairobi, Kenya.

Konferensi UNCED ini menghasilkan kesepakatan dunia yang pertama: (1) "Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan"; (2) mewujudkan "Agenda 21" Program Aksi Pembangunan Berkelanjutan; (3) kesepakatan konvensi kerangka Perubahan Iklim; (4) konvensi tentang keanekaragaman hayati; (5) pernyataan konsensus global tentang manajemen, konservasi dan pembangunan berkelanjutan berbagai macam hutan.

Sementara itu di tahun 2000 juga tumbuh berkembang deklarasi *Millennium Development Goals*, usaha 186 negara dipelopori negara-

negara berkembang yang memprihatinkan aspek sosial pembangunan dengan titik berat pada pengentasan kemiskinan, penanggulangan kelaparan, kesetaraan gender, mengurangi kematian bayi untuk diwujudkan pula dalam kerjasama global.

Sementara proses ini berjalan, perkembangan politik dunia mencemaskan. Sengketa bersenjata di kawasan Timur Tengah menyeret Amerika Serikat dalam kancah pertikaian. Peristiwa September-11 di tahun 2002 meledak di New York dan menghalau Kesepakatan Pemimpin Dunia mengenai pembaharuan komitmen dunia pada Agenda 21 Pembangunan berkelanjutan, seperti yang sudah disepakati dalam *World Summit on Sustainable Development*, Juni 2002, di Johannesburg, Afrika Selatan.

Cita-cita, program Agenda 21 Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda Kemiskinan dibawa hanyut oleh pertikaian politik bersenjata yang berkecamuk di Timur Tengah. Sungguhpun begitu, Konferensi Tingkat Tinggi ketiga, juga dijuluki "Rio+20" diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil, Juni 2012. Dan menghasilkan dokumen "*The Future We Want*" yang memuat "*common vision*" tentang masa depan yang dicita-citakan dan disertai "*renewing political commitment*" untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kekuatan ide Pembangunan Berkelanjutan yang lahir di tahun 1987 tidak bisa dipatahkan. Suatu generasi baru tumbuh di tahun 2012 di dunia dan Indonesia dan membawa bendera perjuangan menegakkan *Sustainable Development*. Di Indonesia bendera perjuangan Pembangunan Berkelanjutan beralih ke tangan lembaga BAPPENAS, sebagai sumber inspirasi, pengembang konsep dan lembaga koordinasi badan-badan Pemerintahan Indonesia.

Di bawah pimpinan Armida Salsiah Alisjahbana, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (periode 2009-2014) dibantu oleh Endah Murniningtyas, Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan BAPPENAS (periode 2010-2016), perjuangan menegakkan pola Pembangunan Berkelanjutan dilanjutkan dengan tempo yang semakin meningkat.

Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Liberia, Ellen Sirleaf Johnson menjadi *Co-Chairs* dari *High Level Panel of Eminent Persons* yang dibentuk Sekjen PBB untuk memberi masukan tentang Agenda Pembangunan Global pasca 2015. Dan dari sinilah berkembang kemudian gagasan *Sustainable Development Goals* yang juga menampung gagasan *Millennium Development Goals*.

Pada tanggal 25 September, 2015 sebanyak 193 negara sudah mendeklarasikan dan menyepakati Sasaran-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kini memuat pula dimensi *Millennium Development Goals* yang titik-beratnya terletak pada pengentasan kemiskinan di seantero dunia di tahun 2030.

*Sustainable Development Goals* bertumpu pada tiga pilar: (1) pilar Sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial; (2) pilar Ekonomi, pembangunan ekonomi; (3) pilar Lingkungan, termasuk Keanekaragaman hayati. Dan ketiga-tiga pilar ditopang oleh landasan institusi tata-kelola. Ketiga-tiga pilar dan landasan institusi ini bertumpu pada 17 *Sustainable Development Goals* yang diurai dalam 169 target-sasaran dan 241 indikator yang saling pengaruh-mempengaruhi.

Tampak dalam pola pendekatan *Sustainable Development Goals* agar pembangunan ekonomi dilaksanakan dalam konteks sosial masyarakat dan semua ini kemudian bermuara dalam ruang lingkup ekosistem sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Masing-masing pilar turut mempengaruhi perkembangan pilar lainnya dalam hubungan serasi, utuh, lestari dan berlanjut.

Manfaat pendekatan *Sustainable Development Goals* yang kini juga memuat sasaran *Millennium Development Goals*, bahwa hasilnya terukur, sehingga kita keluar dari "konsep abstrak idiil" untuk masuk "konsep konkrit dan riil", yang kemudian bisa dikaji tingkat ukurannya. Semua tertuju pada sasaran akhir mengentaskan kemiskinan di tahun 2030 ketika "*no one left behind*."

Bagaimana isi konsep dan cara praktek pelaksanaannya di lapangan dimuat secara komprehensif dalam buku "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi" yang ditulis oleh para konseptor dan penanggung-jawab *Sustainable Development Goals* untuk Indonesia, Armida Salsiah Alisjahbana bersama dengan Endah Murniningtyas dan kini sejak 2016 sudah pensiun dari jabatan Bappenas.

Satu generasi baru telah bangkit. Bagi mereka inilah buku ini tertuju untuk meneruskan ikhtiar Pembangunan Berkelanjutan mengejar tercapainya sekaligus sasaran pembangunan yang ditopang oleh dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup mencapai masyarakat yang bebas dari kemiskinan, ketimpangan dan ketertinggalan di tahun 2030.

Jakarta, 29 Maret 2018.

Emil Salim.



# KATA PENGANTAR

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 di Kantor Pusat PBB New York oleh 193 negara sebagai komitmen Agenda Pembangunan Global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs) yang sudah dilaksanakan selama periode 2000-2015. SDGs merupakan penyempurnaan dari Agenda Pembangunan Global sebelumnya, karena komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau *human wellbeing*. Apakah pembangunan akan menghasilkan kesejahteraan yang diinginkan manusia tergantung dari perilaku manusia itu sendiri terhadap alam dan pemanfaatannya untuk tujuan kesejahteraan saat ini dan untuk generasi mendatang.

Kemuliaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagian diperlambangkan dalam 17 Tujuan atau *Goals* yang terukur untuk memudahkan dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, pembangunan berkelanjutan menuntut manusia untuk memperhatikan keterkaitan (*interlinkages*) antar ke 17 Tujuan, dan saling ketergantungan antar 167 Target yang diukur melalui 241 indikator dan dengan memperhatikan bahwa alam dan seisinya adalah pembatas kelangsungan kehidupan.

Buku dengan judul “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi” disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami kompleksitas konsep serta tantangan implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Buku ini menjelaskan tentang hubungan SDGs dengan konsep pembangunan berkelanjutan, tentang Indikator serta masing-masing Tujuan dan Target SDGs yang terkumpul di dalam Pilar Pembangunan Manusia, Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Lingkungan Hidup yang didukung oleh Pilar Tata Kelola. Buku ini juga menjelaskan tentang Strategi pelaksanaan SDGs, termasuk Strategi Pelaksanaannya di Indonesia.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada SDGs Center, Universitas Padjadjaran, khususnya kepada para pihak yang telah banyak membantu: Aisyah A. Ghina, Nirwan Maulana, Megananda, Ade Maulana dan Wiartini Citrasari, serta kepada rekan Profesor Arief Anshory Yusuf dan Dr. Zuzy Anna, Direktur Eksekutif SDGs Center Universitas Padjadjaran.

Harapan kami, buku ini dapat digunakan secara luas oleh siapa saja, sehingga semakin banyak parapihak yang berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Selain itu, Buku ini dapat dijadikan bahan referensi perkuliahan mengenai Pembangunan Berkelanjutan di Program Studi S1 maupun S2 di Ilmu-ilmu Sosial dan Kebijakan Publik. Semoga Buku ini berkontribusi bagi penyebaran pemahaman dan implementasi pembangunan berkelanjutan untuk kemaslahatan bersama.

Bandung dan Purwokerto, 22 Maret 2018

Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas

# DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR KOTAK</b>	<b>xvii</b>
<b>BAGIAN I LATAR BELAKANG DAN SEJARAH</b>	<b>1</b>
<b>1 Latar Belakang Sejarah dan Proses Penyusunan SDGs</b>	<b>2</b>
1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Dampak Lingkungan yang Dihasilkan	2
1.2 Perjalanan Panjang Pembangunan Berkelanjutan	7
1.3 Keterkaitan SDGs dengan Kesepakatan Global <i>Addis Ababa         Plan of Action</i> dan <i>Paris Climate Agreement</i>	14
<b>2 Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia: Pencapaian dan Pekerjaan Rumah yang Tersisa</b>	<b>21</b>
2.1 Ringkasan Pencapaian 15 Tahun Pelaksanaan MDGs	22
2.2 Strategi Implementasi MDGs	32
2.3 Pembelajaran dari MDGs	37
2.4 Pekerjaan Rumah yang Tersisa	39
<b>BAGIAN II – KONSEP, INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KESIAPAN NEGARA-NEGARA</b>	<b>43</b>
<b>3 Konsep dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</b>	<b>44</b>
3.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Perbedaan dengan Pembangunan Sebelumnya	44

3.2	Beberapa Keraguan terhadap Pembangunan Berkelanjutan	51
3.3	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Goals</i> )	58
<b>4</b>	<b>Indikator Pencapaian SDGs</b>	<b>72</b>
4.1	Proses Penyusunan Indikator SDGs	72
4.2	Indikator SDGs	74
4.3	Indikator: Mengukur Kemajuan untuk Perbaikan Pelaksanaan SDGs	77
<b>5</b>	<b>Kesiapan Negara-Negara dalam Pelaksanaan SDGs</b>	<b>79</b>
5.1	SDGs dan Kesiapan Negara-negara	79
5.2	Perkembangan Pelaksanaan SDGs	83
5.3	Kesiapan dan Persiapan yang Dilakukan Indonesia	86
<b>BAGIAN III FOKUS AREA MENURUT PILAR SOSIAL – EKONOMI - LINGKUNGAN DAN TATA KELOLA</b>		<b>97</b>
<b>6</b>	<b>Pembangunan Manusia</b>	<b>98</b>
6.1	Berbagai Pendekatan Pembangunan Manusia	98
6.2	Pembangunan Manusia dalam SDGs dan <i>Goals</i> yang Terkait	107
6.3	Bagaimana Indonesia Menyikapi Pembangunan Manusia untuk SDGs?	120
<b>7</b>	<b>Ekonomi Hijau</b>	<b>124</b>
7.1	Pengertian Ekonomi Hijau	124
7.2	Keraguan ( <i>Scepticism</i> ) terhadap Ekonomi Hijau	131
7.3	Praktek Ekonomi Hijau dalam Kerangka SDGs	140
7.4	Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia	152
<b>8</b>	<b>Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati</b>	<b>163</b>
8.1	Lingkungan Hidup dan Cakupannya	164
8.2	Pembangunan Lingkungan Hidup dan <i>Biodiversity</i> di dalam SDGs	168
8.3	Pembangunan Lingkungan Hidup dan <i>Biodiversity</i> di Indonesia	180

<b>9 Institusi dan Tata Kelola untuk SDGs</b>	<b>188</b>
9.1 Institusi dan Tata Kelola sebagai Bagian Terintegrasi dari SDGs	188
9.2 Faktor Manusia sebagai Penentu Institusi dan Tata Kelola yang Baik	191
9.3 Target untuk Institusi dan Tata Kelola dalam SDGs	194
9.4 Pengembangan Institusi dan Tata Kelola untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	196
<b>BAGIAN IV STRATEGI PENCAPAIAN SDGs</b>	<b>199</b>
<b>10 Reorientasi Fokus Pencapaian SDGs Indonesia</b>	<b>200</b>
10.1 Agenda Pembangunan yang Belum terselesaikan	200
10.2 Tantangan dan Peluang Pembangunan Jangka Menengah	215
10.3 Sembilan Fokus Area SDGs Indonesia	224
<b>11 Pentingnya Pendekatan Holistik dan Terintegrasi</b>	<b>226</b>
11.1 SDGs dalam Pendekatan Holistik dan Terintegrasi	226
11.2 Keterkaitan Tujuan SDGs Melalui Keterhubungan antar Target	229
11.3 Target Inti ( <i>Core</i> ) dan Target Ikutan ( <i>Extended</i> )	235
11.4 Catatan untuk Pendekatan Keilmuan ( <i>Scientific Approach</i> ) terhadap SDGs	238
<b>12 Pemenuhan Syarat Cukup dan Perlu</b>	<b>241</b>
12.1 Syarat Cukup dan Perlu ( <i>Necessary and Sufficient Conditions</i> )	241
12.2 Kebijakan dan Program Pengungkit	244
12.3 Ketersediaan Pendanaan, Kerjasama dengan Swasta serta Peluang Kerjasama Pembangunan Global	246
<b>BAGIAN V TANTANGAN KELEMBAGAAN DAN IMPLEMENTASI</b>	<b>249</b>
<b>13 Reformasi Kelembagaan SDGs di Tingkat Global</b>	<b>250</b>
13.1 SDGs dan Paradigma Baru Pembangunan di Tingkat Global	250
13.2 Perubahan Tatanan Pembangunan di Tingkat Global	254

13.3	Implikasi Terhadap Sistem Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa ( <i>United Nations Development System</i> )	257
13.4	Arah Reformasi Sistem Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDS)	259
<b>14</b>	<b>Kelembagaan Implementasi SDGs di Indonesia</b>	<b>266</b>
14.1	Kelembagaan SDGs Indonesia	266
14.2	Format Tim Koordinasi Nasional SDGs: Partisipatif dan Inklusif Seluruh Pemangku Kepentingan	268
14.3	Tantangan Pelaksanaan dengan Kelembagaan SDGs	270
<b>15</b>	<b>Mengintegrasikan SDGs ke Dalam Rencana Pembangunan</b>	<b>274</b>
15.1	Tujuan dan Manfaat <i>Mainstreaming</i>	275
15.2	Proses <i>Mainstreaming</i> SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Nasional	276
15.3	Tindak Lanjut Pelaksanaan SDGs	283
<b>16</b>	<b>Pentingnya Pelibatan Semua Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)</b>	<b>287</b>
16.1	Pelibatan Semua Pemangku Kepentingan dalam Merealisasikan SDGs	287
16.2	Langkah Indonesia Mengelola Pelibatan Para Pemangku Kepentingan	289
16.3	Perkembangan Aktivitas Masing-masing <i>Platform</i> Parapihak	293
	<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>297</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>304</b>
	<b>INDEKS</b>	<b>309</b>
	<b>TENTANG PENULIS</b>	<b>318</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian 15 Tahun MDGS di Indonesia	26
Tabel 2.2	Strategi Implementasi MDGs di Indonesia Berdasarkan Tujuan	32
Tabel 2.3	Agenda yang Tersisa Berdasarkan Tujuan	40
Tabel 3.1	17 <i>Goals</i> Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Goals/SDGs</i> )	61
Tabel 4.1	Jumlah Indikator setiap Goal dalam SDGs	74
Tabel 5.1	Skor Negara-negara dalam Pencapaian SDGs	82
Tabel 5.2	Capaian Goal 1. Penurunan Kemiskinan dalam Berbagai Bentuk	86
Tabel 6.1	Target untuk Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan	110
Tabel 6.2	Target untuk Tujuan 2. Tanpa Kelaparan, Ketahanan Pangan, Nutrisi dan Pertanian Berkelanjutan	112
Tabel 6.3	Target untuk Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	115
Tabel 6.4	Target untuk Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas	117
Tabel 6.5	Target untuk Tujuan 5. Kesenjangan Gender	119
Tabel 7.1	Perbandingan Pandangan Dunia tentang Keberlanjutan dan Prinsip Dasar serta Prioritasnya	126
Tabel 7.2	Target untuk Tujuan 7. Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Modern dan Berkelanjutan	142
Tabel 7.3	Target untuk Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Lapangan Kerja Produktif dan Pekerjaan yang Layak	144

Tabel 7.4	Target untuk Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Berdaya Tahan, Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Menumbuhkan Inovasi	146
Tabel 7.5	Target untuk Tujuan 10. Penurunan Kesenjangan Dalam dan Antar Negara	148
Tabel 7.6	Target untuk Tujuan 17. Tata Cara Pelaksanaan dan Kemitraan Global	150
Tabel 7.7	Jumlah Perusahaan yang Mendapat Penghargaan Industri Hijau	155
Tabel 8.1	Target untuk Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	169
Tabel 8.2	Target untuk Tujuan 11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Berdaya Tahan dan Berkelanjutan	171
Tabel 8.3	Target untuk Tujuan 12. Menjamin Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	173
Tabel 8.4	Target untuk Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim	175
Tabel 8.5	Target untuk Tujuan 14. Ekosistem Laut	177
Tabel 8.6	Target untuk Tujuan 15. Ekosistem Daratan	178
Tabel 9.1	Target untuk Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	195
Tabel 9.2	Sasaran Utama, Arah Kebijakan dan Program untuk Pencapaian Goal 16	197
Tabel 10.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha (Persen)	207
Tabel 10.2	Perkembangan Angkatan Kerja, Lapangan Kerja dan Pengangguran (juta orang)	208
Tabel 10.3	Perkembangan opini Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012-2016	215
Tabel 11.1	Keterkaitan antar Tujuan dari SDGs Melalui Target	232
Tabel 11.2	Target Inti ( <i>Core</i> ) dan Target Ikutan ( <i>Extended</i> ): Contoh dari Tujuan 3	236



Tabel 15.1	Kesesuaian antara SDGs dengan Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	278
Tabel 15.2	Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	281

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peningkatan Sampah telah Merusak Lingkungan	4
Gambar 1.2	Proses Penyusunan Agenda Pembangunan Global Pasca 2015 – SDGs	11
Gambar 1.3	Net ODA/GNI pada tahun 2016	17
Gambar 1.4	Persentase Emisi Gas Rumah Kaca Global	19
Gambar 3.1	Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan dan Internalisasi Aspek Lingkungan ke dalam Pilar Sosial dan Pilar Ekonomi	45
Gambar 3.2	Pengelompokkan SDGs ke dalam Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola yang mendukung Pembangunan Berkelanjutan	64
Gambar 3.3	Pengembangan <i>Goals</i> MDGs ke dalam SDGs	69
Gambar 3.4	<i>Goals</i> Baru dalam SDGs	69
Gambar 5.1	Pencapaian Skor SDGs Indonesia menurut SDSN	93
Gambar 6.1	Pendekatan Kapabilitas dalam Meningkatkan Modal Manusia	100
Gambar 6.2	<i>Rates of return</i> terhadap Investasi Modal Manusia	103
Gambar 6.3	Proses <i>Continuum of Care</i> Kesehatan Individu	105
Gambar 6.4	Strategi Pembangunan Nasional	121
Gambar 7.1	Perkiraan Bank Dunia tentang Nilai Kerugian Kebakaran Hutan Tahun 2015	135
Gambar 7.2	Target Penyediaan Energi Primer EBT (Energi Baru dan Terbarukan) Tahun 2025	160
Gambar 8.1	Goal SDGs dan Keterkaitannya	167
Gambar 9.1	Tata Kelola yang Baik sebagai Pilar IV dari SDGs	190

Gambar 9.2	Institusi, Tata Kelola sebagai Bagian terintegrasi dari SDGs	191
Gambar 10.1	Penduduk Miskin di Indonesia 2000-2017 (Persen)	202
Gambar 10.2	Prevalensi Balita dengan Status Pendek dan Sangat Pendek, Kurus dan Sangat Kurus, Gizi Kurang dan Buruk (Persen)	203
Gambar 10.3	Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita (per 1.000 kelahiran)	204
Gambar 10.4	Angka Partisipasi Murni SMP, SMA, PT (Persen)	205
Gambar 10.5	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran (Persen)	207
Gambar 10.6	Rasio Gini Tahun 2002 - 2017	209
Gambar 10.7	Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum dan Sanitasi Layak	210
Gambar 10.8	Luas Kawasan Konservasi Laut	211
Gambar 10.9	Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Indonesia Tahun 2011-2016	212
Gambar 10.10	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	213
Gambar 10.11	Perkembangan Penanganan Korupsi oleh KPK	214
Gambar 11.1	SDGs sebagai suatu Jaringan ( <i>Network</i> ) antar Target	228
Gambar 11.2	Keterkaitan antar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Target	231
Gambar 11.3	Keterkaitan antara Tujuan (Goal) 10 (Kesenjangan) dengan Tujuan ( <i>Goals</i> ) Lainnya	234
Gambar 11.4	Keterkaitan antar Target Menurut ICSU- <i>ISSC Scientific Review of SDGs</i>	240
Gambar 14.1	Struktur Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	270
Gambar 16.1	Empat <i>Platform</i> Pemangku Kepentingan SDGs	291

# DAFTAR KOTAK

Kotak 1.1	Berbagai Gangguan Kesehatan karena Buruknya Kualitas Lingkungan	5
Kotak 1.2	Perjalanan Kesepakatan Global: Dari Stockholm, Rio, ke Johannesburg	9
Kotak 3.1	Perkiraan Persentase Jasa Ekosistem terhadap GDP dan terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin	47
Kotak 4.1	Sembilan (9) indikator yang digunakan dalam beberapa target SDGs	73
Kotak 5.1	Petikan <i>Summary</i> dari <i>Voluntary National Review SDGs 2017</i>	94
Kotak 6.1	Keterkaitan Tujuan 2. Tanpa Kelaparan dengan Tujuan lain dalam SDGs	112
Kotak 6.2	Keterkaitan Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Tujuan lain dalam SDGs	114
Kotak 7.1	Keterkaitan Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau dengan Tujuan lain dalam SDGs	141
Kotak 7.2	Dampak Penggunaan Pestisida pada Lingkungan	155
Kotak 7.3	2.700 Petani Sawit Swadaya Sumsel Raih Sertifikat RSPO	158
Kotak 7.4	Sumut Listrik Daerah Terpencil Pakai PLTS	161
Kotak 8.1	Keterkaitan pelaksanaan Goal 14. Ekosistem Laut dengan Goal SDGs lainnya	176
Kotak 8.2	Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia	181
Kotak 8.3	Mitigasi dan Cegah Emisi, Puluhan Ribu Pohon Ditanam di Gunungkidul	183

Kotak 8.4	<i>Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan</i> 2015-2020	185
Kotak 8.5	Sistem Pemantauan Kapal Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan Perikanan	186

**BAGIAN I**  
**LATAR BELAKANG**  
**DAN SEJARAH**

---

# Latar Belakang Sejarah dan Proses Penyusunan SDGs

Pembangunan berkelanjutan sudah diperkenalkan sejak Konferensi Lingkungan di Stockholm tahun 1972. Namun demikian, konsep dan cara pembangunan berkelanjutan memerlukan waktu lama untuk dapat diterima oleh pelaku di luar bidang lingkungan. Baru-baru ini dengan lahirnya Deklarasi tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015, masyarakat di semua negara mulai memandang penting pembangunan berkelanjutan untuk diimplementasikan. Untuk memahami konsep pembangunan berkelanjutan, Bab ini akan diawali dengan keberhasilan pembangunan serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pembahasan dilanjutkan dengan uraian tentang perjalanan panjang pembangunan berkelanjutan; proses penyusunan SDGs serta keterkaitan SDGs dengan Kesepakatan Global *Addis Ababa Plan of Action* dan *Paris Climate Agreement*.

## 1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Dampak Lingkungan yang Dihasilkan

Pembangunan ekonomi secara global telah banyak dicapai oleh banyak Negara. Saat ini jumlah penduduk yang sudah mencapai lebih dari 7 miliar masih mampu dihidupi oleh rata-rata Negara di dunia. Pada tahun 1970 rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia adalah sebesar 4,36% dan mampu menghidupi 3,76 miliar penduduk dunia

(Bank Dunia).<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi memasuki abad ke-21, masih dapat ditingkatkan dan dipertahankan oleh Negara berkembang. Cina pada tahun 2000 tumbuh sebesar 8,5% dan menghidupi 1,26 miliar penduduknya (1970= 818 juta, tumbuh 19,3%; 1982 baru menyentuh 1,008 miliar). Perekonomian India pada tahun yang sama tumbuh sebesar 3,84% dan menghidupi 1,053 miliar penduduknya (1970= 553 juta), tumbuh 5,16%; 1982 tumbuh 3,84% penduduknya baru menyentuh 730 juta, kemudian menyentuh 1 miliar tahun 1998). Indonesia pada tahun tersebut tumbuh sebesar 4,92% dan menghidupi 211,5 juta penduduk (1970: perekonomian tumbuh 7,55% dengan penduduk 144 juta; 1982 perekonomian hanya tumbuh 2,25%, penduduk 154 juta).

Di sisi lain pembangunan sosial khususnya dengan dorongan melalui MDGs, telah mampu menurunkan kemiskinan ekstrim di dunia sebanyak 915 juta orang, dari sebanyak 1,75 miliar orang pada tahun 1999 menjadi 836 juta pada tahun 2015, pada akhir pelaksanaan MDGs.<sup>2</sup> Meskipun penurunan jumlah penduduk ekstrim berlangsung lambat pada awal pelaksanaan MDGs, namun prestasi ini patut kita syukuri, mengingat MDGs dinilai sebagai agenda global yang bersifat *top down* yang disusun oleh PBB. Dalam pelaksanaan MDGs, Indonesia mampu menurunkan tingkat kemiskinan berdasarkan PPP USD 1/kapita/hari (indikator kemiskinan global), dari 20,6 persen pada tahun 1990 (tahun dasar) menjadi 5,9 persen pada akhir tahun 2015, lebih dari target yang digariskan dalam MDGs "*halving extreme poverty*". Namun, Indonesia tidak berpuas diri, karena apabila diukur menggunakan garis kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan Indonesia baru menurun dari 15,1 persen pada tahun 1990, menjadi 11,22 persen pada tahun 2015.

Meskipun tingkat kemiskinan menurun, namun jumlah orang miskin secara absolut di dunia pada tahun 2015 masih sebanyak 836 juta

---

<sup>1</sup> *World Development Indicators*, World Bank 2016. ([www.databank.worldbank.org](http://www.databank.worldbank.org))

<sup>2</sup> *The Millennium Development Goals Report 2015*, The United Nations, New York 2015.



orang. Kesenjangan kesejahteraan diantara masyarakat masih nampak nyata. Di Negara berkembang, anak dari 20% keluarga termiskin menyandang masalah *stunting* berjumlah dua kali lebih besar dibanding anak pada 20% keluarga terkaya. Di perdesaan sebanyak 16% penduduk tidak menikmati air bersih, sementara di perkotaan hanya 4% yang tidak menikmati air bersih. Selain itu, 50% masyarakat desa tidak memiliki fasilitas sanitasi, sementara di perkotaan hanya 18% masyarakat yang tidak memiliki fasilitas sanitasi.<sup>3</sup> Di Indonesia jumlah orang miskin pada tahun yang sama adalah sebesar 28,59 juta orang.<sup>4</sup> Jumlah masyarakat di perkotaan yang memiliki akses air bersih adalah sebesar 81,30%, sementara di perdesaan hanya sebesar 60,58%. Sementara layanan fasilitas sanitasi di perkotaan sebesar 76,36% dan di perdesaan hanya sebesar 47,84%.<sup>5</sup>



Sumber: 2016 Annual Report: Empowering People to Protect the Planet, UNEP

**Gambar 1.1 Peningkatan Sampah telah Merusak Lingkungan**

---

<sup>3</sup> *The Millennium Development Goals Report 2015: Summary. The United Nations*, New York 2015

<sup>4</sup> Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2015, Badan Pusat Statistik (BPS)

<sup>5</sup> *Executive Summary Fifteen Years MDGs Achievement in Indonesia (2000-2015)*, Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas), Jakarta 2016

Selanjutnya, pembangunan dan kegiatan masyarakat juga telah mengakibatkan berbagai masalah lingkungan hidup dan berbagai gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh buruknya kualitas lingkungan hidup. Perkembangan produksi kemudian dipicu oleh peningkatan dan gaya hidup konsumsi masyarakat telah mengakibatkan produksi sampah melimpah di berbagai negara. Produksi sampah yang melimpah ini tanpa diikuti oleh pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sampah menumpuk dan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang.

Perilaku manusia dan kegiatan ekonomi juga telah menghasilkan emisi yang terus meningkat di berbagai negara. Polusi udara dan air telah mengakibatkan merebaknya berbagai penyakit, bahkan kematian. Penurunan kondisi sanitasi dan makanan yang tidak sehat telah mengakibatkan kematian sebanyak 1,7 miliar manusia setiap tahunnya. Polusi udara di perkotaan telah mengakibatkan kematian sekitar 800 ribu orang setiap tahunnya. Pencemaran tembaga (*lead*) telah mengakibatkan 13 juta manusia cacat, dalam bentuk keterbelakangan mental, dan penyakit kardiovaskular (Kotak 1.1). Bagi Indonesia, keadaan ini mengancam kesehatan generasi muda yang akan menjadi tumpuan potensi bonus demografi yang dialami Indonesia sejak tahun 2012.

**Kotak 1.1 Berbagai Gangguan Kesehatan karena Buruknya Kualitas Lingkungan**

<i>Major environmental risk factors with quantifiable disease impacts</i>	<i>Diseases with an important environmental contribution</i>
<i>Unsafe water and sanitation, poor hygiene. This environmental hazard is estimated to kill nearly 1.7 million people annually, largely as a result of a range of waterborne diseases, including diarrhoeal diseases.</i>	<i>Diarrhoeal diseases. Some 94% of the 1.8 million annual deaths from diarrhoeal disease is attributable to environmental causes, particularly unsafe drinking-water and inadequate sanitation.</i>

<p><b>Indoor pollution.</b> Associate with solid fuel use, mostly in poor countries. Globally 1.5 million people died from diseases caused by indoor air pollution in the year 2002.</p>	<p><b>Lower respiratory infections.</b> Over 1.5 million deaths annually from lower respiratory infections (41% of the LRI disease burden) are attributable to environmental factors, largely associated with exposure to indoor smoke from solid fuels and outdoor (ambient) air pollution.</p>
<p><b>Urban air pollution.</b> Estimated to kill about 800 thousands every year. Elevated levels of fine particulates in ambient air – typically emitted by vehicles, industry and energy generation – are associated with increases in daily and long-term premature mortality due to cardiopulmonary diseases, acute respiratory infections and cancers.</p>	<p><b>Vector-borne diseases.</b> Over 500 thousand deaths annually, or 42% of the global disease burden from malaria, are attributed to modifiable environmental factors such as poorly-designed irrigation and water systems; poor housing and settlement siting; deforestation and ecosystem change/degradation.</p>
<p><b>Climate change.</b> Causes an estimated 150 thousands excess deaths annually, as well as injuries, from more extreme weather events such as heat-waves, floods and droughts; impacts on regional food production; and changed transmission patterns of vector-borne and other infectious diseases.</p>	<p><b>Road-traffic injuries.</b> An estimated 467 thousand deaths from traffic injuries, or about 40% of the total annual disease burden from traffic injuries, is attributable to environmental factors, e.g. transport and land-use designs that expose pedestrians and cyclists to excessive risks.</p>
<p><b>Lead exposure.</b> Contributes to both childhood mental retardation and cardiovascular diseases associated with high blood pressure, together causing a loss almost 13 million disability adjusted life years (DALYs-a combined measure of morbidity and premature mortality) annually, or nearly 1% of the global burden of diseases.</p>	<p><b>Unintentional poisoning.</b> Globally it is estimated that 71% of all intentional poisonings, which kill about 350 thousand people annually, are attributable to environmental factors. In developing countries, such poisonings are strongly associated with poor chemical management in agro-industries and occupational settings.</p>

Sumber: World Health Report, 2002.

Kadaan ini mendorong perlunya cara pembangunan yang baru, cara pembangunan yang memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*people and profit*), dengan tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup (*planet*), sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam akan tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang. Inilah yang dimaksud dengan Pembangunan Berkelanjutan.

## **1.2 Perjalanan Panjang Pembangunan Berkelanjutan**

Paradigma pembangunan ini sebetulnya sudah didengungkan sejak lama dengan diakui pentingnya Pembangunan Berkelanjutan sejak KTT Bumi pertama tahun 1972. Selama 40 tahun, Pembangunan Berkelanjutan menjadi perdebatan karena dinilai abstrak (sulit dimengerti dengan indikator terukur), dinilai menghambat pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Perjalanan kesepakatan pembangunan lingkungan yang baik dan keterkaitannya dengan pembangunan di berbagai aspek sudah dilakukan sejak lama. Isu lingkungan pertama kali menjadi agenda internasional dalam pertemuan internasional di Stockholm tahun 1972. Perhatian tentang pentingnya pembangunan lingkungan untuk kesejahteraan manusia telah melahirkan adanya lembaga yang khusus menangani lingkungan hidup, yaitu *the United Nations Environment Programme (UNEP)*. Pentingnya isu lingkungan hidup terus bergulir dan puncaknya adalah lahirnya laporan yang mendasari pentingnya integrasi kepedulian lingkungan dan pembangunan ekonomi, baik di tingkat internasional, nasional dan lokal. Laporan ini terkenal dengan sebutan *the Brundtland Report* (Kotak 1.2).

Dari gambaran kondisi lingkungan hidup sebagaimana ilustrasi di atas, dampak lingkungan hidup sudah semakin mengganggu masyarakat. Sejalan dengan kemajuan pengetahuan, pengukuran dampak lingkungan yang dianggap eksternalitas sudah dapat dikuantifikasikan, dan dapat diukur nilai ekonominya. Internalisasi

dampak lingkungan ke dalam pembangunan sudah dapat dilakukan melalui keterukuran ini. Dengan demikian, langkah antisipasi dan pencegahan dampak lingkungan ke dalam kegiatan manusia dan kegiatan ekonominya sudah dapat dilakukan. Paradigma pembangunan yang selama ini lebih mengutamakan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan hidup, sudah dapat diubah menjadi pembangunan yang menyeimbangkan antara pemenuhan kehidupan saat ini tanpa membahayakan keadaan lingkungan serta bermanfaat untuk kehidupan generasi mendatang. Paradigma pembangunan seperti ini dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, dan dengan sejarah panjang perjuangan pembangunan berkelanjutan, maka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara nyata sudah tidak dapat ditunda lagi.

### **KTT Bumi Ketiga (Rio +20), Rio de Janeiro, Brazil, 20-22 Juni 2012**

Akhir dari rangkaian tersebut di atas, sepuluh tahun setelah KTT Bumi ke-2 di Johannesburg, KTT Bumi yang ke-3 kembali diselenggarakan oleh PBB di Rio de Janeiro, Brazil. Konferensi ini tidak hanya dihadiri oleh para pemimpin pemerintahan, namun juga perwakilan dari sektor bisnis, organisasi kemasyarakatan (LSM), akademisi, wartawan dan masyarakat umum. KTT Rio+20 menghasilkan Dokumen *The Future We Want*<sup>6</sup> yang menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan nasional. Dokumen tersebut memuat kesepahaman pandangan bersama terhadap masa depan yang diharapkan oleh dunia (*common vision*) dan penguatan komitmen politik untuk menuju pembangunan berkelanjutan (*renewing political commitment*).

---

<sup>6</sup> "The Future We Want" (Resolution 66/288)  
[http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E)

Dalam dokumen *The Future We Want*, terdapat 3 (tiga) isu utama bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu: (i) Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, (ii) Pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan, serta, (iii) Kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kerangka aksi tersebut memuat penyusunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pasca-2015.

### **Kotak 1.2 Perjalanan Kesepakatan Global: Dari Stockholm, Rio, ke Johannesburg**

- Isu lingkungan muncul pertama kali sebagai agenda internasional dalam *Stockholm Conference on Human Environment* tahun 1972. Konferensi ini juga melahirkan lembaga UNEP, *United Nations Environment Programme* dan dua instrumen hukum yaitu Deklarasi Stockholm yang berisi 24 prinsip lingkungan dan pembangunan dan 109 langkah atau rencana aksi. Konferensi Stockholm merupakan awal kebangkitan hukum lingkungan modern, *modern environmental law* (Kiss and Shelton, 1991).
- Pada tahun 1983, PBB membentuk *World Commission on Environment and Development (WCED)* sebagai komisi independen yang membahas serta memberikan rekomendasi terhadap persoalan lingkungan global.
- Pada tahun 1987, WCED (Komisi Brundtland) menghasilkan laporan yang berjudul *Our Common Future* yang membahas berbagai program untuk mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan pembangunan ekonomi di tingkat internasional, nasional dan lokal.
- Tahun 1992, dua puluh tahun setelah Konferensi Stockholm, PBB menyelenggarakan *United Nations Environment and Development (UNCED)*, yang juga merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan kebijakan dan hukum lingkungan di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Dokumen utama hasil UNCED adalah: (i) *Rio Declaration on Environment and Development* (Deklarasi Rio), yang berisi 27 prinsip yang merupakan pengembangan dari prinsip Stockholm. ; (ii) Agenda 21 yang merupakan pedoman untuk pemerintah/tingkat nasional untuk melaksanakan rencana aksi sesuai prinsip-prinsip dalam Deklarasi Rio; (iii) Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati; (iv) *the Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*; (v) *Statement of Principles for a Global Consensus on the Management*,

*Conservation and Sustainable Development of all types of forest (Statement of Forest Principles).*

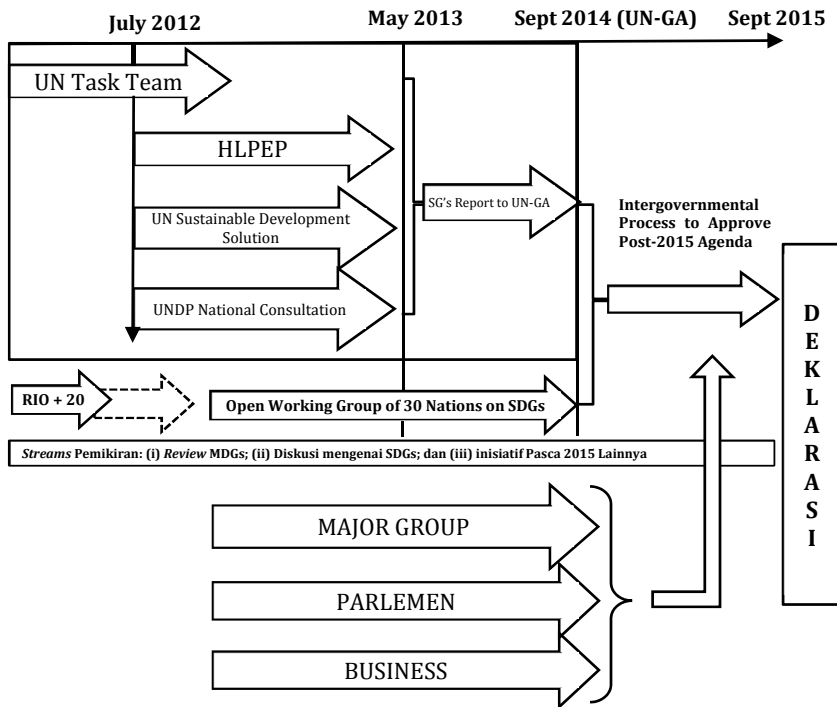
- Tahun 2000, 186 negara mendeklarasikan *Millennium Development Goals (MDGs)*, suatu tekad bersama untuk melawan kemiskinan dan kelaparan, mendorong pendidikan, kesetaraan gender, mengurangi angka kematian bayi dan memperbaiki kesehatan ibu, mendorong keberlanjutan lingkungan dan kerjasama global dalam pembangunan.
- Tahun 2002, diselenggarakan *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* di Johannesburg, Afrika Selatan. Hasil penting dalam pertemuan ini adalah *Political Declaration dan Johannesburg Plan of Implementation (JPOI)*. Deklarasi tersebut terdiri dari enam bagian yang intinya merupakan komitmen untuk melaksanakan JPOI dengan penetapan kerangka waktu untuk mewujudkan capaian-capaian. Sedangkan JPOI sendiri terdiri atas 170 paragraf yang mencakup: (i) mengurangi angka kemiskinan; (ii) mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan; (iii) melindungi dan mengelola SDA sebagai basis pembangunan ekonomi dan sosial; (iv) melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*); (v) upaya sungguh-sungguh (*concerted efforts*) diantara pelaku internasional seperti perwakilan Negara, wilayah, badan PBB, *multinational development banks* dan kelompok masyarakat sipil/CSO; (vi) kelembagaan tingkat nasional yang kuat dan partisipatif untuk mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Dikutip dari Buku Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim, 2010

## **Proses Penyusunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs)**

Pada tanggal 25 September, 2015, sejarah mencatat komitmen 193 negara di dunia, termasuk Indonesia terhadap Agenda Pembangunan Global Pasca 2015. Komitmen ini tertuang dalam Resolusi PBB nomor 70/1 yang menghasilkan *Outcome Document of the United Nations Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda: "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development"*

Proses penyusunan sejak Juli 2012 sampai dengan September 2015, kurang lebih berlangsung sebagai berikut:



Sumber: Bappenas, 2014

**Gambar 1.2 Proses Penyusunan Agenda Pembangunan Global Pasca 2015 – SDGs**

Penyusunan SDGs berlangsung melalui beberapa *streams* yang sangat *bottom up* melibatkan Negara-negara dan juga non pemerintah. *Stream* pertama adalah dari internal PBB yaitu *UN Task Team* dan didukung beberapa Tim yang ditugaskan memberi masukan kepada Sekjen PBB yaitu *High Level Panel of Eminent Person (HLPEP)*; *UN-SDSN* yang didukung jaringan perguruan tinggi di seluruh dunia; serta konsultasi langsung dengan masyarakat oleh UNDP melalui kantor perwakilan di seluruh dunia. *Stream* yang kedua, yaitu jalur Negara yang dimulai dengan *Open Working Group* yang mendapat mandat dari KTT Rio+20. *Stream* selanjutnya yaitu melalui *NGO/Major Groups*



serta jalur Bisnis dan selanjutnya adalah jalur Parlemen. Dalam proses ini nampak adanya proses yang sangat partisipatif dan inklusif.

Hasil KTT Bumi Ketiga (Rio+20) dengan *Outcome Document*-nya *the Future We Want* menjadi bahan utama yang dideliberasi lebih lanjut dalam mekanisme *Open Working Group* yang terdiri dari perwakilan 30 negara. Pembahasan *Open Working Group* ini berlangsung dalam mekanisme PBB. Bahan dasar dan rujukan selanjutnya berasal dari Laporan Sekretaris Jenderal PBB kepada Sidang Umum PBB September, 2014. Laporan ini mendasarkan kepada tiga rujukan utama (Gambar 1.1), masukan dari *High Level Panel of Eminent Persons*, masukan dari *UN Sustainable Development Solutions Network* yang diketuai Profesor Jeffrey Sachs, dan masukan dari konsultasi global yang dikoordinasikan UNDP.

Indonesia berperan signifikan dalam semua proses ini. *High Level Panel of Eminent Persons* merupakan Panel Ahli yang dibentuk Sekjen PBB untuk memberikan masukan tentang Agenda Pembangunan Global Pasca 2015. *Co-chairs* dari Panel Ahli ini adalah: Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, PM Inggris David Cameron dan Presiden Liberia, Ellen Sirleaf Johnson.<sup>7</sup> Dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya di tingkat global, Indonesia senantiasa berperan aktif sebagaimana ditunjukkan dalam *Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG-SDGs)* untuk mendiskusikan 27 kelompok isu yang dimandatkan dalam Laporan Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB (Rio+20) tahun 2012. Hasil dari proses ini menjadi masukan dalam penyusunan Agenda Pembangunan Global Pasca 2015 sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Dalam proses yang paralel, Indonesia juga ditunjuk sebagai anggota dari *Inter-governmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing (IG-SDF)*, yang merupakan bagian penting

---

<sup>7</sup> Laporan tersebut dijadikan masukan bagi Laporan Sekjen PBB dalam Sidang Umum PBB September, 2013.

dalam aspek pendanaan pelaksanaan Agenda Pembangunan Pasca 2015. Selama periode 2012-2014, Indonesia berperan aktif dalam *the Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC)*, yang memiliki tujuan untuk menyusun mekanisme dan pola kerjasama pembangunan internasional yang lebih efektif (*the HOW*) dalam upaya pencapaian target Agenda Pembangunan Pasca 2015 (*the WHAT*).<sup>8</sup>

Dalam Dokumen Hasil Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*UN Outcome Document on Sustainable Development Goals*), inti sari SDGs dideskripsikan sebagai:

*“Alongside continuing development priorities such as poverty eradication, health, education and food security and nutrition, it sets out a wide range of economic, social and environmental objectives. It also promises more peaceful and inclusive societies. It also, crucially defines means of implementation”*

SDGs merupakan komitmen bersama yang jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan MDGs. Penekanan tujuan tidak hanya pada *outcome* dari pembangunan itu sendiri yang berujung pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pada aspek keadilan dan inklusivitas serta cara dalam pencapaian tujuan. SDGs menekankan pada pemenuhan Hak Asasi Manusia, non-diskriminasi, perhatian terhadap kaum marjinal dan difabel, pentingnya partisipasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan: pemerintah, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat. Apabila dalam MDGs terdapat target-target untuk mengurangi sampai dengan setengahnya, misalnya target kemiskinan, maka dalam SDGs target

---

<sup>8</sup> Diwakili oleh Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas KIB II selama periode 2012-2014 untuk *Committee of Experts on Sustainable Financing*, sedangkan Menteri PPN/Kepala Bappenas KIB II bersama Menteri Keuangan/Menko Perekonomian Nigeria dan Menteri Pembangunan International Inggris dipercaya sebagai *Co-Chair* dari *the Global Partnership for Effective Development Cooperation* selama periode 2012-2014.

disepakati jauh lebih ambisius, yaitu misalnya menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuknya.

SDGs sangat mendorong kerjasama pembangunan yang lebih luas di antara pemangku kepentingan, tidak hanya di tataran lokal dan nasional. SDGs memberikan ruang yang luas bagi kerjasama pembangunan global antar pemangku kepentingan, tidak hanya antar pemerintah. Termasuk ke dalam mekanisme kerjasama pembangunan global ini adalah dalam hal pendanaan, peningkatan kapasitas, SDM, alih teknologi serta akses pasar.

### **1.3 Keterkaitan SDGs dengan Kesepakatan Global *Addis Ababa Plan of Action* dan *Paris Climate Agreement***

#### **Keterkaitan SDGs dengan Kesepakatan Global Addis Ababa**

Pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan sangatlah besar, dapat diestimasikan mencapai triliunan dolar setiap tahunnya. Untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah tantangan yang tidak dapat diatasi. Diperlukan sinergi sumber pendanaan tidak hanya pemerintah, tetapi juga swasta (termasuk BUMN) dan masyarakat. Peran investasi publik dan swasta secara global akan cukup untuk menjawab tantangan tersebut - namun hal itu dapat terjadi hanya jika sumber-sumber keuangan yang diinvestasikan sesuai dan sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hal ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari memobilisasi keuangan publik, menetapkan kebijakan publik dan kerangka peraturan yang tepat, membuka potensi transformatif sektor swasta, dan memberi insentif perubahan pada pola konsumsi, produksi dan investasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Agenda Aksi Addis Ababa (AAAA) dalam "*the Third International Conference on Financing for Development*" (Addis Ababa,

13-16 Juli 2015) memberikan landasan yang kuat untuk mendukung implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, termasuk Tujuan 17 dari SDGs yaitu *Global Partnership* dan *Means of Implementation*.

Agenda aksi Addis Ababa memuat kerangka global dan berisi serangkaian kebijakan yang komprehensif, dengan lebih dari 100 langkah konkret, untuk membiayai pencapaian SDGs. Agenda Aksi Addis Ababa bertujuan untuk memobilisasi keuangan publik, menetapkan kebijakan publik dan kerangka peraturan untuk membuka partisipasi sektor swasta, peluang perdagangan, pengembangan teknologi, perubahan insentif pada konsumsi, produksi dan pola investasi. Lebih jauh lagi, hal ini untuk menyelaraskan seluruh arus (*flow*) sumber daya dan kebijakan dengan mengutamakan tiga pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini mencakup berbagai macam sarana pelaksanaan keuangan dan non-keuangan: sektor publik dan sektor swasta, arus pembiayaan dalam negeri dan internasional, kebijakan publik dan kerangka peraturan, teknologi, pengembangan kapasitas, dan lingkungan yang mendukung kerjasama internasional.

Agenda Aksi Addis Ababa meliputi beberapa komitmen baru sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan sosial dan layanan publik prioritas
2. Forum infrastruktur global untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur
3. Paket *Least-Developed Countries* (LDC) untuk mendukung negara-negara yang paling miskin
4. Mekanisme Fasilitasi Teknologi untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
5. Meningkatkan kerjasama internasional dalam perpajakan untuk membantu meningkatkan atau mobilisasi sumber penerimaan di dalam negeri

6. Mengutamakan pemberdayaan perempuan dalam pembiayaan pembangunan

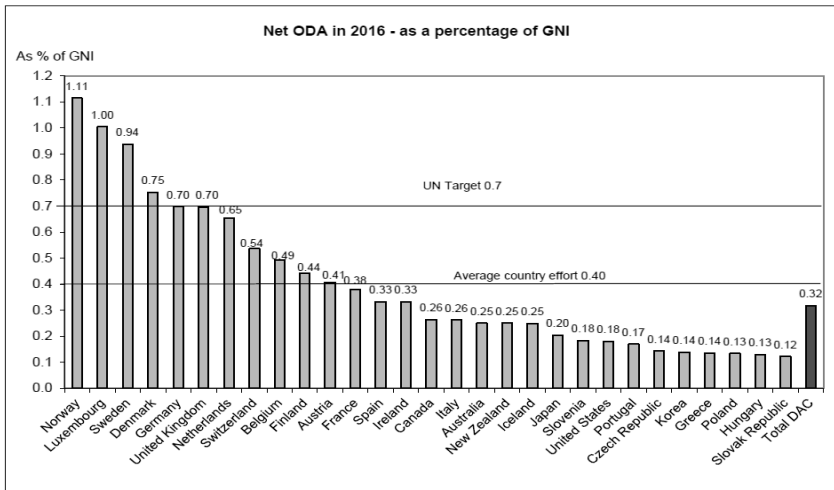
Agenda Aksi Addis Ababa ini berisi perjanjian dan rekomendasi kebijakan dalam tujuh topik utama, yaitu:

1. Sumber Daya Publik Domestik
2. Bisnis dan Keuangan Swasta Domestik dan Internasional
3. Kerjasama Pembangunan Internasional
4. Perdagangan Internasional sebagai Mesin Pembangunan (*Trade as engine of growth*)
5. Keberlanjutan Hutang
6. Menangani Masalah atau Isu Sistemik
7. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Inovasi dan Pembangunan Kapasitas; termasuk juga data, pemantauan, dan tindak lanjut.

Secara lebih rinci dalam topik Kerjasama Pembangunan Internasional dijelaskan bahwa negara-negara maju yang termasuk dalam *Development Assistance Committee - DAC* dari OECD berkomitmen untuk memberikan bantuan pembangunan (*Official Development Assistance - ODA*) sebesar 0,7% dari Pendapatan Nasional Bruto (*Gross National Income - GNI*), dengan 0,15 sampai 0,20 persen (*ODA/GNI*) diberikan kepada negara kurang berkembang (*Least Developed Countries - LDCs*). Negara pemberi ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target penyediaan bantuan pendanaan pembangunan setidaknya 0,2 persen (*ODA/GNI*) untuk LDCs. Uni Eropa berjanji untuk melakukannya pada tahun 2030. Komitmen ini pun tertera pada target 17.2 dalam Goal 17 SDGs, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Gambar 1.3 di bawah ini menggambarkan besaran persentase ODA/GNI negara-negara maju pada tahun 2016. Secara berurutan Norwegia, Luxembourg, Swedia, Denmark, Jerman dan Inggris menempati posisi teratas urutan net ODA/GNI dengan besaran

(ODA/GNI) sudah mencapai atau melebihi target PBB yaitu 0,7 persen. Hanya sedikit dari Negara-negara maju yang telah merealisasikan komitmen pemberian ODA terhadap GNI sebesar minimal 0,7 persen. Negara-negara maju lainnya pada umumnya persentase ODA/GNI mereka masih di bawah 0,7 persen.



Sumber: OECD, 2017

**Gambar 1.3 Net ODA/GNI pada tahun 2016**

### **Keterkaitan SDGs dengan *Paris Climate Agreement*<sup>9</sup>**

Perubahan iklim menimbulkan dampak yang signifikan terhadap semua negara dan wilayah. Hal ini mengganggu perekonomian nasional dan mempengaruhi kehidupan, merugikan manusia, komunitas dan negara di hari ini dan mungkin akan lebih di hari esok.

Dampak dari perubahan iklim dapat dirasakan mulai dari, perubahan pola cuaca, meningkatnya permukaan air laut, dan lebih banyak lagi kejadian cuaca ekstrim. Untuk menanggapi perubahan iklim tersebut,

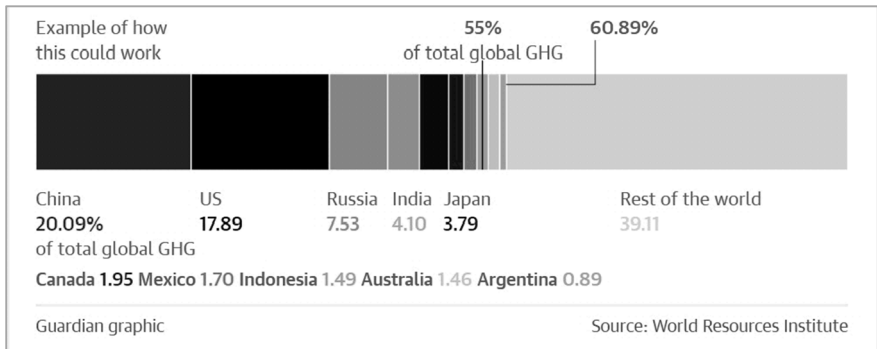
<sup>9</sup> Keterkaitan SDGs dengan *Paris Climate Agreement* merupakan salah satu contoh dari komitmen SDGs dalam Goal tentang *Climate Change* serta hasil kesepakatan Global melalui proses UNFCCC di tahun 2015. Tentu masih terdapat banyak kesepakatan Global lainnya yang terkait dengan salah satu atau beberapa *Goals* dari SDGs yang tidak dibahas dalam buku ini. Misalnya kesepakatan Global yang terkait dengan *Biodiversity* serta keterkaitannya dengan pencapaian *Goals* yang relevan dengan *Biodiversity* di SDGs.

pada tanggal 30 November – 12 Desember 2015, dalam acara Pertemuan Para Pihak ke-21 (COP 21) Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) yang dilaksanakan di Paris, perwakilan negara-negara di dunia mengadopsi sebuah kesepakatan bersama yang disebut dengan *Paris Climate Agreement*. Pertemuan ini adalah pertemuan bersejarah yang menyepakati kesepakatan yang mengikat pertama sejak Protokol Kyoto yang lahir pada pertemuan COP ke-3.

Sebagaimana yang tercantum pada *Article 2* dalam dokumen *Paris Agreement*, tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim, dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya pemberantasan kemiskinan, termasuk dengan:

1. Menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat Celcius dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi peningkatan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat Celcius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim.
2. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan.
3. Membuat suplai finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.

Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris ini di New York, Amerika Serikat pada tanggal 22 April 2016. Sesuai Keputusan COP-21, Perjanjian Paris secara efektif akan berlaku 30 hari setelah diratifikasi oleh paling sedikit 55 Negara Pihak Konvensi yang jumlah total emisinya sekurang-kurangnya 55 persen dari jumlah total emisi gas rumah kaca global.



**Gambar 1.4 Persentase Emisi Gas Rumah Kaca Global**

Gambar di atas menunjukkan persentase emisi gas rumah kaca (GRK) yang disumbangkan oleh negara-negara penyumbang gas rumah kaca terbesar terhadap total emisi GRK global. China merupakan negara terbesar penyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 20,09% dari total emisi GRK dunia. Selanjutnya, diikuti dengan Amerika Serikat, Russia, India, Jepang, Kanada, Mexico, dan Indonesia berada di urutan ke-8 dengan jumlah emisi GRK sebesar 1,49% dari total emisi GRK dunia.

Keberadaan konferensi COP21 tertulis di dalam *Outcome Document of the United Nations Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda: "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development"* paragraf 32. Dokumen yang merupakan komitmen bersama terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tersebut menekankan komitmen dari semua negara untuk bekerja untuk kesepakatan mengenai perubahan iklim yang ambisius dan universal. Implikasi dari Kesepakatan Paris ini adalah bahwa perjanjian politik, instrumen hukum lainnya atau hasil yang disepakati dengan kekuatan hukum berdasarkan konvensi yang berlaku untuk semua pihak harus diperlakukan secara seimbang, antara kepentingan mitigasi, adaptasi, keuangan, pengembangan dan transfer teknologi, pengembangan kapasitas, dan transparansi dalam pelaksanaannya.



Penanganan perubahan iklim tertuang dalam tujuan ke-13 dari SDGs, yaitu: “Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya”, dengan target-target sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.
3. Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.
4. Melaksanakan komitmen negara maju pada the *United Nations Framework Convention on Climate Change* untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparan dalam pelaksanaannya serta mengoperasionalkan secara penuh the *Green Climate Fund* melalui kapitalisasi dana tersebut sesegara mungkin.
5. Meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.

## **Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia: Pencapaian dan Pekerjaan Rumah yang Tersisa**

Memasuki tahun milenium, tepatnya September tahun 2000, para pemimpin dunia dan perwakilan dari 189 negara berkumpul di New York, Amerika Serikat, untuk menyepakati deklarasi milenium atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Millennium Development Goals* (MDGs). Deklarasi tersebut merupakan bentuk nyata dari usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global. MDGs berisikan delapan tujuan yang ingin dicapai hingga tahun 2015, dengan berbagai indikator untuk masing-masing sasaran tersebut. Kedelapan sasaran tersebut adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan (Tujuan 1), mencapai pendidikan dasar untuk semua (Tujuan 2), mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Tujuan 3), menurunkan angka kematian anak (Tujuan 4), meningkatkan kesehatan ibu (Tujuan 5), memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lain (Tujuan 6), menjamin kelestarian lingkungan hidup (Tujuan 7) dan membangun kemitraan global untuk pembangunan (Tujuan 8). Tujuan pertama dapat dikatakan sebagai inti dari MDGs (ADB, 2009). Hal ini dikarenakan, Tujuan 2 sampai 7 dianggap sebagai permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dan/atau disebabkan oleh kemiskinan dan kelaparan. Sementara itu, sasaran membangun kemitraan global untuk pembangunan adalah langkah strategi untuk mendorong negara-negara kaya dalam

menjalin kerjasama dan membantu negara-negara yang lebih miskin, agar dapat meningkatkan standar hidupnya. Bab ini membahas tentang ringkasan pencapaian MDGs Indonesia, pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaannya serta "Pekerjaan Rumah" yang tersisa yang akan dilanjutkan sebagai bagian dari SDGs.

## **2.1 Ringkasan Pencapaian 15 Tahun Pelaksanaan MDGs**

Sebagai salah satu negara yang hadir dan ikut menandatangani Deklarasi Milenium, Indonesia berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pencapaian MDGs. Selama perjalanan 15 tahun MDGs, pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan MDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2005-2009 dan RPJMN 2010-2014), Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (RKP), dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs di setiap provinsi (Bappenas, 2016). Perkembangan pencapaian MDGs di Indonesia sebagaimana yang dipantau Kementerian PPN/Bappenas dalam Laporan Pencapaian MDGs di Indonesia secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 (Bappenas, 2016).

Mengacu pada Laporan Pencapaian MDGs di Indonesia dalam Bappenas, 2016, berikut adalah inti dari pembahasannya.<sup>10</sup> Terkait dengan tujuan MDGs pertama, yakni menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, dari 11 indikator pencapaian MDGs, hanya ada tiga indikator saja yang berhasil dicapai. Ketiga indikator tersebut adalah proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari yang berhasil turun dari sebesar 20.6% pada tahun 1990 menjadi 5.9% pada tahun 2015, indeks kedalaman kemiskinan

---

<sup>10</sup> Pembahasan terkait pencapaian 15 tahun MDGs, Strategi Implementasi MDGs, *Lessons learnt* serta Pekerjaan Rumah yang tersisa dalam Bab ini mengacu sepenuhnya pada Dokumen Laporan Pencapaian MDGs di Indonesia yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2016.

yang berkurang menjadi 1.97% dan proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja yang turun menjadi 41,9%.

Indonesia mampu menurunkan indikator-indikator yang terkait langsung dengan sasaran penurunan kemiskinan, meskipun indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional masih belum mencapai target MDGs. Akan tetapi, nilai dari indikator tersebut mengalami penurunan pada 2015 menjadi sebesar 11,22%, dibandingkan dengan tahun 1990, yaitu sebesar 15,1%. Sementara itu, pekerjaan rumah yang masih banyak untuk target-target yang berkaitan dengan lapangan kerja dan kelaparan. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil agar dapat terus menciptakan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah penduduk usia produktif yang membutuhkan pekerjaan. Dari sisi tujuan penurunan kelaparan, meskipun semua indikatornya tidak mencapai target MDGs, besarnya pada tahun 2015 menurun, relatif terhadap tahun acuannya. Kondisi ini mengindikasikan perlu adanya upaya percepatan supaya dapat mencapai target yang diharapkan.

MDGs menetapkan target yang sangat tinggi untuk indikator-indikator pencapaian tujuan kedua. Namun demikian Indonesia sudah terbilang cukup berhasil mencapai tujuan tersebut. Pasalnya, dari tiga indikator yang ada, hanya indikator proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar saja yang belum mencapai angka di atas 95%. Sebagai tambahan, dalam menggambarkan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, dapat juga digunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) – persentase penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang bersekolah. Hingga tahun 2015, APS telah mencapai 99,1%, yang dapat diinterpretasikan sebagai hanya sekitar 0,9% atau sebanyak 269.415 penduduk usia 7-12 tahun belum bersekolah dan tidak bersekolah lagi (BAPPENAS, 2016).

Tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah tercapai di Indonesia. Temuan menarik dari kondisi ini adalah angka partisipasi perempuan di perguruan tinggi jauh lebih tinggi dari laki-laki, dengan perbandingan rasio APM yang mencapai 122,14. Selain itu, meskipun partisipasi perempuan di dalam parlemen atau kegiatan politik mengalami peningkatan secara nasional, kondisi yang serupa tidak serta merta berlaku untuk parlemen atau kegiatan politik level daerah. Hingga tahun 2014, terdapat 7 provinsi dan 14 kabupaten/kota yang belum memiliki anggota DPR perempuan (BAPPENAS, 2016).

Sasaran penurunan angka kematian anak/balita sudah berhasil tercapai. Keberhasilan ini salah satunya dikarenakan tujuan MDGs keempat ini memang sudah sejak awal menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional. Pemerintah melakukan berbagai strategi untuk mencapai tujuan tersebut, seperti perbaikan infrastruktur kesehatan melalui peningkatan jumlah, jaringan dan mutu puskesmas, mutu dan jumlah tenaga kesehatan dan intervensi program strategis (BAPPENAS, 2016).

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran pada tahun 2015 masih tetap tinggi, yaitu sebesar 305, dan masih jauh dari target MDGs yang sebesar 102. Meskipun demikian, tujuh indikator lainnya di dalam tujuan MDGs kelima sudah tercapai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sasaran MDGs kelima belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih efektif terkait kesehatan ibu, khususnya kematian ibu saat melahirkan.

Indikator-indikator terkait pengendalian penyebaran dan penurunan malaria dan penyakit TB sudah berhasil dicapai semua. Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk berkurang secara signifikan dari 4,68 pada tahun 1990 menjadi 0,85 pada tahun 2015. Angka kejadian penyakit TB juga berkurang, meskipun tidak sedrastis kasus malaria, dari 343 pada tahun 1990 menjadi 183 pada tahun 2015. Akan tetapi,

capaian yang serupa tidak ditunjukkan oleh target pengendalian penyebaran dan penurunan HIV dan AIDS. Prevalensi HIV dan AIDS dari total populasi meningkat sekitar dua kali lipat dari pada periode 2006-2015, dari sebesar 0,16% menjadi 0,36%. Tampaknya peningkatan pencapaian indikator-indikator lainnya yang terkait angka prevalensi tersebut, misalnya penggunaan kondom, akses terhadap pengobatan anti-retroviral dan sosialisasi HIV dan AIDS, belum cukup untuk menurunkan angka prevalensi HIV dan AIDS.

Dari 16 indikator keberhasilan MDGs ketujuh, sebanyak 10 indikator sudah berhasil tercapai, sedangkan sisanya belum tercapai. Indikator penting yang tidak tercapai dan menjadi fokus perhatian adalah rasio kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan. MDGs mengisyaratkan bahwa indikator ini harus naik, sedangkan untuk kasus Indonesia mengalami penurunan dari 59,97% pada tahun 1990 menjadi 51% pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak kebocoran yang terjadi di sektor kehutanan, seperti *illegal logging* dan pembakaran hutan. Selain itu, akses berkelanjutan terhadap sumber air minum dan fasilitas sanitasi layak masih menjadi pekerjaan yang belum terselesaikan, terutama untuk daerah pedesaan. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum dan fasilitas sanitasi layak di pedesaan pada tahun 2015, masing-masing sebesar 60,58% dan 47,84%. Keduanya masih belum mencapai target MDGs, yakni sebesar 65,81% dan 55,55%, meskipun telah mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan acuan dasarnya, tahun 1993.

Tujuan MDGs terakhir sudah hampir tercapai, karena hanya terdapat dua indikator saja yang belum tercapai dari total sembilan indikator. Dua indikator tersebut adalah rasio ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan proporsi rumah tangga dengan akses internet. Indikator yang pertama mengalami penurunan dari 41,6% menjadi 34,17% selama periode 1990-2015. MDGs menargetkan indikator tersebut untuk meningkat, sebagai salah satu

indikasi terjalannya kemitraan global untuk pembangunan. Sementara itu, meskipun proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet telah mengalami peningkatan yang sangat drastis selama periode 2005-2015, dari sebesar 3,37% menjadi 41,98%, indikator tersebut masih belum mencapai target MDGs, yaitu sebesar 50%.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian MDGs di Indonesia adalah 71%. Dengan kata lain, dari total 72 indikator MDGs, terdapat 51 indikator yang berhasil tercapai. Tujuan MDGs ketiga dan keempat - mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan menurunkan angka kematian anak - menjadi tujuan yang semua indikatornya berhasil dicapai oleh Indonesia, dengan masing-masing sebanyak 7 dan 4 indikator. Di sisi lain, sasaran MDGs yang indikatornya paling banyak belum tercapai adalah sasaran MDGs kesatu dan ketujuh - menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup - yakni masing-masing sebanyak 7 dan 6 indikator.

**Tabel 2.1 Pencapaian 15 Tahun MDGS di Indonesia**

Indikator	Acuan dasar	Saat ini	Target 2015	Status	Sumber	
<b>TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN</b>						
<b>Target 1A: Menurunkan proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan di bawah \$1 per hari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015</b>						
1.1	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per kapita per hari	20,6%	5,9% (2015)	10,3%	●	Bank Dunia dan BPS
1.1a	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	15,1% (1990)	11,22% (2015)	7,55%	▼	BPS (SUSENAS)
1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,7% (1990)	1,97% (2015)	Berkurang	●	BPS (SUSENAS)
<b>Target 1B: Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda</b>						
1.4	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	3,52% (1990)	3,31% (2014)	-		Bank Dunia dan BPS (SUSENAS)
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	65% (1990)	61,7% (2015)	-		Bank Dunia dan BPS (SUSENAS)

1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	71% (1990)	41,91% (2015)	Menurun	●	BPS (SUSENAS)
<b>Target 1C: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara 1990-2015</b>						
1.8	Prevalensi balita dengan berat badan rendah atau kekurangan gizi	31% (1989)	19,6% (2013)	15,5%	▼	BPS (SUSENAS), Kemendes (RISKES- DAS)
1.8.a	Prevalensi balita gizi buruk	7,2% (1989)	5,7% (2013)	3,6%	▼	
1.8.b	Prevalensi balita gizi kurang	23,8% (1989)	13,9% (2013)	11,9%	▼	
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum				▼	BPS (SUSENAS)
	- 1.400 Kkal/kapita/hari	17,00% (199)	12,96% (2015)	8,5%	▼	
	- 2.000 Kkal/kapita/hari	64,21% (199)	56,94% (2015)	35,32%	▼	
<b>TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA</b>						
<b>Target 2A: Memastikan pada 2015 semua anak-anak di manapun, laki-laki maupun Perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar</b>						
2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar	88,7% (1992)	96,7% (2015)	100%	●	BPS (SUSENAS)
2.2	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	62% (1990)	88,94% (2014/2015)	100%	▼	Kemdikbud
2.3	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	96,6% (1990)	99,67% (2015) L: 99,7% P: 99,64%	100%	●	BPS (SUSENAS)
<b>TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>						
<b>Target 3A: Menghilangkan Ketimpangan Gender di Tingkat Pendidikan Dasar dan Lanjutan pada tahun 2005 dan di Semua Jenjang Pendidikan Tidak Lebih dari Tahun 2015</b>						
3.1	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi					BPS (SUSENAS)
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI	100,27 (1993)	100,33 (2015)	100	●	
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs	99,86 (1993)	104,45 (2015)	100	●	
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA/MA	93,67 (1993)	103,45 (2015)	100	●	
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	74,06 (1993)	122,14 (2015)	100	●	
3.1a	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	98,44 (1993)	99,94 (2015)	100	●	



3.2	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian	29,24 (1990)	35,77 (2015)	Meningkat	●	BPS (SAKER- NAS)
3.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12,5% (1990)	17,32 (2014)	Meningkat	●	KPU
<b>TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK</b>						
<b>Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga Dua Pertiga, dalam kurun waktu 1990-2015</b>						
4.1	Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 kelahiran hidup	97 (1991)	26,29 (2015)	32 (2015)	●	BPS (SDKI SUPAS)
4.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	68 (1991)	22,23 (2015)	23 (2015)	●	
4.2a	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	32 (1991)	19 (2012)	Menurun	●	
4.3	Persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi Campak	44,50 (1991)	82,36 (2015)	Meningkat	●	BPS (SUSENAS)
<b>TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU</b>						
<b>Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu sebesar Tiga Perempat dalam kurun waktu 1990-2015</b>						
5.1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	390 (1991)	305 (2015)*	102	▼	SDKI; *SUPAS 2015
5.2	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	66,3% (2002)	91,51% (2015)*	Meningkat	●	SDKI, *BPS, Susenas 2015
<b>Target 5B: Mewujudkan Akses Kesehatan Reproduksi bagi Semua pada Tahun 2015</b>						
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, semua cara	49,7% (1991)	59,98% (2015)	Meningkat	●	SDKI, *BPS, Susenas 2015
5.3a	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, cara modern	47,10% (1991)	58,99% (2015)*	Meningkat	●	
5.4	Angka Kelahiran Remaja (perempuan 15-19 tahun) /1000 perempuan 15-19 thn	51 (2002/2003)	48 (2012)	Menurun	●	SDKI
5.5	Cakupan pelayanan ANC (sedikitnya 1 kali kunjungan dan 4 kali kunjungan) <b>1 kunjungan</b>	75,0% (1991)	93,76% (2014)*	Meningkat	●	SDKI *Laporan MDG 2013
	<b>4 kunjungan</b>	56,0% (1991)	85,72% (2014)		●	
5.6	<i>Unmet Need</i> KB	17,0% (1991)	11,4% (2012)	Menurun	●	SDKI
<b>TUJUAN 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA, &amp; PENYAKIT MENULAR LAIN</b>						
<b>Target 6A. Mengendalikan penyebaran dan menurunkan kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015</b>						
6.1	Prevalensi HIV dan AIDS (persen) dari total populasi	0,16% (2006)	0,36% (2015)	Menurun	▼	Laporan estimasi dan pemodelan matemati- ka

6.2	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	12,8% (2002/03)	43,5% (2013)	Meningkat	●	STBP
6.3	Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif HIV dan AIDS	11,40% (2010)	21,25% (2012)	Meningkat	●	Kemkes ( <i>Rapid Survey</i> )
<b>Target 6B. Mewujudkan Akses Terhadap Pengobatan HIV/AIDS bagi Semua yang Membutuhkan sampai dengan Tahun 2015</b>						
6.5	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	76,5% (2010)	93,76% (2014) 91,85% (TW 3, 2015)	Meningkat	●	Kemkes
<b>Target 6C. Mengendalikan Penyebaran dan Mulai Menurunkan Jumlah Kasus Baru Malaria dan Penyakit Utama Lainnya Hingga Tahun 2015</b>						
6.6	Angka kejadian malaria (per 1,000 penduduk)	4,68 (1990)	0,85 (2015)	Menurun	●	Kemkes
6.6a	Angka kejadian malaria		217,025 (2015)	Menurun	●	Kemkes
6.7	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	3,3% (2007)	80,6%** (2014)	Meningkat	●	*SDKI **Kemkes (Survei KAP)
6.9	Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis					
6.9a	Angka kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100.000 penduduk/tahun)	343 (1990)	183 (2013)	Dihentikan , mulai berkurang	●	Global TB Report, WHO, 2013
6.9b	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	443 (1990)	272 (2013)		●	
6.9c	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	92 (1990)	41 (2014)		●	
6.10	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS					
6.10a	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	20,0% (2000)	77% (2014) 68,5% (TW IV, 2015)	70,0%	●	Kemkes
6.10b	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	87,0% (2000)	90,1% (2014) 89,8% (TW IV, 2015)	85,0%	●	

**TUJUAN 7: MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**
**Target 7A. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan**

7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	59,97% (1990)	51,00% (2014)	Meningkat	▼	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7.2	Jumlah emisi karbon dioksida ekuivalen (CO <sub>2</sub> e)	1.001.422 Gg CO <sub>2</sub> e (2000)	1.143.868 Gg CO <sub>2</sub> e (2013) 23,48% dari BAU tahun 2013	Target penurunan emisi GRK 26% dari BAU tahun 2020 tercapai	● (2015) ● (2020)	Bappenas
7.2a	Jumlah konsumsi energi primer (per kapita)	2,64 BOE (1991)	3,47 (2013)	Menurun dari kondisi BAU 6,99	●	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7.2b	Intensitas energi (BOE per 1000 USD)	5,28 BOE/USD 1.000 (1990)	4,05 BOE/USD 1.000 (2013)	Menurun	●	
7.2c	Elastisitas energi	0,98 (1990)	1,52 (2013)	Menurun	▼	
7.2d	Bauran energi untuk energi terbarukan	3,5% (2000)	6,00% (2012)	-		
7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton (CFC dan HCFC)	8.332,7 metrik ton BPO (CFC) (1992) 6.689,21 metrik ton HCFC (2010)	0 CFC 2.419,36 metrik ton HCFC (2015)	0 CFC sementara HCFC menurun	●	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	66,08% (1998)	91,54% (2014)	Tidak melebihi batas	●	Kementerian Kelautan dan Perikanan
7.5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas daratan	26,40% (1990)	27,54% (2014)	Meningkat	●	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,14% (1990)	5,13% (2015)	Meningkat	●	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

<b>Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015</b>						
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan	37,73% (1993)	70,97% (2015)	68,87%	●	BPS (SUSENAS) Kementeria- n PU dan Perumahan Rakyat
7.8a	Perkotaan	50,58% (1993)	81,30% (2015)	75,29%	●	
7.8b	Perdesaan	31,61% (1993)	60,58% (2015)	65,81%	▼	
7.9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi dasar layak, perkotaan dan perdesaan	24,81% (1993)	62,14% (2015)	62,41%	▼	
7.9a	Perkotaan	53,64% (1993)	76,36% (2015)	76,82%	▼	
7.9b	Perdesaan	11,10% (1993)	47,84% (2015)	55,55%	▼	
<b>Target 7D. Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020</b>						
7.10	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	20,75% (1993)	4,94% (2015)	6% (2020)	● (2015) ▶ (2020)	BPS (SUSENAS)
<b>TUJUAN 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN</b>						
<b>Target 8A. Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif</b>						
8.6a	Rasio ekspor dan impor terhadap PDB <sup>1)</sup>	41,60% (1990)	34,17% (2015)**	Meningkat	▼	*BPS & Bank Dunia ** BPS
8.6b	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	45,80% (2000)	92,11% (Des 2015)	Meningkat	●	Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
8.6c	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	101,30% (2003)	77,81% (Des 2015)	Meningkat	●	
<b>Target 8D. Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang</b>						
8.12	Rasio pinjaman luar negeri Pemerintah terhadap PDB	24,59% (1996)	7,0% (Sept 2015)	Berkurang	●	Kementeria- n Keuangan dan BPS
8.12a	Rasio pembayaran kewajiban utang luar negeri Pemerintah terhadap Penerimaan Hasil Ekspor ( <i>debt service ratio/DSR</i> )	51,00% (1996)	4,1% (Sept 2015)	Berkurang	●	Kementeria- n Keuangan dan BPS
<b>Target 8F. Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi</b>						
8.14	Proporsi penduduk yang memiliki jaringan PSTN (kepadatan fasilitas telepon per jumlah penduduk)	4,02% (2004)	4,01% (2015)	Meningkat	●	BPS (SUSENAS)

8.15	Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler <sup>1)</sup>	14,79% (2004)	88,04% (2015)	100,00%	●	BPS (SUSENAS)
8.16	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	3,37% (2005)	41,98% (2015)	50,00%	▼	BPS (SUSENAS)
8.16a	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	3,67% (2005)	18,71% (2015)	Meningkat	●	BPS (SUSENAS)

Status: ● Tercapai ▼ Tidak Tercapai ► Akan Tercapai

Sumber: BAPPENAS (2016)

## 2.2 Strategi Implementasi MDGs

Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJP, RPJMN dan RKP. Pada tingkat daerah pun, telah disusun rencana aksi daerah (renaksi) terkait percepatan MDGs. Sebagai tambahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010, mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 tentang Program Pembangunan Berkeadilan, yang salah satu amanahnya adalah mempercepat pencapaian sasaran MDGs. Inpres tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dari pemerintah untuk mengimplementasikan MDGs di Indonesia. Penjelasan Strategi-strategi implementasi untuk seluruh tujuan MDGs yang telah dilakukan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Strategi Implementasi MDGs di Indonesia Berdasarkan Tujuan**

Tujuan MDGs	Strategi Implementasi
Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterbitkannya Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Peraturan ini juga menjadi dasar hukum pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)</li> <li>2. Pengembangan dan penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) rumah tangga miskin.</li> <li>3. Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Untuk melengkapi BDT, pada tahun 2013, pemerintah meluncurkan program KPS dengan sasaran penduduk miskin. Selanjutnya, para pemegang KPS dapat</li> </ol>

Tujuan MDGs	Strategi Implementasi
	<p>menerima berbagai program bantuan sosial, seperti beras untuk rumah tangga miskin (raskin), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)</li> <li>5. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>6. Kredit Usaha Rakyat (KUR)</li> <li>7. Pemberian kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang bergerak di bidang usaha produktif dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 5.000.000.000</li> <li>8. Diterbitkannya Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan nasional perbaikan gizi</li> <li>9. Diterbitkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Salah satu point penting dari UU ini adalah amanat untuk membentuk Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang langsung berada di bawah Presiden.</li> <li>10. Pemetaan ketahanan pangan sejak tahun 2005.</li> </ol>
Mencapai pendidikan dasar untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemampuan membaca Beberapa program yang bertujuan meningkatkan Angka Melek Huruf (AMH) adalah pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan multi keaksaraan dan keaksaraan usaha mandiri.</li> <li>2. Memastikan program wajib belajar 9 tahun terlaksana Berbagai program bantuan sosial disediakan agar program ini terpenuhi, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM).</li> <li>3. Peningkatan kualitas, kompetensi, profesionalisme dan ketersediaan tenaga mengajar.</li> </ol>

Tujuan MDGs	Strategi Implementasi
Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>2. Ratifikasi hasil konvensi/deklarasi internasional Deklarasi universal hak asasi manusia pada tahun 1948 yang diadopsi ke dalam UU No. 39 tahun 1999; Strategi Nairobi tahun 1995 tentang kesetaraan pembangunan dan perdamaian; Kesepakatan Konferensi Kairo tahun 1993 tentang pembangunan manusia; Kesepakatan Konferensi Beijing tahun 1995; dan Deklarasi Dakkar tahun 2000 tentang pendidikan termasuk pendidikan perempuan.</li> <li>3. Diterbitkannya Perpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional Sebagai bentuk tindak lanjut, pada tahun 2012, diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (Stranas PPRG).</li> <li>4. Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan</li> </ol>
Menurunkan angka kematian anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan Program penempatan bidan di desa dan penempatan tenaga kesehatan strategis melalui penugasan khusus dan berbasis tim. Peningkatan fasilitas kesehatan melalui Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di puskesmas rawat inap dan penyediaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit kabupaten/kota.</li> <li>2. Upaya-upaya untuk menjaga kesehatan anak Program Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Penyelenggaraan Pekan Imunisasi Nasional, Kampanye Campak Polio dan Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional <i>Universal Child Immunization</i> (GAIN-UCI).</li> <li>3. Peluncuran program Jaminan Persalinan (Jampersal) tahun 2011 dengan tujuan</li> </ol>

Tujuan MDGs	Strategi Implementasi
	<p>membayai pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, pelayanan KB pasca persalinan.</p> <p>4. Peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan tunai bersyarat untuk keluarga sangat miskin.</p>
Meningkatkan kesehatan ibu	<p>1. Kebijakan dan program kesehatan ibu. Meningkatkan kesehatan ibu sudah menjadi prioritas nasional jauh sebelum adanya MDGs. Berikut <i>milestones</i> strategi peningkatan kesehatan ibu yang telah dilakukan: (1) Program bidan di desa pada tahun 1989; (2) Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan program desa siaga pada tahun 1996 yang bertujuan mengurangi masalah persalinan dan neonatal; (3) Kebijakan Pengaman Sosial (JPS) pada tahun 1997 dan 1998; (4) Kebijakan desentralisasi kesehatan yang bertepatan dengan dimulainya MDGs; (5) Program jampersal pada tahun 2011.</p> <p>2. Peningkatan kesehatan reproduksi melalui kebijakan akses kesehatan reproduksi bagi semua dan program KB.</p>
Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lain	<p>1. Program penanggulangan HIV dan AIDS</p> <p>2. Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional</p> <p>3. Pengembangan sistem surveilans HIV dan AIDS</p> <p>4. Strategi eliminasi Malaria melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 293/Menkes/SK/IV Tahun 2009.</p> <p>5. Strategi percepatan pengendalian Malaria di Kawasan Timur Indonesia.</p> <p>6. Program pengendalian TB yang dilakukan secara aktif dan bersinergi dengan semua pihak, terutama sektor kesehatan swasta.</p>
Menjamin kelestarian lingkungan hidup	<p>1. Penguatan program berbasis masyarakat pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai.</p> <p>2. Komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Komitmen ini dituangkan ke dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2004 dan RAN GRK dalam Perpres no 60 Tahun 2011.</p> <p>3. Upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan melalui Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2015</p>



Tujuan MDGs	Strategi Implementasi
	<p>Peraturan ini mengamanatkan bahwa biodiesel harus mengandung minyak sawit sebanyak 20%.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="443 283 1008 438">4. Diterbitkannya Keputusan Presiden No. 46 Tahun 2006 tentang pengesahan Amandemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon</li> <li data-bbox="443 438 1008 720">5. Menjaga keberlangsungan sumber daya ikan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45 Tahun 2011. Peraturan ini menetapkan bahwa tangkapan maksimum lestari (<i>Maximum Sustainable Yield/MSY</i>) perikanan adalah 6,52 juta ton per tahun dan tangkapan total yang diizinkan (JTJ) (<i>total allowable catch</i>) sebanyak 80% dari MSY.</li> <li data-bbox="443 720 1008 902">6. Upaya meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dimana layanan air minum dan sanitasi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.</li> <li data-bbox="443 902 1008 1439">7. Diluncurkannya program-program untuk meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak Beberapa program tersebut, seperti program hibah air minum pedesaan (Pamsimas), program hibah air minum untuk masyarakat miskin di perkotaan, program pengembangan SPAM di Kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan program peningkatan kinerja PDAM melalui pembinaan dan fasilitasi oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan program Hibah Sanitasi kota.</li> <li data-bbox="443 1439 1008 1530">8. Upaya untuk menghilangkan seluruh kawasan perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan pada tahun 2019</li> </ol>

Tujuan MDGs	Strategi Implementasi
Membangun kemitraan global untuk pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong aktifitas ekspor-impor sebagai salah satu indikator keterbukaan terhadap kemitraan global</li> <li>2. Meluncurkan program layanan keuangan digital pada tahun 2014</li> <li>3. Mempermudah mekanisme remitansi</li> <li>4. Pengelolaan utang dalam negeri dan luar negeri</li> <li>5. Partisipasi aktif di dalam forum-forum kerjasama internasional, seperti kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), G20 <i>Development Working Group</i> (DWG), <i>Global Green Growth Institute</i> (GGGI), dan <i>Global Partnership for Effectiveness Development and Cooperation</i> (GPEDC)</li> <li>6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur teknologi dan komunikasi (TIK) dengan ikut melibatkan sektor swasta</li> </ol>

Sumber: BAPPENAS (2016)

### 2.3 Pembelajaran dari MDGs

15 tahun perjalanan MDGs menjadi modal yang sangat penting bagi Indonesia dalam memasuki era *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pasalnya, SDGs memiliki jumlah sasaran dan indikator pembangunan yang jauh lebih banyak dari MDGs. Setidaknya ada tiga pembelajaran utama dari MDGs di Indonesia. **Pertama**, upaya-upaya pencapaian sasaran MDGs terlalu bersifat *top-down*, dimana pemerintah pusat terkesan menjadi pemain tunggal. MDGs harus dicapai melalui pendekatan *multi-sectoral* dan *multi-stakeholders*, karena memang pada hakikatnya, seluruh tujuan dan indikator MDGs tidak berada di dalam kewenangan atau tanggung jawab sektor dan pihak tertentu. Diperlukan juga komitmen kuat dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif dari pihak swasta serta masyarakat umum, supaya MDGs dapat berhasil tercapai.

Meskipun bersifat *top-down* seperti dijelaskan di atas, hal yang perlu ditingkatkan kedepannya adalah koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. Selama 15 tahun perjalanan MDGs, pemerintah pusat

telah cukup berperan aktif dalam hal koordinasi strategi-strategi pencapaian MDGs, seperti *capacity building*, *monitoring* dan evaluasi. Beberapa contoh program konkrit yang menarik untuk dibahas, sebagai perwujudan hal tersebut adalah MDGs *awards* dan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. MDGs *awards* diprakarsai oleh Bappenas sejak tahun 2013, sebagai bentuk apresiasi dan *encouragement* kepada pemerintahan provinsi yang telah bersungguh-sungguh dalam mencapai MDGs. Sementara itu, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan dana penyerta yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, sebagai bentuk pelimpahan wewenang dan penugasan terkait program dan kegiatan yang menjadi prioritas kementerian dan lembaga nasional. Kehadiran MDGs *awards* dan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dinilai sebagai salah satu manifestasi dari strategi implementasi MDGs, terutama terkait koordinasi anatara pemerintah pusat dan daerah.

Pembelajaran penting yang **kedua** adalah kurangnya keterkaitan antar tujuan dan indikator dalam MDGs. Selain memerlukan keterlibatan dari semua pihak, MDGs harus dicapai melalui pendekatan yang holistik. Maksudnya adalah penyusunan strategi untuk mencapai satu sasaran harus dikaitkan dengan upaya pencapaian sasaran lainnya.

Pembelajaran yang **terakhir** adalah aspek payung hukum yang kuat dan jelas. Meskipun MDGs sudah diluncurkan secara global pada tahun 2000 dan banyak negara, termasuk Indonesia, pun telah berkomitmen untuk mengadopsi MDGs ke dalam perencanaan pembangunan negaranya masing-masing sejak saat itu, landasan hukum terkait MDGs di Indonesia baru muncul pada tahun 2010. Pada tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden (InPres) No. 3 tentang Program Pembangunan Berkeadilan, yang salah satu amanahnya adalah mempercepat pencapaian sasaran MDGs. Tidak sedikit pihak yang mengatakan

bahwa Inpres dinilai bukan merupakan dasar hukum yang kuat, mengingat posisi MDGs yang sangat penting dan telah sejalan dengan isu prioritas pembangunan nasional. Atas latar belakang inilah, Pemerintah Indonesia membuat Perpres No. 59 Tahun 2017 sebagai payung hukum SDGs, sebagai agenda pembangunan berkelanjutan pasca MDGs.

## **2.4 Pekerjaan Rumah yang Tersisa**

Penyediaan data di tingkat kabupaten dan kota secara komprehensif terkait indikator-indikator MDGs merupakan isu pertama yang harus menjadi fokus pasca MDGs. Seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, implementasi MDGs di Indonesia terlalu didominasi oleh peran pemerintah pusat, yang menyebabkan ketersediaan data indikator MDGs pun lebih banyak untuk tingkat nasional. Ketersediaan data tersebut sangat penting untuk fungsi *monitoring* dan evaluasi keberhasilan pembangunan di daerah yang terkadang kurang diperhatikan. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat salah satu prinsip SDGs adalah *leaving no one behind*. Maksudnya adalah tingkat keberhasilan pembangunan berkelanjutan harus merata antar wilayah, tanpa ada satu pun yang jauh tertinggal.

Agenda lain yang masih tersisa dan tak kalah penting adalah keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan non-pemerintahan, seperti masyarakat umum, LSM dan dunia usaha, dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Selain menjalin komunikasi dan advokasi terhadap pemerintah daerah, pemerintah pusat juga harus bisa menjangkau pemangku kepentingan di atas. Sebagai contoh, salah satu strategi untuk mencapai sasaran 3 SDGs, yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk dengan semua usia, adalah dengan implementasi sistem jaringan kesehatan nasional, seperti BPJS. BPJS tidak dapat diterapkan apabila pemerintah tidak menggandeng rumah sakit swasta, mengingat jumlah rumah sakit pemerintah yang terbatas. Sementara

itu, penjelasan menyeluruh mengenai pekerjaan rumah yang tersisa dari semua tujuan MDGs dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Agenda yang Tersisa Berdasarkan Tujuan**

Tujuan MDGs	Agenda yang Tersisa
Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat laju penurunan kemiskinan dengan mengoptimalkan penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) rumah tangga miskin.</li> <li>2. Fokus perhatian pada disparitas kemiskinan antar wilayah.</li> <li>3. Masih banyak penduduk yang rentan terhadap kemiskinan.</li> <li>4. Ketimpangan pendapatan Indonesia yang meningkat.</li> <li>5. Pertumbuhan ekonomi yang stabil agar lapangan kerja dapat terus tersedia.</li> <li>6. Prevalensi kurang gizi dan gizi buruk yang masih tinggi.</li> <li>7. Mengurangi prevalensi anak pendek dan obesitas.</li> <li>8. Memperbaiki kebijakan ketahanan pangan.</li> </ol>
Mencapai pendidikan dasar untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun.</li> <li>2. Kualitas pendidikan yang merata di seluruh daerah, terutama di daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T)</li> <li>3. Program pendidikan dasar gratis yang merata di seluruh daerah.</li> </ol>
Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarusutamaan isu kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan.</li> <li>2. Meningkatkan kontribusi pekerja perempuan, khususnya di sektor non-pertanian.</li> <li>3. Kesetaraan tingkat upah antar perempuan dan laki-laki.</li> <li>4. Mendorong partisipasi aktif perempuan di dunia politik.</li> <li>5. Mencegah dan mengurangi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> </ol>
Menurunkan angka kematian anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi disparitas kualitas pelayanan kesehatan anak antar wilayah, khususnya di daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T).</li> <li>2. Perbaiki kualitas data dan informasi kesehatan masyarakat umum dan anak.</li> </ol>

Tujuan MDGs	Agenda yang Tersisa
Meningkatkan kesehatan ibu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan angka kematian ibu ketika melahirkan dengan cara perluasan akses pelayanan kesehatan maternal, peningkatan kompetensi tenaga medis dan program bantuan melahirkan untuk masyarakat miskin.</li> <li>2. Perbaiki sistem pencatatan data kelahiran dan kematian ibu.</li> </ol>
Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan intensitas sosialisasi HIV dan AIDS terhadap masyarakat umum.</li> <li>2. Meningkatkan program bantuan pencegahan malaria di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Mengatasi pasien Tuberkulosis dengan <i>multi-drug resistant</i> (TBMDR).</li> </ol>
Menjamin kelestarian lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan tingkat deforestasi hutan melalui kebijakan moratorium dan tata ruang lingkungan.</li> <li>2. Mengurangi tingkat kebakaran lahan gambut dan hutan dengan cara, salah satunya, memperkuat satuan polisi hutan.</li> <li>3. Melakukan restorasi lahan gambut yang rusak.</li> <li>4. Penurunan jumlah emisi karbon dengan target 29% terhadap <i>business as usual</i> (BAU) 2030 dan bila dengan bantuan pihak-pihak internasional, maka target penurunan akan menjadi 41% BAU 2030.</li> <li>5. Pengurangan pemakaian <i>Chlorodifluoromethane</i> (HCFC) secara bertahap.</li> <li>6. Mendorong penggunaan energi terbarukan.</li> <li>7. Mencegah dan mengurangi tingkat <i>Illegal, unreported and unregulated fishing</i> (IUU).</li> <li>8. Peningkatan akses air minum layak dengan cara, salah satunya, menyehatkan kinerja PDAM daerah.</li> <li>9. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk infrastruktur sanitasi dan air minum.</li> <li>10. Penataan kawasan kumuh perkotaan.</li> </ol>
Membangun kemitraan global untuk pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong terciptanya keuangan inklusif di Indonesia.</li> <li>2. Pembangunan akses internet berkecepatan tinggi yang merata di seluruh daerah.</li> <li>3. Mengimplementasikan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang rencana pita lebar (<i>broadband</i>) Indonesia 2014-2019.</li> </ol>

Sumber: BAPPENAS (2016)

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

**BAGIAN II**  
**KONSEP, INDIKATOR**  
**PEMBANGUNAN**  
**BERKELANJUTAN**  
**DAN KESIAPAN**  
**NEGARA-NEGARA**

---



## **Konsep dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Esensi dari pembangunan berkelanjutan adalah internalisasi dampak setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup. Artinya, setiap kegiatan sosial dan ekonomi perlu menghindari/mencegah atau memperhitungkan dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup, agar lingkungan hidup tetap dapat menjalankan fungsinya untuk menopang kehidupan saat ini dan di masa mendatang. Bab ini membahas konsep Pembangunan Berkelanjutan serta perbedaannya dengan konsep pembangunan konvensional. Bab ini berupaya menjawab berbagai keraguan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan dan memperkenalkan visi, prinsip utama dan tujuan dari SDGs.

### **3.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Perbedaan dengan Pembangunan Sebelumnya**

Selama ini, pembangunan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) menjadi fokus utama dan ukuran pencapaian dari keberhasilan pembangunan di semua negara. Dampak terhadap lingkungan tidak diperhitungkan dan dibiarkan menjadi tanggung jawab masyarakat yang menjadi korban baik langsung terhadap hidupnya, maupun tidak langsung karena kegiatan ekonominya menurun karena lahan dan airnya terkena polusi. Perkiraan terhadap dampak lingkungan juga perlu

menjadi “pemahaman” pada setiap manusia Indonesia, dan menerapkannya tidak hanya dalam perilaku ekonomi namun juga perilaku sosial. Selama ini, dampak lingkungan ditanggung atau menjadi beban masyarakat, bukan menjadi beban biaya pelaku ekonomi dan bukan menjadi kebiasaan dan perilaku sosial masyarakat Indonesia. Saat ini pandangan dan perilaku ini harus diubah. Setiap tindakan harus memperkirakan dan memperhitungkan dampak dari tindakan terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Langkah ini sering disebut dengan “internalisasi” dampak lingkungan ke dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial (Gambar 3.1).



**Gambar 3.1 Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan dan Internalisasi Aspek Lingkungan ke dalam Pilar Sosial dan Pilar Ekonomi**

Internalisasi dampak terhadap lingkungan atas setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat adalah satu-satunya cara mengendalikan dampak setiap kegiatan ekonomi terhadap kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan hidup. Internalisasi dampak terhadap lingkungan ini juga perlu dilakukan terhadap pilar sosial, baik di bidang kesehatan, pendidikan secara luas, kependudukan serta perumahan. Selain itu, pembangunan pilar lingkungan hidup juga

sangat penting disetarakan dengan kedua pilar lainnya, tidak hanya karena adanya dampak tersebut di atas, namun yang lebih penting lagi karena lingkungan hidup merupakan “pembatas” seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan pemanfaatan lestari lingkungan hidup itu sendiri. Buruknya pengelolaan lingkungan hidup dan tidak “dikendalikannya” dampak berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan pengelolaan lingkungan hidup akan menentukan seberapa “umur” kehidupan manusia dan makhluk hidup di planet ini.

Beberapa perbedaan pembangunan berkelanjutan dengan cara pembangunan sebelumnya:

**Secara makro.** PDB yang selama ini merupakan prestasi untuk menghasilkan pertumbuhan dan pendapatan moneter untuk kesejahteraan hidup masyarakat, sudah tidak memadai karena: (i) Tidak memperhitungkan kerusakan alam yang telah mengurangi dan bahkan meniadakan akses masyarakat setempat terhadap alam, untuk kegiatan hidupnya. Kegiatan ekonomi tidak memperhitungkan dampak polusi bagi masyarakat sekitar, dengan kata lain dampak polusi yang merugikan masyarakat (penyakit akibat polusi, kerusakan generasi muda yang terkena polusi), tidak diperhitungkan pada “cara berproduksi, bahan yang digunakan dan nilai dampak yang ditanggung” ke dalam cara memproduksi barang tersebut. Secara makro kerusakan dan penurunan sumber daya alam ini sering dihitung dalam bentuk depleksi, yang tidak dinilai. Selama ini seolah-olah PDB terus tumbuh, namun pada saat yang sama depleksi sumber daya alam juga besar, serta dampak polusi terhadap manusia dan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati juga besar. Maka nilai PDB ini seharusnya dikurangi dengan nilai dampak sosial dan lingkungan sekitarnya; (ii) Tidak memperhitungkan nilai “pendapatan” masyarakat sekitar yang tidak terhitung dalam GDP, karena mereka mengkonsumsi bahan-bahan dari alam (buah dan sayur yang dipetik dari kebun dan hutan; kayu bakar dari hutan, hewan yang ditangkap, ikan yang ditangkap dari sungai).

Menurut penelitian awal Pavan Sukhdev, masyarakat miskin yang hidup sekitar hutan di Kalimantan, memperoleh manfaat dari hutan sekitarnya senilai sekitar 75 persen dari nilai konsumsi/pendapatan total mereka (Kotak 3.1). Dalam kaitan dengan GDP, ini berarti bahwa hanya 25 persen dari nilai konsumsi mereka yang terhitung dalam GDP, 75 persen lainnya tidak terhitung dalam GDP. Namun informasi yang lebih penting lagi adalah, apabila hutan di sekitar tempat hidup mereka rusak, maka mereka akan jatuh miskin karena kehilangan sekitar 75 persen dari sumber penghidupannya. Nilai ini menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat miskin pada sumber daya alam dan lingkungan di sekitarnya. Pada saat yang sama nilai ini pulalah yang akan hancur dan memiskinkan masyarakat apabila sumber daya alam tidak kita pelihara.

**Kotak 3.1 Perkiraan Persentase Jasa Ekosistem terhadap GDP dan terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin**

*Another reason we must engage in this exercise is the strong link between natural capital and poverty reduction. TEEB recently measured ecosystem services as a percentage of GDP in three countries - India (10%), **Indonesia (16%)** and Brazil (21%). These figures themselves do not tell you very much, however if you ask the right question you get the right answer. The right question here would be: what are ecosystem services as a percentage of the income of the rural poor household. When we ask that question and we look at the number of rural poor households - 100 million in Indonesia, 350 million in India, and 20 million tribals in Brazil - the answer is somewhat different: 47% of GDP in India, **75% in Indonesia** and 89% in Brazil. What this question and its answer clearly show is that destroying an ecosystem service means denying opportunities for development. The lesson therefore is that we must not simply measure ecosystem services and compare them with GDP. If you pick the right numerator and the right denominator then you get the real choice that you are making. For example, measuring the consumption of ecosystem services by poor households and dividing it by the GDP of the poor.*

Sumber: Dikutip dari *Study presentation* by Pavan Sukhdev *Biodiversity and Natural Capita, Globe International* (<http://globelegislators.org/study-prewswentation-by-pavan-sukhdev>).

**Secara mikro**, proses produksi yang selama ini tidak menggunakan teknologi yang efisien, bersih dan bahan yang ramah lingkungan, sudah harus berubah. Teknologi yang tidak efisien dalam penggunaan sumber daya cenderung memboroskan penggunaan sumber daya yang seharusnya bisa: (i) Menghasilkan output yang lebih banyak; atau (ii) Dapat menghasilkan output yang kita butuhkan untuk waktu yang lebih lama; (iii) Menghasilkan output dengan limbah yang lebih sedikit, sehingga menimbulkan beban dan kerusakan yang minimal. Demikian pula, dengan penggunaan bahan yang ramah lingkungan, maka kita dapat menikmati output tanpa meninggalkan limbah yang merusak, atau meninggalkan limbah yang merusak dalam jumlah minimal, pada tingkat yang dapat diserap dan diolah kembali oleh alam, sehingga lingkungan dapat tetap berfungsi menopang kehidupan.

**Secara lebih transformatif**, pembangunan sebelumnya menganggap bahwa penggunaan alam dan sumber daya yang ada di dalamnya dapat terus menerus, karena akan ada teknologi baru yang membantu mengatasi keterbatasan. Dengan demikian, meskipun kebutuhan hidup semakin berkembang selaras dengan bertambahnya populasi, maka alam dan sumber daya di dalamnya masih digunakan seolah-olah tanpa batas. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dan mengharuskan “cara pandang” yang sangat berbeda, karena sumber daya dan alam memiliki batas dan menjadi pembatas kehidupan di dunia. Bahwa dengan berkembangnya populasi manusia dan penggunaan alam dan isinya, pada saat ini sudah sampai pada titik di mana alam memiliki batas, atau dikenal dengan *planetary boundary*.

Dalam *planetary boundary*, alam memiliki batas yang ditunjukkan oleh 9 indikator pembatas daya dukung alam (Rockstrom et.al 2009 di dalam Jeffrey Sachs, 2015), yaitu:

- (a) **Human induced climate change**, yaitu perubahan iklim yang diakibatkan oleh perilaku manusia, yaitu meningkatnya efek gas rumah kaca di dalam atmosfer karena meningkatnya gas CO<sub>2</sub>, metan, NO<sub>2</sub> dan beberapa gas lain yang dihasilkan dari proses industri;
- (b) **Meningkatnya tingkat keasaman laut (ocean acidification)**, yang diakibatkan meningkatnya CO<sub>2</sub> di atmosfer, sehingga merusak air laut yang menjadi habitat ikan, terumbu karang, mikroorganisme laut lainnya, sehingga mematikan kehidupan di dalam laut; menghilangkan tidak saja kehati laut, namun juga seluruh sumber kehidupan dari laut dan potensi kehidupan yang belum kita ketahui saat ini, yang pasti bermanfaat untuk generasi mendatang.
- (c) **Penurunan lapisan ozone** di atmosfer yang menjadi pelindung manusia dari matahari, karena banyaknya penggunaan CFC.
- (d) **Polusi dari penggunaan nitrogen dan phosphor** dari pupuk kimia yang digunakan dalam bidang pertanian. Revolusi hijau yang berjasa besar untuk meningkatkan ketersediaan pangan dunia, juga membawa dampak pada emisi berlebihan yang tidak bisa diserap oleh alam. Polusi ini mengakibatkan meningkatnya populasi *algae* yang memakan oksigen yang dibutuhkan oleh ikan dan hasil perikanan di perairan tawar (sungai, danau dan estuaria).
- (e) **Penggunaan air tawar (freshwater) yang berlebihan**, melebihi daya hasil air tawar dari alam. Tidak hanya penggunaan yang semakin tinggi melebihi daya tumbuh air, namun juga ruang untuk daya serap air ke bumi dan juga kebersihan atmosfer untuk menjaga siklus air di alam semakin

berkurang; dan ini terkait dengan penggunaan lahan (*land use*), yang merupakan batas alam berikutnya.

- (f) **Penggunaan lahan.** Kebutuhan lahan untuk permukiman dan infrastruktur mobilitas manusia, untuk industri, produksi pangan dan penggunaan lain, memperluas jumlah hutan yang harus dikonversi. Konversi hutan telah meningkatkan jumlah emisi karbon dan daya serap bumi terhadap karbon. Meluasnya lahan untuk industri dan mobilitas manusia sejalan dengan *human induced climate change*; dan mengurangi habitat untuk keanekaragaman hayati. Sementara jumlah lahan di dunia tidak bertambah, namun lahan yang menjadi daya topan kehati, daya regenerasi dan siklus untuk air dan udara berkurang. Hal ini semakin mempercepat tercapainya batas planet untuk kehidupan manusia.
- (g) **Keanekaragaman hayati.** Seiring dengan konversi hutan, telah menghilangkan habitat kehati. Ini merupakan ancaman dari kehati yang spesiesnya menjadi mata rantai siklus kehidupan dan menghilangkan potensi untuk penopang kehidupan ke depan.
- (h) **Aerosol loading** yang dihasilkan dari pembakaran batubara baik untuk listrik, energi di pabrik-pabrik serta penggunaan minyak diesel telah meningkatkan polusi aerosol di udara yang mengancam kesehatan pernapasan, selain juga menjadi penyebab polusi dan berdampak pada pemanasan global. Semakin meningkatnya polusi aerosol di udara akan membatasi kehidupan dan kelangsungan hidup di planet/dunia.
- (i) **Polusi bahan kimia** yang disebabkan oleh industri pertambangan dan minyak, tidak saja mencemari perairan, yang menjadi sumber air untuk kehidupan sehari-hari maupun sungai dan danau yang menjadi habitat ikan, dan kehati air lainnya.

Sembilan faktor pembatas kehidupan dan kelangsungan hidup planet/bumi tersebut yang akan menentukan kehidupan generasi mendatang dapat terus berlanjut atau tidak. Ruang alam tidak bertambah, sehingga apabila pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka manusia harus pindah dari bumi. Jumlah air ada batasnya, sehingga kalau kita tidak memelihara mata air dan menjaga siklus air dengan seimbang, maka kehidupan akan semakin sulit dan dapat berakhir pada waktu tertentu. Jumlah lahan tidak bertambah dan pembangunan semakin meluas dan membutuhkan lahan, termasuk lahan yang kita gunakan untuk membuang sampah. Apabila sampah tidak dapat kita kurangi atau kelola, maka kita akan hidup dalam ruang yang penuh sampah. Penggunaan bahan berbahaya dalam jumlah berlebihan, suatu saat akan membahayakan manusia dan berbahaya untuk kehidupan mikroorganisme yang memelihara kesuburan lahan. Dampak yang akan timbul adalah, jumlah racun akan terpapar pada air yang kita minum, lahan yang kita tempati dan udara yang kita hirup, dan bahkan pada bahan pangan yang kita tanam di atas tanah/lahan beracun. Dengan demikian, perbedaan mendasar cara pembangunan saat ini (*business as usual*) dengan pembangunan berkelanjutan adalah bahwa pembangunan berkelanjutan (harus) memperhatikan alam dan seisinya sebagai pembatas kita. Planet dan seisinya adalah batas kelangsungan kehidupan kita. Kita harus hidup dan memperlakukan serta menggunakan alam dengan cara yang memungkinkan alam untuk menjaga daya bersih dan daya tumbuhnya, sehingga dapat menopang kehidupan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya.

### **3.2 Beberapa Keraguan terhadap Pembangunan Berkelanjutan**

#### **Pembangunan Berkelanjutan Menimbulkan *Trade-off***

Respon pertama tentang penerapan pembangunan berkelanjutan adalah bahwa dengan ramah lingkungan maka dikhawatirkan akan



membuat harga barang menjadi lebih mahal. Pembangunan berkelanjutan, khususnya penerapan proses produksi ramah lingkungan, memang akan membawa konsekuensi perubahan dari proses produksi yang biasa, ke proses produksi yang memperhatikan efisiensi bahan dan limbah yang bersih, maka cara berproduksi akan menjadi lebih panjang/lama. Penggunaan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan akan membutuhkan modal baru sehingga terasa lebih mahal dibandingkan menggunakan teknologi saat ini. Penggunaan bahan baku yang aman terhadap lingkungan juga memiliki harga yang lebih mahal. Dengan demikian, setiap produsen merasa “repot” mengganti teknologi dan pasti akan meneruskan nilai kemahalan ke dalam harga barang.

Namun, kita lupa bahwa “harga yang selama ini kita nikmati ‘murah’ karena kita tidak menanggung biaya dampak limbah” terhadap kesehatan manusia yang menjadi korban akibat air yang lebih kotor, dan mengandung bahan berbahaya, atau karena menghirup udara yang semakin kotor. Kita tidak menghitung dampak polusi udara, lahan dan air terhadap keamanan bahan pangan yang kita makan. Kita tidak menghitung dampak polusi udara, lahan dan air terhadap kerusakan habitat keanekaragaman hayati yang mengakibatkan keanekaragaman hayati tersebut mati; sehingga generasi mendatang tidak berkesempatan menikmati potensi keanekaragaman hayati untuk sumber kehidupan mereka. Dengan pembangunan berkelanjutan, semua langkah untuk mencegah timbulnya dampak polusi sudah diinternalisasikan/diperhitungkan ke dalam harga barang. Dengan demikian, bukan harga menjadi mahal namun harga barang sebelumnya terlalu murah karena belum memperhitungkan biaya dampak yang ditanggung masyarakat lain dan lingkungan hidup.

Selanjutnya, perpindahan dari cara pembangunan selama ini (*business as usual*) ke cara pembangunan berkelanjutan sering dianggap sebagai *trade offs*; karena kita harus mengorbankan tingkat pertumbuhan saat ini untuk keselamatan alam dan seisinya (tumbuh atau

menyelamatkan lingkungan). *Trade offs* terjadi karena kita harus mengorbankan laju penggunaan sumber daya alam yang cepat dan berpindah ke penggunaan sumber daya alam secara terbatas serta menggunakan sumber daya alam yang terbarukan. *Trade offs* dirasakan karena masyarakat harus membayar harga barang saat ini, dengan harga yang lebih tinggi, karena industri harus mengganti teknologi/mesin baru yang lebih bersih; industri harus menerapkan proses produksi bersih yang lebih panjang rantainya dan mengelola limbah dengan teknologi yang baik agar limbah menjadi buangan yang tidak mencemari dan mengancam fungsi alam dan seisinya. Namun langkah ini diiringi dengan tidak adanya masyarakat yang menderita karena dampak lingkungan, dan penggunaan sumber daya alam yang memboroskan cadangan untuk generasi mendatang.

Anggapan tentang *trade-offs* ini adalah anggapan yang bersifat “*partial*” yang memandang bahwa pertumbuhan atau melestarikan lingkungan saling berkompetisi. *Trade off* ini muncul karena proses pembangunan bersifat “*linier*” yang menganggap bahwa alam dan isi sumber daya di dalamnya tidak ada batasnya. Pandangan ini juga didukung bahwa akan selalu ditemukan teknologi baru yang dapat memperpanjang penggunaan alam dan sumber daya yang ada di dalamnya. Keterbatasan sumber daya alam tidaklah sebanyak yang kita duga, karena tanda-tanda keterbatasan sudah ditandai oleh beberapa hal:

- a. Semakin langkanya ruang (semakin tingginya densitas) sebagai akibat semakin meningkatnya penggunaan ruang untuk berbagai kebutuhan dan dalam skala yang besar, seiring dengan meningkatnya populasi dan ragam kebutuhan manusia;
- b. Habisnya sumber daya alam untuk kebutuhan saat ini dan kemungkinan tidak menyisakan cadangan untuk generasi mendatang;

- c. Semakin terganggunya manusia oleh “limbah/buangan” manusia sendiri, karena ruang pembuangan semakin terbatas. Sebagai akibatnya, kualitas jasa alam yang kita gunakan semakin menurun. Kita menghirup udara yang semakin kotor, kita meminum air yang semakin berisi *pollutant*, dan kita bercocok tanam di lahan yang semakin terkontaminasi, sehingga tumbuhan yang kita konsumsi juga mengandung bahan yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Hal-hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya planet yang besarnya tetap akan semakin sesak dan semakin terdegradasi kualitasnya.

Kalau sudah demikian, maka pembangunan yang menyeimbangkan ekonomi dan lingkungan harus dilakukan, kalau kita mau terus hidup dan memelihara kehidupan untuk anak cucu dan cicit kita di masa depan. Pemikiran dan fakta empiris yang ada memberikan kenyataan yang sebaliknya, demikian pula sebagaimana indikator keterbatasan di dalam alam yang secara ilmiah ditunjukkan oleh 9 (sembilan) indikator sebagaimana penjelasan di atas. Dengan demikian, menjaga keseimbangan antara menggunakan dan memelihara alam dan isi sumber daya didalamnya adalah suatu keharusan, suatu cara untuk menjaga kelangsungan hidup, suatu langkah untuk *survival* tidak hanya saat ini, namun lebih penting lagi adalah untuk kehidupan jangka panjang.

### **Mengapa Harus Agenda Global?**

Apabila kita sudah yakin bahwa pembangunan yang menyeimbangkan sosial-ekonomi-lingkungan hidup adalah keharusan, karena untuk *survival* hidup kita, *survival* kehidupan anak cucu kita dan bahkan *survival* bumi kita, maka pembangunan berkelanjutan adalah keharusan bagi kita semua. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa perlu dilakukan bersama secara global? Jawaban dari pertanyaan ini adalah karena wilayah/tempat/negara yang kita tempati merupakan

bagian dari planet yang ditempati semua manusia di dunia/global. Dengan demikian, mempertahankan *survival* planet kita merupakan tanggung jawab semua manusia yang hidup di dunia, sehingga secara global bersama-sama harus mengamankan planet kita.

Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan secara global seringkali timbul pertanyaan, mengapa harus semua Negara, Mengapa tidak Negara maju saja yang sudah siap melakukan pembangunan berkelanjutan, sementara Negara berkembang masih “disibukkan” dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan penting dilaksanakan oleh semua Negara dan di Negara masing-masing karena: (i) Kondisi sumber daya alam yang berbeda dari satu lokasi ke lokasi lainnya, sehingga keseimbangan pembangunan sosial-ekonomi-lingkungan hidup sangat spesifik lokasi dan berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara lain; (ii) Dampak penggunaan sumber daya alam yang tidak seimbang, ada yang bersifat lokal terhadap masyarakat di sekitarnya. Proses internalisasi dampak kegiatan ekonomi dan sosial terhadap lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara perlu dilakukan oleh masing-masing Negara; (iii) Dampak penggunaan sumber daya alam dan lingkungan ada yang bersifat global (*transboundary*), seperti perubahan iklim akibat pemanasan global, penipisan ozone dan peningkatan keasaman air laut. Meskipun masyarakat dibagi dalam yurisdiksi Negara, namun tanggungjawab bersama secara global perlu dilakukan oleh semua Negara secara bersama-sama.

Selanjutnya, apakah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tidak memberatkan Negara berkembang, yang masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Kata-kata memberatkan, memberi interpretasi seolah-olah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan akan mengorbankan pertumbuhan, memperlambat upaya mengatasi kemiskinan, dan sebagainya. Persepsi ini sama dengan persepsi bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

merupakan *trade offs* sebagaimana dibahas di atas. Pandangan ini tidak seluruhnya salah, karena yang kita korbankan (hentikan) adalah pembangunan saat ini, yang masih menciptakan pertumbuhan ekonomi namun pada saat yang sama juga menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia, karena lingkungan yang memburuk; pertumbuhan yang diiringi dengan kerusakan alam dan habitat keanekaragaman hayati, yang mungkin bisa diperbaiki kembali, namun tidak tertutup kemungkinan terjadi kerusakan yang permanen. Padahal, dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan banyak peluang yang dapat diciptakan untuk tetap bertumbuh dengan tingkat yang tinggi, misalnya ketersediaan energi dapat tetap digantikan oleh sumber energi bersih dan terbarukan.

Selanjutnya, dalam proses produksi yang selama ini belum efisien menggunakan sumber daya masih dapat diciptakan output tambahan yang menjadi *co-benefit* baru. Selain itu, dari ekosistem dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya masih tersedia potensi ekonomi dari pemanfaatan kehati untuk bahan pangan, material dan obat-obatan alami/herbal yang saat ini dirasakan sangat besar manfaatnya. Sementara itu, dengan meningkatnya mobilitas manusia, maka *travelling sudah* merupakan konsumsi sehari-hari, dan di Negara berkembang banyak potensi alam (nilai *amenity*) yang dapat mendatangkan pendapatan untuk masyarakat sekitar dan devisa Negara melalui wisata alam.

Dengan demikian, yang disebut *trade offs* meskipun tidak seluruhnya salah, perlu diinterpretasikan bahwa perubahan dari pembangunan dengan cara saat ini ke pembangunan yang berkelanjutan, akan menimbulkan “kelambatan sementara”, seperti mobil harus ganti “*gear*”, pasti ada periode untuk melambat sebentar sebelum akselerasi terjadi. Waktu kelambatan ini sangat tergantung bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menggali potensi baru dalam pembangunan berkelanjutan, sementara pembangunan dengan cara lama masih harus menyesuaikan diri. Potensi baru tersebut akan

dapat mengkompensasi hilangnya sebagian pendapatan Negara karena adanya “kelambatan/penurunan sesaat” atas pembangunan *business as usual* yang sudah harus berubah atau bahkan dihilangkan. Manfaat lain yang diperoleh adalah manusia dapat hidup dengan lebih sehat karena hidup dalam lingkungan yang bersih dan seimbang. Melalui pandangan ini, maka saat ini adalah *point of no return* bagi semua Negara untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan, apalagi indikator terukurnya sudah dapat dirumuskan di dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, sehingga pelaksanaannya akan relatif lebih mudah.

Faktor lain adalah, bahwa SDGs merupakan tujuan pembangunan semua Negara. MDGs dipandang sebagai agenda yang ditujukan untuk Negara berkembang dan LDCs, karena MDG berisi tujuan yang lebih berfokus pada pembangunan manusia: kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, gender; yang pada saat MDGs diluncurkan mayoritas menjadi masalah bagi Negara-negara berkembang. Sementara pada saat SDGs diluncurkan masalah tersebut juga dialami semua Negara, Negara berkembang maupun Negara maju, karena pada saat ini, negara-negara maju sedang mengalami resesi ekonomi dan juga menghadapi pengangguran dan kemiskinan yang meningkat. Selain itu, pada saat ini banyak Negara maju dan sedang berkembang juga mengalami kesenjangan, tidak saja kesenjangan ekonomi di dalam Negara yang perlu mendapat perhatian Negara tertentu; namun juga kesenjangan antar Negara yang meningkat.

SDGs juga berisi tujuan pembangunan lain yaitu ekonomi berkelanjutan dan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah untuk “*survival*”, maka kita harus menyelamatkan keberlanjutan planet bersama-sama, dan ini merupakan tanggungjawab semua penghuni planet, Negara maju, Negara sedang berkembang dan Negara miskin sekalipun. Masalah-masalah *transboundary* yang menjadi tanggung jawab global seperti

perubahan iklim, *biodiversity* baik lahan dan laut yang tidak saja merupakan asset global, tetapi juga memiliki kaitan dengan perilaku global yang terkait dengan perdagangan, hubungan antar Negara di berbagai bidang, dan juga semakin tingginya mobilitas manusia antar Negara. Semua tujuan dan langkah-langkah ini memerlukan kontribusi setiap Negara, sehingga pelaksanaan pembangunan berkelanjutan memerlukan kerjasama bersama secara global.

### **3.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)**

#### **Visi dan Prinsip-prinsip Utama SDGs**

Komitmen terhadap SDGs memperkuat komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) atau dikenal pula sebagai MDGs plus, serta berlandaskan Agenda 21 yang menekankan pada Visi dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Adapun SDGs menekankan pada Visi Bersama (*Shared Visions*) sebagai berikut:

- Komprehensif: berlandaskan pada tiga pilar, yaitu Pilar Ekonomi, Sosial dan Lingkungan serta Pilar Tata Kelola (*Governance*);
- Tematik: terdiri dari 17 Tujuan (*Goals*);
- Holistik dan terintegrasi: ke 17 Tujuan tidak berdiri sendiri, namun saling terkait dan terintegrasi;
- Inklusif: tidak ada satu pihakpun yang tertinggal (*no one left behind*);
- Kolaborasi (*partnership*): membutuhkan kerjasama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, dunia usaha, LSM, universitas dan masyarakat;

Adapun komponen utama dari SDGs adalah:

- Pembangunan manusia utamanya terdiri dari pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender ;

- Pengentasan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan pengurangan kesenjangan;
- Perlindungan sosial dan perhatian terhadap kaum marjinal;
- Pembangunan ekonomi yang inklusif dan penciptaan kesempatan kerja yang layak;
- Infrastruktur yang berkelanjutan;
- Hunian dan perkotaan yang berkelanjutan;
- Energi yang berkelanjutan;
- Pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya alam, keanekaragaman hayati dimana perlindungan ekosistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas masing-masing negara;
- Rumusan cara pencapaian dan kerjasama pembangunan global;

Dalam Dokumen Hasil Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*UN Outcome Document on Sustainable Development Goals*), inti sari SDGs dideskripsikan sebagai:

*“Alongside continuing development priorities such as poverty eradication, health, education and food security and nutrition, it sets out a wide range of economic, social and environmental objectives. It also promises more peaceful and inclusive societies. It also, crucially defines means of implementation”*

Dalam dokumen tersebut dapat dilihat bahwa SDGs merupakan komitmen bersama yang jauh lebih komprehensif bila dibandingkan MDGs. Tujuan yang ditekankan tidak hanya pada *outcome* dari pembangunan yang berakhir pada peningkatan kesejahteraan saja, tetapi aspek keadilan, inklusivitas serta cara dalam pencapaian tujuan juga merupakan hal yang ditekankan. Penekanan dari SDGs mencakup



pada pemenuhan Hak Asasi Manusia, non-diskriminasi, perhatian terhadap kaum marjinal dan difabel, pentingnya partisipasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan (pemerintah, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat). Target yang disepakati dalam SDGs merupakan target yang lebih ambisius bila dibandingkan dengan target MDGs. Sebagai contoh, target kemiskinan MDGs hanya berupa pengurangan jumlah kemiskinan, sedang dalam SDGs target yang ingin dicapai sampai pada menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuknya.

Kerjasama pembangunan global yang diusung oleh SDGs tidak hanya pada tataran lokal dan nasional, namun juga pada ruang yang lebih luas dimana bagi kerjasama global tidak hanya kerjasama antar pemerintah namun dengan pemangku kepentingan lainnya juga. Mekanisme kerjasama pembangunan global ini yang dapat dilakukan adalah hal pendanaan, peningkatan kapasitas, SDM, alih teknologi serta akses pasar.

## **Tujuan/Goals**

SDGs hasil Deklarasi berisi 17 (tujuh belas) *goals*, jumlah goal yang banyak apabila dibandingkan dengan MDGs yang hanya 8 (delapan) *goals*. SDGs juga memiliki 166 target dengan indikator terukur, yang 61 diantaranya berupa cara pelaksanaan (*means of implementations*).<sup>11</sup> Sehubungan dengan itu, SDGs dinilai sangat ambisius dan mungkin berat untuk dilaksanakan oleh semua negara. Namun demikian, hasil kesepakatan ini sudah melalui proses yang komprehensif dan panjang (Lihat Gambar 1.2 di Bab 1).

*Pertama*, dalam proses penyusunannya Sekjen PBB membentuk berbagai jalur untuk mendapatkan masukan, yaitu dari: (i) Kalangan akademisi yang dikoordinasikan oleh *Sustainable Development Solutions Network/SDSN* yang diketuai oleh Profesor Jeffrey Sachs,

---

<sup>11</sup> *Compilation of metadata IAEG-SDGs, March 2016*

mengusulkan 10 *Goals*; (ii) Pemimpin Negara, perusahaan, pemuka masyarakat global yang terhimpun di dalam *High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP)* yang diketuai bersama oleh Presiden Republik Indonesia, Perdana Menteri Inggris dan Presiden Nigeria; yang mengusulkan 12 *goals*<sup>12</sup>; (iii) Proses mendapat masukan *online* melalui *Myworld*; (iii) Masukan dari lembaga internal PBB/UN *Task Team*.

*Kedua*, Rumusan dari Kelompok Kerja yang mendapat mandat dari KTT Rio+20, yang disebut dengan *Open Working Group (OWG)*, yang dengan anggota inti sebanyak 30 negara, dimana Indonesia merupakan salah satu anggota. OWG dibentuk sebagai mandat dari Hasil KTT Rio+20, yang merupakan perwakilan Negara-negara untuk menyusun Agenda Pembangunan Pasca 2015 secara inklusif dan *bottom up*. Hasil perumusan dari OWG diserahkan kepada Sekjen PBB untuk dikomunikasikan dengan Negara-negara, dan akhirnya dideklarasikan dalam pertemuan UNGA tahun 2015, pada tanggal 25 September 2015, dalam *A/RES/70/1 Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015: Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Ke-17 Goals yang telah disepakati secara lengkap ada dalam Tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1 17 Goals Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  
(Sustainable Development Goals/SDGs)**

Tujuan	Jumlah Target	
	Target	Cara Implementasi
1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	5	2
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	5	2

<sup>12</sup> *A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development. Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda, The United Nations, 2013*

Tujuan	Jumlah Target	
	Target	Cara Implementasi
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	9	3
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	7	3
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	6	3
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	6	2
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	3	2
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	10	2
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	5	3
10. Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara	7	3
11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	7	3
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	8	3
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	3	2
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	7	3
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta	9	3

Tujuan	Jumlah Target	
	Target	Cara Implementasi
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati		
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	10	2
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	19	-

Sesuai hasil Deklarasi, SDGs terdiri dari 17 *goals* yang dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar yang tidak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan. Empat pilar ini untuk menunjukkan ada dan pentingnya keseimbangan di antara 3 pilar utama yaitu pilar/dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan hidup, yang didukung dengan pilar tata kelola. Ketiga pilar ini merupakan pilar yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Pilar lingkungan merupakan unsur terpenting, karena pertumbuhan saat ini yang digambarkan dalam pilar ekonomi, perlu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Demikian pula, perilaku sosial masyarakat yang digambarkan dalam pilar sosial, perlu berubah dan memiliki perilaku yang ramah terhadap lingkungan, sebagaimana digambarkan di atas.

PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL	PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI	PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN	PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA
Goal 1. Tanpa Kemiskinan	Goal 7. Energi Bersih dan Terjangkau	Goal 6. Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	Goal 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Goal 2. Tanpa Kelaparan	Goal 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Goal 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	
Goal 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Goal 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Goal 12. Konsumsi dan produksi Berkelanjutan	
Goal 4. Pendidikan Berkualitas	Goal 10. Berkurangnya Kesenjangan	Goal 13. Penanganan Perubahan Iklim	
Goal 5. Kesetaraan Gender	Goal 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	Goal 14. Ekosistem Laut	
		Goal 15. Ekosistem Daratan	

Sumber: Sekretariat SDGs, 2016

**Gambar 3.2 Pengelompokan SDGs ke dalam Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola yang mendukung Pembangunan Berkelanjutan**

**Dimensi/Pilar Sosial**, merupakan kelanjutan dari MDGs, meningkatkan kualitas pembangunan manusia berkualitas dengan beberapa elemen baru. Kemiskinan tidak hanya akan diturunkan, namun akan dihilangkan dalam berbagai aspeknya, melalui perlindungan sosial (Goal 1), kesetaraan memperoleh akses untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan membangun ketahanan masyarakat miskin terhadap kerentanan sosial, ekonomi, perubahan iklim dan bencana. Tujuan untuk menghilangkan kelaparan, diiringi dengan perbaikan gizi dan didukung dengan produksi dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan (Goal 2). Target ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan didukung pula dengan cara dan upaya (*Means of Implementation/MoI*) untuk peningkatan

investasi di pertanian melalui pembangunan infrastruktur dan kerjasama internasional; perbaikan tata cara perdagangan yang distortif serta menerapkan fungsi pasar komoditas dan derivatifnya untuk mencegah volatilitas pasar. Selanjutnya, kesehatan ditingkatkan dengan memperluas jaminan kesehatan di segala usia (Goal 3). Pendidikan ditingkatkan kualitasnya untuk segala usia (*long life learning*) dan untuk generasi muda difokuskan pada keahlian (*skill*) agar dapat mendukung *decent job* dan kewirausahaan (Goal 4). Pencapaian goal air bersih tidak hanya target yang berkaitan dengan sanitasi untuk semua, namun termasuk pengelolaan air berkelanjutan baik melalui pengendalian polusi, efisiensi penggunaan air, perlindungan dan pemulihan ekosistem, (Goal 6), sehingga dikelompokkan ke dalam Pilar Lingkungan. Sementara itu, Tujuan 5. Kesenjangan Gender menjadi bagian penting dalam pencapaian Tujuan di pilar Sosial, meskipun peran gender lintas pilar dengan *Goals* sangat strategis dalam pencapaian keseluruhan *Goals*.

**Dimensi/Pilar Ekonomi**, merupakan pilar baru yang meliputi penyediaan energi untuk semua, yang merupakan faktor penting baik untuk pendidikan, pelayanan kesehatan maupun penurunan kemiskinan. Penyediaan energi tidak hanya harus dengan harga terjangkau namun juga mengutamakan penggunaan energi terbarukan yang diiringi dengan efisiensi konsumsi energi (Goal 7). Pertumbuhan ekonomi tidak hanya perlu tinggi, tetapi perlu pertumbuhan yang berkelanjutan secara kemampuan fiskal, maupun pertumbuhan yang tidak membahayakan lingkungan hidup dan pengembangan peluang kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, yang didukung pengembangan kesempatan kerja yang produktif dan *decent* (Goal 8). Dalam kaitan ini termasuk *goal* untuk industri yang berkelanjutan, inklusif, memanfaatkan inovasi yang didukung infrastruktur yang ramah lingkungan dan berdaya tahan (*resilient*) (Goal 9). Goal 10. Mengurangi Kesenjangan yang merupakan Goal baru, berperan penting untuk diselesaikan dan akan sangat mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang inklusif

dan partisipatif. Prinsip *no one left behind* sangat terkait dengan pelaksanaan pengurangan kesenjangan. Selanjutnya, Goal 17. Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan, terdiri dari isu dan langkah di bidang ekonomi yang perlu diwujudkan untuk ekonomi berkelanjutan, dan merupakan pilar penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Belajar dari pengalaman pelaksanaan MDGs yang “mengabaikan” kerjasama antara Negara dan peran serta tanggungjawab Negara maju dalam melaksanakan agenda pembangunan global, maka dalam SDGs dirumuskan kerjasama global dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Goal 17). Rumusan secara eksplisit, tentang cara dan instrumen kerjasama global akan dilakukan melalui dukungan finansial melalui ODA maupun cara lainnya; melalui transfer teknologi, peningkatan kapasitas, tata cara perdagangan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama dalam mengatasi kesenjangan antar Negara. Sementara itu, di dalam negeri, juga dilakukan melalui mobilisasi sumber daya domestik melalui perbaikan pengelolaan pajak dan keuangan Negara, kerjasama antara pemerintah dan swasta, serta kerjasama dengan parapihak lain yaitu Filantropi dan LSM. Dengan adanya tatakelola baru ini, maka ketiga dimensi/pilar pembangunan berkelanjutan akan dilaksanakan dengan baik, secara inklusif, melibatkan semua parapihak serta akan dapat menjangkau setiap warganegara (*no one left behind*).

**Dimensi/Pilar Lingkungan Hidup.** Pilar ini sangat penting dan merupakan landasan dari semangat transformatif dari pembangunan berkelanjutan, dimana lingkungan hidup, alam dan seisinya merupakan pembatas, sehingga seluruh goal sosial dan ekonomi tidak boleh mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menopang kehidupan saat ini dan masa depan. Untuk itu, pilar ini dimulai dengan penanganan air bersih dan sanitasi. Berbeda dengan MDGs, di dalam SDGs akses air bersih tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi untuk pembangunan sosial

khususnya kesehatan, pendidikan dan pangan/kelaparan. Dalam SDGs, penyediaan air bersih dan sanitasi harus memperhatikan keseimbangannya terhadap lingkungan dan planet seisinya. Demikian pula, ketersediaan air sangat terkait dengan Goal selanjutnya, yaitu pengembangan kota dan permukiman yang harus inklusif, aman, berdaya tahan dan ramah lingkungan (Goal 11). Akses dan penyediaan air secara berkelanjutan juga terkait dengan Goal 12. perilaku produksi dan konsumsi, khususnya berkaitan dengan penggunaan air secara efisien. Goal 12 ini juga penting untuk terwujudnya ekonomi berkelanjutan, dengan mengedepankan efisiensi penggunaan sumber daya alam, penurunan limbah pangan, mengurangi kehilangan pangan sepanjang rantai produksi dan konsumsi.

Goal selanjutnya yang penting untuk dilaksanakan adalah upaya pengendalian perubahan iklim, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terjaga (Goal 13). Dengan adanya forum perubahan iklim yang terpisah dalam forum *Conference of the Parties/COP*, maka dalam Goal Perubahan Iklim difokuskan untuk pengendalian perubahan iklim dan peningkatan daya tahan ekonomi dan masyarakat sehingga tahan terhadap gangguan perubahan iklim yang sudah terjadi pada saat ini. Selanjutnya, perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati baik yang kehati teresterial maupun di lautan mendapat perhatian tinggi (Goal 14 dan 15). Meningkatnya tingkat keasaman laut karena polusi udara maupun polusi air menjadi perhatian penting karena dapat mematikan laut dan sumber air bersih yang menjadi habitat ikan dan organisme air lainnya. Sementara itu, pengelolaan sumber daya air tawar di daratan menjadi perhatian penting. Penjagaan siklus air sangat kunci untuk menjaga ketersediaan air untuk seluruh kehidupan manusia, flora dan fauna di dunia. Pencegahan terhadap kekeringan dan kemungkinan meluasnya kecenderungan penggurunan (*desertification*), juga menjadi perhatian, karena akan mengganggu produksi pangan dan kehidupan secara keseluruhan. Hal lainnya adalah melindungi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan yang sesuai dengan daya regenerasinya, sehingga keanekaragaman



hayati masih akan lestari menjadi sumber penghidupan generasi mendatang.

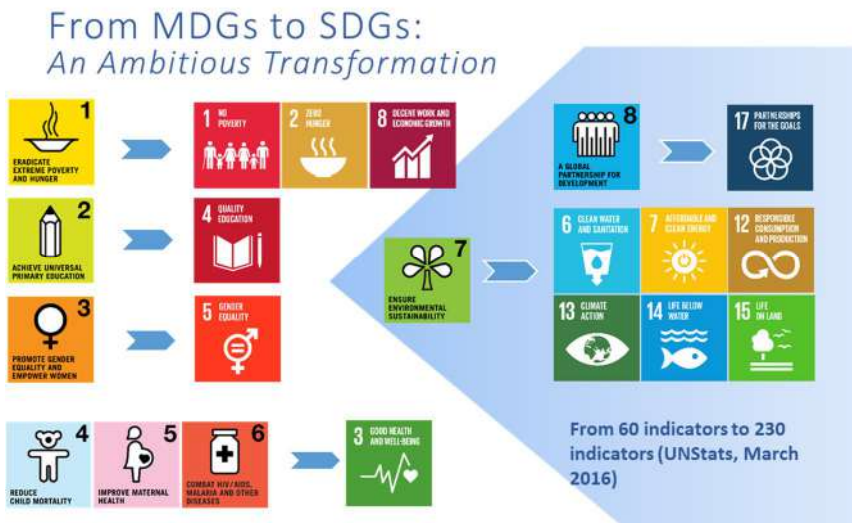
**Tata Kelola dan Kemitraan Global** merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Untuk itu, dalam SDGs dirumuskan goal baru yaitu tatakelola dan stabilitas keamanan untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses terhadap keadilan dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di setiap level (Goal 16). Goal ini muncul karena disadari bahwa dengan banyaknya perang dan konflik akan mengganggu keamanan dan kestabilan yang menjadi prasyarat berlangsungnya pembangunan, dan dalam kaitan ini pembangunan berkelanjutan. Akses terhadap keadilan menjadi penting untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan, karena dengan meningkatnya berbagai konflik, pelecehan dan eksploitasi masyarakat dalam berbagai bentuk akan mengganggu upaya pembangunan yang inklusif (*no one left behind*) dan berkelanjutan.

Akses terhadap keadilan juga penting agar semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya produktif, akses untuk mengaktualisasikan diri, berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya penegakan hukum juga memerlukan adanya akses terhadap keadilan bagi semua. Untuk itu, kelembagaan, baik lembaga dan tata kelola, di setiap lembaga publik perlu dilakukan dengan transparan dan akuntabel sehingga akan menjamin bahwa masyarakat tidak akan ditinggalkan dan tertinggal dalam berpartisipasi dan menikmati pembangunan berkelanjutan. Tata kelola seperti ini tidak hanya berlaku di dalam setiap Negara namun juga tata kelola lembaga-lembaga publik global, mengingat pelaksanaan SDGs juga untuk mengatasi kesenjangan

Perbedaan agenda pembangunan global SDGs dengan MDGs antara lain adalah: Pertama, adanya transformasi terutama "*mindset*" baru bahwa planet menjadi batas kehidupan manusia dan makhluk seisinya

yang di"ukur" dengan "*planetary boundary*"/keterbatasan, dan segala hal yang ada di dunia merupakan siklus serta memiliki hubungan sebab-akibat (*cause and effect*). Dengan demikian, 17 *Goals* memang memiliki target dan indikator sendiri-sendiri untuk mempermudah pelaksanaan, namun keseluruhan memiliki saling ketergantungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat/*human wellbeing*.

Kedua, adanya goal-goal baru dengan indikator terukur, terutama goal dan indikator dalam dimensi/pilar ekonomi dan dimensi/pilar lingkungan hidup, serta adanya Goal baru.



Gambar 3.3 Pengembangan *Goals* MDGs ke dalam SDGs



Gambar 3.4 *Goals* Baru dalam SDGs

Ketiga, terdapat rumusan eksplisit tentang tata kelola (*governance*) dan cara pelaksanaan (*means of implementation*), hal yang dalam pelaksanaan MDGs terabaikan. Cara pelaksanaan secara spesifik dirumuskan dalam setiap *goals*, sementara cara pelaksanaan secara umum dimasukkan dalam Goal. 17, yang akan dilakukan dalam bentuk kemitraan, *sharing knowledge*, dan juga dukungan dari Negara-negara maju sebagai cerminan dari Kerjasama Keuangan Global sebagai bagian dari prinsip – *common but differentiated responsibility (CBD)*. Keempat, Goal dan indikator yang pada waktu pelaksanaan MDGs dirasakan sebagai “raport” pelaksanaan Negara (berkembang), dan bukan sebagai langkah dan ukuran untuk memantau kemajuan suatu Negara dalam melaksanakan MDGs. Untuk itu, dalam kerangka SDGs, Negara-negara secara sukarela akan menyusun laporan pelaksanaan SDGs yang disebut dengan *Voluntary National Review (VNR)*. Laporan pelaksanaan SDGs VNR disampaikan dalam *High Level Political Forum (HLPF)* sebagai forum pimpinan Negara-negara untuk pembangunan global di PBB. VNR bersifat sukarela bagi Negara yang ingin mengambil peran aktif, menggunakan laporan pelaksanaan SDGs ini untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan SDGs, untuk perbaikan pelaksanaan SDGs di dalam negaranya masing-masing dan untuk mereview agenda-agenda yang menjadi tanggungjawab bersama secara global.

Untuk kebutuhan ini, disamping setiap tahunnya HLPF akan mendengarkan VNR dari setiap Negara, maka forum tingkat Menteri dalam HLPF ini meminta Sekjen PBB untuk menyusun laporan 4 tahunan pelaksanaan SDGs – *Quadrennial Global Sustainable Development Report*.<sup>13</sup> Untuk menyusun laporan ini, Sekjen PBB membentuk *Independent Global Scientist (IGS)* yang beranggotakan 15 orang dari 15 negara, salah satunya dari Indonesia, yang sekaligus bertindak sebagai *Co-Chair* bersama dengan wakil dari Swiss. Laporan

---

<sup>13</sup> E/HLS/2016/1 Ministerial declaration of the high-level-segment of the 2016 session of the Economic and Social Council on the annual theme “Implementing the post-2015 development agenda: moving from commitment to results”

empat tahun *Global Sustainable Development* (GSDR 2019) akan melaporkan perkembangan pembangunan berkelanjutan dan akan melengkapi laporan goal-goal dalam SDGs yang disusun oleh UNSTAT/UNDESA. Laporan empat tahunan ini juga merupakan pandangan dari sisi *science* tentang pembangunan berkelanjutan dan bagaimana perkembangan *science*/ilmu pengetahuan memberi dasar untuk pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan (*science providing instrument for policy making*).

## Indikator Pencapaian SDGs

Sebagaimana disepakati, pelaksanaan SDGs merupakan peluang untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, dengan tetap menyelesaikan target MDGs yang belum tercapai (*the unfinished business*). Dengan demikian, target dan indikator SDGs sebagian merupakan peningkatan dari target MDGs serta target dan indikator baru dalam pelaksanaan SDGs. Setelah Deklarasi SDGs dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015, pada bulan Maret 2016 Komite Statistik baru dapat menyepakati usulan Indikator yang akan digunakan untuk pelaksanaan SDGs.<sup>14</sup> Jumlah indikator untuk SDGs adalah sebanyak 241, suatu jumlah yang cukup banyak dengan tantangan besar dalam penggunaan dan pemenuhannya, mengingat masih banyak Goal yang baru, terutama Goal yang berada dalam kelompok dimensi/pilar Ekonomi dan dimensi/Pilar Lingkungan Hidup.

### 4.1 Proses Penyusunan Indikator SDGs

Sejalan dengan proses pembicaraan dalam *Open Working Group on SDGs*, maka UNSTAT bersama-sama perwakilan lembaga statistik dari berbagai Negara juga menyusun ‘kandidat’ indikator SDGs, baik yang

---

<sup>14</sup> *Compilation of metadata IAEG-SDGs, 4 March 2016*

berasal dari pengembangan indikator lanjutan dari MDGs, maupun indikator-indikator yang sudah disepakati dalam berbagai forum sektor serta calon indikator baru yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan SDGs. Hasil “kajian bersama” calon indikator ini kemudian diproses oleh *Inter-agency and Experts Group on SDGs Indicators (IAEG SDGs)* yang dibentuk dan memulai Sidang I pada bulan Maret 2015.

**Kotak 4.1 Sembilan (9) indikator yang digunakan dalam beberapa target SDGs**

1. 8.4.1/12.2.1
2. 8.4.2./12,2,2
3. 10.3.1/16.b.1
4. 10.6.1/16.8.1
5. 15.7.1/15.c.1
6. 15.a.1/15.b.1
7. 1.5.1/11.5.1/13.1.1
8. 1.5.3/11.b.1/13.1.2
9. 1.5.4/11.b.2/13.1.3

IAEG SDGS dibentuk untuk menjamin adanya keahlian dan dukungan teknis dalam penerapan indikator, setelah indikator disepakati. Group ini juga bertanggungjawab untuk memonitor penggunaan indikator secara harmonis dan definisi yang disepakati, me-review proses metodologi serta isu yang terkait dengan indikator dan metadatanya. Pada pertemuan kedua di Bangkok pada bulan Oktober 2015, IAEG SDGs melakukan *review* secara rinci terhadap daftar indikator yang sudah ada; mendiskusikan kerangka indikator serta rencana kerja dan tahap yang diperlukan dalam proses selanjutnya. Hasil proses *IAEG SDGS* pada tanggal 11 Maret 2016 disepakati oleh *UN Statistical Commission* akan digunakan sebagai *proposed global indicator* dan *IAEG SDGs* akan terus melakukan tugasnya: (i) memperhatikan usulan *Member States* atas usulan perbaikan terhadap *global indicators* tersebut; (ii) melaporkan perkembangan yang dilakukan dalam membangun dan menyempurnakan indikator

global tersebut dan menyediakan usulan serta rencana untuk *review* indikator secara regular termasuk mekanisme persetujuannya; (iii) melaporkan rencana untuk mengembangkan metodologi untuk indikator-indikator yang definisi dan standarnya belum dibentuk/disusun.

Indikator yang diusulkan dari IAEG SDGs adalah sebagaimana disampaikan oleh IAEG SDGs kepada ECOSOC dan yang sudah diadopsi sebagai Resolusi A/RES/71/313 pada tanggal 6 Juli 2017 dalam *General Assembly on Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Dalam Resolusi tersebut telah disepakati terdapat 241 indikator untuk SDGs, atau tepatnya 232 indikator karena terdapat 9 (Sembilan) indikator yang digunakan dalam 2 atau 3 target yang berbeda.

## 4.2 Indikator SDGs

Secara lengkap, indikator berjumlah 241 indikator. Penyediaan indikator secara dini pada bulan Maret 2016 (meskipun baru selesai 6 bulan setelah Deklarasi SDGs pada bulan September 2015) berdasarkan pengalaman adanya jeda (*lag*) dalam penyediaan dan pengerjaan indikator untuk pelaksanaan MDGs. Sehubungan dengan itu, indikator yang diusulkan oleh IAEG SDGs disepakati dan group ini juga ditugaskan untuk melakukan 3 langkah lanjutan sebagaimana di atas. Secara ringkas jumlah indikator dalam setiap Goal disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1 Jumlah Indikator setiap Goal dalam SDGs**

Tujuan	Jumlah Indikator
Goal 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	12
Goal 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	14

<b>Tujuan</b>	<b>Jumlah Indikator</b>
Goal 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	26
Goal 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	11
Goal 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	14
Goal 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	11
Goal 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	6
Goal 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	17
Goal 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	12
Goal 10. Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara	11
Goal 11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	15
Goal 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	13
Goal 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	7
Goal 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	10
Goal 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	14
Goal 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	23
Goal 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	25



Dalam proses selanjutnya, IAEG SDGs melakukan analisa terhadap indikator yang disepakati untuk memfasilitasi penerapan indikator. Seluruh 241 indikator dikelompokkan ke dalam 3 Tier, yaitu:

- Tier 1: adalah indikator yang jelas secara konsep dan sudah terdapat standar dan metodologi yang tersedia secara internasional serta sudah diproduksi oleh Negara-negara (minimal 50 negara).
- Tier 2: adalah indikator yang secara konsep sudah jelas, memiliki metodologi dan standar yang tersedia secara internasional, namun belum diproduksi oleh Negara-negara.
- Tier 3: adalah kelompok indikator yang belum tersedia metodologi atau standarnya namun standar dan metodologi tersebut sedang atau akan dikembangkan dan diuji.

Semua indikator di atas dinilai sama pentingnya untuk pelaksanaan SDGs. Dari hasil analisa IAEG SDGs, pada bulan Desember 2017 terdapat 93 indikator yang termasuk dalam Tier 1; 66 indikator dalam kelompok Tier 2, dan 68 yang tercakup dalam kelompok Tier 3. Serta 5 indikator yang memiliki *multiple Tier*. Pengelompokan data ini dilakukan untuk mempermudah Negara-negara melakukan review ketersediaan data masing-masing dan melakukan persiapan, sehingga secara global dapat dilakukan strategi pelaksanaan dan pemantauan secara mudah. Sementara itu, kesiapan data di masing-masing Negara dapat berbeda dan setiap Negara dapat menyusun Tier sendiri-sendiri sesuai kondisi data masing-masing. Namun demikian, semuanya menuju kepada kesesuaian Tier 1 secara global, sehingga pelaksanaan SDGs secara nasional dan global selaras. Pada akhirnya secara agregat pelaksanaan SDGs secara global dapat dimonitor, termasuk kemajuan di masing-masing Negara.

### **4.3 Indikator: Mengukur Kemajuan untuk Perbaikan Pelaksanaan SDGs**

Dalam dimensi/pilar sosial yang sebagian besar merupakan cerminan kelanjutan dari MDGs, banyak dijumpai dan telah dirumuskan indikator pembangunan manusia sebagai lanjutan dari MDGs. Indikator tersebut sudah disepakati oleh berbagai forum teknis/sektor, terutama yang menyangkut indikator yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya, dalam dimensi/pilar ekonomi dan lingkungan hidup terdapat banyak indikator baru. Sebagian besar indikator lingkungan hidup masih perlu dikembangkan, karena indikator tersebut masih baru/belum digunakan dan/atau belum ada data yang dapat digunakan untuk menyusun indikator secara nasional. Dalam dimensi/pilar ekonomi, indikator yang digunakan untuk sementara dapat menggunakan indikator pembangunan yang selama ini digunakan dalam pembangunan ekonomi (*business as usual*). Namun ke depan, diperlukan indikator baru yang dapat menunjukkan internalisasi dimensi lingkungan/ramah lingkungan ke dalam indikator ekonomi; baik dalam tataran makro, mikro maupun kemungkinan adanya indikator yang selama ini belum ada. Dengan demikian, pelengkapan target dan indikator pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam SDGs merupakan peluang dan kesempatan untuk melengkapi pemahaman kita mengenai ukuran-ukuran pembangunan masing-masing pilar dan bagaimana keterkaitan indikator tersebut untuk mengukur pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Dengan sifat indikator SDGs seperti itu, maka semangat penggunaan indikator dalam SDGs adalah cara untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu Negara dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pengukuran perkembangan dan capaian goal, indikator dan pelaporannya sebaiknya tidak digunakan sebagai alat untuk men"*judge*" bahwa suatu Negara berhasil atau tidak berhasil melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Namun, pengukuran

perkembangan dan capaian pelaksanaan SDGs seharusnya lebih digunakan sebagai “alat” untuk mengetahui dan mendiagnosa apakah: (i) Suatu Negara memiliki kelemahan pelaksanaan SDGs di bidang dan tujuan, serta target tertentu, dan kemudian informasi tersebut digunakan oleh PBB untuk mencari bantuan atau dukungan dari lembaga internasional atau Negara lain untuk membantu mereka. Langkah untuk bantuan dan dukungan ini dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam *means of implementation* yang melekat pada setiap *Goals* atau secara umum dirumuskan dalam *Goals 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development*; (ii) Langkah dan capaian dalam bidang, goal dan target tertentu dari suatu Negara dapat dijadikan “pembelajaran” bagi Negara lain (*lessons learnt*).

Sehubungan dengan itu, PBB perlu memiliki suatu Sekretariat yang dapat membaca laporan/*review* pencapaian SDGs suatu Negara. PBB kemudian dapat menggunakan informasi dari Laporan Pencapaian SDGs untuk melakukan kerjasama/kemitraan global dan/atau bantuan kepada Negara tersebut, sehingga dapat membantu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan cepat dan tepat, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Negara tanpa kecuali (*no one left behind*).

## Kesiapan Negara-Negara dalam Pelaksanaan SDGs

Kesepakatan tentang SDGs meskipun dilakukan oleh 193 negara, tetap memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya, mengingat banyaknya goal, target dan indikator yang telah disetujui bersama. Meskipun demikian, Negara-negara sangat antusias dengan pelaksanaan SDGs, karena agenda pembangunan ini merupakan kelanjutan dari target MDGs yang tersisa, pengembangan agenda ekonomi berkelanjutan seperti pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati serta tata kelola yang sangat penting bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, perlu diketahui bagaimana kesiapan Negara-negara dalam melaksanakan SDGs; bagaimana *Voluntary National Review* yang merupakan review atas pelaksanaan SDGs dan bagaimana kesiapan Indonesia dalam pelaksanaan SDGs.

### 5.1 SDGs dan Kesiapan Negara-negara

Terdapat berbagai kajian tentang kesiapan Negara-negara dalam melaksanakan SDGs diantaranya yang dilaksanakan oleh *Overseas Development Institute* (ODI, 2015),<sup>15</sup> *Sustainable Development*

---

<sup>15</sup> *Projecting progress: Reaching the SDGs by 2030, Overseas Development Institute (ODI), 2015*

*Solutions Network* (SDSN, 2017)<sup>16</sup> dan beberapa kajian lainnya yang bersifat regional.<sup>17</sup>

Studi ODI dengan metoda proyeksi dan scorecard telah melakukan proyeksi sistematis terhadap kemajuan pencapaian SDGs dan memperkirakan apa yang akan terjadi kalau tren saat ini yang akan berlanjut (*business as usual*). Kesimpulan dari *exercise* yang dilakukan ODI adalah bahwa hanya mengandalkan pada upaya biasa (*business as usual*), maka tidak ada satupun target akan dapat dicapai secara global. Artinya, untuk dapat mencapai semua target secara global diperlukan upaya tambahan. Adapun gambaran tren pencapaian target SDGs dari Studi ODI ini adalah sebagai berikut:

- a. Target yang akan tercapai hanya setengahnya, apabila tidak dilakukan langkah reformasi, yaitu target pada: (i) Goal 1. Kemiskinan pada Target 1.1. Penghilangan kemiskinan ekstrim; (ii) Goal 8. Pertumbuhan berkelanjutan pada Target 8.1. Pertumbuhan ekonomi di *Least Developed Countries* (LDCs); dan (iii) Goal 10. Keanekaragaman Hayati pada Target 15.2. Penghentian Deforestasi.
- b. Target yang memerlukan langkah bersifat Revolusi, yaitu: (i) Goal 2. Kesehatan khususnya pada Target 3.1. Penurunan *Maternal Mortality*; (ii) Goal 4. Pendidikan yaitu pada Target 4.1. Pendidikan Menengah untuk semua; (iii) Goal 16. Perdamaian yaitu pada Target 16.1. Penurunan Kekerasan yang mengakibatkan kematian; (iv) Goal 17. Kemitraan Global yaitu pada Target 17.1. Mobilisasi Sumber daya Domestik; (v) Goal 2. Kelaparan yaitu pada Target 2.1. Penghentian Kelaparan; (vi) Goal 6. Air Bersih dan Sanitasi yaitu pada Target 6.2. Akses air bersih untuk semua; (vii) Goal 7. Energi yaitu pada Target 7.1. Akses energi untuk semua; (viii) Goal 5.

---

<sup>16</sup> *National Baseline for SDGs*, SDSN, 2017. Juga diterbitkan dalam *Nature Geoscience* 17 July 2017 (Jeffrey Sachs dkk)

<sup>17</sup> Misalnya untuk negara-negara Arab: Allen dkk (2016)

Gender yaitu pada Target 5.3. Penghentian Pernikahan pada anak; (ix) Goal 9. Industrialisasi yaitu pada Target 9.2. Industrialisasi di LDCs.

- c. Target yang kemungkinan bahkan akan membalik (*reversal*) apabila tidak dilakukan dengan hati-hati yaitu: (i) Goal 10. Kesenjangan yaitu pada Target 10.1. Penurunan kesenjangan pendapatan; (ii) Goal 11. Perkotaan berkelanjutan yaitu pada Target 11.1. Penurunan populasi tinggal di wilayah kumuh; (iii) Goal 12. Limbah yaitu pada Target 12.5. Penurunan limbah; (iv) Goal 13. Perubahan Iklim yaitu pada Target 13.2. Penanganan perubahan iklim; (v) Goal 14. Ekosistem Laut yaitu pada Target 14.2. Perlindungan lingkungan pesisir.

Selanjutnya studi ini juga memperkirakan bahwa Negara-negara di Sub-Sahara Afrika adalah yang paling tertinggal. Sementara itu Negara-negara di wilayah Asia Selatan, Asia Timur dan Pasifik serta Amerika akan lebih maju, meskipun masing-masing Negara memiliki tantangan yang berbeda. Untuk Indonesia, studi ini memperkirakan bahwa Goal yang kemungkinan *on-track* adalah Goal 3. Kesehatan pada *maternal mortality*; Goal 13. Perubahan Iklim pada Target Penanganan Perubahan Iklim dan Goal 15. Ekosistem Daratan yaitu pada Target Penghentian Deforestasi. Perkiraan ini sangat berbeda dengan *trend* global, namun berdasarkan kebijakan dan langkah-langkah yang ada di bidang ini, perbedaan memang dinilai wajar/masuk akal.

Senada dengan hasil kajian ODI, hasil kajian SDSN yang dilakukan terhadap 149 negara secara umum menyimpulkan bahwa semua negara memiliki tantangan dalam pencapaian SDGs. Tantangan untuk Negara miskin pada umumnya adalah pada Goal kemiskinan ekstrim, akses terhadap infrastruktur, kerusakan lingkungan dan inklusi sosial. Sementara itu, tantangan pada Negara-negara kaya adalah pada ketimpangan, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Selain itu, studi ini juga menyimpulkan bahwa berbagai Negara memiliki

ketidakseimbangan strategi dalam pencapaian SDGs antara prioritas di pilar sosial, ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan score yang dihitung, hasil kajian SDSN menunjukkan bahwa ternyata Negara maju besar (*large advanced countries*) memperoleh skor moderat untuk pencapaian SDGs. Negara-negara di wilayah Skandinavia lah yang memiliki skor tertinggi yaitu: Swedia, Denmark, Finlandia, Norwegia serta Republik Chekoslovakia (Tabel 5.1).

**Tabel 5.1 Skor Negara-negara dalam Pencapaian SDGs**

1	Sweden	85.6	27	Poland	75.8	53	Costa Rica	69.8	79	Peru	66.0	105	Nepal	61.6	131	Tanzania	52.1		
2	Denmark	84.2	28	Portugal	75.6	54	Malaysia	69.7	80	Jordan	66.0	106	Timor-Leste	61.5	132	Burundi	51.8		
3	Finland	84.0	29	Cuba	75.5	55	Thailand	69.5	81	Sri Lanka	65.9	107	Lao PDR	61.4	133	Mauritania	51.1		
4	Norway	83.9	30	Italy	75.5	56	Brazil	69.5	82	Venezuela, RB	65.8	108	South Africa	61.2	134	Zambia	51.1		
5	Czech Rep.	81.9	31	Korea, Rep.	75.5	57	Macedonia, FYR	69.4	83	Bhutan	65.5	109	Ghana	59.9	135	Congo, Rep.	50.9		
6	Germany	81.7	32	Latvia	75.2	58	Mexico	69.1	84	Bosnia and H	65.5	110	Myanmar	59.5	136	Angola	50.2		
7	Austria	81.4	33	Luxembourg	75.0	59	Trinidad and To	69.1	85	Gabon	65.1	111	Namibia	59.3	137	Togo	50.2		
8	Switzerland	81.2	34	Moldova	74.2	60	Ecuador	69.0	86	Lebanon	64.9	112	Guatemala	58.3	138	Burkina Faso	49.9		
9	Slovenia	80.5	35	Romania	74.1	61	Singapore	69.0	87	Egypt, Arab Rep.	64.9	113	Botswana	58.3	139	Sudan	49.9		
10	France	80.3	36	Lithuania	73.6	62	Russian Feder	68.9	88	Colombia	64.8	114	Cambodia	58.2	140	Yemen, Rep.	49.8		
11	Japan	80.2	37	Serbia	73.6	63	Albania	68.9	89	Iran, Islamic Rep.	64.7	115	Syrian Arab Re	58.1	141	Djibouti	49.6		
12	Belgium	80.0	38	Greece	72.9	64	Algeria	68.8	90	Bolivia	64.7	116	India	58.1	142	Benin	49.5		
13	Netherlands	79.9	39	Ukraine	72.7	65	Tunisia	68.7	91	Guyana	64.7	117	Turkmenistan	56.7	143	Mozambique	49.2		
14	Iceland	79.3	40	Bulgaria	72.5	66	Georgia	68.6	92	Bahrain	64.6	118	Iraq	56.6	144	Guinea	48.8		
15	Estonia	78.6	41	Argentina	72.5	67	Turkey	68.5	93	Philippines	64.3	119	Senegal	56.2	145	Nigeria	48.6		
16	UK	78.3	42	United States	72.4	68	Vietnam	67.9	94	Oman	64.3	120	Bangladesh	56.2	146	Mali	48.5		
17	Canada	78.0	43	Armenia	71.7	69	Montenegro	67.3	95	Mongolia	64.2	121	Zimbabwe	56.1	147	Malawi	48.0		
18	Hungary	78.0	44	Chile	71.6	70	Dominican Re	67.2	96	Panama	63.9	122	Pakistan	55.6	148	Gambia, The	47.8		
19	Ireland	77.9	45	Uzbekistan	71.2	71	China	67.1	97	Nicaragua	63.1	123	Rwanda	55.0	149	Sierra Leone	47.1		
20	New Zealand	77.6	46	Kazakhstan	71.1	72	Tajikistan	66.8	98	Qatar	63.1	124	Swaziland	55.0	150	Afghanistan	46.8		
21	Belarus	77.1	47	Uruguay	71.0	73	Morocco	66.7	99	El Salvador	62.9	125	Kenya	54.9	151	Niger	44.8		
22	Malta	77.0	48	Azerbaijan	70.8	74	Jamaica	66.6	100	Indonesia	62.9	126	Ethiopia	53.5	152	Haiti	44.1		
23	Slovak Rep	76.9	49	Kyrgyz Rep	70.7	75	Paraguay	66.1	101	Saudi Arabia	62.7	127	Cote d'Ivoire	53.3	153	Madagascar	43.5		
24	Croatia	76.9	50	Cyprus	70.6	76	Belize	66.0	102	Kuwait	62.4	128	Lesotho	53.0	154	Liberia	42.8		
25	Spain	76.8	51	Suriname	70.4	77	United Arab Em	66.0	103	Mauritius	62.1	129	Uganda	52.9	155	Congo, Dem. Rep.	42.7		
26	Australia	75.9	52	Israel	70.1	78	Barbados	66.0	104	Honduras	61.7	130	Cameroon	52.8	156	Chad	41.5		
																	157	Central Afri Rep	36.7

Sumber: SDSN, 2017

Dalam perbandingan yang dilakukan pada studi ini, SDSN juga menghadapi adanya gap data yaitu: data yang tidak *comparable* antar Negara; data yang tidak lengkap serta banyak sumber data yang belum dapat diakses oleh publik (misalnya yang bersumber dari *Big Data*). Hasil kajian tersebut memberikan informasi bagaimana Negara kita dibandingkan dengan Negara-negara lain, meskipun untuk mengetahui kesiapan dan kekurangan yang masih kita miliki diperlukan pendalaman lebih lanjut. Namun demikian, hasil kajian sangat berharga untuk dijadikan input pelaksanaan dan persiapan pelaksanaan ke depan.

## 5.2 Perkembangan Pelaksanaan SDGs

Dari informasi yang bersifat obyektif sebagaimana diinformasikan dari Kajian di atas, maka penggunaan indikator sangat bermanfaat untuk melakukan *review* swadaya oleh masing-masing Negara yang dilakukan melalui *Voluntary National Review* (VNR), laporan SDGs Negara serta laporan SDGs yang disusun oleh UNDESA.

Review perkembangan pelaksanaan SDGs di suatu Negara dapat dilihat melalui VNR dan melalui laporan SDGs.<sup>18</sup> Kesamaan diantara kedua review ini adalah: keduanya merupakan review berdasarkan pelaksanaan SDGs oleh Negara-negara, keberhasilan dan tantangan yang masih mereka hadapi serta pembelajaran (*lesson learnt*). Selain itu, keduanya juga disusun berdasarkan keterlibatan pemangku kepentingan dan sangat bergantung pada input data yang berkualitas. Kesamaan lainnya adalah VNR dan laporan SDG Negara-negara disusun berdasarkan beberapa prinsip, antara lain: proses *review* harus: (i) sukarela dan *country led*; (ii) fokus pada universalitas, integrasi dan keterkaitan antar goal, target termasuk *means of implementations*; (iii) terbuka, inklusif, partisipatif dan transparan kepada semua; (iv) berorientasi pada manusia, sensitif gender, menghormati serta melindungi hak dasar, serta fokus pada kelompok termiskin, paling rentan dan paling tertinggal; (v) berdasarkan *platform* dan proses yang ada, namun tetap memperhatikan metodologi terbaru; (vi) *rigorous* dan berdasarkan fakta, informasi evaluasi yang dilakukan Negara dan data berkualitas yang dapat diakses, tepat waktu, *reliable* dan disagregasi berdasarkan karakteristik yang sesuai dengan konteks nasional; (vii) dan memiliki orientasi jangka panjang, dengan mengidentifikasi capaian, tantangan, gap serta faktor kritis yang menunjang kesuksesan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Voluntary National Reviews and National SDG Reports. Overview Report to Guide Their Preparation. UNDP. Draft in Progress, September 2017.*

<sup>19</sup> *idem*



Sementara itu, perbedaannya adalah bahwa VNR disusun oleh negara dan merupakan *review* yang dilakukan secara formal sebagai kelanjutan dari proses formal antar Negara dan disampaikan dalam forum HLPF pada bulan Juli setiap tahunnya.<sup>20</sup> Tujuan VNR adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara pada rekan-rekan Negara lain dan masyarakat internasional atas pelaksanaan SDGs. Penyusunannya dilakukan sesuai pedoman yang disusun oleh PBB yaitu *the UN Secretary General's Voluntarily Guidelines* yang sudah disepakati dalam *UN General Assembly* tahun 2016. *Guideline* ditujukan untuk mendorong konsistensi dan komparabilitas antar VNR dan antara VNR tahun ini dengan tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, laporan SDGs disusun dengan cara yang lebih fleksibel dan tidak ada kebutuhan formal untuk struktur, frekuensi dan tahap waktu penyusunannya. Meskipun demikian, UNDESA/UNDG mengeluarkan pula *SDGs Country Report Guidelines*.

Selanjutnya, UNSTAT setiap tahun mengeluarkan SDGs Report berdasarkan data yang dapat diakses oleh UNSTAT melalui mitra lembaga statistik di Negara-negara, sebagaimana mereka juga dikonsultasikan selama proses penyusunan indikator SDGs. Laporan ini merupakan cikal-bakal dari Laporan Sekjen PBB dalam Sidang Umum PBB yang dilakukan pada bulan September di New York, Amerika Serikat.

### ***Voluntary National Review (VNR)***

Dalam pelaksanaan SDGs kali ini, PBB bertindak lebih proaktif, dengan membimbing Negara-negara untuk secara sukarela melakukan review kesiapan mereka dalam pelaksanaan SDGs. Selama proses *Open Working Group (OWG)*, terdapat beberapa Negara yang secara sukarela “dibimbing” untuk melakukan VNR. Dari proses tersebut, PBB kemudian menyusun Pedoman VNR dan menerbitkannya untuk

---

<sup>20</sup> idem 4 dan 5

dapat diacu oleh Negara-negara. Sebagai hasilnya, pada pertemuan *High Level Political Forum (HLPF)* pada tahun 2016, terdapat 22 Negara yang melaporkan hasil VNR mereka. Dari beberapa dokumen VNR 2016 Negara-negara tersebut, terdapat beberapa kategori: (i) Negara yang hanya memberikan *Statement* Umum, antara lain seperti Cina dan Mesir; (ii) Negara yang sudah melaporkan dengan lebih lengkap antara lain seperti Norwegia, Belanda, Finlandia, meskipun tingkat kedalamannya berbeda-beda. Pada tahun 2017, semakin banyak Negara yang sudah melaporkan VNR dalam pertemuan HLPF bulan Juli 2017, yaitu sebanyak 44 negara termasuk Indonesia.

### **Laporan SDGs oleh UNDESA**

Berbeda dengan VNR dan laporan SDGs Negara, maka laporan SDGs oleh UNDESA dimaksudkan untuk memberi gambaran capaian secara global. Laporan disusun berdasarkan capaian Goal per Goal. Sementara itu, perbandingan secara wilayah dilakukan dengan membandingkan agregasi data antar wilayah, yaitu Sub-Sahara Afrika, Oceania, Asia Tengah dan Tenggara; Amerika Latin dan Karibia; Afrika Utara dan Afrika Bagian Barat; Australia dan New Zealand serta Eropa dan Amerika Bagian Utara. Sementara sebagai pembanding adalah rata-rata dunia. Namun demikian, dengan banyaknya Negara, maka periode data yang digunakan untuk masing-masing goal sangat berbeda, ada yang masih tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, dengan tahun 1999 sebagai basis. Contoh Laporan UNDESA ini dari capaian Goal 1 (Tabel 5.2)

**Tabel 5.2 Capaian Goal 1.  
Penurunan Kemiskinan dalam Berbagai Bentuk**

Wilayah	Target		
	Proporsi (%) Populasi hidup di bawah 1.90 USD/hari		Kurang dari separuh penduduknya terlayani minimal satu skema perlindungan sosial (%)
	1999	2013	2016
Sub-Sahara Afrika	57,7	42,3	13
Oceania	44,3	27,2	-
Asia Bagian Tengah dan Selatan	37,5	14,4	16
Amerika Latin dan Karibia	13,9	5,4	61
Asia Bagian Timur dan Asia Tenggara	34,7	3,2	59
Afrika Bagian Utara dan Asia Bagian Barat	9,6	2,6	-
Australia dan New Zealand	1,3	0,7	80
Eropa dan Amerika Bagian Utara	1,8	0,6	86
Dunia	28	10,7	45

Sumber: *The Sustainable Development Goals Report 2017*, UNDESA

### **5.3 Kesiapan dan Persiapan yang Dilakukan Indonesia**

Indonesia melakukan persiapan pelaksanaan SDGs sejak tahap awal, yaitu penyelarasan antara Draft RPJMN 2015-2019 dengan Konsep-konsep yang memberi masukan ke dalam SDGs. Indonesia telah berpengalaman dalam melaksanakan agenda global seperti MDGs, Perubahan Iklim dan beberapa konvensi internasional lainnya, sehingga telah ada “mekanisme” baku untuk pelaksanaan agenda global melalui *mainstreaming* agenda global tersebut dalam penyusunan rencana aksi, koordinasi nasional dan pemantauan serta pelaporan/*review* secara berkala.

**Mainstreaming.** Indonesia merupakan Negara yang relatif siap dalam pelaksanaan SDGs, karena memiliki pengalaman dalam pelaksanaan MDG mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan-pelaporan. Dalam pelaksanaan MDG, ada beberapa *lessons learnt* yang membantu persiapan pelaksanaan SDGs sebagai berikut:

- a. Indonesia memerlukan sekitar 5 tahun untuk “melokalkan” MDG, khususnya menyusun target dan indikator yang sesuai dengan konteks nasional dan basis data nasional. Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian PPN/Bappenas bersama BPS serta K/L terkait dalam pelaksanaan MDGs sudah memilih indikator yang sesuai untuk MDGs dan cara pengukuran yang *conform* dengan indikator MDGs global.
- b. Isi dari MDGs sangat sejalan dengan rencana pembangunan yang dimiliki Indonesia pada waktu itu, yang mengutamakan pembangunan manusia seutuhnya. Berbagai indikator yang digunakan dalam pembangunan sejalan dan *conform* dengan MDGs, sehingga *mainstreaming* MDG ke dalam pembangunan nasional menjadi sangat mudah dan dapat dilakukan dengan segera.
- c. *Mainstreaming* pembangunan global yang sudah menjadi “SOP” pelaksanaan agenda global di berbagai bidang pembangunan merupakan cara untuk menjamin bahwa: (i) agenda global sejalan dengan agenda nasional; (ii) pelaksanaan agenda global merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional, artinya agenda global tersebut akan dilaksanakan oleh K/L penanggungjawab dan ada jaminan pendanaannya; (iii) pelaksanaan agenda global akan dapat dikoordinasikan dengan pembangunan daerah sejak dari tingkat penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporannya.
- d. Untuk melaksanakan itu semua, Indonesia memiliki Rencana Aksi yang dilandasi dengan peraturan, sehingga landasan hukumnya jelas. Hal ini penting untuk pelaksanaan

pembangunan di era demokrasi, dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung di 34 provinsi dan 518 Kabupaten/Kota di Indonesia.<sup>21</sup> Penyusunan rencana aksi dan pelaksanaan di tingkat sub-nasional (provinsi dan apalagi kabupaten/kota) merupakan hal yang biasa di Indonesia, namun hal yang sangat langka di tingkat global.

Dalam kaitannya dengan SDGs, Indonesia sudah melakukan beberapa langkah persiapan:

- a. *Mainstreaming* SDGs ke dalam RPJMN 2015-2019. Langkah ini bisa dilakukan karena Indonesia terlibat dalam penyusunan SDGs sejak Presiden RI menjadi *Co-Chair HLPEP* serta jajaran pemerintah Indonesia termasuk Kementerian PPN/Bappenas aktif dalam proses penyusunan SDGs di tingkat global. Untuk itu, selama proses penyusunan RPJMN 2015-2019, prinsip SDGs dan goal SDG sudah ada di dalam RPJMN 2015-2019. Proses *mainstreaming* sudah dilakukan sejak awal.
- b. Dengan adanya keselarasan antara SDGs dengan RPJMN 2015-2019, maka Indonesia sudah dapat *me-review* goal, target dan indikator SDGs, sejak sebelum indikator SDGs diterbitkan oleh UNSTAT bulan Maret 2016.

Dalam 5 (lima) tahun pertama, Indonesia akan menggunakan target dan indikator di dalam RPJMN 2015-2019. Keunggulan dari penggunaan target dan indikator RPJMN 2015-2019 adalah: (i) Indonesia sudah sejak awal melaksanakan SDGs, bahkan sejak sebelum indikator global diterbitkan oleh UNSTAT, PBB. Indonesia juga sudah memiliki target pencapaian SDGs nasional, yang sudah merupakan komitmen bersama antara pemerintah dengan parapihak dan terutama DPR; (ii) Indikator yang ada di RPJMN 2015-2019, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Goal-goal dalam

---

<sup>21</sup> Daftar Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia (Mei 2013), Kemendagri. <https://www.kppod.org>.

dimensi/pilar Sosial, sudah merupakan kelanjutan dari pelaksanaan MDGs. Hal ini sejalan dengan spirit bahwa SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs terutama untuk *the unfinished goals*; (iii) Dengan adanya SDGs di dalam RPJMN 2015-2019, maka dapat dipastikan bahwa Goal dan Target sudah memiliki program yang akan digunakan untuk mencapai target dan goal tersebut; sudah pasti tersedia pendanaan dalam 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam UU APBN dan ada mekanisme *monitoring* dari Pusat sampai di daerah, karena mekanisme tersebut sudah “*embedded*” di dalam proses perencanaan nasional.

Untuk menunjukkan tingkat kesiapan sejak awal tersebut kepada masyarakat global, Indonesia melakukan *Side Event* dalam acara UNGA September tahun 2016. *Side Event* dihadiri oleh Wakil Presiden RI dan Kepala UNDP Helen Clark. Dalam pelaksanaan *Side Event* tersebut ditunjukkan beberapa kesiapan Indonesia antara lain:

“Pemerintah Indonesia telah selaraskan Agenda 2030 dalam RPJMN dan membangun matriks yang sesuaikan SDG (*localizing* SDGs) dengan menyusun Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah”. Dalam acara yang menjadi pembelajaran bagi Negara seperti Meksiko dan Nigeria, Indonesia dinilai oleh PBB cukup berhasil melaksanakan MDGs karena: (i) komitmen pimpinan nasional dan adanya dasar hukum yang kuat; pengarusutamaan MDGs ke dalam agenda pembangunan nasional; dan adanya sinergi dan komunikasi serta peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan; serta *monitoring*, evaluasi dan pelaporan secara regular”. Selanjutnya, dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyatakan bahwa dengan kesiapannya, Indonesia sangat berpeluang besar untuk berhasil melaksanakan SDGs.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Side Event* SDGs Indonesia di New York, USA. [www.sdgsaindonesia.or.id](http://www.sdgsaindonesia.or.id)

**Penyusunan Rencana Aksi sebagai Instrumen penting untuk Koordinasi Nasional.** Meskipun *mainstreaming* SDGs ke dalam RPJMN 2015-2019 telah dilakukan, diperlukan suatu dokumen rencana yang dapat diacu semua parapihak dan dijadikan dasar untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan *review/evaluasi*. Sehubungan dengan itu, sejak Deklarasi SDGs bulan September 2015, atas penugasan Presiden dalam Sidang Kabinet bulan Desember 2015, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan sebagai koordinator pelaksanaan SDGs untuk melakukan:

- i. **Pembentukan Sekretariat SDGs.** Pembentukan Sekretariat SDGs untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan tidak membutuhkan waktu yang relatif lama, karena sejak proses *mainstreaming*, Kementerian PPN/Bappenas telah melibatkan Sekretariat MDGs. Pelibatan sejak awal sangat penting untuk melanjutkan mekanisme koordinasi yang sudah bagus dan agar ada kesinambungan target MDGs yang masih harus di "*carry-over*" ke SDGs (*unfinished targets*). Oleh Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat MDGs kemudian diubah menjadi Sekretariat SDGs, dengan komposisi staf dan menambah kompetensi yang belum dimiliki. Staf baru adalah yang menangani dimensi/pilar Ekonomi dan dimensi/pilar Lingkungan Hidup serta yang terkait dengan hubungan dengan *stakeholders* yang sekarang menjadi lebih luas dan lebih signifikan perannya. Sekretariat SDGs ini pula yang mempersiapkan *Side Event* SDGs Indonesia pada September 2016 lalu; dan Sekretariat ini pula yang langsung melakukan penelaahan dan pembahasan untuk menyiapkan Rencana Aksi Nasional SDG, menyiapkan Perpres SDGs serta menyusun Metadata SDGs setelah proposal indikator SDGs diterbitkan oleh UNSTAT pada bulan Maret 2016. Peran besar Sekretariat secara horizontal melakukan komunikasi dan pelibatan *stakeholders* yang tergabung dalam 4 *platform* sebagaimana akan dijelaskan dalam Bab 14 dan 16, dan melakukan

komunikasi dan koordinasi secara vertikal dengan Pemda dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD SDGs. Pada saat ini Sekretariat telah menyelesaikan VNR 2017 yang telah disampaikan dalam pertemuan HLPF pada bulan Juli 2017.

- ii. **Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.** Berlandaskan pada target pembangunan, program dan K/L pelaksana yang sudah tercantum di dalam RPJMN 2015-2019, dan *update* yang sudah ada di dalam RKP 2016, dan 2017 maka penyusunan Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB/SDGs) dapat dilakukan. Berdasarkan draft tersebut, kemudian dilakukan pembahasan dengan K/L yang akan menjadi anggota Tim Pelaksana SDGs, terutama untuk melakukan *update* dengan beberapa agenda global sektoral, serta perkembangan yang ada dalam pelaksanaan RKP 2016 dan RKP 2017. Rencana Aksi Nasional TPB ini sedang dalam proses final. Namun demikian, komponen pokok RAN TPB ini sudah menjadi Lampiran dari Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Adanya Rencana Aksi Nasional dan Daerah akan menjadi landasan untuk koordinasi di tingkat pusat dengan para *stakeholders* nasional, dan dengan Pemda bersama *stakeholders* daerah.
- iii. **Review Kesiapan Indikator dan Pemantauannya.** Sambil menunggu selesainya penyusunan Indikator SDGs oleh PBB, Sekretariat melakukan penyisiran indikator dalam RPJMN 2015-2019 dan menyandingkan dengan draft Indikator SDGs. Penyusunan Metadata SDGs baru dapat dilakukan secara intensif sejak keluarnya Indikator SDGs pada bulan Maret 2016. Dari penyusunan Metadata SDGs, Indonesia memiliki: (i) 85 indikator yang sudah sama/sesuai dengan indikator global; (ii) 71 Indikator masih berupa *proxy* indikator global; (iii) 85



Indikator perlu dikembangkan (Sekretariat SDGs).<sup>23</sup> Dengan adanya indikator yang sudah siap tersebut, maka Rencana Aksi Nasional SDGs sudah dapat dilaksanakan dan dipantau dengan baik. Mekanisme pemantauan dilakukan berlandaskan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sehingga pemantauan dapat dilakukan tidak hanya di tingkat Pusat/nasional, namun juga di 34 provinsi/*sub national*.

## **Pemetaan Awal SDGs Indonesia**

Pada tahun 2015 SDSN mengeluarkan *SDGs Dashboard*, dan menggunakan data yang ada dari Negara-negara,<sup>24</sup> maka status SDGs di setiap Negara dapat diketahui. Menurut SDSN, Indonesia memiliki skor 54,4 (0-100), sedikit lebih rendah dari rata-rata Asia dengan skor sebesar 54,6, meskipun dalam hal skor setiap Goal, Indonesia memiliki skor yang lebih tinggi pada 8 *Goals* yaitu: Goal 4. Pendidikan; Goal 5. Gender; Goal 7. Energi; Goal 8 Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak; Goal 12; Goal 13. Perubahan Iklim, Goal 14. Ekosistem Lautan; dan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Sementara skor rata-rata dunia adalah sebesar 58,4.

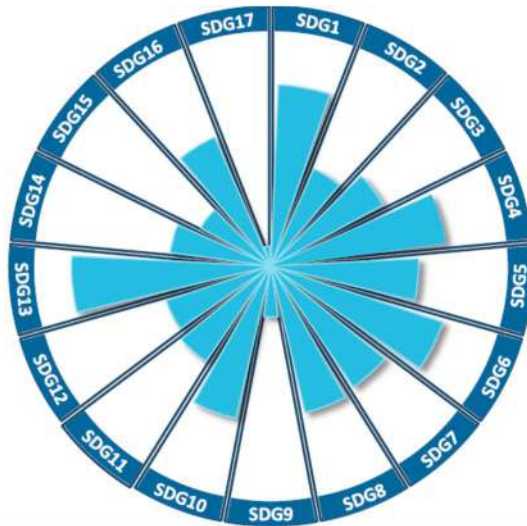
Apabila, melihat pencapaian masing-masing Goal, maka Indonesia mencapai skor tertinggi pada Goal 13. Perubahan Iklim, Goal 1. Penurunan Kemiskinan; Goal 4. Pendidikan Berkualitas dan Goal 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (Gambar 5.1).

---

<sup>23</sup> Dalam Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, BPS, 2016

<sup>24</sup> Data dari Indonesia yang digunakan adalah data IFLS dari Surveymeter.

SDGs		Indonesia	Rata-rata ASEAN
1	Tanpa Kemiskinan	76,87	83,7
2	Tanpa Kelaparan	44,82	47,1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	53,79	61,24
4	Pendidikan Berkualitas	73,83	70,06
5	Kesetaraan Gender	62,09	55,76
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	79,10	80,97
7	Energi Bersih dan Terjangkau	61,78	58,49
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	63,71	59,55
9	Industri, Inovasi dan Terstruktur	21,52	24,27
10	Berkurangnya Kesenjangan	66,18	68,64
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	48,80	56,28
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	46,41	39,86
13	Penanganan Perubahan Iklim	83,96	69,84
14	Ekosistem Lautan	42,80	37,29
15	Ekosistem Daratan	33,65	46,22
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	59,51	56,37
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	8,57	21,18
<b>SDGs Keseluruhan</b>		<b>54,4</b>	<b>54,6</b>



**Gambar 5.1 Pencapaian Skor SDGs Indonesia menurut SDSN**

Sementara itu, berdasarkan atas RAN SDGs, pada saat ini, Indonesia telah menyusun VNR 2017. Sesuai dengan tema dan komponen Goal yang perlu dilaporkan dalam VNR 2017, serta indikator yang sudah siap digunakan, Indonesia memiliki trend yang bagus dalam

pencapaian SDGs dan perkembangan dalam tahun 2016-2017 menunjukkan adanya kemajuan di beberapa *goals* dan target yang merupakan kelanjutan MDGs atau pilar sosial dalam SDGs; sementara itu, masih mengupayakan pelaksanaan *goals* dalam pilar ekonomi dan lingkungan agar selaras dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (Kotak 5.1).

Langkah selanjutnya adalah melakukan finalisasi RAN SDGs dan melakukan koordinasi untuk penyusunan RAD SDGs, untuk menjamin bahwa pelaksanaan SDGs sampai ke daerah dan sehingga ada mekanisme untuk menjangkau seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan prinsip SDGs “*no one left behind*”. Proses pemantauan pelaksanaan SDGs setiap tahunnya akan mengikuti mekanisme pemantauan pembangunan nasional sesuai Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Berdasarkan proses pemantauan dan hasilnya ini, maka Indonesia akan dapat menyusun Laporan pelaksanaan SDGs dan sekaligus menjadi bahan VNR yang disampaikan dalam forum HLPF pada bulan Juli dan Sidang Umum PBB (UNGA) pada bulan September setiap tahunnya.

#### **Kotak 5.1 Petikan *Summary* dari *Voluntary National Review SDGs 2017***

Tema VNR SDGs pada tahun 2017 adalah “*Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world*”. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia berhasil menurunkan kemiskinan dari 17,75 persen (2006) menjadi 10,7 persen (2016). Namun meskipun telah menurun drastis, secara absolut jumlah kemiskinan Indonesia masih mencapai 22,76 juta penduduk. Sejalan dengan tema VNR, hal itu adalah tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu bagaimana menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, serta pangan dan gizi. Melalui ketercukupan kebutuhan dasar dalam berbagai dimensi, maka *endowment* manusia tersebut akan menjadi sarana bagi mereka untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) serta mencegah kerentanan penduduk untuk jatuh miskin. Dukungan peningkatan kesempatan ekonomi dan penghidupan berkelanjutan terutama melalui peningkatan usaha mikro dan kecil baik di sektor primer pertanian, perikanan maupun pengolahan, penyerapan tenaga kerja melalui pembangunan industri inklusif, serta melalui teknologi ataupun inovasi yang kini sangat berkembang.

Indonesia melakukan terobosan dalam pelayanan kesehatan dengan *universal health coverage* melalui program kebijakan jaminan kesehatan nasional. Proporsi penduduk penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2016 mencapai 66,4 persen, meningkat dari 51,4 persen di tahun 2014. Disamping meningkat cepat, program jaminan kesehatan tersebut telah menjangkau lebih dari 160 juta penduduk atau termasuk terbesar di dunia. Program khusus untuk mengatasi kematian ibu melahirkan yang masih tinggi di Indonesia yaitu jaminan persalinan, juga diintegrasikan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan tersebut.

Program lain untuk mengatasi *intergenerational poverty* yaitu melalui *conditional cash transfer* pada keluarga miskin dan rentan yang mencakup pendidikan anak, kesehatan ibu dan balita, serta pelayanan bagi penyandang disabilitas dan lansia di atas 70 tahun. Program Keluarga Harapan tersebut pada tahun 2016 mencapai 6 juta keluarga, meningkat hampir 6 kali lipat dari 1,1 juta keluarga pada tahun 2011. Indonesia juga melakukan inovasi untuk mengatasi tantangan pangan dan gizi diantaranya melalui Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan fokus 1000 hari pertama kehidupan (HPK), Indonesia menjadi salah satu negara pertama dari 59 Negara dalam *Scaling Up Nutrition Global*, lalu menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional dan Daerah, serta membuat Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA).

Indonesia mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, tol, jalur kereta api, pelabuhan dan bandara, terutama di kawasan timur untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. mengurangi beban pengeluaran penduduk berpendapatan rendah dan miskin. Pembangunan infrastruktur juga menjadi landasan untuk mengembangkan industri pada pembentukan 14 Kawasan Industri (KI) di kawasan timur yang berpotensi menyerap 962.800 tenaga kerja. Hingga tahun 2016, tiga kawasan industri sudah beroperasi. Pengembangan industri Indonesia difokuskan pada industri padat karya maupun industri yang mengolah sumber daya lokal.

Disamping kaya dengan sumber daya alam darat, sumber daya kelautan Indonesia juga sangat kaya sebab memiliki kawasan perairan terluas dunia. Hingga tahun 2016 telah dicapai kawasan konservasi perairan seluas 17,9 juta hektar yang terdiri atas 165 *marine protected area* (MPA) dari target 20 juta hektar tahun 2020. Indonesia juga fokus mengelola MPA guna memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan ekonomi kawasan-kawasan konservasi tersebut dilakukan melalui kegiatan perikanan tangkap, budidaya, pariwisata bahari, dan penelitian serta pendidikan. Indonesia juga secara tegas memberantas perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU Fishing*).

Beberapa tantangan besar dalam pelaksanaan SDGs adalah bekerjasama mensinergikan potensi pemerintah, CSOs, bisnis dan filantropi, serta akademisi dan pakar. Membangun rasa saling percaya, keterbukaan dan kerjasama para stakeholder untuk menjalankan prinsip inklusif, dibutuhkan proses dan waktu yang memadai. Menjalankan prinsip *no one left behind* di negara dengan belasan ribu pulau besar kecil dengan berbagai keragaman suku, budaya, bahas, agama, bukan hanya dari sisi pelaksanaan SDGs yang menjadi tantangan, memproduksi data untuk menjamin prinsip tersebut pun sudah menjadi tantangan besar.

Sumber: *Voluntary National Review 2017: "Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World"*

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

**BAGIAN III**  
**FOKUS AREA MENURUT**  
**PILAR SOSIAL – EKONOMI -**  
**LINGKUNGAN DAN**  
**TATA KELOLA**

---

## **Pembangunan Manusia**

Pembangunan Manusia di dalam pembangunan berkelanjutan memegang peran mendasar tidak hanya karena sumber daya manusia yang memiliki kesehatan, terpenuhi kebutuhan dasarnya serta terbangun kapabilitasnya; namun di dalam kapabilitas sumber daya manusia perlu adanya transformasi mendasar tentang tanggungjawabnya terhadap alam. Di dalam Bab ini akan diuraikan beberapa pendekatan pembangunan sumber daya manusia menurut pendekatan modal manusia dan pembangunan kapabilitas; menurut pendekatan siklus kehidupan serta pendekatan terhadap 1.000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya diuraikan tentang pembangunan manusia di dalam SDGs dan bagian terakhir membahas tentang bagaimana Indonesia menyikapi pembangunan manusia saat ini.

### **6.1 Berbagai Pendekatan Pembangunan Manusia**

#### **Modal Manusia dan Pembangunan Kapabilitas**

Realisasi SDGs yang multi-dimensi memerlukan investasi fisik maupun non-fisik. Investasi yang terpenting adalah investasi dalam pembangunan sumber daya manusia. Sama halnya dengan investasi yang bersifat fisik, jalan, jembatan, bandar udara, pelabuhan irigasi dll, investasi sumber daya manusia mutlak dilakukan sejak awal dan di segala lini. Termasuk ke dalam investasi sumber daya manusia adalah yang bersifat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Investasi

sumber daya manusia seringkali dikenal sebagai upaya untuk meningkatkan modal manusia (*human capital*). Investasi modal manusia bersifat kumulatif, yang harus dipupuk sejak awal dan berlangsung terus menerus.

Investasi sumber daya manusia tidak hanya di bidang pendidikan dan kesehatan, tetapi juga meliputi bagaimana manusia dibentuk dan dididik sehingga berperilaku produktif melalui suatu proses yang panjang serta kumulatif. Amartya Sen dalam berbagai tulisan dan pemikirannya menuangkan konsep pembangunan sumber daya manusia berbeda dengan pendekatan tradisional. Dalam pendekatan tradisional, sumber daya manusia dipandang sebatas salah satu input dalam faktor produksi, disamping modal dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan perekonomian. Manusia diposisikan sebagai pelaku pembangunan saja.

Dalam pendekatan kapabilitas dari Sen, manusia dilihat tidak sebatas pelaku pembangunan, tetapi juga sebagai penikmat hasil pembangunan, utamanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan (*well-being*) seseorang dapat dilihat diantaranya pada kualitas hidup individu itu sendiri. Seseorang yang memiliki kesehatan yang baik, bahagia, dapat diasosiasikan dengan memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Definisi kesejahteraan sendiri dalam hal ini tentunya bukan hanya yang bersifat material seperti pendapatan, tetapi juga meliputi sesuatu yang immaterial seperti kesehatan yang baik serta rasa bahagia.

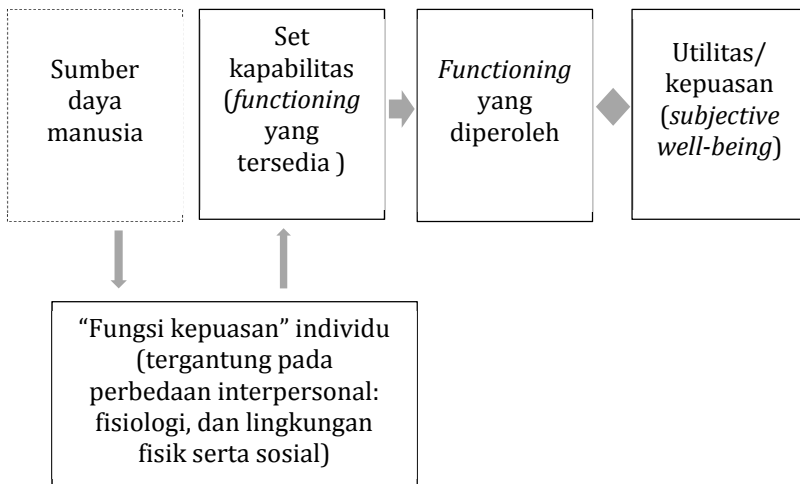
Pendekatan kapabilitas (*Capability Approach*) dari Sen menekankan pada apa yang disebut sebagai peningkatan kefungisian (*functionings*) yang dapat dilakukan seorang individu. Menurut Sen, *functionings* dapat berupa hal-hal mendasar ~ seperti mendapatkan nutrisi yang baik, tubuh yang sehat, terhindar dari kematian prematur dan sebagainya ~ hingga sesuatu yang lebih holistik seperti halnya kebahagiaan (Sen, 1992). Tidak ada batasan yang definitif mengenai



kefungsian dasar (*basic functioning*) dari individu, karena sesungguhnya hal tersebut sangat beragam dan dapat berbeda antar individu.

Sen melihat bahwa kefungsian tersebut melekat pada diri seseorang dan lebih lanjut ia berpendapat bahwa hidup merupakan sekumpulan kefungsian (*set of functionings*), dimana *functionings* terdiri dari dua elemen penting, yaitu “menjadi” (*being*) dan melakukan sesuatu (*doing*). Karena kapabilitas merupakan sekumpulan *functioning* yang dicapai, maka sesungguhnya meningkatkan kualitas hidup dicapai dengan cara meningkatkan kapabilitas dari kefungsian dari setiap individu. Dengan demikian, kapabilitas mencerminkan kebebasan dan kemampuan individu untuk mencapai kesejahteraan.

Pendekatan Kapabilitas tersebut digunakan Sen untuk menganalisis ketimpangan pembangunan dan kemiskinan. Sen berpendapat bahwa tujuan dari pembangunan adalah upaya peningkatan kapabilitas (*expansion of capability*) dari individu-individu suatu masyarakat.



Sumber: Sen, 1992

**Gambar 6.1 Pendekatan Kapabilitas dalam Meningkatkan Modal Manusia**

Jika *functionings* adalah melekat pada diri setiap individu, maka tantangan saat ini adalah bagaimana memberdayakan hingga batas maksimal (*leveraging*) modal manusia. Hal penting lainnya yang ditekankan oleh Sen dalam pembangunan manusia adalah mengenai *agency* (Comim, Qizilbash dan Alkire, 2008). Dalam pandangan Sen, seorang *agent* adalah “yang bertindak dan membawa perubahan”. Dalam konteks kapabilitas dan pembangunan sumber daya manusia, maka manusia yang memiliki kapabilitas sekaligus adalah sebagai *agent* dari pembangunan.

Pendekatan lain yang digunakan Sen dalam mengkaji pembangunan manusia adalah akumulasi modal manusia. Akumulasi merupakan hasil dari proses penambahan secara kontinu. Seseorang yang secara kontinu menempuh pendidikan, baik formal, non-formal maupun informal, akan dapat mengakumulasi pengetahuannya. Akumulasi dari pengetahuan tersebut yang kemudian akan dapat meningkatkan keterampilannya di tempat kerja atau dengan kata lain, produktivitasnya tinggi. Semakin tinggi produktivitas seseorang, berarti semakin banyak output kerja yang dapat dihasilkan, sehingga upah kerja atau kesejahteraanpun lebih tinggi.

Untuk membentuk modal manusia yang berkualitas diperlukan infrastruktur dan proses yang berkelanjutan dari berbagai aspek terkait, baik pendidikan, kesehatan, serta aspek penunjang lainnya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan terkait pembangunan modal manusia haruslah merupakan kebijakan yang tidak berhenti dan terputus.

### **Pendekatan Siklus Kehidupan (*Life Cycle Approach*) Terhadap Pembangunan Manusia**

Peningkatan kapabilitas sebagaimana dibahas di atas, melekat pada diri manusia dimana manusia sendiri mengalami tumbuh kembang selama siklus kehidupannya. Ide Sen mengenai peningkatan kapabilitas (*capability expansion*) adalah tepat, karena potensi yang

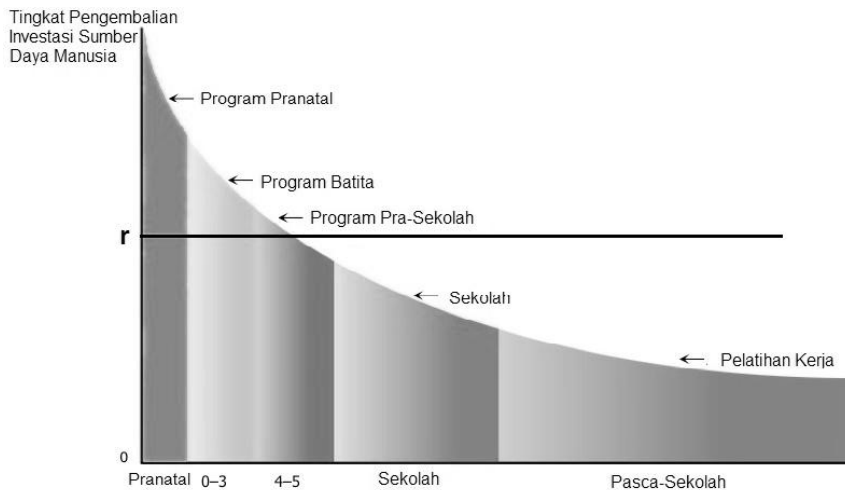
dimiliki manusia adalah tidak terbatas dan pengembangan kapabilitasnya dapat dilakukan hingga usia lanjut. Oleh karenanya, pendekatan investasi modal manusia haruslah meliputi fase keseluruhan hidup manusia (*over the life cycle*).

Senada dengan Sen, Sachs (2015) memandang proses akumulasi sebagai salah satu elemen terpenting dalam pembangunan manusia. Karena akumulasi pembangunan manusia merupakan proses jangka panjang, maka seyogyanya perhatian akan proses tersebut tidak hanya dimulai saat individu-individu tersebut tergolong ke dalam usia siap kerja atau produktif, namun sejak awal kehidupannya dimulai. Oleh karena itu, sejalan dengan pentingnya akumulasi, Sachs dalam kesempatan yang sama juga menekankan bahwa gagasan penting kedua dalam pembangunan manusia adalah siklus hidup individu (*individual life cycle*). Melalui hal tersebut, manusia dipandang secara utuh sepanjang hidupnya. Mempersiapkan generasi yang baik tidak dapat dilakukan dengan melihat individu pada satu titik waktu saja, atau cukup dengan pendidikan saja, melainkan keseluruhan siklus hidupnya (*life cycle*) meliputi pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya.

Kehidupan seorang manusia dimulai sejak berada di dalam kandungan rahim ibunya. Sejak masa tersebut serangkaian proses tumbuh kembang dilalui hingga ia dilahirkan, melewati masa remaja, dewasa dan akhirnya lanjut usia. Proses tersebut merupakan siklus hidup yang hakiki pada setiap individu namun dapat berbeda, sehingga dampaknya pun dapat tidak sama bagi setiap individu. Dapat melalui proses tumbuh kembang dengan baik dan menjalani setiap fase kehidupan merupakan kesempatan yang semestinya dapat diraih oleh setiap individu. Namun berbagai hambatan mencegah sebagian individu untuk dapat melewati fase tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Sebagai contoh, di negara-negara di kawasan Sub-Sahara Afrika, tercatat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) sangat tinggi. Angola misalnya pada tahun 2015 menjadi negara dengan



Sumber: Heckman, 2006 dalam Sachs, 2015

**Gambar 6.2 Rates of return terhadap Investasi Modal Manusia**

Sachs (2015) menekankan pentingnya pendidikan usia dini tidak hanya untuk mengasah skill dasar dan sosial sebagai manusia, tetapi juga merupakan fase terpenting dari terbentuknya otak manusia. Pengembangan kemampuan kognitif seorang individu dimulai sejak usia dini melalui proses pendidikan dan kasih sayang yang diterimanya dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Pendidikan formal sebagaimana yang kita kenal seyogyanya dimulai sejak sebelum masa pendidikan dasar melalui PAUD. Sementara pendidikan di tingkat SD kita ketahui merupakan *basic needs* dan *human rights* dari setiap individu yang menjadi tujuan MDG 2.

*Returns* atau tingkat pengembalian terhadap tahapan pendidikan sebagaimana yang diperlihatkan ekonom terkenal Heckman dalam Sachs (2015) menunjukkan *returns* tertinggi terjadi untuk jenjang program PAUD, kemudian pendidikan formal dasar, menengah, dan

---

AKB tertinggi, yaitu 180. kematian per 1000 kelahiran. Hal tersebut tentunya dapat diterjemahkan sebagai hilangnya kesempatan seorang manusia untuk hidup, melalui proses tumbuh kembang dan menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi dirinya.

tinggi serta pelatihan dengan tingkat yang semakin menurun (Gambar 6.2). Gambaran ini dikenal sebagai *rate of return* dari investasi modal manusia yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan yang dicapai seseorang.

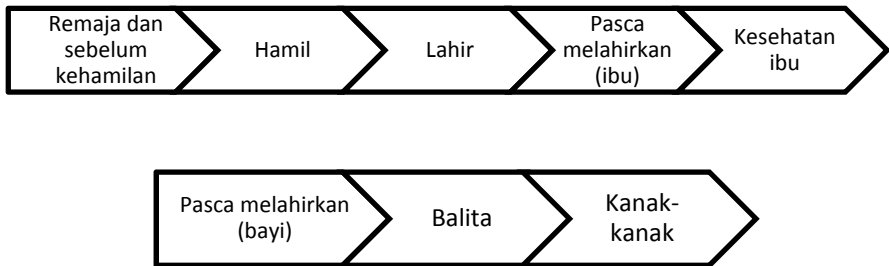
Peran pemerintah menjadi kunci melalui penyediaan program-program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah termasuk pendanaannya bagi anak-anak dari keluarga miskin. Penting bagi semua anak-anak mendapatkan akses pendidikan ini sejak usia dini sampai dengan minimal pendidikan menengah untuk semua kelompok keluarga. Untuk Indonesia apabila di tahun 2000an pendidikan wajib cukup sampai dengan tingkat sekolah menengah pertama (Wajar Dikdas 9 tahun), dengan kemajuan teknologi dan tuntutan perkembangan ekonomi yang begitu cepat, maka tingkat pendidikan wajib minimal yang ingin dicapai adalah tingkat pendidikan menengah atas (12 tahun). Termasuk prioritas yang semakin penting ke depan adalah pengembangan pendidikan dan kesempatan mengenyam pendidikan sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kunci bagi terjadinya inovasi dan penguasaan IPTEK, suatu prasyarat mutlak bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa.

### **Pendekatan 1.000 Hari Pertama Kehidupan dan *Continuum of Care***

Relevan dengan pendekatan siklus hidup sebagaimana dibahas di atas adalah pentingnya investasi pada 1.000 hari pertama kehidupan individu khususnya di bidang kesehatan. Melalui pendekatan ini, kondisi janin sejak dalam kandungan ibu hingga lahir dan berusia dua tahun betul-betul mendapat perhatian agar perkembangannya optimal.

Periode sejak calon bayi dalam kandungan ibu hingga 1.000 hari pertama sejak dilahirkan merupakan momen sangat berharga yang akan mempengaruhi proses tumbuh kembang dan kemampuannya

kelak dalam berbagai aspek kehidupan. Makanan selama kehamilan dapat mempengaruhi fungsi memori, konsentrasi, pengambilan keputusan, intelektual, mood, dan emosi seorang anak di kemudian hari. Adapun jika seseorang mengalami kekurangan gizi selama periode 1000 pertama hari kehidupannya, maka ia memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi. Misalnya, kurangnya nutrisi pada otak menyebabkan rendahnya intelegensia. Kekurangan nutrisi merupakan penyebab masalah kurangnya tinggi badan (*stunting*) serta anak yang bersangkutan akan sangat rentan terhadap penyakit tidak menular.



**Gambar 6.3 Proses *Continuum of Care* Kesehatan Individu**

Pentingnya memandang manusia secara utuh sejak dini, karena tahap awal perkembangannya merupakan momen paling penting yang akan menentukan kehidupannya kelak. Anak yang memperoleh nutrisi cukup akan melalui proses tumbuh kembang dengan sempurna. Sebagai contoh dua indikator dari kurangnya nutrisi pada anak adalah berat badan lebih rendah dari anak-anak seusianya atau *stunting*. Anak yang tumbuh kembang dengan sempurna dapat lebih mudah menerima dan mencerna berbagai pengetahuan sesuai dengan usianya. Hal ini merupakan modal yang sangat berguna bagi kehidupannya kelak secara lebih produktif.

Oleh karena itu sebagai bagian terintegrasi kegiatan kesehatan preventif dan pola hidup sehat selama 1000 Hari Pertama Kehidupan menghendaki diterapkannya aktivitas inti oleh Ibu dan anak yang terdiri dari pemenuhan gizi selama Ibu hamil dan anak sampai dengan usia Balita. Pemberian imunisasi dasar serta ASI hingga usia 2 tahun. Makanan tambahan ASI agar anak mendapatkan gizi dan nutrisi yang cukup terutama anak Balita. Tidak kalah pentingnya adalah lingkungan tumbuh kembang anak Balita di rumah maupun lingkungan sekitar yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak. Termasuk stimulasi anak dengan mengikutsertakannya di kegiatan PAUD.

Disamping perhatian terhadap tumbuh kembang anak sejak usia dini, hal yang tidak boleh luput dari perhatian mengenai pentingnya kesehatan individu secara paripurna adalah bahwa beberapa gangguan kesehatan dapat diturunkan secara genetik. Jika hal tersebut terjadi, maka hambatan dalam investasi pembangunan manusia akan melampaui lebih dari satu generasi, diturunkan ke generasi selanjutnya. Perhatian terhadap prioritas pembangunan bidang kesehatan lainnya adalah pada investasi perilaku dan pola hidup sehat serta upaya preventif, dan tidak semata-mata yang bersifat kuratif atau penyembuhan dari suatu penyakit. Dengan semakin sejahtera, insidens penyakit menular kecuali untuk beberapa penyakit semakin turun, di lain pihak insidens penyakit tidak menular (*non-communicable diseases*) semakin meningkat. Seringkali fenomena ini dikenal sebagai *double disease burden*.

Peran strategis pemerintah adalah dalam memastikan ketersediaan sarana prasarana kesehatan, terutama kesehatan dasar dan keterjangkauan masyarakat miskin terhadap akses pelayanan kesehatan dasar. Dua prasyarat penting yang telah dimiliki Indonesia, namun perlu penyempurnaan adalah Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar serta Sistem Asuransi Kesehatan *universal coverage* dengan tenggat waktu tahun 2019. Termasuk ke dalam prioritas terkait

dengan pembangunan berkelanjutan adalah memutus lingkaran setan (*vicious circle*) kemiskinan dan kesehatan, dan sebaliknya. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan adalah pemenuhan derajat kesehatan dasar masyarakat terutama masyarakat miskin sebagai pemutus lingkaran setan (*virtuous cycle*) kesehatan dengan kemiskinan.

## **6.2 Pembangunan Manusia dalam SDGs dan Goals yang Terkait**

### **Pembangunan Manusia dalam SDGs**

Terdapat perbedaan mendasar antara pembangunan manusia dalam MDGs dengan SDGs. *Human development* dalam MDGs berisi agenda-agenda untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan serta kondisi untuk kesetaraan dalam pelaksanaan pembangunan, serta capaian kesejahteraan, baik melalui mendapatkan pekerjaan (tidak menganggur) maupun pendapatan yang memadai untuk hidup layak dan dapat berkarya. Hal ini tercermin dalam berbagai tujuan dari MDGs. Penekanan pembangunan manusia melalui aspek pendidikan dan kesehatan adalah sebagaimana yang dijelaskan di bagian terdahulu.

Manusia merupakan “*center/pusat*” pembangunan berkelanjutan, karena tujuan akhir/*ultimate goal* pembangunan berkelanjutan adalah “*human wellbeing*” atau manusia yang sejahtera. Tujuan akhir akan dapat dicapai kalau manusia dapat “memperlakukan” bumi sesuai dengan kemampuannya untuk mendukung, menghidupi dan menopang kehidupan manusia saat ini dan generasi mendatang. Sehubungan dengan itu, pembangunan manusia di dalam SDGs adalah untuk membangun manusia yang menyadari dirinya adalah bagian penting dan penentu dari siklus kehidupan yang ada di bumi/planet ini; manusia yang memiliki hak untuk memanfaatkan alam dan seisinya sekaligus memiliki kesadaran dan kewajiban untuk menjaga



bahwa “tingkat dan cara” pemanfaatan tersebut akan menentukan kualitas kehidupan manusia itu sendiri dan generasi selanjutnya.

Keterkaitan antara tujuan di bidang pendidikan dan kesehatan dengan tujuan SDGs lainnya atau keterkaitan antar tujuan dan target dari SDGs merupakan ciri pembeda dengan MDGs. Apabila MDGs fokus secara tersendiri kepada masing-masing tujuan yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan, misalnya maka dalam SDGs intervensi kebijakan dan fokus kegiatan sudah saling memperhatikan keterkaitan antar tujuan. Misalnya untuk meningkatkan pencapaian tingkat kesehatan masyarakat, maka investasi dalam infrastruktur dasar mendapatkan perhatian yang tidak kalah pentingnya. Infrastruktur dasar termasuk di dalam air bersih, sanitasi yang layak, listrik, jalan dan komunikasi akan sangat mendukung akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Demikian halnya keterkaitan antara infrastruktur dasar dengan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan.

Sementara itu, di dalam SDGs, pembangunan manusia selain melanjutkan tujuan-tujuan di atas, juga diisi dengan rasa tanggungjawab terhadap alam, berperan aktif dalam menjaga alam dan melakukan kegiatan sosial dan ekonominya secara bertanggungjawab dengan tidak merusak alam dan seisinya. Apabila dalam MDGs peningkatan kesejahteraan berpusat pada diri orang per orang, maka dalam SDGs pembangunan manusia dituntut untuk dapat menciptakan masyarakat yang berkualitas secara individu/perorangan, memiliki “*mind set*” ramah lingkungan, serta dituntut berlaku aktif melalui berbagai dimensi pembangunan yang tercermin dalam tujuan-tujuan di SDGs. Peningkatan kualitas manusia di dalam SDGs, ditujukan agar manusia memiliki kemampuan pengetahuan, keahlian/*skill* untuk berdaya saing dan menguasai teknologi yang dapat digunakan untuk memanfaatkan alam secara efisien dan bertanggungjawab, sehingga kemampuan alam dan sumber daya di dalamnya akan cukup untuk menopang kehidupan

saat ini dan kehidupan generasi mendatang. Perbedaan signifikan antara pembangunan manusia dalam MDGs dengan pembangunan manusia dalam SDGs adalah adanya hubungan *reciprocal dan cyclical* antara manusia dengan alam.

SDGs menuntut perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Berdasarkan hubungan siklus di atas, maka manusia yang dibangun dalam SDGs bukan hanya manusia yang mampu memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan kualitas diri sendiri. Perilaku manusia yang mendukung SDGs adalah yang dapat memanfaatkan alam dan sumber daya di dalamnya secara bertanggung jawab.

Secara teknis, hal ini tercermin dalam setiap Goal dari SDGs. Misalnya di dalam mengusahakan ketahanan pangan dan memberantas kelaparan, manusia dituntut untuk melakukannya melalui pertanian berkelanjutan. Demikian pula di dalam mengupayakan peningkatan akses energi yang berguna untuk mendukung peningkatan kesehatan, pendidikan dan upaya ekonomi (ketahanan pangan, industri, perluasan kesempatan kerja dll), maka manusia dituntut pula untuk menggunakan energi yang ramah lingkungan (menggunakan teknologi bersih dan energi yang efisien) serta memanfaatkan sumber daya energi yang terbarukan.

### ***Goals yang Terkait dengan Pembangunan Manusia di SDGs***

Di dalam SDGs, pembangunan manusia dicerminkan ke dalam: Goal 1. Tanpa Kemiskinan; Goal 2. Tanpa kelaparan; Goal 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Goal 4. Pendidikan Berkualitas; dan Goal 5. Kesetaraan Gender. *Goals* dalam pilar sosial ini sebagian besar adalah melanjutkan pelaksanaan MDGs dan khususnya menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih tersisa.

## Goal 1. Tanpa Kemiskinan

Goal 1-Tanpa Kemiskinan sebetulnya merupakan tujuan akhir dari semua *Goals* di dalam SDGs, namun juga menjadi prasyarat agar pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam mencapai tujuan ini, ukuran kemiskinan tidak hanya didasarkan pada kemiskinan berdasarkan dimensi pendapatan, namun juga pengukuran kemiskinan berdasar akses terhadap layanan dasar serta akses sumber daya produktif lainnya. Berbeda dengan MDGs, yang menggunakan indikator global (USD 1/kapita/hari), di dalam SDGs tidak hanya digunakan ukuran tingkat kemiskinan internasional (USD 1.25/kapita/hari), namun juga terdapat indikator dengan menggunakan garis kemiskinan nasional. Selain itu, kelompok paling miskin dan rentan mendapat perhatian pula dan menjadi salah satu target dengan indikator tersendiri. Secara lengkap tujuan dan isi Target untuk Goal 1 disampaikan dalam Tabel 6.1.

**Tabel 6.1 Target untuk Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan**

Target	Isi Target
1.1.	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.
1.2.	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
Cara pelaksanaan	
1.a.	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara yang berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
1.b.	Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

## Goal 2. Tanpa Kelaparan

Tujuan penghentian kelaparan dalam SDGs tidak hanya menyangkut penyediaan pangan, namun juga proses penyediaan pangan melalui ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta pertanian berkelanjutan. Penyediaan pangan secara pertanian berkelanjutan merupakan bagian tidak terpisahkan, karena tantangan terbesar dari pembangunan adalah penyediaan pangan untuk penduduk yang pada tahun 2030 nanti akan mencapai jumlah 9 miliar di seluruh dunia. Tanpa pola pengamanan ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi melalui pertanian berkelanjutan, maka dikhawatirkan jumlah lahan yang semakin menyempit untuk pertanian akan menghambat pencapaian Goal ini.

Perbaikan nutrisi juga sangat penting apabila dikaitkan dengan Goal kesehatan, khususnya untuk mencapai target *maternal mortality* dan *stunting* serta *child mortality*. Ketiga hal ini sangat penting tidak hanya untuk tujuan kesehatan, namun juga untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, sehingga menjadi modal pembangunan untuk mengisi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Secara lengkap keterkaitan antara Goal 2 dengan *goals* SDGs lainnya dapat dilihat dalam Kotak 6.1 berikut.

**Kotak 6.1 Keterkaitan Tujuan 2. Tanpa Kelaparan dengan Tujuan lain dalam SDGs**



Berdasarkan hasil penelitian Scientist yang terkumpul dalam ICSU, Goal 2. Tanpa Kelaparan sangat berpengaruh dan terkait dengan:

- a. SDGs-1 Tanpa Kemiskinan
- b. SDGs-3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- c. SDGs-5 Kesetaraan Gender
- d. SDGs-6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- e. SDGs-7 Energi Bersih dan Terjangkau
- f. SDGs-13 Penanganan Perubahan Iklim
- g. SDGs-15 Ekosistem Daratan

Sumber: *A Guide to SDGs Interactions: From Science to Implementations*, ICSU, 2017

Selanjutnya, Goal 2 ini memiliki 5 (lima) target dan 2 target untuk *means of implementation*. Secara lengkap target tersebut disampaikan dalam Tabel 6.2.

**Tabel 6.2 Target untuk Tujuan 2. Tanpa Kelaparan, Ketahanan Pangan, Nutrisi dan Pertanian Berkelanjutan**

Target	Isi Target
2.1.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli,

Target	Isi Target
	keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.
2.4.	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.
2.5	Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.
Cara pelaksanaan	
2.a	Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.
2.b	Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat <i>the Doha Development Round</i>
2.c.	Mengadopsi langkah- langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.

### Goal 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kehidupan sehat dan sejahtera merupakan lanjutan dan perluasan dari Tujuan dalam MDGs. Secara global, MDGs masih meninggalkan *unfinished business* dalam Goal ini, sehingga pelaksanaan Goal ini dalam SDGs menghadapi tantangan yang cukup besar, di sebagian besar Negara, maupun secara global. Bagi Indonesia, Goal kesehatan ini sangat penting karena Indonesia akan memiliki potensi bonus demografi pada tahun 2028-2030. Kalau kita gagal dalam melaksanakan Goal 3. Kesehatan dan Goal 4. Pendidikan, maka tidak tertutup kemungkinan bonus dapat menjadi beban demografi. Apabila ini terjadi maka akan dapat mengganggu pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana Goal lain dalam SDGs yang tidak berdiri sendiri, maka Goal 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera ini sangat terkait dengan Goal 2; Goal 8; Goal 11 dan Goal 13 (Kotak 6.2). Meskipun, dalam rangka membangun terwujudnya pembangunan berkelanjutan, pembangunan sumber daya manusia sehat dan cerdas serta memiliki toleransi dan tanggungjawab terhadap planet, merupakan faktor yang sangat penting untuk semua pilar dalam pembangunan berkelanjutan.

#### Kotak 6.2 Keterkaitan Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Tujuan lain dalam SDGs



Berdasarkan hasil penelitian Scientist yang terkumpul dalam ICSU, Goal 3. Tanpa Kelaparan sangat berpengaruh dan terkait dengan:

- SDGs-2 Tanpa Kelaparan
- SDGs-8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- SDGs-11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- SDGs-13 Penanganan Perubahan Iklim

Sumber: *A Guide to SDGs Interactions: From Science to Implementations*, ICSU, 2017

Dalam SDGs, langkah-langkah untuk membangun kehidupan Sehat dan Sejahtera secara lengkap disampaikan dalam Tabel 6.3. berikut ini.

**Tabel 6.3 Target untuk Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

<b>Target</b>	<b>Isi Target</b>
3.1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
3.6	Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
3.9.	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.
<b>Cara pelaksanaan</b>	
3.a	Memperkuat pelaksanaan the <i>Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.



Target	Isi Target
3.b.	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekecualaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.
3.c.	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.
3.d.	Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

#### Goal 4. Pendidikan Berkualitas

Pendidikan berkualitas juga merupakan Goal kelanjutan dan peningkatan dari MDGs. Untuk Indonesia, setelah berhasil meningkatkan rata-rata sekolah untuk SD, maka dalam era SDGs ini, Indonesia sudah meningkatkan untuk rata-rata sekolah sampai selesai sekolah menengah pertama. Bahkan terus mempersiapkan untuk rata-rata sekolah sampai sekolah lanjutan atas. Dalam Goal ini, pendidikan juga meluas kepada *life-long learning*, terutama untuk mempersiapkan SDM yang ahli (*skilled*) dan kreatif untuk menghadapi persaingan dalam dunia kerja yang semakin tinggi. Meskipun demikian, SDGs juga masih harus menyelesaikan tingkat buta huruf yang secara global masih dihadapi, terutama di kalangan dewasa.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dalam pendidikan ini juga termasuk pembekalan pengetahuan dan keahlian yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk perilaku ramah lingkungan, tanggung jawab terhadap alam serta apresiasi terhadap budaya dan kontribusi budaya dalam pembangunan berkelanjutan.

Hal ini sangat sejalan dengan Indonesia yang sangat beragam dan memiliki keragaman budaya lokal; yang merupakan bekal berharga bagi pembangunan berkelanjutan.

Perhatian besar dalam pendidikan ini juga pendidikan kepada kelompok masyarakat difabel; serta kesempatan seluas-luasnya pendidikan untuk semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat tradisional atau masyarakat adat. Secara lengkap Target yang ada dalam Goal 4. Pendidikan berkualitas, disampaikan dalam Tabel 6.4. berikut.

**Tabel 6.4 Target untuk Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas**

<b>Target</b>	<b>Isi Target</b>
4.1.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
4.4.	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
4.7	Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan

Target	Isi Target
	berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.
Cara pelaksanaan	
4.a.	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
4.b.	Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.
4.c.	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

## Goal 5. Kesetaraan Gender

Bagi Indonesia kesetaraan gender sudah cukup maju, apabila dibanding Negara-negara lain atau rata-rata global. Perempuan di Indonesia sudah tidak menghadapi perbedaan akses dan kesempatan di berbagai bidang, berkat perjuangan panjang sejak era peranan wanita, kemudian pemberdayaan perempuan. Dalam berbagai program di lapangan, peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan juga sudah berjalan dengan baik. Di sisi *outcome*, berbagai data pembangunan juga sudah dilakukan disagregasi laki-laki dan perempuan, sehingga bisa dipantau tingkat kesetaraan gender. Meskipun demikian, dengan terus bergantinya dekade dan generasi, maka momentum ini perlu terus dipelihara, khususnya karena

kesetaraan gender berperan besar dalam pelaksanaan setiap Goal dalam SDGs.

Sehubungan dengan itu, dalam kerangka SDGs, pencapaian Tujuan 5. Kesetaraan Gender merupakan bagian dari pembangunan manusia (pilar sosial), namun kesetaraan gender merupakan Tujuan yang memiliki peran lintas Pilar dan lintas Goal. *Gender mainstreaming* merupakan prinsip yang dianut dalam pelaksanaan semua sektor pembangunan dan berarti pelaksanaan semua Goal dalam SDGs. Target yang dicanangkan dalam SDGs adalah sebagaimana dalam Tabel 6.5 berikut ini.

**Tabel 6.5 Target untuk Tujuan 5. Kesetaraan Gender**

<b>Target</b>	<b>Isi Target</b>
5.1.	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
5.4.	Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil <i>review</i> dari konferensi- konferensi tersebut.

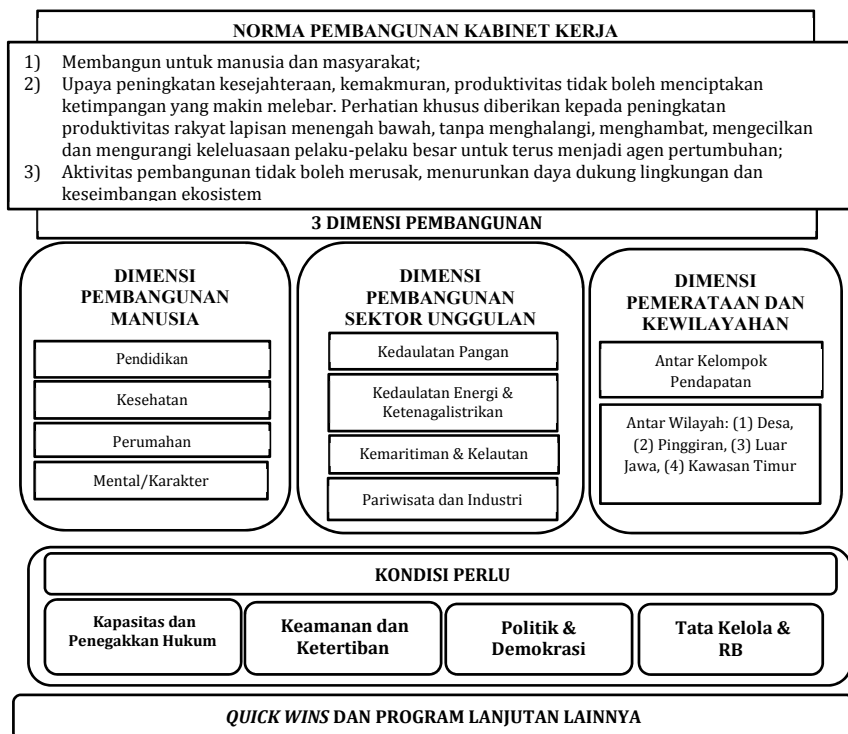
Target	Isi Target
Cara pelaksanaan	
5.a.	Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
5.b.	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
5.c.	Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

### **6.3 Bagaimana Indonesia Menyikapi Pembangunan Manusia untuk SDGs?**

#### **Pencerminan Pembangunan Manusia sebagai Pusat dan Orientasi Pembangunan Nasional**

Sejak awal Indonesia menyadari bahwa pembangunan manusia sangat penting tidak hanya sebagai pemanfaat hasil pembangunan, namun manusia merupakan penentu bahwa pembangunan berkelanjutan akan dapat dijalankan atau tidak. Hal ini secara eksplisit tercermin pada norma pertama Strategi Pembangunan Nasional, bahwa: Pembangunan nasional adalah membangun manusia dan masyarakat, yaitu manusia secara individu dan bagaimana manusia berperilaku, berhubungan dan bergaul dengan individu lainnya. Manusia yang dibangun adalah yang memiliki kualitas diri yang baik (sehat, cerdas), namun juga memiliki mental yang baik, mental bermasyarakat yang baik, yang mencerminkan sifat gotong royong bangsa Indonesia. Dalam melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, maka harus dijaga agar peningkatan produktivitas dan akses merata pada orang per orang dan tidak menciptakan kesenjangan yang semakin melebar.

Norma baru yang selaras dengan SDGs secara eksplisit dinyatakan bahwa aktivitas pembangunan adalah yang tidak merusak alam, menurunkan daya dukung lingkungan dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Norma pembangunan tersebut tercermin di dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional, yang tidak hanya meningkatkan manusia cerdas, sehat sehingga berdaya saing, namun juga memiliki mental dan karakter yang bertanggungjawab di segala aspek. Dalam kaitan ini dibutuhkan adanya revolusi mental, dan revolusi mental yang selaras dengan SDGs dan pembangunan berkelanjutan adalah: *mindset* ramah lingkungan (menyadari adanya hubungan siklus/timbal balik dengan alam) dan berperan aktif mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari (kehidupan sosial dan ekonomi).



Sumber: RPJMN 2015-2019

**Gambar 6.4 Strategi Pembangunan Nasional**

Selanjutnya prinsip *no one left behind*, tercermin pada dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, bahwa pembangunan nasional harus menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan menjangkau seluruh pelosok desa, pinggiran, luar Jawa dan Kawasan Timur yang saat ini sering tertinggal dalam berbagai aspek. Langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan prioritas, perhatian dan sumber daya yang lebih besar, sehingga kelompok tertinggal dan wilayah tertinggal ini akan dapat “mengejar ketertinggalan” dibanding anggota masyarakat lain yang sudah berada di atas rata-rata nasional.

### **Pencerminan dalam Kebijakan dan Langkah Konkrit**

Pembangunan manusia khususnya dalam pilar ini juga merupakan langkah untuk meningkatkan capaian pembangunan manusia yang telah diselesaikan dalam MDGs, serta upaya-upaya untuk terus meningkatkan kualitas *targeting* dan menjangkau semua warga negara Republik Indonesia. Dalam kebijakan sehari-hari, kehadiran di berbagai sektor merupakan pelaksanaan konkrit dari penempatan pembangunan manusia dan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Kebijakan ini sangat selaras dengan upaya untuk menjangkau setiap warganegara agar dapat menikmati dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Langkah-langkah konkrit lain juga terus dilakukan sekaligus untuk menyelesaikan Agenda MDGs yang tersisa (*unfinished business*) antara lain adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan khususnya berkaitan dengan prevalensi kurang gizi dan gizi buruk yang masih tinggi; mengurangi *stunting* dan obesitas serta perbaikan kebijakan ketahanan pangan dan gizi (Lihat Bab 2). Langkah lain yang sangat sejalan dengan upaya *no one left behind* adalah mengoptimalkan penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) rumah tangga miskin. Selanjutnya, langkah lain untuk tujuan pendidikan adalah program pendidikan gratis di seluruh daerah, meningkatkan program wajib

belajar menjadi 12 tahun serta meningkatkan kualitas belajar di seluruh daerah, khususnya daerah terpencil, terluar dan terdepan. Selanjutnya, langkah untuk menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan Ibu serta memerangi HIV/Aids, malaria dan penyakit menular lainnya juga terus dilakukan dalam SDGs ini sebagai kelanjutan dari pekerjaan rumah tersisa dari MDGs.

Namun demikian, pembangunan manusia sebagaimana diharapkan untuk mendukung SDGs, tidak akan terjadi dengan sendirinya hanya mengandalkan pada aspek akumulasi modal manusia melalui pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender saja. Terdapat tantangan tersendiri untuk mewujudkan pembangunan manusia dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan. Tantangan tersebut meliputi: (i) Kesadaran orang per orang; (ii) Internalisasi kesadaran dan perilaku di Rumah Tangga, Perusahaan, Pemerintah, Pemda dan LSM dan lembaga lain sebagai konsumen; (iii) Internalisasi ke dalam perilaku Rumah Tangga (UKM) dan Perusahaan sebagai aktor ekonomi/produsen; (iv) Landasan hukum dan instrumen untuk penegakan hukum; termasuk instrument fiskal (insentif-disinsentif untuk perilaku ramah lingkungan); (v) Konsistensi dalam penegakan aturan dan hukum dan sistem insentif-disinsentif; (vi) Pemantauan dan Evaluasi untuk penerapan yang dinamis sejalan dengan perkembangan “bumi” yang semakin “sesak” dari waktu ke waktu.



## Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau merupakan komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan dan SDGs, karena komponen ini adalah pengguna sumber daya alam dan lingkungan berlandaskan motif keuntungan, sehingga berpotensi menciptakan deplesi dan destruksi apabila tidak memperhatikan keseimbangan terhadap alam. Sangat penting bagi semua pihak untuk memahami Ekonomi Hijau dan bagaimana Ekonomi Hijau perlu dilaksanakan agar pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan. Bab ini mengulas pengertian Ekonomi Hijau; berbagai pandangan tentang Ekonomi Hijau khususnya berkaitan dengan pandangan yang meragukan Ekonomi Hijau; pembahasan mengenai manfaat Ekonomi Hijau untuk berbagai pihak, perkembangan pelaksanaannya di Indonesia, serta bagaimana *Goals* terkait dalam SDGs memberi panduan untuk penerapannya.

### 7.1 Pengertian Ekonomi Hijau

Definisi Ekonomi Hijau mengalami perkembangan dari waktu ke waktu; dari konsep “Ekonomi hijau yang membatasi hanya pada kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, dengan memberikan berbagai kebijakan standar, bagaimana menilai lingkungan secara ekonomi dan pemberian sanksi terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan” ke definisi yang lebih modern, yaitu “mendorong pelaku produk dan jasa yang lebih ramah lingkungan”.

Definisi Ekonomi Hijau ini bergeser dari perspektif lama “menghijaukan kegiatan ekonomi yang selama ini belum ramah lingkungan (masih mengabaikan dampak terhadap lingkungan)”, ke “*pembangunan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan (green jobs) dengan investasi hijau (green investment), produksi, perdagangan, dan konsumsi yang nantinya akan memberi kontribusi pada peningkatan kesadaran lingkungan serta barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan.*”<sup>26</sup>

Adapun definisi Ekonomi Hijau menurut UNEP adalah:

*“Green Economy: one that has results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcity. It is low carbon, resource efficient and socially inclusive”*

## **Mengapa Perlu Berpindah ke Ekonomi Hijau**

Definisi ekonomi hijau dapat lebih jelas dilihat dengan adanya perbandingan ekonomi/pertumbuhan ekonomi saat ini dengan Ekonomi Hijau (Tabel 7.1). *Mainstream* ekonomi sebagaimana didefinisikan dalam Tabel tersebut, sudah dirasakan keterbatasannya dalam mengatasi beberapa masalah pembangunan. Sebagaimana kita ketahui, *mainstream* ekonomi tidak dapat menyelesaikan masalah kesenjangan, yang diasumsikan akan terjadi melalui *trickle down effects*. Meskipun *mainstream* ekonomi masih diterapkan, berbagai Negara sudah melengkapi upaya untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan dengan langkah afirmasi, berupa program bantuan sosial (*social security program*). Sebagai contoh, Indonesia melakukan langkah afirmasi ini melalui transfer yaitu Bantuan Langsung Tunai baik yang bersyarat maupun yang tidak bersyarat. Indonesia mengatasi kesenjangan akses layanan dasar melalui Kartu Indonesia

---

<sup>26</sup> Langkah Menuju Ekonomi Hijau: Sintesa dan Memulainya. Kementerian PPN/Bappenas, 2012

Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Peningkatan jangkauan layanan kesehatan masyarakat juga diperluas dengan bantuan premi BPJS untuk 40% masyarakat miskin.

**Tabel 7.1 Perbandingan Pandangan Dunia tentang Keberlanjutan dan Prinsip Dasar serta Prioritasnya<sup>27</sup>**

<b><i>Political Perspective</i></b>	<b><i>Mainstream economic model</i></b>	<b><i>Green Growth</i></b>	<b><i>Sustainable well-being</i></b>
<i>School of thought</i>	<i>Neo-classical economics</i>	<i>Environmental economics</i>	<i>Ecological economics</i>
<i>Primary policy goal</i>	<i>More: economic growth in the conventional sense, as measured by GDP. The assumption is that growth will ultimately allow the solution of all other problems.</i>	<i>More but with lower environmental impact: GDP growth decoupled from carbon and from other material and energy impacts.</i>	<i>Better: Focus must shift from merely growth to development in the sense of improvement in the sustainable well-being, recognizing that growth has significant negative by-product.</i>
<i>Primary measure of progress</i>	<i>GDP</i>	<i>Still GDP, but recognizing impacts on natural capital.</i>	<i>Measures of human welfare, often based on GDP but incorporating environmental and social dimensions (index of Sustainable Economic Welfare, Genuine Progress Indicator or other)</i>

<sup>27</sup> UN-DESA *Back to Our Common Future*, United Nations, 2012

<b><i>Political Perspective</i></b>	<b><i>Mainstream economic model</i></b>	<b><i>Green Growth</i></b>	<b><i>Sustainable well-being</i></b>
<i>Scale/carrying capacity/role of environment</i>	<i>Not an issue, since markets are assumed to be able to overcome resource limits via prices and new technology, and substitutes for resources are always available.</i>	<i>Recognized, but assumed to be solvable and decoupling and market incentives system</i>	<i>A primary concern as a determinant of ecological sustainability. Natural capital and ecosystem services are not infinitely substitutable and real limits exist.</i>
<i>Distribution/poverty</i>	<i>Acknowledged, but relegated to politics and trickle down policy: a rising tide lifts all its boat</i>	<i>Recognized as important dimension, it is assumed that greening the economy will reduce poverty via enhanced natural assets, agriculture and employment in green sector.</i>	<i>A primary concerns since it directly affect quality of life and social capital. Questions the trickle down assumption -- a too rapidly rising tide only its yachts, while swamping small boats.</i>
<i>Economic efficiency/allocation</i>	<i>The primary concern, but generally including only marketed goods and services (GDP) and market institutions.</i>	<i>A primary concern. Recognition of the need to include natural capital and the need to incorporate the value of natural capital into market incentives.</i>	<i>A primary concerns, but including both market and non-market goods and services and effects. Emphasis on the need to account for the value of natural and social capital to achieve true allocation efficiently.</i>

<b><i>Political Perspective</i></b>	<b><i>Mainstream economic model</i></b>	<b><i>Green Growth</i></b>	<b><i>Sustainable well-being</i></b>
<i>Property rights</i>	<i>Emphasis on private property and conventional markets.</i>	<i>Recognition of the need for instruments beyond market.</i>	<i>Emphasis on a balance of property rights regimes appropriate to the nature and scale of the system, and a linking of rights with responsibilities. Include larger role for common-property institutions in addition to private and state property.</i>
<i>Role of Government and principles of governance</i>	<i>Government intervention to be minimized and replaced with private and market institutions.</i>	<i>Recognition of the need for government intervention to internalize natural capital</i>	<i>Government should play a central role, including new functions as referee, facilitator and broker in a new suite of common-assets institutions.</i>

Sumber: *Back to Our Common Future*, United Nations, UNDESA 2012 (p16)

Dalam upaya untuk mitigasi dampak lingkungan, *mainstream* ekonomi juga belum mampu mendorong penyebab dampak lingkungan untuk “mengkompensasi” pihak yang terkena dampak. *Mainstream* ekonomi belum cukup kuat untuk memaksa bisnis melakukan proses produksi yang ramah lingkungan. *Mainstream* ekonomi belum dapat mengoreksi pengukuran GDP yang sudah mengurangkan adanya deplesi terhadap penggunaan sumber daya alam. Sehubungan dengan itu, dengan semakin tingginya penggunaan

sumber daya alam, semakin sesaknya penggunaan ruang fisik dan semakin memburuknya ruang karena polusi air, udara dan tanah, maka sudah saatnya untuk berproses dan beralih ke ekonomi hijau atau sering disebut juga dengan pertumbuhan hijau (*green growth*); meskipun masih banyak kalangan yang beranggapan bahwa penerapan ekonomi hijau adalah “pemaksaan dari Negara maju” atau bahwa penerapan ekonomi hijau akan mengakibatkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal.

Langkah ini akan lebih berat daripada “tambahan” kebijakan untuk mengatasi masalah perlindungan sosial sebagaimana disampaikan di atas, karena menyangkut perubahan pola pikir (*mind set*) individu, masyarakat secara umum dan pelaku usaha untuk mencegah dampak buruk kegiatan mereka terhadap lingkungan. Langkah yang juga besar adalah perubahan kebijakan pemerintah yang seringkali secara politik dipengaruhi oleh kekuatan lobi kelompok usaha yang akan dirugikan dengan kebijakan baru. Langkah yang lebih besar lagi adalah mengubah pajak yang biasanya sangat berorientasi “pendapatan saat ini atau bahkan *immediate income*” dengan “penundaan” pendapatan secara moneter karena ada nilai dampak negatif yang dapat dicegah di kemudian hari. Dengan kata lain, ada bencana yang nantinya ditanggung (dibayar) masyarakat, namun pada saat ini harus “dibayar”/mengurangi pendapatan pemerintah karena ada penundaan, pengurangan skala usaha dan kegiatan yang akan menghasilkan dampak lingkungan.

Selanjutnya, Ekonomi Hijau tidak hanya menghijaukan komponen/sektor-sektor dalam ekonomi, namun juga “menjamin adanya upaya membentuk dan menerapkan kombinasi yang selaras antara kebijakan ekonomi, investasi dan insentif yang dilakukan untuk menurunkan ketergantungan terhadap karbon (*carbon dependency*), melindungi ekosistem yang rentan dan menurunkan kemiskinan, dengan tetap melaksanakan *economic recovery and creating jobs*”. Jadi pencapaian Ekonomi Hijau melalui dua langkah

utama, yaitu: (i) *reducing carbon dependency*; dan (ii) *reducing ecological scarcity*. Menurunkan ketergantungan karbon dilakukan melalui: (i) *imporving energy efficiency and conservation*; (ii) *expanding clean energy supply option*; (iii) *iproving sustainability of transport*; (iv) *adopting economoy-wide policy measures to discourage carbon use (e.g. cap-and-trade, carbon taxes)*; dan (v) *increasing availability affordable and sustainable energy services for the poor*<sup>28</sup>.

Langkah di beberapa negara untuk menurunkan ketergantungan terhadap karbon adalah intinya menurunkan emisi karbon di sektor energi dan *energy related activity*. Di Amerika Serikat dilakukan melalui: (i) *retrofitting buildings to improve energy efficiency*; (ii) *expanding mass transit and fresight rail*; (iii) *constructing smart electrical grid transmission system*; and (iv) *developing renewable energy- wind power, solar power and next generation biofuels (cellulosic rather than corn-based fuels, such as agricultural plant waste or dedicated crops such ass grasses and algae) and other bio-based energy*. Amerika Serikat mengalokasikan belanja pemerintah sebesar USD 100 milyar dalam 2 tahun untuk sektor ini yang diperkirakan mampu menyerap 2 juta tenaga kerja. Cina melakukan penyelarasan antara penurunan ketergantungan karbon dengan pembangunan ekonomi melalui pengembangan efisiensi dan konservasi energi, serta menerapkan penggunaan sumber energi terbarukan untuk pasokan energi, seperti tenaga angin, tenaga matahari, tenaga panas bumi dan biomasa.<sup>29</sup>

Selanjutnya, *reducing ecological scarcity* dilakukan dengan “*using investible funds from resource use and primary production to build up socks of physical and human capital that more than offset the depletion of mineral, timber and other natural resources*”, melalui (i) *improving*

---

<sup>28</sup> *Rethinking the Economic Recovery: A Global green new deal*. Edward B. Barbier, UNEP-Cambridge, 2010

<sup>29</sup> *idem*

*the sustainability of primary production; (ii) creating more sustainable resource-dependent economies; (iii) improving livelihood of the poor; (iv) improving water management.*<sup>30</sup>

Beberapa Negara seperti Malaysia: (i) menggunakan penerimaan dari minyak dan pertambangan sejak tahun 1970 untuk diversifikasi ekonomi; (ii) menetapkan *permanent estate forest* untuk menghentikan deforestasi dengan tetap menjaga produksi timber; (iii) melakukan reinvestasi dari sektor primer dan ekspor pertanian ke pengembangan *export-oriented manufacturing, labor-intensive manufacturing* yang sudah mendiversifikasi perekonomian Malaysia saat ini.

## **7.2 Keraguan (*Scepticism*) terhadap Ekonomi Hijau**

Dalam perjalanan memperluas pemahaman dan penerapan Ekonomi Hijau, sering dijumpai beberapa pandangan yang tidak seluruhnya benar, namun dapat menghambat tujuan baik dari penerapan Ekonomi Hijau dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Paling tidak dua pernyataan yang sering mengganggu adalah: (i) penerapan Ekonomi Hijau adalah untuk kepentingan Negara maju; dan (ii) penerapan Ekonomi Hijau akan membuat barang menjadi lebih mahal.

### **Ekonomi Hijau merupakan Kepentingan Negara Maju yang Dipaksakan ke Negara Berkembang**

Internalisasi masalah lingkungan ke dalam kegiatan ekonomi, adakalanya dipandang sebagai pengamanan kepentingan Negara maju, karena Negara maju harus mengendalikan “polusi” atau menjaga kualitas lingkungan mereka. Negara maju sudah banyak “membuat polusi” dalam kegiatan ekonomi mereka sebelumnya. Bagi Negara berkembang yang masih dalam masa membangun dan meningkatkan kegiatan ekonomi, pembatasan polusi yang

---

<sup>30</sup> Idem



sedikit/banyak mempengaruhi tingkat dan cara produksi saat ini, dinilai merupakan “pembatasan pertumbuhan”, sehingga sering dianggap sebagai paksaan atau desakan untuk kepentingan Negara maju. Namun demikian, pandangan ini tidak seluruhnya benar.

Pendapat ini **benar** apabila kita berbicara mengenai dampak polusi yang bersifat *transboundary*, dimana tanggung jawab Negara maju yang sudah “lebih dulu” membuat polusi, menjadi lebih besar dari pada Negara yang “belum lama membuat polusi”. Namun pendapat tersebut **salah**, apabila kita berbicara tentang polusi yang langsung berpengaruh di tempat, misalnya polusi terhadap lahan karena pembuangan air limbah beracun yang langsung ke masyarakat, atau pembuangan sampah berbahaya yang berdampak di masyarakat sekitar pabrik, adalah merupakan masalah dimanapun polusi tersebut terjadi, baik di Negara maju maupun di Negara berkembang. Tanpa pengendalian polusi seperti ini, maka masyarakat di Negara itu sendiri yang akan terkena dampaknya, berupa rusaknya kondisi lahan, yang tidak dapat digunakan lagi untuk pertanian. Dampak lain dapat berupa rusaknya kualitas air, sehingga air tidak dapat diminum, tidak dapat digunakan untuk menyiram tanaman dan memberi minum ternak, air bahkan menyebabkan gatal-gatal dan gangguan kulit lainnya. Pengendalian polusi dan internalisasi dampak polusi ke dalam seluruh kegiatan -sosial dan ekonomi yang ada di dalam setiap Negara, tidak ada hubungannya dengan tingkat kemajuan Negara tersebut (negara maju maupun tidak maju). Artinya, internalisasi masalah lingkungan ke dalam seluruh kegiatan di suatu Negara merupakan tanggung jawab semua Negara, untuk mengamankan kualitas kehidupan di wilayahnya masing-masing.

Sehubungan dengan itu, polusi yang berasal dari kita sendiri dan berdampak kepada masyarakat kita sendiri; yaitu polusi dari produsen setempat dan berdampak langsung kepada masyarakat setempat (yang tidak bisa menghindar dan memilih tempat/lokasi yang bebas polusi karena miskin), harus ditangani semua Negara,

maju ataupun belum maju. Polusi inilah yang perlu dihindari dan dicegah sejak awal oleh Negara manapun, dengan menginternalisasikan dan memitigasi dampak polusi dalam proses produksi. Sementara itu, untuk dampak polusi yang bersifat lintas batas, baik melalui pertukaran barang maupun karena sifat polusi yang lintas batas/*transboundary* (asap, pemanasan bumi) penanganannya menganut prinsip *common but differentiated responsibilities (CBDR)*.

Untuk itu, penerapan Ekonomi Hijau perlu dipahami dan diutamakan sebagai kepentingan sendiri suatu Negara untuk: (i) Memiliki kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, sehingga lingkungan bebas dari polusi, sumber daya alam dapat digunakan secara efisien, sehingga “tersisa” bagi generasi mendatang untuk meneruskan keberlanjutan kehidupan; (ii) Lingkungan hidup akan bersih, sehingga kualitas hidup masyarakat saat ini terjaga, dan ekosistem terjaga untuk kehidupan generasi ke depan; (iii) Peluang untuk memanfaatkan perubahan ke Ekonomi Hijau untuk memperluas manfaat sumber daya dan daya saing/keunggulan produk nasional dengan tetap menjaga keberlanjutan alam untuk mendukungnya. Hal ini patut ditekankan, karena: (i) Masih banyak peluang kegiatan ekonomi yang sejalan dengan upaya pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam; (ii) Banyak manfaat ganda yang belum dikembangkan, banyak ekonomi jasa lingkungan yang belum dibangun; dan (iii) Masih banyak sumber daya bersih dan terbarukan yang belum dimanfaatkan optimal. Dengan ketiga alasan di atas, maka perubahan ekonomi dari “*business as usual*” ke Ekonomi Hijau/pertumbuhan hijau, merupakan konsekuensi setiap Negara untuk menyeimbangkan antara kegiatan sosial dan ekonomi dengan penggunaan ruang, sumber daya alam dan hasil limbah yang mampu dikelola ruang tersebut, sehingga alam dapat tetap menopang kehidupan generasi mendatang.

## **Ekonomi Hijau: Apakah Lebih Mahal?**

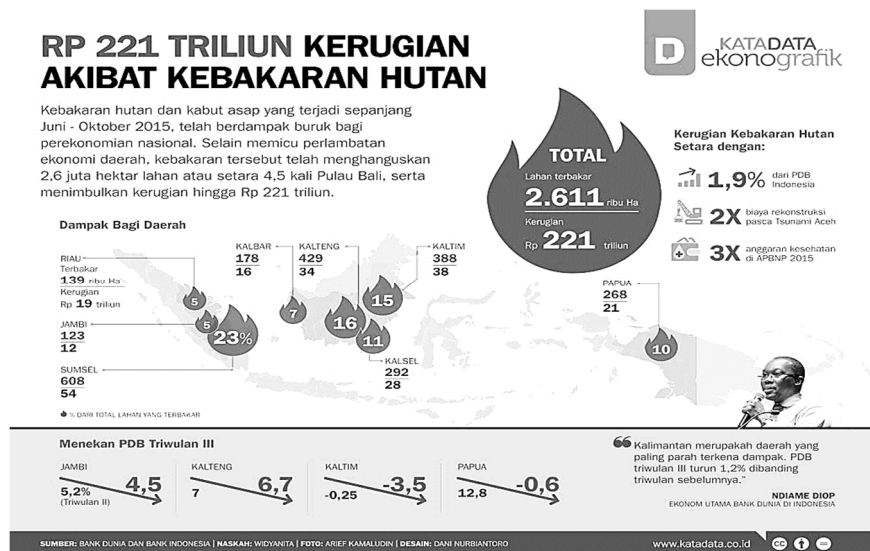
Pendapat lain yang sering kita dengar berkenaan dengan Ekonomi Hijau adalah bahwa dengan melakukan internalisasi dampak lingkungan ke dalam kegiatan ekonomi akan mengakibatkan harga barang menjadi lebih mahal. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah. Kemahalan timbul karena diperlukan perubahan proses produksi, penggunaan teknologi baru yang lebih bersih yang berarti mesin baru, pelatihan baru untuk pekerja, adanya biaya untuk pengelolaan limbah secara lebih baik dan seterusnya.

Di lain pihak, cara pandang tersebut keliru, karena selama ini biaya dampak akibat limbah baik bagi masyarakat sekitar atau alam, ditanggung oleh pihak lain. Proses produksi yang menghasilkan limbah dan limbah yang tidak dikelola dengan benar, maka masyarakat sekitarnyalah yang terkena dampak dan membayar kerugian akibat dampak lingkungannya. Penggunaan bahan dan proses produksi yang tidak ramah lingkungan yang berakibat pada produk yang tidak aman, dampaknya tidak ditanggung oleh produsen namun oleh masyarakat konsumen secara luas. Lingkungan hidup dan ekosistem yang rusak, karena limbah yang berbahaya, biaya yang timbul ditanggung oleh masyarakat sekitar ekosistem, karena mereka tidak dapat memanfaatkan ekosistem tersebut dengan baik. Generasi mendatang juga kehilangan kesempatan untuk menikmati nilai/*value* dari ekosistem tersebut, baik *tangible* maupun *intangible value*. Sebagai contoh, penilaian kerugian oleh Bank Dunia atas kerugian kebakaran hutan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 221 triliun (Gambar 7.1).

Biaya tersebut dianggap baru oleh perusahaan, karena selama ini “dibayar/ditanggung” oleh pihak lain dan dibayar oleh generasi mendatang. Sekarang biaya tersebut harus dimasukkan ke dalam biaya perusahaan. Padahal biaya tersebut belum tentu termasuk hanya biaya yang akan timbul di masa mendatang akibat: (i) Penyakit

dan kesehatan anak-anak yang tidak hanya meningkatkan biaya kesehatan mereka semasa usia produktif, namun juga penurunan produktivitas yang seharusnya dihasilkan apabila mereka sehat; (ii) Hilangnya kesempatan generasi mendatang untuk menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersih; (ii) Musnahnya keanekaragaman hayati yang menjadi salah satu rantai dalam ekosistem penopang kehidupan.

Biaya-biaya ini akan ditanggung oleh generasi mendatang dan menjadi beban tambahan pembangunan masa datang. Dampak yang lebih besar lagi adalah akibat yang timbul yang akan mengganggu peluang Bonus Demografi. Dengan kata lain, bukan harga komoditas menjadi mahal, namun justru selama ini produsen telah menghitung biaya produksi yang terlalu murah, karena membiarkan sebagian biaya produksi “ditanggung” (menimbulkan kerugian) oleh masyarakat yang hidup saat ini dan masyarakat yang hidup dekade mendatang.



Sumber: [www.katadata.com](http://www.katadata.com)

**Gambar 7.1** Perkiraan Bank Dunia tentang Nilai Kerugian Kebakaran Hutan Tahun 2015

## **Ekonomi Hijau: Manfaat bagi Bisnis, Masyarakat dan *NGO***

Persepsi masyarakat tentang ekonomi hijau, khususnya Bisnis, Masyarakat Umum, Akademisi dan *NGO* penting diketahui, karena persepsi tersebut akan berpengaruh terhadap kemudahan adanya perubahan perilaku mereka ke ekonomi hijau. Sehubungan dengan itu, bagaimana ekonomi hijau akan bermanfaat bagi parapihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Manfaat Ekonomi Hijau Bagi Bisnis.** Internalisasi dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan pada saat ini dilakukan melalui berbagai peraturan di bidang lingkungan. Dimulai dengan proses Amdal pada waktu rencana kegiatan ekonomi/investasi dilakukan, sampai kepada peraturan ambang batas limbah yang dihasilkan dan “boleh’ di”buang” ke alam. Internalisasi semacam ini sudah sangat baik dilakukan di Negara-negara maju, namun di Negara berkembang masih sangat rendah tingkat penerapannya.

Di Indonesia, meskipun telah ada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun penegakan hukumnya masih sulit, apalagi penegakan yang bersifat sanksi finansial. Dengan kondisi seperti ini, maka pandangan bisnis/perusahaan tentang internalisasi dampak lingkungan ke dalam proses produksi/usaha ekonomi hidup secara umum masih dinilai berdampak negatif, karena menimbulkan “kemahalan” dengan adanya proses produksi baru, penerapan Iptek dan tata kelola limbah yang menimbulkan biaya baru yang kemudian tercakup dalam biaya produksi. Bagi bisnis yang menggunakan sumber daya alam (eksploitasi), internalisasi dampak lingkungan tidak hanya berarti pengelolaan dampak lingkungan, namun juga berarti penggunaan teknologi eksplotasi yang ramah lingkungan atau bahkan pembatasan eksploitasi sumber daya utama bisnis tersebut. Namun dengan semakin meningkatnya dampak sosial akibat polusi terhadap lingkungan, maka perusahaan semakin mencari cara untuk dapat

meminimalkan dampak proses produksi terhadap lingkungan atau bahkan menggunakan proses produksi ramah lingkungan sebagai keunggulan produk atau bahkan keunggulan perusahaan.

Penyebab lain adalah, adanya kesadaran konsumen yang mulai memperhatikan cara-cara produksi perusahaan dan sikap perusahaan terhadap alam. Kesadaran konsumen ini mendesak perusahaan untuk memiliki sikap yang lebih ramah lingkungan dan menyediakan produk dengan cara yang ramah terhadap lingkungan. Sehubungan dengan itu, paling tidak, terdapat 4 (empat) alasan bahwa menganut “*green*” merupakan nilai strategis bisnis (*The Green to Gold* hal 5-6)<sup>31</sup>, yaitu: (i) mitigasi resiko pelanggaran terhadap aturan lingkungan; (ii) penurunan biaya operasional dan peningkatan efisiensi; (iii) sumber pendapatan baru; (iv) penciptaan *intangible value* bagi bisnis.

**Manfaat Ekonomi Hijau Bagi Masyarakat.** Apabila dikaitkan dengan polusi, maka masyarakat secara umum memiliki dua sisi, yaitu sisi sebagai obyek yang terkena dampak polusi dari perilaku perusahaan/bisnis dan sekaligus sebagai pelaku penghasil polusi dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Sebagai konsumen dan masyarakat pada umumnya, Ekonomi Hijau penting, karena masyarakat umum dan konsumen merupakan pihak yang terkena dampak dari perilaku produksi yang tidak hijau. Berbagai dampak dari polusi udara yang diakibatkan karena transportasi, kebakaran hutan dan lahan, maupun dari emisi pabrik telah memberi dampak buruk pada kesehatan (pernapasan manusia) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 7.1 di atas. Sementara itu, polusi air baik air yang berasal dari sungai maupun daerah mata air yang tercemar telah mengakibatkan masalah bagi kehidupan rumah tangga pada umumnya. Penimbunan sampah dan sanitasi yang buruk juga telah mengakibatkan gangguan umum (bau, pandangan) namun juga

---

<sup>31</sup> *The Green to Gold*, Daniel Esty and PJ Simmons, 2011

meresap ke dalam tanah dan berpengaruh terhadap kualitas dan nilai lahan/lokasi.

Di sisi lain, masyarakat umum juga berperan sebagai penghasil polusi, karena pada saat yang sama konsumen dan masyarakat juga memproduksi polusi dalam perilaku hidup mereka sehari-hari. Penggunaan plastik berlebihan, misalnya sudah menimbulkan masalah di berbagai tempat, karena volume plastik yang semakin menumpuk dan tidak dapat terurai telah mengotori pandangan dan mencemari lahan. Penempatan *septic-tank* sudah menimbulkan permasalahan polusi lahan dan air, dengan semakin sempitnya halaman yang pada umumnya menjadi tempat septintank dan pompa air tanah keluarga.

Untuk itu, masyarakat dapat berkontribusi melalui dua sisi. Sisi pertama, sebagai pelaku sosial dan ekonomi, masyarakat secara umum dan dimulai dari rumah tangga, manusia harus berperilaku ramah lingkungan. Perilaku dimulai dari yang sederhana, misalnya: (i) Memilah dan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik yang bisa digunakan ulang (plastik, kaleng dll); (ii) Mengurangi penggunaan sampah anorganik, dengan mengurangi penggunaan plastik, berubah menjadi menggunakan “wadah” yang dapat digunakan ulang (tas, botol minuman dll); (iii) Menghemat penggunaan listrik dan air, baik dalam mengkonsumsi minuman, mandi dan kegiatan sehari-hari; (iv) Menghemat penggunaan kendaraan, dengan menggunakan kendaraan sendiri seperlunya, dan memperbanyak berjalan kaki (untuk jarak pendek) atau menggunakan kendaraan umum.

Sisi yang lain, sebagai konsumen kita mulai mengubah diri dengan hanya mengkonsumsi barang dan jasa yang ramah lingkungan. Dengan posisi konsumen adalah raja, maka perilaku konsumsi ini, juga akan mendorong perubahan pola permintaan di pasar, sehingga akan memaksa produsen berubah perilaku pula. Sebagai masyarakat, kita

semua memiliki peran langsung dan memiliki peran yang dapat “memaksa” produsen untuk menerapkan perilaku produksi yang ramah lingkungan.

**Manfaat Ekonomi Hijau Bagi NGO.** *NGO* merupakan salah satu aktor yang berperan penting dalam proses pembangunan. *NGO* berperan cukup besar dalam pembangunan terutama karena fokusnya pada “*people centered development, reflecting recent shifts away from heavily theoretical ideas about development, to a more pragmatic “theories about practice”*”. Peran mereka dalam setiap proses pembangunan pada umumnya adalah sebagai *implementer, catalyst* dan *partners*. Pada umumnya *NGO* sangat berkaitan dengan isu-isu pemberdayaan, partisipasi, gender dan modal sosial.<sup>32</sup> Dalam perkembangan sebagai pelaku pembangunan, *NGO* tidak hanya berperan di tingkat masyarakat, namun juga mulai berperan sebagai mitra sejajar Pemerintah dan Pemda.

Berkaitan dengan pembangunan, karena mereka dekat dengan pelaksanaan di lapangan dan masyarakat (*grass root*), maka biasanya mereka menjadi “saksi” pihak-pihak yang dirugikan dalam proses pembangunan. Secara langsung mereka menerima keluhan dari masyarakat, sehingga seringkali menyuarakan “sisi lain” dari upaya pembangunan. Mereka nampak seolah-olah menjadi “oposisi” dalam proses pembangunan. Dalam perkembangan peningkatan kualitas proses pembangunan, peran *NGO* kemudian sebagai *partner* pembangunan untuk menginternalisasikan “resiko” yang kemungkinan timbul dalam pembangunan. Apabila resiko dapat diantisipasi, maka resiko terutama yang berkaitan dengan dampak pembangunan yang kemungkinan merugikan masyarakat dapat dikurangi, dimitigasi dan disiapkan langkah-langkah antisipasinya.

---

<sup>32</sup> *Non-Governmental Organizations and Development, Routledge, 2009*



Dalam kaitannya dengan Ekonomi Hijau, kesadaran untuk menginternalisasikan dampak negatif kegiatan ekonomi terhadap lingkungan hidup merupakan “kemajuan” bagi *NGO* yang selama ini menyuarakan masyarakat yang terkena dampak limbah berbagai perusahaan. Dengan adanya kesadaran masyarakat, perusahaan dan pemerintah akan pentingnya Ekonomi Hijau, maka ini merupakan manfaat dan kepentingan *NGO* secara umum dan secara khusus *NGO* yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Peran mereka besar dan akan semakin besar terutama dalam hal pemberdayaan, partisipasi, gender dan modal sosial, yang merupakan unsur penting dalam pengembangan Ekonomi Hijau. Sebagai *implementer*, maka *NGO* dapat menjadi partner Pemerintah untuk menyebar-luaskan kesadaran masyarakat akan pentingnya ramah terhadap lingkungan, termasuk kepada perusahaan. Peran mereka sangat penting di area pemberdayaan masyarakat sehingga kesadaran akan meningkat dan memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku di dalam masyarakat. Dengan langkah ini maka *NGO* dapat menjadi mitra Pemerintah untuk membangun modal sosial yang ramah terhadap lingkungan melalui tindakan-tindakan yang sejalan dengan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.

### **7.3 Praktek Ekonomi Hijau dalam Kerangka SDGs**

Menurut UNEP, terdapat 11 sektor yang berkaitan dengan Ekonomi Hijau, yaitu: (1) Pertanian; (2) Bangunan; (3) Perkotaan; (4) Energi; (5) Perikanan; (6) Kehutanan; (7) Industri pengolahan/manufaktur; (8) Pariwisata; (9) Transportasi; (10) Limbah dan (11) Air. Sesuai pengelompokan oleh Sekretariat SDGs Indonesia, Goal yang termasuk ke dalam Ekonomi Hijau dicerminkan dalam: (i) Goal 7. Akses atas energi yang terjangkau, *reliable*, berkelanjutan dan modern; (ii) Goal 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif dan layak; (iii) Goal 9. Membangun infrastruktur, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta

mendukung inovasi; Goal 10. Berkurangnya kesenjangan dan Goal 17 Kemitraan global.

## **Goal 7. Akses atas Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern**

Akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan menggunakan teknologi modern menjadi tujuan penting dalam SDGs, karena beberapa alasan, yaitu:

1. Ketersediaan energi yang semakin meningkat dengan meningkatnya populasi dan konsumsi per kapita menjadi dasar untuk suksesnya pencapaian tujuan SDGs yang lain.
2. Kebutuhan energi yang semakin besar apabila tidak dilakukan dengan berkelanjutan akan menghabiskan sumber daya tidak terbarukan dan mencemari lingkungan hidup;
3. Pola penggunaan energi yang boros akan mengakibatkan ketidakmampuan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan energi.

### **Kotak 7.1 Keterkaitan Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau dengan Tujuan lain dalam SDGs**



Berdasarkan hasil penelitian scientist yang terkumpul dalam ICSU, Goal 7. Akses energi untuk semua sangat berpengaruh dan terkait dengan tercapainya tujuan:

- a. SDGs-1 Penurunan Kemiskinan;
- b. SDGs-2 Penurunan Kelaparan;
- c. SDGs-6 Air Bersih dan Sanitasi;
- d. SDGs-8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
- e. SDGs-13 Penanganan Perubahan Iklim

Sumber: *A Guide to SDGs Interactions: From Science to Implementations*, International Council for Science/ICSU, 2017

Untuk mengatasi hal itu, maka terdapat beberapa langkah untuk mewujudkan energi berkelanjutan, yaitu: (i) Meningkatkan efisiensi energi, melakukan penghematan penggunaan energi di berbagai tingkat sehingga penggunaan energi/ PDB akan terus menurun; (ii) Meningkatkan penggunaan teknologi bersih untuk penggunaan sumber energi yang tidak terbarukan, karena perpindahan penggunaan sumber energi tidak terbarukan ke sumber energi terbarukan akan memerlukan waktu; (iii) Meningkatkan porsi pasokan dan penggunaan sumber energi terbarukan. Sehubungan dengan itu, target SDGs 7 adalah sebagai berikut dalam Tabel 7.2.

**Tabel 7.2 Target untuk Tujuan 7. Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Modern dan Berkelanjutan**

<b>Target</b>	<b>Isi Target</b>
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses energi secara universal yang terjangkau, andal dan modern.
7.2.	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.
7.3.	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.
<b>Cara pelaksanaan</b>	
7a.	Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih
7b	Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang (LDCs), negara berkembang kepulauan kecil dan negara berkembang (SIDS)

## **Goal 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Lapangan Kerja yang Produktif dan *Decent Work* (Pekerjaan yang Layak)**

Pertumbuhan ekonomi selama ini di banyak Negara terutama Negara berkembang belum cukup berhasil dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan serta dilain pihak menimbulkan penurunan sumber daya alam serta menciptakan limbah yang semakin menurunkan daya dukung alam. Meskipun tingkat pertumbuhan tetap dibutuhkan cukup tinggi untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan, namun diperlukan transformasi dalam cara pencapaiannya, baik di tingkat Negara maupun di tingkat pelaku usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya.

Untuk tetap menghasilkan pertumbuhan yang terjaga tinggi, diperlukan penerapan teknologi dan cara produksi yang bersih dan ramah lingkungan. Untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam tidak terbarukan yang sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan alam dan penyediaan sumber kehidupan generasi mendatang, maka diperlukan penghematan/efisiensi penggunaan, cara penggunaan serta pengelolaan limbah yang tidak mengganggu daya dukung lingkungan hidup dan alam. Langkah ini perlu didukung dengan pengembangan sumber pertumbuhan yang lebih banyak menggunakan sumber daya alam terbarukan dan yang tidak menghasilkan limbah yang membahayakan kelangsungan lingkungan hidup. Pengembangan sumber ekonomi baru ini akan tetap dapat menjadi sumber perluasan lapangan kerja dan sumber pertumbuhan nasional. Berkaitan dengan itu, target SDGs 8 adalah sebagai berikut dalam Tabel 7.3.

**Tabel 7.3 Target untuk Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Lapangan Kerja Produktif dan Pekerjaan yang Layak**

<b>Target</b>	<b>Isi Target</b>
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang
8.2.	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
8.3.	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
8.4	Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan <i>the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production</i> , dengan negara-negara maju sebagai pengarah.
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
8.7	Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.
8.8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

<b>Target</b>	<b>Isi Target</b>
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan lokal untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
Cara pelaksanaan	
8a	Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui <i>the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance</i> bagi negara kurang berkembang.
8b	Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan <i>the Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i> .

## **Goal 9. Membangun Infrastruktur yang Berdaya Tahan, Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi**

Infrastruktur memiliki peran penting untuk setiap sektor pembangunan. Infrastruktur berperan penting untuk membuka daerah terisolir sehingga masyarakat dapat memiliki akses untuk kehidupan sosial, politik dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Infrastruktur sangat penting untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan pemasaran hasil pertanian yang saling menguntungkan. Infrastruktur sangat berperan penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sekolah dan layanan pendidikan lainnya, serta layanan kesehatan untuk pembangunan manusia berkualitas. Infrastruktur sangat penting untuk penyediaan energi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perkotaan dan permukiman, penyediaan air bersih dan sanitasi maupun pembangunan transportasi.

Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur juga berpotensi untuk “mengurangi” lahan pertanian produktif, hutan lindung dan dapat mengganggu konservasi keanekaragaman hayati apabila tidak dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan pilihan

transportasi yang ramah lingkungan, yaitu antara lain yang menghasilkan polusi lebih rendah, pilihan teknologi yang ramah kepada lingkungan dan tidak membahayakan keanekaragaman hayati dsb. Sebagai contoh, perbanyak fasilitas transportasi (rel) kereta api dibandingkan moda jalan darat untuk transportasi kendaraan bermotor yang menghasilkan polusi udara (terutama apabila berbasis BBM). Contoh lain adalah pembangunan jalan layang untuk wilayah yang merupakan jalur air dan tempat “rembesan air”. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian Goal 9 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.4 Target untuk Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Berdaya Tahan, Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Menumbuhkan Inovasi**

<b>Target</b>	<b>Isi Target</b>
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
9.2.	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
9.3.	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di Negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.
9.4.	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua Negara sesuai kemampuan masing-masing.
9.5.	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta

Target	Isi Target
	orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.
Caraa pelaksanaan	
9a.	Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.
9b	Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.
9c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di lokal-negara kurang berkembang pada tahun 2020.

## Goal 10. Berkurangnya Kesenjangan

Berkurangnya kesenjangan merupakan Goal baru yang disepakati dalam SDGs. Keberadaan goal baru kesenjangan/ketimpangan ini disepakati karena secara global kesenjangan masih cukup tinggi, tidak saja di Negara berkembang namun juga di Negara maju. Selain itu, kesenjangan antar Negara juga dirasakan dan isu ini dinilai merupakan masalah antar Negara yang perlu diselesaikan secara global. Perhatian kepada 40% penduduk termiskin menjadi target yang ingin disasar, mengingat kelompok ini merupakan kelompok termiskin dan kesejahteraannya rentan terhadap dampak perubahan. Selain itu, penurunan kesenjangan juga dilakukan dengan memberdayakan dan meningkatkan inklusifitas sosial, ekonomi dan politik masyarakat dalam berbagai kelompok umur, gender, disabilitas, ras, etnik, daerah asal maupun agama. Kebijakan perlindungan sosial juga disarankan diadopsi oleh Negara-negara untuk menurunkan kesenjangan secara progresif. Secara global langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan diantaranya adalah menjamin adanya keterwakilan dan suara dari Negara berkembang



dalam pengambilan keputusan di lembaga ekonomi dan keuangan global.

Selanjutnya, secara global migrasi juga diakui sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan, sehinggalangkah-langkah untuk memfasilitasi migrasi dan termasuk biaya transaksi untuk remintasi juga ditargetkan untuk diperbaiki. Secara lengkap target yang terkait dengan Goal 10 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5 Target untuk Tujuan 10. Penurunan Kesenjangan Dalam dan Antar Negara**

<b>Target</b>	<b>Isi Target</b>
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada pada 40% terendah dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.
10.5	Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.
10.6	Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.
10.7	Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

Cara pelaksanaan	
10.a	Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan <i>World Trade Organization</i> .
10.b	Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang kepulauan kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.
10.c	Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja.

## Goal 17. Kemitraan Global

Tujuan ini merupakan perluasan dan perumusan yang lebih eksplisit dari Goal 8 MDGs. Perumusan lebih konkrit ini didorong oleh rendahnya komitmen kerjasama global termasuk dukungan pendanaan dari Negara maju selama pelaksanaan MDGs. Dengan pengalaman tersebut, maka perumusan kemitraan global yang merupakan langkah pelaksanaan untuk memperlancar pencapaian SDGs dilakukan tidak saja secara umum dalam Goal 17, namun juga ada yang melekat di masing-masing Goal (Target dengan label a, b, c dst).

Beberapa cara pelaksanaan yang dirumuskan adalah yang berkaitan dengan pendanaan, baik dari mobilisasi sumber daya di dalam negeri maupun mekanisme lama melalui *Official Development Assistance (ODA)*. Keikutsertaan aktor non pemerintah dalam pelaksanaan SDGs dirasakan sangat sentral. Oleh karena itu, dalam salah satu target pendanaan adalah memobilisasi sumberdana berbagai lembaga non pemerintah, seperti dana/kerjasama swasta, filantropi dan juga mekanisme baru lainnya. Kerjasama di bidang teknologi, peningkatan kapasitas maupun cara perdagangan juga masih harus dilakukan secara konkrit untuk mempercepat pencapaian SDGs. Dalam kerjasama global diidentifikasi pula adanya kerjasama dalam isu-isu

sistemik seperti koherensi internasional dan kebijakan; kerjasama *multistakeholders* serta kerjasama di bidang pengembangan data untuk meningkatkan kemampuan *monitoring* dan akuntabilitas dalam pelaksanaan SDGs. Secara lengkap Target dalam Goal 17 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.6 Target untuk Tujuan 17. Tata Cara Pelaksanaan dan Kemitraan Global**

<b>Target</b>	<b>Isi Target</b>
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
17.2	Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan ( <i>Official Development Assistance - ODA</i> ), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.
17.3	Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.
17.4	Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.
17.5	Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

Target	Isi Target
17.7	Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
17.9	Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.
17.10	Menggalkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah <i>Doha Development Agenda</i> .
17.11	Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.
17.12	Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan <i>World Trade Organization</i> termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian ( <i>rules of origin</i> ) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.
17.13	Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.
17.14	Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.
17.15	Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
17.16	Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya

Target	Isi Target
	keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

## 7.4 Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia

Koridor untuk penerapan ekonomi hijau di Indonesia sudah dicantumkan dalam dokumen RPJMN 2015-2019. Pelaksanaan RPJMN 2015-2019 memperhitungkan kondisi lingkungan global yaitu adanya Agenda Pasca 2015 (yang saat ini sudah dideklarasikan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs) dan perubahan iklim. Beberapa Sasaran Pokok Pembangunan Nasional berkaitan dengan penerapan Ekonomi Hijau sudah secara eksplisit tercantum dalam Dokumen RPJMN 2015-2019.<sup>33</sup> Beberapa contoh sasaran pokok tersebut adalah: peningkatan penggunaan gas di dalam negeri dan pengendalian produksi batubara agar deplesi sumber daya alam terkendali dan perusakan serta produksi emisi gas rumah kaca (GRK) dapat ditekan sebagai komitmen dari pelaksanaan penurunan emisi

---

<sup>33</sup> Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Kementerian PPN/BAPPENAS. Buku I halaman 69-71

pada tahun 2020. Selain itu, Emisi GRK pada tahun 2020 sebesar 26% juga menjadi bagian dalam Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019.

Langkah penting lainnya adalah ditetapkannya Sasaran Pokok Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan indeks komposit dari kualitas lingkungan air, udara dan lahan. Pencantuman IKLH secara tidak langsung menggambarkan sebagian dari kekuatan daya dukung alam untuk mendukung kegiatan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan ini masih merupakan tahap awal penerapan Ekonomi Hijau secara menyeluruh. Penerapan secara konkrit di beberapa sektor utama perlu digambarkan untuk dapat melakukan penyempurnaan ke depan.

### **Industri (*Manufacturing*) Hijau**

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga perkembangan industri dapat menyelaraskan diri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai langkah lanjut dari RPJMN 2015-2019, telah disusun aturan tentang Industri Hijau, yang dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Di dalam RIPIN, dicantumkan bahwa strategi pokok pengembangan Industri Hijau dilakukan melalui dua cara yaitu: (i) mengembangkan industri yang sudah ada menuju Industri Hijau dan (ii) membangun industri baru dengan menerapkan prinsip Industri Hijau. Terdapat tiga langkah untuk melaksanakan strategi tersebut yaitu:

- a. Penetapan standar, dengan menyusun standar Industri Hijau berdasarkan kelompok industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha. Pemberlakuan standar Industri Hijau secara wajib yang dilakukan secara bertahap, dan pengawasan

- terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya dilakukan secara wajib;
- b. Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor Industri Hijau;
  - c. Pemberian fasilitas, berupa fasilitas fiskal sesuai peraturan perundangan, dan fasilitas non fiskal berupa pelatihan, sertifikasi, bantuan pembangunan prasarana fisik, serta bantuan promosi hasil industri.

Standar Industri Hijau terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, *yields*, produk, sistem manajemen, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang dibakukan dan disusun secara konsensus oleh semua pihak terkait yang bertujuan mewujudkan Industri Hijau. Tujuh (7) karakteristik dari Industri Hijau adalah: a. efisiensi penggunaan material output; b. menggunakan alternatif material input; c. rendahnya intensitas energi, d. rendahnya intensitas air, e. SDM yang kompeten; f. minimalisasi limbah yang dihasilkan; dan g. teknologi rendah karbon.

Sampai saat ini penerapan standar Industri Hijau masih bersifat sukarela/*voluntary* dan penghargaan diberikan setiap tahun. Dalam menilai Industri Hijau terdapat 7 karakteristik yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori dengan bobot berbeda. Sebagai contoh pada tahun 2013 kelompok dan bobot adalah sebagai berikut: (i) 70% bobot pada proses produksi; (ii) 20% bobot pada upaya penurunan emisi CO<sub>2</sub>, pemenuhan baku mutu lingkungan dan sarana pengelolaan limbah/emisi; dan (iii) bobot 10% pada sertifikasi, CSR, penghargaan yg pernah diterima dan kesehatan karyawan. Perkembangan jumlah perusahaan yang secara sukarela mengikuti lomba untuk mendapat penghargaan Industri Hijau disampaikan dalam Tabel 7.7 berikut ini.

**Tabel 7.7 Jumlah Perusahaan yang Mendapat Penghargaan Industri Hijau<sup>34</sup>**

<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jumlah perusahaan	69	101	102	129
Level 5 <sup>35</sup>	34	-	59	65: 60 skala besar; 5 skala menengah
Level 4	35	-	43	64: 56 skala besar; 7 menengah dan 1 kecil

Dalam kaitan dengan kesepakatan adanya standar Industri Hijau, dalam kurun waktu 2014-2017 telah disepakati 17 SHI, yaitu untuk: (1) Industri semen Portland; (2) Ubin keramik; (3) Pulp dan kertas; (4) Susu bubuk; (5) Pupuk buatan tunggal hara makro primer; (6) Pengasapan karet; (7) Karet remah; (8) Tekstil pencelupan, pencapan dan penyempurnaan; (9) Gula kristal putih; (10) Kaca pengaman berlapis; (11) Kaca pengaman diperkeras; (12) Barang lain dari kaca; (13) Kaca lembaran; (14) Penyamakan kulit; (15) Pengawetan kulit; (16) Baja *flat product*; dan (17) Baja *long product*.

**Kotak 7.2 Dampak Penggunaan Pestisida pada Lingkungan**

Dalam penerapan pupuk di bidang pertanian, ternyata tidak semua pestisida mengenai sasaran. Kurang lebih hanya 20 persen pestisida mengenai sasaran sedangkan 80 persen lainnya jatuh ke tanah. Akumulasi residu pestisida tersebut mengakibatkan pencemaran lahan pertanian. Apabila masuk ke dalam rantai makanan, sifat beracun bahan pestisida dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, mutasi, bayi lahir cacat, CAIDS (*Chemically Acquired Deficiency Syndrome*) dan sebagainya (Sa'id, 1994).

Pestisida yang paling banyak menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam kesehatan manusia adalah pestisida sintetik, yaitu golongan organoklorin. Tingkat kerusakan yang disebabkan oleh senyawa organoklorin lebih tinggi dibandingkan senyawa lain, karena senyawa ini peka terhadap sinar matahari dan tidak mudah terurai (Sa'id, 1994). Sebagian besar bahan-bahan

<sup>34</sup> Dari berbagai sumber

<sup>35</sup> Perusahaan dengan level 5: nilai 90,1-100 dan level 4: 80,1-90,0.



kimia pertanian yang disemprotkan jatuh ke tanah dan didekomposisi oleh mikroorganisme. Sebagian menguap dan menyebar di atmosfer dimana akan diuraikan oleh sinar ultraviolet atau diserap hujan dan jatuh ke tanah (Uehara, 1993). Pestisida bergerak dari lahan pertanian menuju aliran sungai dan danau yang dibawa oleh hujan atau penguapan, tertinggal atau larut pada aliran permukaan, terdapat pada lapisan tanah dan larut bersama dengan aliran air tanah. Penumpahan yang tidak disengaja atau membuang bahan-bahan kimia yang berlebihan pada permukaan air akan meningkatkan konsentrasi pestisida di air. Beberapa dampak penggunaan pestisida yang berhubungan dengan lingkungan dan ekosistem: (1) Punahnya Spesies; (2) Peledakan Hama; (3) Gangguan Keseimbangan lingkungan; (4) Kesuburan Tanah Berkurang.

**Diringkas dari:** <http://www.pusatbiologi.com/2013/12/akibat-dan-dampak-penggunaan-pestisida.html>

Ketaatan terhadap standar Industri Hijau masih bersifat sukarela serta masih dibutuhkan kesepakatan mengenai SIH untuk setiap jenis industri. Terhadap penegakan standar Industri Hijau di lapangan, masih belum ada pola yang teratur. Dengan jumlah industri sebanyak 25,529 ribu industri besar dan menengah serta 283.022 industri kecil dan 3,38 juta industri mikro (BPS, 2017),<sup>36</sup> akan diperlukan waktu yang lama untuk menjaga kualitas lingkungan hidup kita dari praktek industri yang tidak ramah lingkungan. Sulit diharapkan berapa lama waktu untuk menerapkan standar Industri Hijau secara keseluruhan, apalagi dengan adanya dinamika masuk keluarnya industri serta banyaknya jumlah usaha menengah dan kecil yang ada.

### **Pertanian Berkelanjutan (ISPO, *Organic Farming*, *Organic Coffee* dsb)**

Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang mengusahakan lahan dan air untuk menghasilkan komoditas pangan, perkebunan, ternak, maupun hortikultura serta ikan. Sektor pertanian adalah penyerap tenaga kerja paling besar, yaitu sebanyak 39,7 juta atau

---

<sup>36</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) Data industri besar, sedang, kecil dan mikro, 6 Agustus 2017

sekitar 31,9% total penduduk usia 15 th ke atas yang bekerja<sup>37</sup>. Persentase ini akan bertambah apabila dimasukkan pula usaha *processing* (industri pengolahan pangan) dan penyajian makanan (restoran dan *catering*).

Dengan pola usaha pertanian, maka pertanian dan perikanan berpotensi membuat polusi namun pada saat yang sama akan terkena dampak dari polusi hasil dirinya sendiri maupun dampak dari industri lainnya. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan akan meracuni tanah dan air, yang pada akhirnya akan menghambat produksi tanaman dan kelangsungan hidup ikan. Kelebihan pestisida di dalam tanah juga dapat terserap ke hasil pertanian dan berkaibat pada kesehatan konsumen (Kotak 7.2).

Dalam RPJMN 2015-2019 sudah dicantumkan kebijakan mengenai pertanian berkelanjutan, sebagai respon dari adanya berbagai kasus polusi lahan pertanian, maupun semakin sadarnya konsumen atas produk hasil pertanian yang bebas dari pupuk dan pestisida anorganik/kimia. Demikian pula sudah beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas dan pelaksanaan pertanian berkelanjutan seperti *good agriculture practices*, penggunaan pupuk organik, dan bahkan sudah ada *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) untuk standar kualitas pengelolaan perkebunan sawit. Sebagai langkah tambahan, beberapa produsen sawit juga terus memperjuangkan pencapaian standar *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) yang diterapkan oleh beberapa Negara pengimpor sawit. Salah satu contoh bahwa standar sawit berkelanjutan tidak hanya dapat dicapai oleh perusahaan, namun juga oleh produsen kelapa sawit masyarakat, digambarkan dalam Kotak 7.3 berikut ini.

---

<sup>37</sup> BPS, 19 Juni 2017 [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

### **Kotak 7.3 2.700 Petani Sawit Swadaya Sumsel Raih Sertifikat RSPO**

**Bisnis.com**, PALEMBANG – Sebanyak 2.700 petani kelapa sawit swadaya di Sumatra Selatan berhasil meraih sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO dengan total luasan lahan mencapai 5.500 hektare. Para petani tersebut bergabung dalam tujuh koperasi tingkat desa, yang berada di tiga kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dengan produksi sebanyak 92.000 metrik ton tandan buah segar (TBS) bersertifikat.

Ketua Perhimpunan Petani Swadaya Sapta Tunggal Mandiri, Amin Rohmad, mengatakan pihaknya merasakan perbedaan pengelolaan kebun sawit setelah mengikuti proses sertifikasi RSPO. “Kami jadi petani yang terlatih untuk tidak mengelola kebun secara asal-asalan karena dalam RSPO ada ketentuan penggunaan pupuk dan obat-obatan,” katanya saat acara penganugerahan sertifikasi RSPO binaan Wilmar Group Indonesia di Palembang, Selasa (23/8/2017).

Amin menerangkan dengan adanya penerapan standar RSPO dalam mengelola kebun, maka petani bisa melakukan penghematan biaya produksi. Sehingga, petani tersebut bisa menyisihkan uangnya yang berujung pada peningkatan kesejahteraan petani. “Biasanya praktik pemupukan itu tidak tepat sasaran, pupuk dibuang di batang sawit sekarang bisa dihemat, penggunaan obat-obatan juga dikurangi,” katanya. Menurut dia, empat dari tujuh koperasi yang tergabung dalam perhimpunan tersebut sebelumnya merupakan petani plasma binaan PT Tania Selatan milik grup Wilmar. Nantinya, penjualan produk sawit bersertifikat dari Sapta Tunggal Mandiri akan dilakukan melalui salah satu model rantai pasok RSPO, yakni mass balance. Dia mengemukakan perolehan sertifikat RSPO itu juga menunjukkan bahwa pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan bisa dilakukan petani swadaya.

Sumber:

Diringkas dari <http://industri.bisnis.com/read/20160823/99/577598/2.700-petani-sawit-swadaya-sumsel-raih-sertifikat-rspo>

Pertanian berkelanjutan tidak hanya dilakukan untuk menjaga proses produksi pertanian ramah terhadap lingkungan, namun juga dilakukan agar produk pertanian aman dikonsumsi manusia. Untuk itu, pada tahun 2010 telah dikeluarkan Permentan No. 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan hasil Pertanian, yang terdiri dari: (i) HACCP – Keamanan Pangan

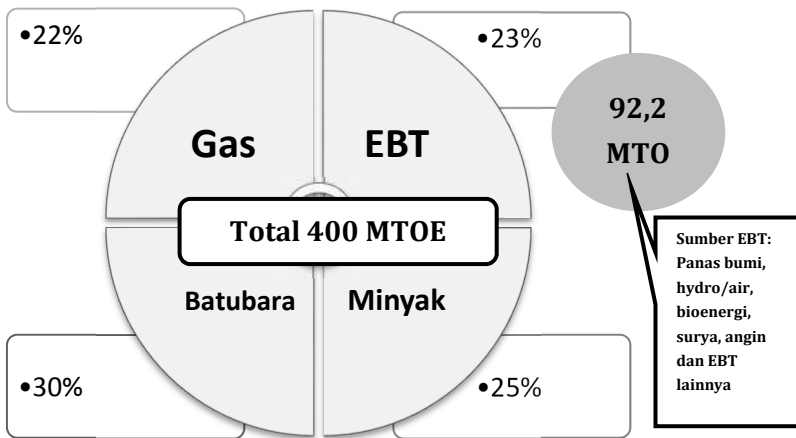
berdasar *Hazard Analysis Critical Control Point*-suatu konsepsi manajemen mutu untuk memberikan jaminan keamanan dari produk pangan dengan menerapkan SNI; (ii) GAP: suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan/ternak, yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, layak dikonsumsi; (iii) GHP: suatu pedoman yang menjelaskan cara penanggulangan penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi; (iv) GMP: suatu pedoman yang menjelaskan cara pengolahan hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi. Dalam ketentuan tersebut di atas, praktek di dalam industri pertanian lebih difokuskan pada keamanan konsumsi untuk manusia, meskipun pada akhirnya beberapa kontrol terhadap bahaya keamanan pangan akan berdampak pula pada penurunan limbah yang berbahaya bagi kualitas lingkungan hidup.

### **Akses Energi Berkelanjutan**

Produksi dan konsumsi energi Indonesia selama ini sangat tergantung pada bahan bakar fosil, baik minyak bumi maupun batu bara. Padahal akses masyarakat terhadap energi masih relatif rendah, baru mencapai 81% pada tahun 2014. Akses energi pada akhir tahun 2019 akan dipenuhi menjadi 100% dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya energi untuk penggunaan di dalam negeri, serta meningkatkan penggunaan sumber daya energi terbarukan terutama untuk wilayah terpencil, perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan.

Di dalam RPJMN 2015-2019 hal ini dituangkan di dalam arah kebijakan dan sasaran penggunaan gas bumi dari 53% pada tahun 2015 menjadi 64% pada tahun 2019. Langkah ini didukung dengan pembangunan infrastruktur gas baik *floating storage*, regasifikasi *onshore*, pembangunan pipa gas dari 514 km (2014) menjadi 6.300 km lebih pada tahun 2019, serta pembangunan SPBG yang semula hanya 40 unit (2014) menjadi 118 unit pada akhir tahun 2019. Pasokan energi lainnya, diperoleh dari sumber energi bersih dan terbarukan,

yaitu sumber energi air, geothermal, tenaga surya, tenaga angin/bayu. Rencana diversifikasi sumber energi, terutama penggunaan energi baru dan terbarukan serta sumber energi bersih lainnya, sudah dicantumkan di dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Dengan diversifikasi sumber energi, maka target komposisi penyediaan energi primer pada tahun 2025 adalah sebagaimana dalam Gambar 7.2 berikut.



**Gambar 7.2 Target Penyediaan Energi Primer EBT (Energi Baru dan Terbarukan) Tahun 2025<sup>38</sup>**

Selain penyediaan dan distribusi energi menggunakan jaringan (*on grid*), penggunaan EBT memberi peluang untuk meningkatkan elektrifikasi daerah yang jauh dari jangkauan layanan melalui jaringan. Peluang ini sangat sesuai untuk peningkatan akses energi untuk semua bagi masyarakat di daerah terisolir, perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan, yang pada umumnya jauh dari jaringan listrik nasional. Salah satu contoh manfaat energi tenaga surya di luar jaringan nasional disampaikan dalam Kotak 7.4 berikut ini.

<sup>38</sup> Sumber: Majalah Gatra, 24 Mei 2017

#### **Kotak 7.4 Sumut Listriki Daerah Terpencil Pakai PLTS**

**Kabar24.com**, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara membuka peluang mengoperasikan pembangkit listrik alternatif untuk melayani warganya di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN. Wakil Gubernur Sumatra Utara Nurhajizah Marpaung mengungkapkan Pemprov sedang menjajaki pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di daerah pelosok.

"Masih banyak daerah terpencil atau pelosok yang belum menikmati listrik. Sementara yang lainnya juga masih mengalami pemadaman hampir setiap hari," ujarnya pada Senin (22/5). Dia menjelaskan belum lama ini Pemprov menggelar pertemuan dengan dua perusahaan swasta yang dinilai berkemampuan membangun PLTS. Keduanya adalah PT Elektrik Vine Industries dan PT Cahaya Samudra Global. Pertemuan itu membahas rencana pembangunan PLTS di daerah-daerah terpencil Sumut yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. PLTS dipilih antara lain karena proses pembangunan yang relatif lebih cepat, lebih murah, dan ramah lingkungan.

Selain itu, PLTS juga tidak memerlukan lahan yang luas seperti pembangkit konvensional. Selain itu, instalasi pembangkit juga dapat dioperasikan dengan waktu yang jauh lebih lama, atau hingga 20 tahun, tanpa harus mengalami penggantian atau perbaikan yang berarti. Meskipun PLN meyakini bahwa cadangan listrik Sumut sudah mampu mencukupi kebutuhan daerahnya, terlebih dengan kedatangan vessel marinir power plant (VMPP) berkapasitas 240 MW, namun menurut Wagub, Pemprov menilai bahwa PLTS masih diperlukan untuk daerah terpencil.

"Karena kenyataannya masih banyak masyarakat di daerah terpencil belum menikmati listrik. Contohnya masyarakat yang tinggal dekat dengan PLTA Siguragura, masih banyak yang gelap.".

Karena itu, dia memastikan Pemprov akan mendukung berbagai hal yang dibutuhkan kedua perusahaan tersebut jika memang keduanya ingin membangun PLTS di Sumut, terutama soal perizinan. Pada tahap awal, Wagub menginginkan PLTS dapat mengaliri listrik ke 500 rumah. Pemprov yakin kedua perusahaan itu berkemampuan membangun PLTS karena telah berpengalaman melakukannya serta memiliki standar nasional dan Eropa.

Sumber:

<http://kabar24.bisnis.com/read/20170522/78/656004/sumut-listriki-daerah-terpencil-pakai-plts>. Mei 22 / 2017 20:08 WIB Oleh : Yoseph Pencawan

Beberapa langkah baik dalam tingkat rencana pembangunan nasional maupun rencana pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kebijakan, program dan langkah nyata untuk

melaksanakan berbagai *Goals* dalam *SDGs* untuk melaksanakan ekonomi berkelanjutan/hijau. Langkah-langkah tersebut tentu saja belum cukup untuk mewujudkan pelaksanaan Ekonomi Hijau. Perjalanan masih panjang, masih banyak agenda pembangunan berkelanjutan yang perlu diterapkan dalam pilar ekonomi ke depan. Untuk itu, diperlukan konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Nasional.

## Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati

Lingkungan hidup merupakan unsur baru dalam tujuan pembangunan global. Dalam pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup menduduki posisi sentral, karena transformasi yang diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan adalah “menerapkan lingkungan hidup dan alam seisinya” sebagai pembatas kehidupan; kalau manusia ingin menjalani kehidupan yang berkelanjutan. Volume dan kualitas bumi dan alam seisinya adalah pembatas seluruh aktivitas kehidupan kita. Dengan bahasa sederhana, kita semua harus sadar bahwa, kita hidup di dalam akuarium besar, sehingga apapun yang kita lakukan dan berdampak pada kondisi di dalam “akuarium” akan kembali kita rasakan. Keberadaan dan kualitas ekosistem “akuarium” akan menentukan apakah kita (manusia dan makhluk hidup lainnya) akan bisa terus hidup di dalamnya.<sup>39</sup> Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati tidak hanya diwakili oleh Goal yang berada di pilar lingkungan hidup di SDGs, namun “menjaga lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati” harus menjadi prinsip kegiatan untuk mencapai target dalam setiap *Goals* di SDGs.

Kalau kita hanya melihat pilar Lingkungan Hidup di dalam SDGs, maka secara target dan indikator, Goal dalam pilar Lingkungan Hidup

---

<sup>39</sup> Lihat kembali Bab 3 dalam Buku ini



memang ditempatkan setara dengan pilar lainnya. Namun kalau kita melihat Goal-goal lain, maka “unsur” keterbatasan dan pencegahan dampak semua aktivitas kita ke dalam lingkungan hidup sudah diarusutamakan ke dalam setiap target dan indikator dalam SDGs, terutama dalam perilaku lembaga dan individu manusia, yang tercermin pada Goal 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab. Perlakuan kita terhadap lingkungan hidup dan alam seisinya sebagai pembatas kelangsungan hidup kita inilah yang sangat perlu menjadi “*mindset*” dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian *Goals* dan *beyond the goals in the SDGs*.

Pembahasan mengenai “*mindset*” tersebut di atas sudah dilakukan di Bab 3 Konsep dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Bab ini membahas pilar Lingkungan Hidup sebagai tujuan dan target pembangunan yang menjadi bagian/komponen dari pembangunan berkelanjutan dan secara “terbatas” diukur melalui target dan indikator di dalam SDGs. Pembahasan dalam Bab ini akan dimulai dengan definisi lingkungan hidup, kemudian dilanjutkan dengan Goal dan Target yang terkait di dalam SDGs serta penerapannya di Indonesia.

## **8.1 Lingkungan Hidup dan Cakupannya**

Lingkungan hidup didefinisikan dalam berbagai versi. Berbagai definisi itu kami sampaikan di sini untuk mendapatkan gambaran utuh, karena satu definisi saling memperkuat dan mengutuhkan definisi yang lainnya. Beberapa definisi lingkungan hidup antara lain adalah:

- a. *“The sum total of all surroundings of a living organism, including natural forces and other living things, which provide conditions for development and growth as well as of danger and damage”*.<sup>40</sup> Menurut Webster, lingkungan hidup adalah “a : the

---

<sup>40</sup> <http://www.businessdictionary.com/definition/environment.html>

*complex of physical, chemical, and biotic factors (such as climate, soil, and living things) that act upon an organism or an ecological community and ultimately determine its form and survival; b : the aggregate of social and cultural conditions that influence the life of an individual or community*"<sup>41</sup>

- b. Menurut *law dictionary*, lingkungan hidup adalah "*the milieu in which an organism lives. Includes the sum of all of its surroundings. This includes natural forces and other living things. It defines the conditions of danger and damage to existence, as well as development and growth*"<sup>42</sup>.
- c. Selanjutnya, definisi lebih konkrit adalah "*The environment can be considered to be divided into systems. Environmental science is then how these systems interact with each other. Systems involved are: Biosphere - all living organisms; Lithosphere - the Earth's solid surface (rock, soil, etc.); Hydrosphere - Water in all its forms: liquid, solid (ice), vapor; and Atmosphere - the air surrounding the Earth*"<sup>43</sup>.
- d. Menurut UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia.

Dari beberapa definisi tersebut di atas dan khususnya yang terakhir, keanekaragaman hayati/*biodiversity* adalah *biosphere* yang merupakan bagian dari lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menemukan pola pembangunan yang memanfaatkan lingkungan hidup untuk memberikan kehidupan untuk saat ini tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang

---

<sup>41</sup> <https://www.merriam-webster.com/dictionary/environment>

<sup>42</sup> <http://thelawdictionary.org/environment/>

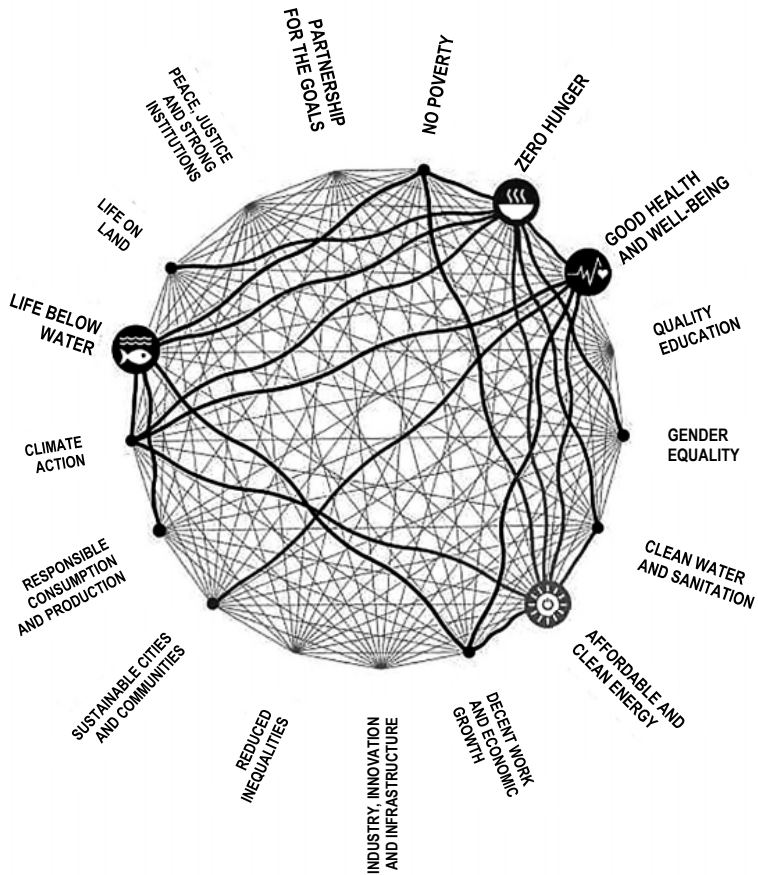
<sup>43</sup> [http://wikieducator.org/Science\\_Man\\_and\\_His\\_Environment/What\\_is\\_Environment](http://wikieducator.org/Science_Man_and_His_Environment/What_is_Environment)

untuk menggunakan lingkungan hidup bagi kesejahteraannya. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya tentang lingkungan hidup, namun juga tentang bagaimana manusia berinteraksi dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk kesejahteraannya. Definisi lengkap ini, - khususnya kelengkapan unsur dalam lingkungan hidup, dan perilaku manusia - merupakan kunci dari terwujudnya Ekonomi Hijau. Perilaku manusia merupakan kunci terwujudnya Ekonomi Hijau, baik perilaku manusia sebagai individu, dalam kelompok masyarakat, dalam kelompok organisasi di Pemerintahan, di perusahaan dan di lembaga-lembaga non pemerintah.

Di dalam SDGs, perilaku ramah lingkungan, perilaku yang sadar akan pentingnya pembangunan berkelanjutan dibangun dalam *Goal* yang berada di kelompok Pilar Sosial. Dalam SDGs, *goal-goal* pembangunan manusia tidak hanya membangun manusia yang sehat dan cerdas, namun juga membangun manusia yang memiliki perilaku sosial menjaga lingkungan hidup tetap berkelanjutan. Sebagian lagi tercermin di dalam *Goal* pada Pilar Ekonomi, yang memberi pedoman bagaimana perilaku ekonomi, dalam menyediakan energi, dalam melakukan kegiatan industri, dalam berusaha ekonomi lainnya, serta dalam memperlakukan lingkungannya, harus menjaga lingkungan hidup tetap berkelanjutan.

Sementara itu, pilar lingkungan adalah penjaagaan lingkungan hidup itu sendiri baik *lithosphere*, *hydrosphere*, maupun *atmosphere*, sehingga *biosphere* dapat tetap terjaga memberi fungsi kehidupan berkelanjutan. Tentu saja pembangunan berkelanjutan tidak hanya diwakili oleh 17 *Goals* secara sendiri-sendiri, namun 17 *Goals* tersebut saling terkait dan memiliki ketergantungan satu sama lain, untuk menjadikan lingkungan hidup dan seisinya berkelanjutan bagi umat manusia. Berdasarkan kajian ICSU (2017), Goal 14 dan 15 ini memiliki

keterkaitan paling tinggi dengan goal-goal yang lainnya (Gambar 8.1).<sup>44</sup>



Sumber: *A Guide to SDGs Interactions: From Science to Implementation*, International Council for Science (ICSU), 2017

**Gambar 8.1 Goal SDGs dan Keterkaitannya**

---

<sup>44</sup> *A Guide to SDGs Interactions: From Science to Implementation*, International Council for Science (ICSU), 2017

## **8.2 Pembangunan Lingkungan Hidup dan *Biodiversity* di dalam SDGs**

Di dalam SDGs, lingkungan hidup dan *biodiversity* diwakili oleh Goal 6. Air Bersih dan Sanitasi yang Layak; Goal 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan; Goal 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab; Goal 13. Perubahan Iklim, Goal 14. Konservasi dan Pemanfaatan berkelanjutan atas samudera, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan, dan Goal 15. Perlindungan, pelestarian, peningkatan pemanfaatan secara berkelanjutan atas ekosistem daratan, pengelolaan hutan berkelanjutan, mencegah desertifikasi, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan, dan penghentian kehilangan *biodiversity*.

### **Goal 6. Air Bersih dan Sanitasi yang Layak**

Air bersih memegang peranan penting dalam semua aspek kehidupan keluarga, baik untuk kebutuhan air minum maupun keperluan sanitasi dalam rumah tangga. Akses terhadap air bersih dan sanitasi sangat menentukan kesehatan bayi, balita dan anak, dimana dalam pencapaian MDGs kita masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Pada saat yang sama, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan air untuk pertanian dan pangan, untuk industri serta kebutuhan sosial ekonomi lainnya juga meningkat.

Dalam konteks SDGs, peningkatan penggunaan air serta kompetisi penggunaan air antar kegiatan sosial dan ekonomi perlu dikelola dengan baik, karena keterbatasan planet untuk menyediakan, menyimpan dan menjaga siklus air. Keseimbangan antara akses penggunaan yang masih harus ditingkatkan, kemampuan menjaga fungsi planet untuk menyimpan dan menjaga siklus yang dapat memenuhi kebutuhan yang terus berkembang harus dijaga. Siklus dan saling ketergantungan inilah yang menjadi faktor penting yang harus dijaga dalam SDGs; yang sebelumnya tidak ada dalam MDGs. Oleh sebab itu, keterkaitan Tujuan ini dengan Tujuan Kesehatan dan pola

penggunaan air yang efisien serta kelestarian lingkungan untuk menjaga sumber-sumber/mata air sangat perlu diperhatikan dalam pelaksanaan SDGs secara keseluruhan. Dalam Tabel 8.1 berikut adalah target untuk Goal 6 yang perlu dicapai dalam SDGs.

**Tabel 8.1 Target untuk Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi yang Layak**

<b>Target</b>	<b>Isi Target</b>
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
6.2.	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
6.3.	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
6.6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
<b>Cara pelaksanaan</b>	
6.a.	Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.
6.b	Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.

## **Goal 11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Berdaya Tahan dan Berkelanjutan**

Pertumbuhan perkotaan dan penduduk yang bermukim di perkotaan dalam beberapa dekade ini terus meningkat. Secara global, pada saat ini sebanyak 54% penduduk dunia hidup di perkotaan, dan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2045 diperkirakan penduduk dunia di perkotaan akan mencapai 6 miliar orang, atau meningkat 1,5 kali dari penduduk perkotaan saat ini. Pada saat ini, 80% GDP juga dihasilkan di perkotaan, maka dengan peningkatan penduduk di perkotaan tersebut perencanaan pertumbuhan perkotaan memegang peran penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.<sup>45</sup>

Pertumbuhan perkotaan dan penduduk di dalamnya akan berdampak pada konsumsi energi yang semakin besar, kebutuhan penyediaan energi, air, infrastruktur, permukiman, transportasi dan tata ruang untuk kenyamanan dan keamanan permukiman serta potensi polusi yang akan ditimbulkannya.

Di Indonesia sendiri, Negara dan kota-kota yang masih terus bertambah dan tumbuh memerlukan penyiapan pertumbuhan perkotaan yang baik, antisipasi penyediaan lahan dan air bersih serta penjagaan terhadap polusi udara. Tantangan yang besar adalah penataan ruang agar penggunaan ruang di perkotaan tidak hanya nyaman dan aman, namun juga akses terhadap layanan dasar serta keseimbangan penggunaan ruang. Penataan dan perencanaan pertumbuhan perkotaan yang kurang baik berpotensi menyumbang produksi limbah padat dan cair, polusi udara dan juga timbulnya permukiman kumuh. Sehubungan dengan itu, cukup banyak target yang dicanangkan dalam Goal 11 SDGs sebagai berikut.

---

<sup>45</sup> <http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview>

**Tabel 8.2 Target untuk Tujuan 11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Berdaya Tahan dan Berkelanjutan**

<b>Target</b>	<b>Isi Target</b>
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.
11.2.	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.
11.3.	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas
<b>Cara Pelaksanaan</b>	
11a.	Mendukung hubungan positif ekonomi, sosial dan lingkungan hidup antar urban, peri-urban dan rural areas melalui penguatan perencanaan pembangunan nasional dan regional.
11b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan secara holistik risiko



Target	Isi Target
	bencana di semua lini, sesuai dengan the <i>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>
11c	Mendukung LDCs termasuk melalui dukungan teknis dan finansial dalam mendirikan bangunan yang berdaya tahan dan berkelanjutan dengan menggunakan material lokal.

## **Goal 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan**

Di dalam *Goals SDGs* lain lebih banyak berkaitan dengan target sektor agar pembangunan sektor tersebut mendukung pembangunan berkelanjutan. Pada *Goal* ini, penekanan adalah pada pelaku, baik perusahaan (korporasi), lembaga maupun individu masyarakat untuk mengubah perilaku menjadi perilaku yang berkelanjutan. Perilaku ini tidak hanya dari sisi penggunaan/pasokan bahan/input produksi, namun juga mencakup proses produksi, distribusi dan pemasaran serta konsumsi baik sebagai korporasi, lembaga maupun individu dalam rumah tangga. Dalam proses pasokan bahan/input produksi sudah harus diseleksi dengan standar proses pengadaan yang berkelanjutan. Pada proses produksi melakukan proses produksi yang efisien dan berkelanjutan, serta menghasilkan limbah yang minimal atau pada tingkat yang aman dampaknya terhadap manusia dan lingkungan hidup. Demikian pula dalam penggunaan bahan dianjurkan untuk menggunakan limbah/*recycle* dan menggunakan wadah yang dapat digunakan berulang serta mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak terbarukan dan yang akan menimbulkan dampak buruk terhadap manusia dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan Goal ini, sudah disepakati beberapa target dengan indikator sebagaimana diuraikan dalam Tabel 8.3. berikut.

**Tabel 8.3 Target untuk Tujuan 12. Menjamin Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan**

<b>Target</b>	<b>Isi Target</b>
12.1	Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i> , dengan semua Negara mengambil tindakan, dipimpin Negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas Negara berkembang.
12.2.	Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan
12.3.	Pada tahun 2020, menurunkan setengah dari limbah pangan global di tingkat retail dan tingkat konsumen serta menurunkan susut pangan sepanjang rantai produksi dan pasokan, termasuk susut pasca panen.
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan lokal yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.
<b>Cara pelaksanaan</b>	
12a.	Mendukung lokal berkembang dalam pengembangan iptek yang mengarah ke pengembangan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
12b	Membangun dan menerapkan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan atas pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan budaya dan produk lokal
12c	Merasionalisasi subsidi <i>fossil-fuel</i> yang mendorong konsumsi yang boros, dengan menghilangkan distorsi pasar selaras dengan kondisi lokal, termasuk melalui

Target	Isi Target
	restrukturisasi perpajakan dan <i>phasing out</i> subsidi yang membahayakan, untuk mencerminkan dampak terhadap lingkungan hidup, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik dan kondisi Negara berkembang dan meminimalkan dampak yang tidak diinginkan terhadap perlindungan masyarakat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.

### Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan ini secara spesifik memiliki 3 target yaitu: (i) penguatan ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bencana berkaitan dengan iklim dan bencana alam; (ii) mengintegrasikan langkah penanganan perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional; serta (iii) meningkatkan pendidikan, kesadaran dan kapasitas manusia dan lembaga untuk mitigasi, adaptasi, penurunan dampak dan peringatan dini terhadap perubahan iklim. Target ini memperkuat perjanjian perubahan iklim yang memiliki target kuantitatif global, dimulai sejak *Kyoto Protocol* untuk menekan pemanasan global sampai dengan tahun 2020, yang dilanjutkan dengan *Paris Agreement* untuk mengendalikan pemanasan global setelah 2030. Melalui Tujuan 13 didorong agar Negara-negara segera mengintegrasikan penanganan perubahan iklim ke dalam pembangunan nasional, agar Goal-goal lain di dalam SDGs terjaga, agar pembangunan berkelanjutan tidak terganggu oleh dampak perubahan iklim. Pencapaian Goal 13 dalam SDGs dicerminkan pada Target sebagaimana tercantum dalam Tabel 8.4. sebagai berikut.

**Tabel 8.4 Target untuk Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim**

<b>Target</b>	<b>Isi Target</b>
13.1.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
13.2.	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.
13.3	Memperbaiki pendidikan, peningkatan kesadaran dan kapasitas manusia dan kelembagaan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta penurunan dampak dan peringatan dini.
<b>Cara pelaksanaan</b>	
13.a	Menerapkan komitmen yang dilakukan oleh kelompok Negara maju terhadap UNFCCC, khususnya tujuan untuk mobilisasi bersama dana sebesar USD 100 miliar setiap tahunnya sampai tahun 2020 dari berbagai sumber, untuk memenuhi kebutuhan Negara berkembang dalam konteks pelaksanaan aksi mitigasi secara nyata dan transparansi implementasinya serta berjalannya <i>Green Climate Fund</i> .
13.b	Mendorong mekanisme untuk peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan perubahan iklim di LDCs dan SIDS, termasuk fokusnya pada perempuan, generasi muda dan masyarakat lokal dan termajinalkan.

## **Tujuan 14. Ekosistem Laut**

Bertujuan untuk melakukan konservasi dan menjaga pemanfaatan sumber daya samudera, laut dan pesisir untuk pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target dalam Goal 14 ini, tidak hanya bermanfaat untuk pengelolaan ekosistem laut berkelanjutan, namun juga berdampak pada pencapaian Goal SDGs lainnya, yaitu Goal 1, Goal 2, Goal 8, Goal 11, Goal 12 dan Goal 13. Hasil analisis ilmiah oleh *International Council of Science (ICSU, 2017)* memperlihatkan keterkaitan antara Goal 14 dengan goal-goal tersebut di atas sebagaimana tergambar dalam Kotak 8.1.

### Kotak 8.1 Keterkaitan pelaksanaan Goal 14. Ekosistem Laut dengan Goal SGDs lainnya



Berdasarkan hasil penelitian scientist yang terkumpul dalam ICSU, Goal 14. Ekosistem Laut sangat berpengaruh dan terkait dengan tercapainya tujuan:

SDGs-1 Penurunan Kemiskinan;  
SDGs-2 Penurunan Kelaparan;  
SDGs-8 Pekerjaan Layak dan  
Pertumbuhan Ekonomi;  
SDGs-11 Kota dan Permukiman yang  
Berkelanjutan;  
SDGs- 12 Konsumsi dan Produksi  
yang bertanggungjawab;  
SGDs-13 Penanganan Perubahan  
Iklim.

Sumber: *A Guide to SDGs Interactions: From Science to Implementations*,  
International Council for Science/ICSU, 2017

Adapun beberapa target yang sudah disepakati dalam Goal 14 adalah: (i) mencegah dan mengurangi polusi laut khususnya yang berasal dari daratan, termasuk puing-puing laut dan polusi nutrisi; (ii) melindungi dan mengelola secara berkelanjutan ekosistem laut dan pesisir; (iii) meminimalkan dan menangani dampak dari peningkatan kandungan asam di laut serta (iv) mengatur pemanenan ikan di laut dan *IUU fishing*; dan (v) konservasi minimal 10% area laut dan pesisir sesuai informasi ilmu pengetahuan; (vi) menjaga subsidi yang mendorong kapasitas berlebih dan *overfishing* serta yang mendorong *IUU fishing*; (vii) meningkatkan manfaat ekonomi laut kepada masyarakat di Negara kepulauan kecil dan Negara berkembang dengan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, antara lain melalui pengelolaan perikanan berkelanjutan, perikanan budidaya dan pariwisata. Secara lengkap, target SDGs ke 14. Ekosistem Kelautan dapat dilihat dalam Tabel 8.5.

**Tabel 8.5 Target untuk Tujuan 14. Ekosistem Laut**

Target	Isi Target
14.1.	Pada tahun 2025, melindungi dan secara signifikan menurunkan berbagai jenis polusi laut, terutama yang berkaitan dengan aktivitas di daratan, termasuk <i>“marine debris and nutrient pollution”</i> .
14.2.	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.
14.3	Meminimalkan dan menangani dampak dari <i>ocean acidification</i> , termasuk melalui berbagai tingkat kerjasama ilmiah.
14.4	Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.
14.5	Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.
14.6.	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yg berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yg berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur & menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus & berbeda yang tepat & efektif utk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the <i>World Trade Organization</i> .
14.7	Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi kepada SIDS dan LDCs atas penggunaan sumber daya lautan yang berkelanjutan, termasuk melalui pengelolaan perikanan, <i>aquaculture</i> dan wisata laut yang berkelanjutan.
Cara pelaksanaan	
14.a	Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas riset dan teknologi transfer kelautan, dengan memperhatikan <i>IOC Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology</i> , untuk memperbaiki kesehatan laut

Target	Isi Target
	dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut terhadap pembangunan di Negara berkembang, khususnya SIDS dan LDCs.
14.b	Menyediakan akses untuk buruh nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar.
14.c	Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> , yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari " <i>The future we want</i> ".

## Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Bertujuan untuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya daratan secara berkelanjutan, yang memiliki target antara lain: (i) menjaga konservasi dan restorasi serta pemanfaatan ekosistem air dan daratan sejalan dengan perjanjian internasional; (ii) menerapkan pengelolaan semua jenis hutan; (iii) memerangi penggurunan (*desertification*), mengembalikan lahan terdegradasi dsb. Sebagai satu kesatuan, "perilaku ramah lingkungan" yang dicerminkan dalam goal SDGs lainnya sangat terkait dengan upaya pelestarian yang ditargetkan di dalam Goal 14. Pelestarian Ekosistem Lautan dan Goal 15. Pelestarian Ekosistem Daratan. Secara lengkap isi target dalam Tujuan 15. Pelestarian Ekosistem Daratan adalah sebagai berikut.

**Tabel 8.6 Target untuk Tujuan 15. Ekosistem Daratan**

Target	Isi Target
15.1.	Pada tahun 2020 menjamin konservasi, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan air tawar dan jasa ekosistemnya, terutama hutan, rawa, pegunungan dan lahan kering sudah selaras dengan kewajiban internasional yang sudah disepakati.
15.2.	Pada tahun 2020, mendorong penerapan pengelolaan berkelanjutan untuk semua jenis hutan, menghentikan penggurunan, mengembalikan hutan terdegradasi dan secara substansial meningkatkan penghutanan kembali

Target	Isi Target
15.3	Pada tahun 2030, memerangi penggurunan, mengembalikan kondisi lahan dan tanah terdegradasi, termasuk lahan yang terkena dampak penggurunan, kekeringan dan banjir dan berusaha keras untuk mencapai kondisi <i>land degradation-neutral world</i> .
15.4	Pada tahun 2030, menjamin konservasi ekosistem gunung, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitas penyediaan manfaat yang <i>essential</i> untuk pembangunan berkelanjutan.
15.5	Melakukan langkah " <i>urgent</i> " dan signifikan untuk menurunkan degradasi habitat alam, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah punahnya spesies yang terancam.
15.6	Mendorong pembagian manfaat yang " <i>fair and equitable</i> " atas penggunaan sumber daya genetik dan meningkatkan akses terhadap sumber daya tersebut secara tepat sesuai kesepakatan internasional.
15.7	Melakukan langkah urgen untuk menghentikan perdagangan liar dan <i>poaching</i> spesies flora dan fauna yang dilindungi serta menangani <i>supply dan demand</i> yang produk <i>wildlife</i> yang <i>illegal</i> .
15.8	Pada tahun 2020, memperkenalkan aturan untuk mencegah dan menurunkan secara signifikan dampak invasif dari <i>alien species</i> di daratan dan perairan tawar serta mengendalikan atau membasmi <i>species priority</i> .
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam sistem perencanaan nasional dan lokal, dalam proses pembangunan, penurunan kemiskinan dan neraca keuangan Negara.
Cara Pelaksanaan	
15.a	Memobilisasi dan meningkatkan secara signifikan sumber daya finansial dari berbagai sumber untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem berkelanjutan.
15.b	Memobilisasi secara signifikan sumber daya dari seluruh sumber pada setiap tingkat, untuk mendanai pengelolaan hutan berkelanjutan dan menyediakan insentif yang cukup kepada Negara berkembang, untuk memperbaiki pengelolaan, termasuk untuk konservasi dan penghutan kembali.
15.c	Meningkatkan dukungan global untuk upaya memerangi pencurian dan perdagangan spesies terlindungi, termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam menjalankan peluang <i>sustainable livelihood</i> .



### 8.3 Pembangunan Lingkungan Hidup dan *Biodiversity* di Indonesia

Apapun definisi yang digunakan, secara singkat jelas bahwa lingkungan hidup yang berisi *biodiversity* di dalamnya merupakan faktor pembatas yang akan membedakan cara pembangunan selama ini (*business as usual*) dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mempertimbangkan planet (alam dan seisinya), lingkungan dan *biodiversity* sebagai pembatas. Dengan demikian, dimensi pembangunan ini dalam SDGs merupakan hal yang paling penting dan fundamental untuk terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan lingkungan hidup dan *biodiversity* (keanekaragaman hayati/kehati) sudah saatnya ditangani dengan benar, dengan beberapa alasan berikut.

- a. Kehati eksistensinya perlu dijaga karena merupakan kunci dari siklus makhluk hidup termasuk manusia di dalam alam semesta ini yang dikenal dengan ekosistem.
- b. Keseimbangan siklus ini perlu diketahui perimbangannya dari waktu ke waktu dan dijaga sehingga eksistensi kehidupan di planet ini akan tetap terjaga.
- c. Sebagian kecil *biodiversity* yang ada di Indonesia sudah diketahui dan didokumentasikan, namun pengetahuan pemanfaatannya masih sangat rendah.
- d. Apabila kita memperlakukan *biodiversity* dan ekosistemnya dengan tidak seimbang, maka siklus hidup akan tidak berlanjut dan menimbulkan kepunahan salah satu unsur ekosistem dan pada akhirnya akan punah seluruh rangkaian dalam ekosistem tersebut.
- e. Belum semua siklus ini dikenali dan diketahui kondisinya dari waktu ke waktu, dan inilah yang perlu diantisipasi dan dipelajari, karena secara tidak sengaja kita bisa memusnahkan salah satu makhluk yang memiliki fungsi dan peran penting di

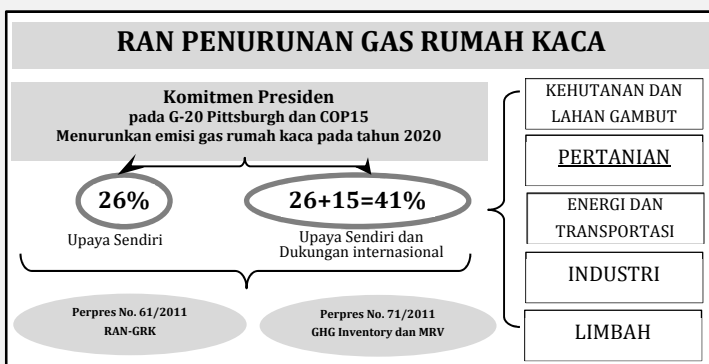
dalam ekosistem yang di kemudian hari akan dapat mengganggu siklus kehidupan seluruh planet yang kita huni.

- f. Lingkungan hidup memiliki arti penting untuk eksistensi *biodiversity*, karena menyediakan tempat tumbuh/habitat sehingga harus dijaga agar dapat mendukung eksistensi ekosistem kehidupan dan *biodiversity* yang ada di dalamnya.

Menyadari pentingnya hal tersebut, maka Indonesia sudah memiliki kebijakan dan langkah konkrit pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Biodiversity*:

### Kotak 8.2 Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia

Komitmen penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebagai kontribusi Indonesia dalam Kyoto Protocol adalah penurunan sebesar 26% dari emisi yang dihasilkan dari kegiatan yang biasa dilaksanakan (*business as usual*). Berdasarkan model yang disusun untuk memperkirakan penurunan emisi, maka diperoleh 5 (lima) sektor utama penyumbang perubahan iklim yang akan berkontribusi signifikan untuk menurunkan emisi GRK Indonesia adalah: (i) sektor kehutanan dan lahan gambut; (ii) sektor pertanian; (iii) sektor energi dan transportasi; (iv) sektor industri; dan (v) sektor limbah. Penurunan emisi akan diperoleh lebih besar lagi apabila ada kerjasama dan dukungan dari masyarakat internasional. Indonesia konsisten dengan komitmen tersebut dengan mengarusutamakan langkah penurunan emisi tersebut ke dalam RPJMN 2010-2014. Kelanjutan komitmen sesuai *Paris Agreement* juga akan dilanjutkan untuk diarusutamakan ke dalam RPJMN mendatang.



Sumber: Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah kaca

**Pertama**, terkait dengan perubahan iklim, Indonesia sudah melakukan komitmen *Kyoto Protocol* untuk menurunkan emisi sebesar 26% dari *business as usual* pada tahun 2020. Langkah detail untuk komitmen ini sudah diintegrasikan ke RPJMN 2015-2019 khususnya ke dalam 5 (lima) sektor penting yaitu: Kehutanan; Pertanian; Industri; Energi dan Persampahan. Selanjutnya, langkah konkrit dengan targetnya sudah disatukan di dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), pada tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Perpres 69/2011 (Kotak 8.2). Rencana Aksi Nasional ini sudah diturunkan ke tingkat *sub-national* yaitu tingkat provinsi, untuk menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan. Sekretariat RAN GRK sudah dibentuk untuk mengkoordinir pelaksanaan RAN dan RAD GRK, dan berfungsi sebagai “klinik” bagi daerah yang membutuhkan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan penanganan perubahan iklim.

Selanjutnya, pada tahun 2013 sudah disusun kajian kerentanan di beberapa provinsi yang dinilai rentan terhadap dampak perubahan iklim. Langkah adaptasi sudah disusun dan sudah disatukan ke dalam Review RAN GRK pada tahun 2015, menjadi satu kesatuan RAN Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Dengan langkah-langkah tersebut di atas, maka Indonesia sudah melaksanakan SDGs tujuan ke-13 dan targetnya secara detail. Langkah-langkah ini terus dikoordinasikan, dipantau dan diukur hasilnya. Langkah perencanaan, pemantauan dan pengukuran memang masih belum sempurna, namun kebijakan dan langkah yang sudah disusun oleh Indonesia berkaitan dengan Goal 13, sudah dimulai sejak tahun 2011.

Sebagai kelanjutan dari langkah penurunan emisi dengan target penurunan 26% dari *business as usual*, Indonesia juga sudah memberikan komitmen penurunan emisi sampai dengan tahun 2030. Target penurunan emisi yang dikontribusikan Indonesia pada saat KTT Perubahan Iklim di Paris tahun 2015 adalah penurunan emisi sebesar 29% dari *business as usual*. Dalam komitmen penurunan emisi

GRK sampai tahun 2020, lebih dari 80% target penurunan emisi bertumpu pada sektor kehutanan dan lahan gambut.

Sementara itu, pada komitmen 2030, penurunan emisi akan lebih mengandalkan pada kegiatan berbasis energi, yaitu pembangkitan energi, penggunaan energi baik di sektor transportasi, industri maupun penggunaan energi di tingkat rumah tangga. Target penurunan emisi di sektor berbasis lahan hanya mencapai sekitar 40% dan target penurunan emisi dari sektor berbasis energi menjadi sekitar 60%-nya<sup>46</sup>. Langkah ini sejalan dengan perkiraan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga perkiraan kebutuhan dan peningkatan penyediaan energi, transportasi masyarakat seiring dengan meningkatnya populasi dan mobilitas masyarakat dan perkembangan industri.

Langkah penurunan emisi tersebut merupakan langkah yang berkesinambungan dan sudah tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Untuk komitmen pelaksanaan sampai dengan tahun 2030, masih perlu diarusutamakan ke dalam RPJMN 2020-2025 dan RPJPN 2026-2045 mendatang. Capaian target penurunan emisi di berbagai bidang/sektor pembangunan akan berpeluang besar terjadi, terutama apabila didukung oleh keberhasilan dalam penerapan Ekonomi Hijau. Salah satu contoh kegiatan penurunan emisi di tingkat masyarakat disampaikan dalam Kotak 8.3 berikut.

### **Kotak 8.3 Mitigasi dan Cegah Emisi, Puluhan Ribu Pohon Ditanam di Gunungkidul**

**Metrotvnews.com, Gunungkidul:** Puluhan ribu tanaman ditanam di puluhan desa di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penanaman pohon berbagai macam jenis itu dalam rangka mitigasi bencana serta untuk mengurangi emisi karbon.

Setidaknya ada 26.690 tanaman kayu; 39.810 tanaman buah-buahan seperti mangga, rambutan, jambu, hingga kelengkeng; dan 900 tanaman pelindung. Bibit-

---

<sup>46</sup> *Developing Indonesian Climate Mitigation Policy 2020-2030, Ministry of National Development Planning/BAPPENAS, November 2015 (at <http://www.sekretariat-rangrk.org/>)*

bibit tanaman tersebut ditanam di 20 desa pada sembilan kecamatan di Gunungkidul.

Sejumlah desa itu di antaranya, Desa Balong, Kecamatan Girisubo; Desa Dengok, Kecamatan Playen; Desa Candirejo, Kecamatan Semanu; Desa Kepek, Kecamatan Saptosari; Desa Getas, Kecamatan Playen; dan Desa Katongan, Kecamatan Nglipar. Tanaman terbanyak ditanam di kawasan Dukuh Turunan, Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, yakni sekitar 7.000-an pohon.

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi, mengatakan, penanaman pohon itu menjadi penting bagi wilayahnya. Sebab, sejumlah kawasan di Gunungkidul memiliki kerawanan bencana kekeringan maupun longsor.

"Di zona utara, punya kerawanan longsor di Kecamatan Patuk, Gedangsari dan Semin. Terakhir di (kecamatan) Ngawen beberapa waktu lalu memakan korban," kata Immawan dalam acara Pemeliharaan Tanam dan Pelihara Pohon di kawasan Watu Payung, Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Kamis, 6 April 2017. Ia juga menilai, penanaman pohon itu juga menjadi langkah mitigasi bencana di kalangan masyarakat. Sebab, sejumlah tanaman tersebut ditanam di lahan kritis dan sekitar hutan lindung.

"Saya kira semangat gotong royong masyarakat masih tinggi. Jangan menganggap ini proyek, namun sebagai tanggung jawab untuk dilakukan dengan sukses," kata dia.

Penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari program Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dan *Java Learning Center* (Javlec). "Ini bagian dari komitmen Indonesia mengurangi 29 persen gas emisi rumah kaca. Selain itu juga menjaga cadangan air di kawasan karst Gunungkidul," kata dia.

Menurutnya, permasalahan emisi bukan hanya masalah lingkungan hidup, tapi juga masalah pembangunan nasional dalam peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Camat Panggang, Agustinus Gunawan menyambut baik kegiatan itu. Terlebih, asa sejumlah petani di tempatnya yang sudah mendapatkan sertifikat izin pengelolaan hutan. "Ini sekaligus untuk mengelola lingkungan agar terjaga, kesuburan bagus, serta memberikan kesejahteraan masyarakat umum. Apalagi Gunungkidul sudah menjadi kawasan Geopark Guwung Sewu," kata dia.

Kamis, 06 April 2017 17:03. Ahmad Mustaqim, Editor : Sigit Aprianto Nugroho  
Untuk artikel asli silakan mengunjungi laman berikut:  
<http://www.metrotvnews.com/amp/8N0epLrb-mitigasi-dan-cegah-emisi-puluhan-ribu-pohon-ditanam-di-gunungkidul>

**Kedua**, berkaitan dengan Konservasi laut dan daratan sebagaimana yang ada dalam Goal 14 dan Goal 15, maka Indonesia sudah memiliki *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)* sejak tahun 2003. Selain itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) secara terus menerus melakukan riset dan eksplorasi untuk menemu-kenali kekayaan *biodiversity* Indonesia. Laporan "*stocktaking*" keberadaan

*biodiversity* sudah didokumentasikan di dalam Laporan Kekinian Keanekaragaman Hayati, 2014<sup>47</sup>. Laporan keadaan terkini kekayaan *biodiversity* Indonesia telah digunakan sebagai landasan untuk memperbarui IBSAP 2003-2020 pada tahun 2015 lalu. Langkah pembaruan IBSAP ini juga untuk untuk mengintegrasikan *Nagoya Protocol* yang disepakati tahun 2010 dan *Aichi Target* (Kotak 8.4).

#### **Kotak 8.4 Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020**

IBSAP pertama kali disusun pada tahun 2003 melalui proses yang komprehensif dan inklusif. Dokumen ini merupakan Dokumen *Biodiversity* Indonesia yang menjabarkan tentang perkembangan *biodiversity* dan strategi pembangunan *biodiversity* secara komprehensif. Pemutakhiran dilakukan untuk: (i) Memudahkan dan meningkatkan pemahaman serta penerapan kebijakan dan rencana aksi; (ii) Pengkayaan pengetahuan kita mengenai *biodiversity* Indonesia, koreksi dengan adanya kehilangan jenis dan kerusakan habitat dan ekosistem karena tekanan ekonomi; (iii) Sebagai upaya untuk pelaksanaan *Nagoya Protocol* dan *Protocol Cartagena*. Pemutakhiran juga dilakukan agar program dan kegiatan dalam IBSAP 2015-2020 sejalan dengan RPJMN 2015-2019, sehingga pelaksanaannya didukung dengan program, kegiatan dan K/L penanggungjawab yang jelas. Secara ringkas, pembaruan mengenai Visi, Misi dan Rencana Aksi Pengelolaan *Biodiversity* dapat diringkas dalam Gambar berikut ini.

<b>VISI</b>		
<b>Terpeliharanya kehati milik Indonesia, serta terwujudnya pengembangan kehati dalam menyumbang daya saing bangsa dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang</b>		
<b>MISI 1</b>	<b>MISI 2</b>	<b>MISI 3</b>
Meningkatkan penguasaan kehati Indonesia menjadi milik bangsa Indonesia	Menjadikan kehati sebagai sumber kesejahteraan dan berkelanjutan kehidupan bangsa Indonesia	Pengelolaan secara bertanggungjawab demi keberlangsungan kehidupan dunia
<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>DATA DAN SISTEM INFORMASI</b>	<b>LEMBAGA DAN REGULASI YANG TEPAT</b>
<b>PENDANAAN: PUBLIK, SWASTA DAN MASYARAKAT</b>		
<b>RENCANA AKSI:</b>		
1. PENELITIAN, PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMENTASI KEHATI; 2. PENGEMBANGAN MANFAAT KEHATI; 3. PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN KEHATI; 4. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEHATI		

Sumber: *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*  
[www.bappenass.go.id](http://www.bappenass.go.id)

<sup>47</sup> Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia, LIPI 2014

Pelaksanaan pelestarian ekosistem laut sudah dimulai sejak ditetapkannya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Namun demikian, penetapan WPP ini belum diikuti dengan pembentukan organisasi pengelolaan dan penegakan aturannya. Demikian pula, langkah untuk membatasi penangkapan sesuai daya tumbuh (*maximum sustainable yields/MSY*) dan penertiban penangkapan dan pencurian ikan belum sepenuhnya ditegakkan di lapangan. Langkah cepat dan tegas baru dimulai pada awal tahun 2015, awal Kabinet Kerja, dengan adanya pelarangan penangkapan pada wilayah dan waktu tertentu, penangkapan kapal pencuri ikan dan penindakan tegasnya. Semua langkah ini adalah contoh penerapan pengawasan penangkapan ikan sebagai bagian dari perikanan berkelanjutan disampaikan dalam Kotak 8.5.

#### **Kotak 8.5 Sistem Pemantauan Kapal Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan Perikanan**

*Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan bahwa sistem pemantauan kapal atau Vessel Monitoring System (VMS) dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan serta diyakini dapat menjamin pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.*

“Dengan adanya laporan VMS, maka kapal-kapal yang melakukan kegiatan *illegal fishing* dapat terpantau. Untuk itu, kita butuh pertukaran informasi kredibel yang lebih transparan berkaitan dengan perikanan antarnegara. Kasihan nelayan-nelayan kecil yang mengandalkan laut sebagai ladang pekerjaan dan sumber makanan jika kita tidak serius dalam penanganan *illegal fishing* ini,” kata Menteri Susi dalam siaran pers tersebut.

Menurut Susi, keterbukaan data VMS merupakan cara efektif untuk mencegah *overfishing* dan IUU fishing yang selama ini mengancam pasokan bahan baku ikan nasional. Transparansi data VMS akan mendorong kesadaran masyarakat terhadap kegiatan perikanan di Indonesia. “Masyarakat diharapkan menjadi lebih kritis, dan menjadi mitra pemerintah dalam mengelola perikanan nasional, memperhatikan serta melaporkan kegiatan perikanan yang mencurigakan,” ujarnya.

Dengan *Global Fishing Watch* sebagai media, lanjut Susi, masyarakat dapat melihat kepadatan aktivitas perikanan di Indonesia, serta informasi mengenai kapal ikan, seperti alat tangkap, bendera, bobot (GT) kapal, serta ukuran panjang dan lebar kapal ikan. Salah satu fitur *Global Fishing Watch* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah identifikasi kegiatan alih muat di tengah laut atau *transshipment*. Dengan dibukanya data VMS, *Global Fishing Watch* mampu mendeteksi pertemuan antara kapal ikan yang menggunakan VMS dengan kapal lain yang menggunakan transmitter AIS di tengah laut.

Pertemuan kedua kapal ini merupakan salah satu indikasi terjadinya transshipment di tengah laut. Melalui fitur *Global Fishing Watch* ini, masyarakat dapat melihat dan melaporkan kegiatan *transshipment* yang telah dilarang melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 yang melarang kegiatan transshipment. "Sekarang masyarakat dapat melihat padatnya aktivitas perikanan, memantau pergerakan kapal ikan, dan mengidentifikasi kegiatan perikanan yang mencurigakan. Jika ada yang mencurigakan, masyarakat juga dapat segera melaporkan. Gunanya, untuk mencegah overfishing dan IUU fishing di laut Indonesia," pungkask Menteri Susi. **Penulis** : Ismadi Amrin

Sumber: By [maritimeneews](#) - Juli 6, 2017 2:00 pm

Dengan langkah-langkah kebijakan penanganan akses air bersih dan sanitasi, perkotaan yang berkelanjutan, perubahan iklim, pengendalian lingkungan hidup dan perlindungan serta konservasi *biodiversity* daratan dan lautan tersebut di atas, maka RAN SDGs khususnya untuk Goal 6, Goal 11, Goal 13, Goal 14 dan Goal 15, secara detil dapat disusun. Pedoman penyusunan Rencana Aksi Nasional ini sudah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hasil capaian dua tahun pertama dari SDGs ini sudah dilaporkan di dalam *Voluntarity National Report 2016*, yang disampaikan dalam pertemuan *High-Level Political Forum* bulan Juli tahun 2017.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Lihat *Voluntary National Review (VNR) Indonesia* dalam [www.sdg.org](#)



## **Institusi dan Tata Kelola untuk SDGs**

Institusi dan Tata Kelola merupakan bagian dari transformasi yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan SDGs untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perubahan *mindset* pada setiap manusia di planet ini sangat penting tidak hanya dicerminkan dalam perilaku pribadi, sebagai masyarakat sosial dan ekonomi namun juga dalam mengekspresikan tanggungjawabnya kepada planet bumi. Pencerminan lain sangat diperlukan dalam pembentukan *mindset* institusi dan tata kelola yang juga dibentuk oleh manusia baru tersebut. Bab ini akan menguraikannya dengan menggambarkan institusi dan tata kelola sebagai bagian terintegrasi dari SDGs. Selanjutnya diikuti dengan uraian tentang faktor Manusia sebagai Penentu Institusi dan Tata Kelola yang Baik; serta Target Institusi dan Tata Kelola dalam SDGs; dan terakhir Pengembangan Institusi dan Tata Kelola untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

### **9.1 Institusi dan Tata Kelola sebagai Bagian Terintegrasi dari SDGs**

Pengalaman dan sejarah pembangunan Negara-negara di dunia menunjukkan bahwa institusi dan tata kelola yang baik merupakan kunci bagi kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Acemoglu, et al, 2005). Apabila kita melihat Negara-negara yang berhasil dalam proses pembangunan, dan sekarang menjadi Negara maju, atau Negara yang beranjak menjadi Negara maju, maka terdapat

kesamaan diantara mereka, meskipun sistem ketatanegaraan dan pemerintahannya dapat berbeda-beda. Kesamaan tersebut adalah institusi dan tata kelola yang baik yang mendukung terselenggaranya institusi publik di bidang politik, hukum dan birokrasi dengan optimal.

Apa hubungan antara institusi dan tata kelola dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan? Tata kelola didefinisikan sebagai otoritas yang mempunyai tujuan dan memegang kendali dari proses-proses sosial. Hal itu termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah (termasuk masyarakat sipil, mitra kerja dan sektor swasta) yang berada di berbagai tingkatan. Implementasi di tingkat nasional dan tingkat daerah menjadi hal yang krusial dalam sukses atau gagalnya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Biermann et al. 2014).

Terdapat dua pandangan tentang peran institusi dan tata kelola dalam pencapaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pandangan pertama berpendapat bahwa Tata Kelola merupakan Pilar ke Empat dari SDGs. Tata kelola ditempatkan sebagai *drivers* dari tujuan-tujuan dari SDGs. Tata kelola merupakan faktor dan prasyarat terjadinya proses transformasi demokrasi, serta memberikan signal yang kuat atas komitmen politik di tingkat tertinggi. Tata kelola yang baik merupakan bagian tidak terpisahkan dari semua aktor atau pemangku kepentingan SDGs mulai dari pemerintah, sektor swasta, CSO, akademisi, masyarakat yang kesemuanya saling bekerjasama.

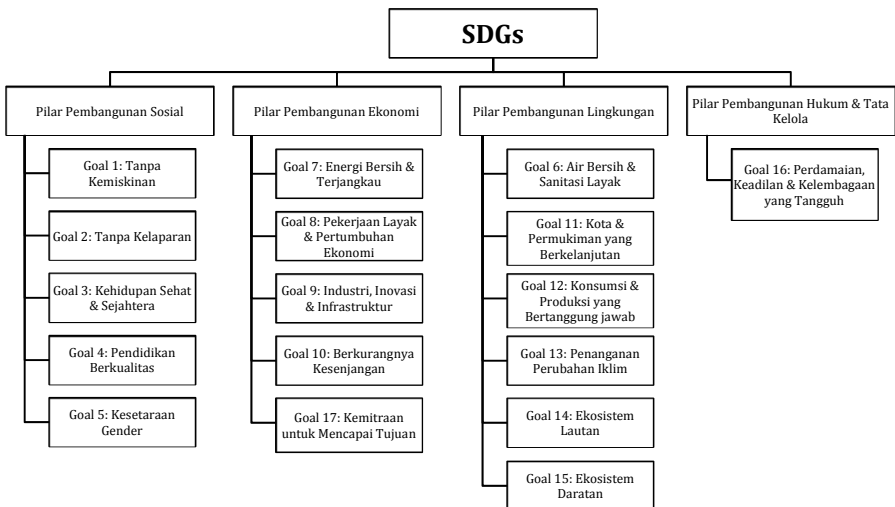
Sementara pandangan kedua berpendapat bahwa unsur Tata Kelola seyogyanya merupakan bagian yang terintegrasi dari setiap implementasi pencapaian *Goals* dari SDGs. Termasuk ke dalam unsur tata kelola ini adalah: kapasitas implementasi, partisipasi, akuntabilitas, transparansi serta pembiayaan. Namun, tidak dapat dilakukan penyeragaman akan standar tata kelola yang akan dijadikan referensi, mengingat proses dan norma dari tata kelola di masing-masing *Goals* dari SDGs berbeda-beda. Perbedaan inipun bisa terjadi

di tingkat pusat dibandingkan dengan tingkat daerah. Intinya tidak dapat dilakukan penyeragaman dari proses dan norma penerapan tata kelola yang baik untuk setiap *Goals* dari SDGs.

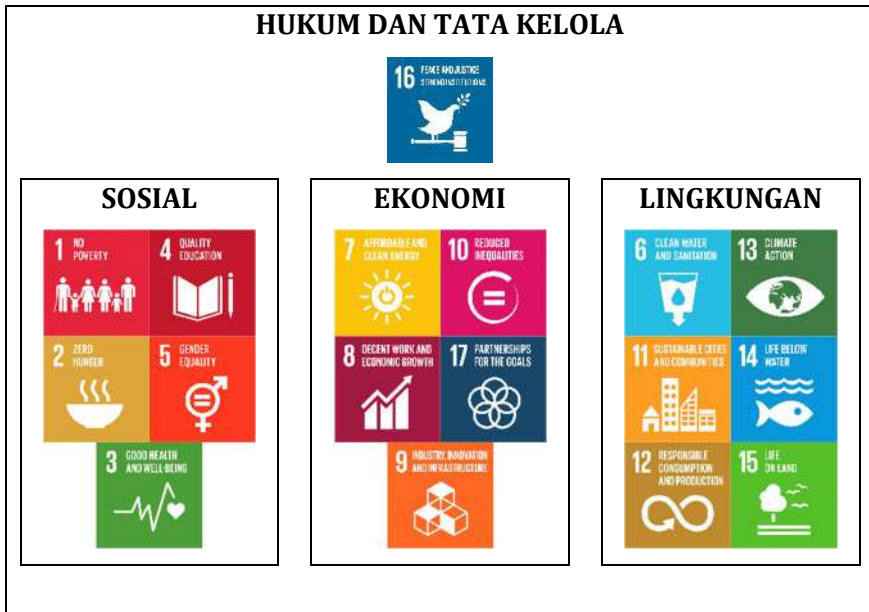
Terdapat tiga aspek tata kelola dalam pelaksanaan SDGs yang perlu mendapat perhatian, yaitu (UNU/IAS, 2015):

1. *Good Governance* – Proses pengambilan keputusan dan fondasi kelembagaan
2. *Effective Governance* – Kapasitas suatu negara untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
3. *Equitable Governance* – Hasil pembangunan yang terdistribusi secara merata diantara masyarakat

Tata kelola atau *governance* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian SDGs, karena berfungsi sebagai enabler terhadap keseluruhan kerangka SDGs. Tata kelola untuk mendukung implementasi SDGs tentu berbeda-beda kebutuhannya antar Negara, dan antar daerah. Sifat dari tata kelola adalah *local specific*, sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat untuk secara bertahap dikembangkan ke arah/standar yang tinggi.



**Gambar 9.1** Tata Kelola yang Baik sebagai Pilar IV dari SDGs



**Gambar 9.2** Institusi, Tata Kelola sebagai Bagian terintegrasi dari SDGs

## 9.2 Faktor Manusia sebagai Penentu Institusi dan Tata Kelola yang Baik

Institusi dan tata kelola yang baik adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Tata kelola yang baik berasal dari institusi yang terbangun dan tertata dengan baik. Berikut adalah pandangan yang disarikan dari Professor Boediono, Wakil Presiden RI periode 2009-2014 mengenai “Membangun Institusi Publik” dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah” (Boediono, 2016):

..... Membangun institusi jauh lebih rumit dan sulit dari membangun sesuatu yang bersifat fisik, seperti: infrastruktur atau mendirikan pabrik. Institusi tidak bisa dibangun tanpa melihat kenyataan sosial dan budaya yang mengakar pada suatu masyarakat. Atau istilahnya, institusi tidak bisa dibangun dalam suatu keadaan yang seolah-olah “vakum”. Istilahnya, *institutions must be homegrown*. Ia tidak bisa sekedar mencontoh dari Negara lain atau mengambil dari

suatu *template* yang sudah baku. **Institusi harus dibangun berdasarkan kondisi sosial dan budaya yang mengakar di suatu masyarakat.** Bahwa kemudian institusi yang dibangun secara bertahap dikembangkan secara dinamis menjadi institusi dan tata kelola yang terbaik. Setiap institusi terbangun dari suatu sistem aturan main yang berlaku serta manusia atau SDM yang menjalankan institusi tersebut.

**Manusia merupakan pembentuk utama dari suatu institusi.** Manusia yang berada di balik suatu institusi akan menentukan kinerja dari institusi tersebut. Mutu manusia menjadi faktor penentu bagi baik buruknya kinerja suatu institusi dan seberapa jauh tata kelola yang baik dikembangkan dan dilaksanakan. Institusi dan tata kelola yang baik melingkupi orang-orang (SDM) yang menjalankan institusi di lingkup eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik dan birokrasi. Mutu manusia atau SDM yang menjamin tata kelola dan institusi yang baik harus disiapkan sejak dini dan dalam perspektif jangka panjang. Tidak cukup hanya dengan pendidikan formal yang baik, tetapi bagaimana manusia SDM tersebut mempunyai perilaku, dedikasi, disiplin serta beretika.

**Terdapat tiga institusi publik yang perlu diprioritaskan karena berdampak luas terhadap institusi-institusi lain, yaitu institusi yang mengatur politik, hukum dan birokrasi.** Institusi politik melingkupi partai politik, lembaga legislatif di tingkat daerah dan pusat. Anggota legislatif di tingkat daerah dan pusat dipilih dari anggota-anggota partai politik yang mengikuti pemilihan anggota legislatif, dalam hal Indonesia setiap lima tahun sekali. Salah satu tugas dan fungsi dari lembaga legislatif adalah menyusun, membahas dan menyetujui peraturan di tingkat UU dan Perda (daerah) bersama-sama pemerintah (daerah).

Adalah penting untuk mendapatkan anggota-anggota partai politik yang merupakan SDM dengan pendidikan, kompetensi dan etika yang baik. Memang harus diakui bahwa termasuk ke dalam permasalahan ini adalah proses rekrutmen, seleksi dan pemilihan untuk menjadi anggota legislatif tersebut. Masih kurang banyak individu-individu manusia yang *the best and brightest* terjun ke dunia politik ini. Mereka sangat diperlukan tidak hanya sekedar masuk ke dunia politik, tetapi untuk turut membentuk dan membenahi kehidupan politik menjadi lebih baik.

Selanjutnya, SDM yang baik dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk menjamin institusi hukum yang baik. Institusi hukum termasuk institusi peradilan dan institusi penegakan hukum. Pembangunan institusi hukum dan penerapan penegakan hukum yang adil memerlukan keterlibatan SDM terbaik kita. Baik buruknya kinerja birokrasi pemerintahan akan sangat menentukan kualitas pelayanan publik, yang kemudian akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pembenahan institusi birokrasi dilakukan melalui serangkaian reformasi birokrasi yang merupakan agenda jangka panjang. Penempatan orang yang tepat di jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya atau *the right man on the right job* juga berlaku di sini. Sistem meritokrasi dipandang berjalan dengan baik apabila tercermin pada kinerja birokrasi yang baik. Sistem meritokrasi tidak dengan sendirinya akan terjadi, apalagi di lingkup institusi publik. Perlu sistem dan aturan main yang baik serta komitmen yang kuat dari pimpinan, terutama komitmen politik. Pengalaman dari banyak Negara yang sedang membangun termasuk Indonesia, banyak sekali kendala dan hambatan yang dihadapi untuk mewujudkan

sistem meritokrasi dalam institusi publik di bidang politik, hukum maupun birokrasi .....

Dari penjelasan di atas sangat jelas kaitan antara kualitas SDM atau pembangunan manusia dengan kualitas institusi dan tatakelola yang baik. Dalam kerangka pelaksanaan SDGs, kualitas SDM tidak saja berkaitan dengan kualitas manusia yang sehat dan cerdas, namun juga manusia yang memiliki rasa toleransi dan tanggungjawab atas kesejahteraan manusia lainnya, atas kesejahteraan generasi mendatang serta toleransi dan tanggungjawab atas lingkungan dan makhluk hidup lain di dalamnya. Manusia bukan satu-satunya penghuni dan pengguna lingkungan dan sumber daya alam di dalam planet ini. Perilaku manusia dalam pengelolaan bumi dan seisinya, dalam membentuk institusi pengelolaan bumi dan seisinya dalam membentuk aturan dan tata cara yang digunakan dalam mengelola bumi dan seisinya akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan, yang indikator terukurnya dicerminkan dalam SDGs.

### **9.3 Target untuk Institusi dan Tata Kelola dalam SDGs**

Dalam kerangka SDGs, institusi dan tatakelola untuk pembangunan berkelanjutan, memerlukan tercapainya beberapa target khususnya dalam menjaga perdamaian agar pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pada saat ini masih banyak negara-negara yang sebagian atau seluruh wilayahnya dalam kondisi konflik, sehingga masyarakatnya tidak bisa beraktivitas sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahterannya. Masyarakatnya tidak sempat membangun institusi yang dapat mengembangkan tata kelola untuk adanya kesejahteraan yang berkesinambungan, sebagai prasyarat bagi bangsanya membangun secara berkelanjutan untuk keluarga dan keturunan/generasi mendatang. Demikian pula, masyarakat yang memiliki rasa inklusif,

memiliki rasa keadilan serta memiliki kemampuan membangun institusi yang efektif, bertanggung-gugat dan inklusif di segala tingkat juga sangat diperlukan untuk menjamin adanya tata kelola yang adil bagi semua, generasi saat ini dan mendatang. Prasyarat inilah yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs.

Target yang dirumuskan untuk mengukur dan menandai tercapainya Tujuan 16. Institusi dan Tata Kelola yang mendukung SDGs dapat dilihat dalam Tabel 9.1. berikut ini.

**Tabel 9.1 Target untuk Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

<b>Target</b>	<b>Isi Target</b>
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.
16.2.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
16.3.	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
16.4	Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
16.8	Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
<b>Cara pelaksanaan</b>	
16.a.	Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk



Target	Isi Target
	membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang- undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

## 9.4 Pengembangan Institusi dan Tata Kelola untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Pengembangan institusi dan tata kelola yang sejalan dengan arahan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan khususnya pencapaian target SDGs untuk kondisi Indonesia, difokuskan pada sasaran: (i) secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait pembunuhan; (ii) menegakkan kedaulatan Negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional serta menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua; dan (iii) mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan.<sup>49</sup>

Di dalam RPJMN 2015-2019 sudah dirumuskan dengan jelas, arah kebijakan untuk pencapaian Tujuan 16. Khususnya untuk: (i) Mengendalikan prevalensi kekerasan terhadap anak; (ii) perlindungan anak dan perempuan; (iii) menegakkan kedaulatan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses terhadap keadilan untuk semua; (iv) Strategi tatakelola dan reformasi birokrasi, khususnya terkait dengan pentingnya peran SDM dalam membangun institusi dan tata kelola yang mempercepat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, program dan kegiatan yang sudah dirumuskan di dalam Rancangan RAN SDGs secara ringkas disampaikan dalam Tabel berikut.

---

<sup>49</sup> Dikutip dari Draft Rencana Aksi Nasional Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): RAN SDGs, Desember 2017

**Tabel 9.2 Sasaran Utama, Arah Kebijakan dan Program untuk Pencapaian Goal 16**

<b>Sasaran Umum Goal 16</b>	<b>Arah Kebijakan dalam RPJMN 2015-2019</b>	<b>Program dalam RPJMN 2015-2019</b>
1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan rangka kematian terkait pembunuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengendalikan prevalensi kekerasan terhadap anak</li> <li>2. Perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</li> <li>2. Perlindungan Anak</li> <li>3. Penanganan Kekerasan terhadap perempuan.</li> </ol>
2. Menegakkan kedaulatan Negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggalakkan kedaulatan hukum di tingkat nasional dan internasional</li> <li>2. Menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Hukum Nasional</li> <li>2. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dan Peradilan Umum</li> <li>3. Peningkatan Kemajuan dan penegakkan HAM.</li> </ol>
3. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi tata kelola dan reformasi birokrasi</li> <li>2. Peningkatan demokrasi Indonesia dengan memantapkan proses konsolidasi demokrasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan intern akuntabilitas keuangan Negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan system pengendalian inern pemerintah</li> <li>2. Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi</li> <li>3. Bina otonomi daerah</li> <li>4. Penguatan kelembagaan demokrasi</li> <li>5. Pemberantasan tindak pidana korupsi ...dsb</li> </ol>

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

**BAGIAN IV**  
**STRATEGI**  
**PENCAPAIAN SDGs**

---

## **Reorientasi Fokus Pencapaian SDGs Indonesia**

Pembangunan Indonesia sejak Era Reformasi tidak dapat dipungkiri telah banyak membawa kemajuan di berbagai bidang. Namun demikian, masih banyak agenda pembangunan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola yang masih tertinggal. Kemiskinan dan ketimpangan, mutu modal manusia, penghidupan ekonomi yang layak, pembangunan perkotaan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan contoh dari agenda pembangunan yang belum terselesaikan. Bab ini membahas tentang pencapaian maupun tantangan dan peluang pembangunan Jangka Menengah serta Sembilan fokus area SDGs di Indonesia.

### **10.1 Agenda Pembangunan yang Belum Terselesaikan**

Pasca berakhirnya periode MDGs pada akhir tahun 2015, yang bersamaan dengan 17 tahun berjalannya periode reformasi di Indonesia, telah banyak capaian pembangunan di bidang sosial, ekonomi, lingkungan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Namun, masih banyak agenda pembangunan yang tesa. Memasuki tahun ke tiga dari pelaksanaan komitmen Indonesia terhadap SDGs, agenda pembangunan yang belum terselesaikan dapat di kelompokkan menurut pilar-pilar SDGs sebagai berikut:

**Sosial:** Masalah pengentasan kemiskinan masih menjadi topik sentral dalam pencapaian SDGs; Kelaparan (*hunger*): *Stunting, wasting, malnutrition*; Kesehatan: Angka Kematian Neonatal, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Bayi; Pendidikan: Aksesibilitas pendidikan menengah dan tinggi, dan kualitas pendidikan;

**Ekonomi:** Pertumbuhan ekonomi; Sumber pertumbuhan dan produktivitas; Pengangguran, kesempatan kerja; Kesenjangan dan pemerataan antar kelompok masyarakat berdasarkan status sosial ekonomi dan kesenjangan antar daerah.

**Lingkungan:** Akses terhadap air minum dan sanitasi layak; Energi bersih (*renewable energy*); Degradasi lingkungan (hutan); Depleksi sumber daya alam termasuk sumber daya maritim dan kelautan (laut).

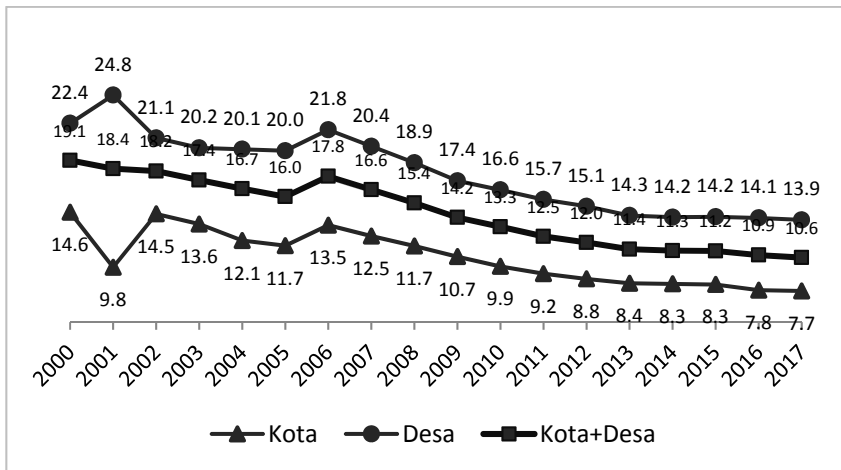
**Tata Kelola dan Institusi:** Pendalaman demokratisasi; Pelaksanaan desentralisasi; Pemberantasan korupsi; Kualitas birokrasi.

Adapun Agenda Pembangunan yang belum terselesaikan menurut ke tiga pilar SDGs dan pilar tata kelola dan institusi secara ringkas berdasarkan pencapaian sejak awal periode reformasi sampai dengan data terakhir yang tersedia adalah sebagai berikut:

## **Pilar Sosial**

Pengentasan kemiskinan merupakan isu sentral dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrim yang mengacu pada pendapatan per kapita US\$1,90 per hari, ditargetkan untuk hilang (menjadi 0%) di tahun 2030. Apabila menggunakan acuan garis kemiskinan nasional, maka perkembangan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia relatif melambat sejak tahun 2014. Tingkat kemiskinan menurut garis kemiskinan nasional pada Maret 2017 berada di level 10,6% atau 27,77 juta penduduk (Gambar 10.1). Adapun target di akhir tahun 2019, akhir periode RPJMN 2015-19 adalah pada kisaran 6-8%. Target

tingkat kemiskinan menggunakan garis kemiskinan nasional di tahun 2025 menurut RPJPN 2007-2025 adalah pada angka 4%.



Sumber: BPS, berbagai tahun

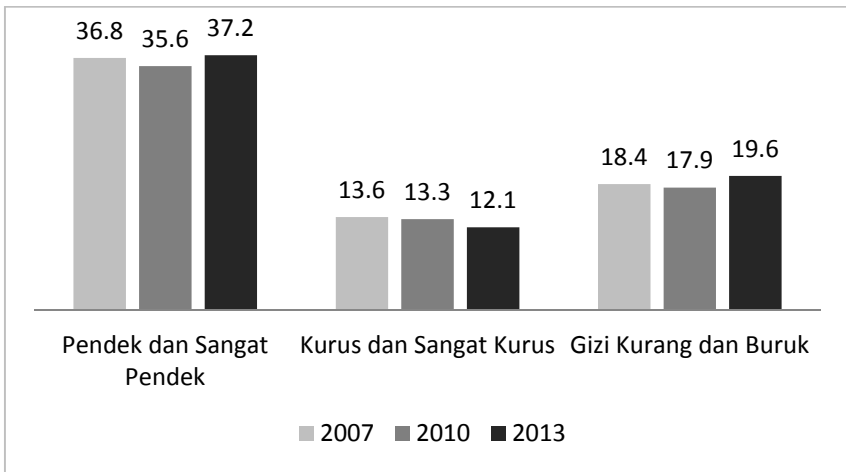
**Gambar 10.1 Penduduk Miskin di Indonesia 2000-2017 (Persen)**

Selanjutnya masih dalam pilar sosial, di dalam tujuan nomor 2 (dua) tanpa kelaparan, pada target poin 2.2 disebutkan bahwa: “Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun.....”

Data untuk indikator prevalensi balita dengan status pendek dan sangat pendek (*stunting*) tidak menunjukkan tren penurunan atau stagnan dari tahun 2007 hingga tahun 2013 (lihat Gambar 10.2). Data terakhir pada tahun 2013 menunjukkan prevalensi balita dengan status pendek dan sangat pendek di Indonesia masih sebesar 37,2 persen. *World Health Organization* (WHO) menetapkan target global pada tahun 2025 ini sebesar 40% penurunan angka *stunting* pada Balita.

Masih dalam target yang sama, untuk indikator lainnya, prevalensi balita dengan status kurus dan sangat kurus (*wasting*) tidak

menunjukkan tren penurunan yang signifikan, dengan data terakhir pada tahun 2013 masih di angka 12,1%. Untuk indikator ini, WHO menetapkan global target pada tahun 2025 adalah mengurangi dan memelihara angka *wasting* di bawah 5 persen. Untuk indikator selanjutnya, prevalensi balita dengan status gizi kurang dan buruk masih masih berada di angka 19,6% pada tahun 2013.

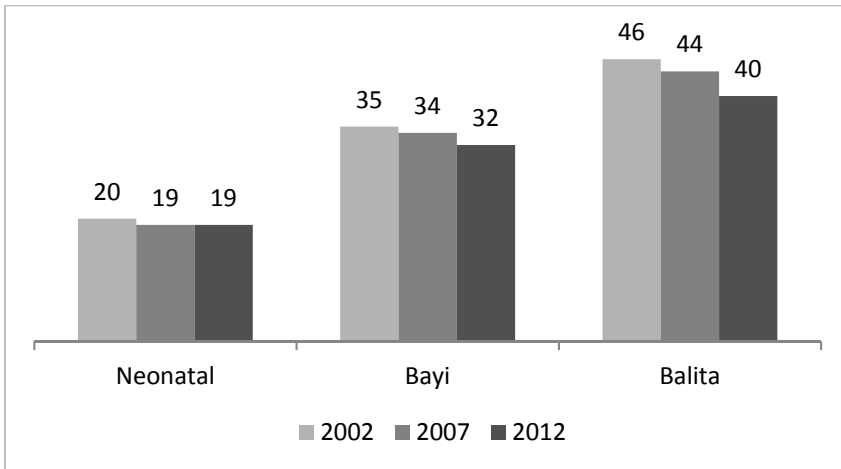


Sumber: RISKESDAS, berbagai tahun

**Gambar 10.2 Prevalensi Balita dengan Status Pendek dan Sangat Pendek, Kurus dan Sangat Kurus, Gizi Kurang dan Buruk (Persen)**

Tujuan 3 (tiga) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Salah satu targetnya, yaitu poin 3.2, menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita sebesar 25 per 1.000 kelahiran hidup.

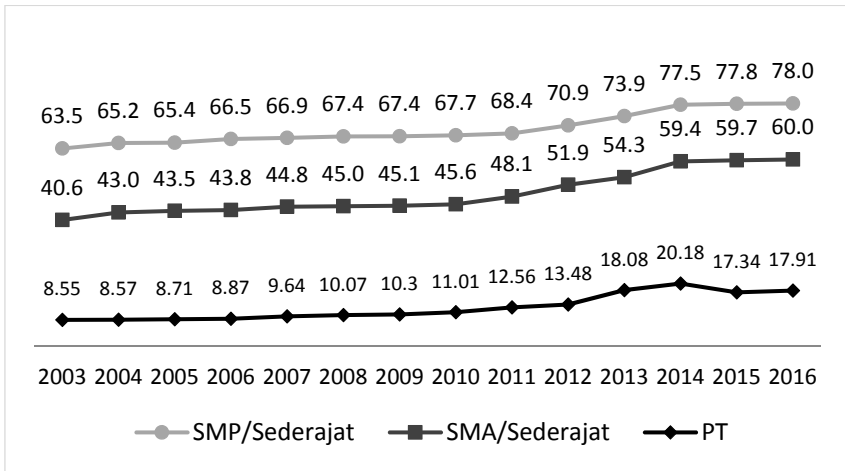




Sumber: IDHS/SDKI, berbagai tahun

**Gambar 10.3 Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita (per 1.000 kelahiran)**

Selanjutnya masih termasuk pilar sosial, tujuan nomor 4 (empat), yaitu pendidikan yang berkualitas dengan salah satu indikator Angka Partisipasi Murni (APM), yaitu proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perhatian diberikan pada APM jenjang pendidikan sekolah menengah tingkat pertama dan tingkat atas serta yang sederajat, dan perguruan tinggi. Meskipun kenaikan APM terjadi di jenjang pendidikan menengah khususnya selama periode 2010-14, namun dalam 2 tahun terakhir kenaikan APM ini melambat. Hal yang sama untuk jenjang perguruan tinggi, bahkan di tahun 2015 dan 2016 menurun dibandingkan tahun 2014.



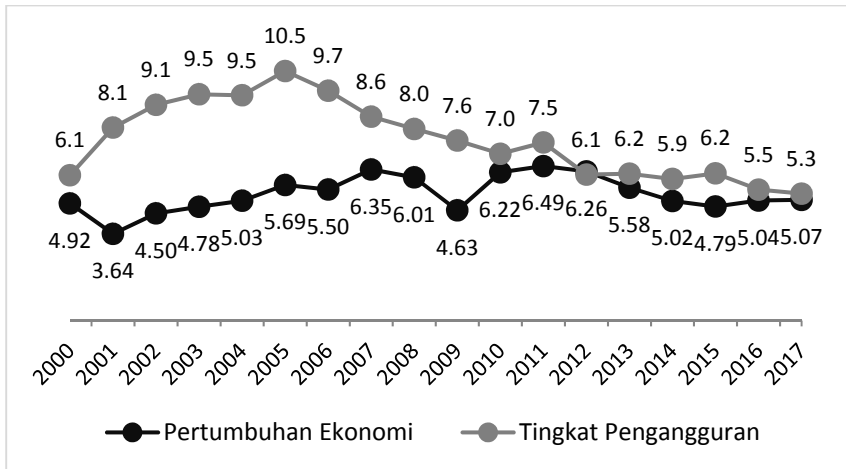
Sumber: BPS, berbagai tahun

**Gambar 10.4 Angka Partisipasi Murni SMP, SMA, PT (Persen)**

## Pilar Ekonomi

Tujuan 8 (delapan) dari SDGs, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Pencapaian indikator ini dan Pekerjaan Rumah yang tersisa dapat dilihat dari kinerja tiga indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Kinerja dan pekerjaan Rumah terkait isu kemiskinan telah dibahas di sub-bab Pilar Sosial. Gambar 10.5 berikut memperlihatkan kinerja pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran awal periode reformasi hingga data terakhir. Pertumbuhan ekonomi terutama mengalami perlambatan sejak tahun 2013 yang banyak disebabkan faktor eksternal. Pelemahan harga dan permintaan terhadap mineral dan komoditi berimbang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia, meskipun sejak tahun 2014 masih dapat bertahan di laju 5 persen rata-rata per tahun. Angka ini sesungguhnya tidak cukup untuk mempercepat penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan.

Lima sektor utama sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah: 1) Industri Pengolahan; 2) Pertanian; 3) Perdagangan; 4) Konstruksi; 5) Pertambangan dan Penggalan. Meskipun, peran sektor jasa (tersier) selama 20 tahun terakhir mengalami peningkatan yang pesat. Sektor jasa secara keseluruhan saat ini sudah menguasai dua pertiga dari perekonomian Indonesia. Secara lebih rinci, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha dapat dilihat pada Tabel 10.1. Pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dikuasai oleh sektor jasa, sektor pertanian kembali pada rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah 4 % per tahun. Sektor industri pengolahan belum sepenuhnya bangkit, malah mengalami pelambatan (Tabel 10.1). Paralel dengan angka pertumbuhan ekonomi adalah jumlah angkatan kerja, lapangan kerja dan pengangguran (Tabel 10.2). Tingkat pengangguran terbuka berada di bawah 6% per tahun sejak tahun 2014. Tren tingkat pengangguran terbuka terus menurun, menandakan penciptaan kesempatan kerja lebih besar penambahan angkatan kerja yang bertambah sebanyak 2-4 juta per tahun. Jumlah penganggur stabil pada angka 7 juta orang dalam dua tahun terakhir. Meskipun tantangannya adalah penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas, ditandai dengan persentasi yang bekerja di sektor formal dan pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) semakin menurun.



Sumber: BPS, berbagai tahun

**Gambar 10.5 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran (Persen)**

**Tabel 10.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha (Persen)**

Komponen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,95	4,59	4,20	4,24	3,77	3,25	3,81
Pertambangan dan Penggalian	4,29	3,02	2,53	0,43	-3,42	1,06	0,69
Industri Pengolahan	6,26	5,62	4,37	4,64	4,33	4,29	4,27
Pengadaan Listrik dan Gas	5,69	10,06	5,23	5,90	0,90	5,39	1,54
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,73	3,34	3,32	5,24	7,07	3,60	4,61
Konstruksi	9,02	6,56	6,11	6,97	6,36	5,22	6,79
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,66	5,40	4,81	5,18	2,59	3,93	4,44

<b>Komponen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Transportasi dan Pergudangan	8,31	7,11	6,97	7,36	6,68	7,74	8,49
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	6,64	6,80	5,77	4,31	4,94	5,55
Informasi dan Komunikasi	10,02	12,28	10,39	10,12	9,69	8,87	9,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,97	9,54	8,76	4,68	8,59	8,90	5,48
Real Estate	7,68	7,41	6,54	5,00	4,11	4,30	3,68
Jasa Perusahaan	9,24	7,44	7,91	9,81	7,69	7,36	8,44
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,43	2,13	2,56	2,38	4,63	3,19	2,06
Jasa Pendidikan	6,68	8,22	7,44	5,47	7,33	3,84	3,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,25	7,97	7,96	7,96	6,68	5,00	6,79
Jasa lainnya	8,22	5,76	6,40	8,93	8,08	7,80	8,66
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>6,17</b>	<b>6,03</b>	<b>5,56</b>	<b>5,01</b>	<b>4,88</b>	<b>5,02</b>	<b>5,07</b>

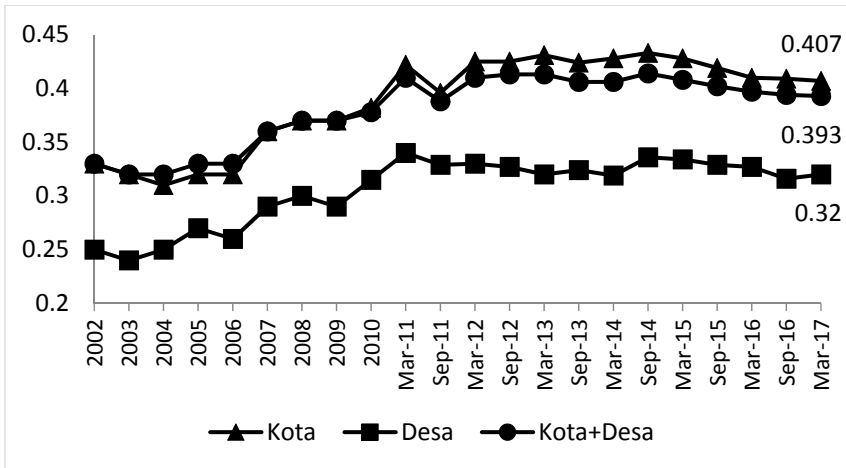
Sumber: BPS, berbagai tahun

**Tabel 10.2 Perkembangan Angkatan Kerja, Lapangan Kerja dan Pengangguran (juta orang)**

<b>Uraian</b>	<b>2004</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Angkatan Kerja	104,0	113,7	116,0	119,4	122,7	123,6	125,3	128,3	127,7	131,5
Lapangan Kerja	93,7	104,9	107,4	111,3	115,1	116,4	118,2	120,8	120,7	124,5
Pengangguran	10,3	9,3	8,6	8,1	7,7	7,2	7,2	7,5	7,0	7,0

Sumber: BPS, berbagai tahun

Ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan koefisien Gini mengalami peningkatan pesat sejak tahun 2006 sampai dengan 2010, stabil di kisaran koefisien Gini 0.41 sebelum dalam tiga tahun terakhir mengalami sedikit penurunan. Ketimpangan di daerah perkotaan selalu lebih tinggi relatif terhadap ketimpangan di daerah perdesaan. Pada Maret 2017, rasio gini di Indonesia turun menjadi 0,393 dari sebelumnya sebesar 0,397 pada Maret 2016. Rasio gini di daerah perkotaan adalah sebesar 0,407 sedangkan di daerah perdesaan adalah sebesar 0,320. Ketimpangan antar daerah berbeda, daerah-daerah di Propinsi DKI Jakarta, dan propinsi-propinsi di Jawa terutama daerah perkotaan menunjukkan kesenjangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.<sup>50</sup>



Sumber: BPS, berbagai tahun

**Gambar 10.6 Rasio Gini Tahun 2002 - 2017**

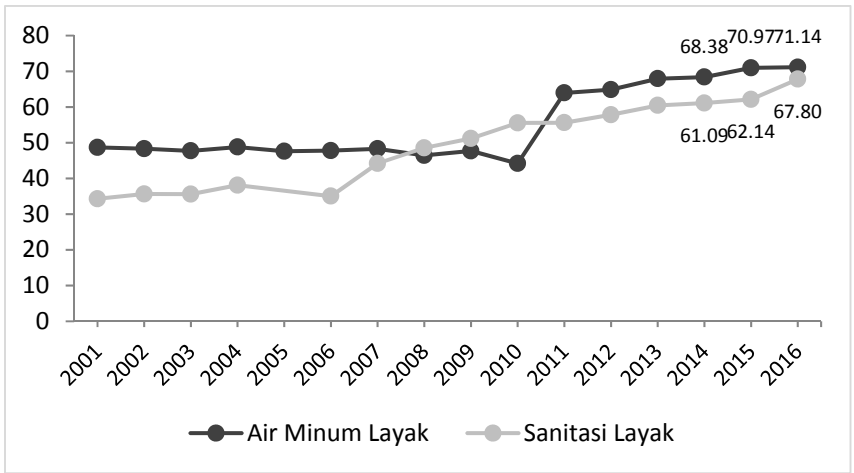
## Pilar Lingkungan

Terdapat 6 Tujuan dari SDGs yang secara langsung mendukung Pilar Lingkungan. Sebagai ilustrasi tantangan pembangunan yang masih tersisa, Tujuan 6, Tujuan 14 dan Tujuan 15 berikut ini memberikan

<sup>50</sup> Lihat BPS, Statistik Indonesia, berbagai tahun untuk detail data koefisien Gini atau indikator kesenjangan antar daerah di Indonesia.

tren pencapaian sejak awal periode Reformasi sampai dengan data tahun terakhir. Tujuan 6 (enam), menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Adapun Target 6.1 pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Target 6.2 pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua.

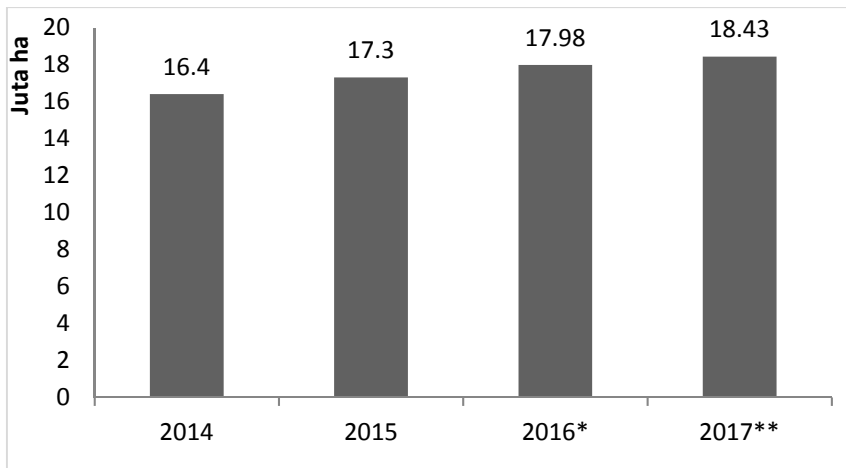
Target 6 terkait akses Rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak merupakan kelanjutan dari pencapaian MDGs sebelumnya. Pencapaian akses terhadap air minum layak sebesar 71,14% dan 67,80% untuk sanitasi layak di tahun 2016. Pencapaian ini masih jauh dari 100% yang merupakan target RPJMN 2015-19. Kesenjangan pencapaian yang cukup tajam terjadi antara Rumah tangga di kota dengan desa. Persentase Rumah tangga dengan air minum dan sanitasi layak di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan.



Sumber: BPS, berbagai tahun

**Gambar 10.7 Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum dan Sanitasi Layak**

Selanjutnya, Tujuan 14: melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Secara spesifik dan kuantitatif salah satu target pada tujuan 14 (target 14.5) menyebutkan untuk melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Gambaran dari upaya ini mengacu pada indikator luas kawasan konservasi laut beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang menggembirakan (lihat Gambar 10.8). Terjadi peningkatan persentase luas kawasan konservasi laut dari 16,4% di tahun 2014 menjadi sekitar 18% di tahun 2016.



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017

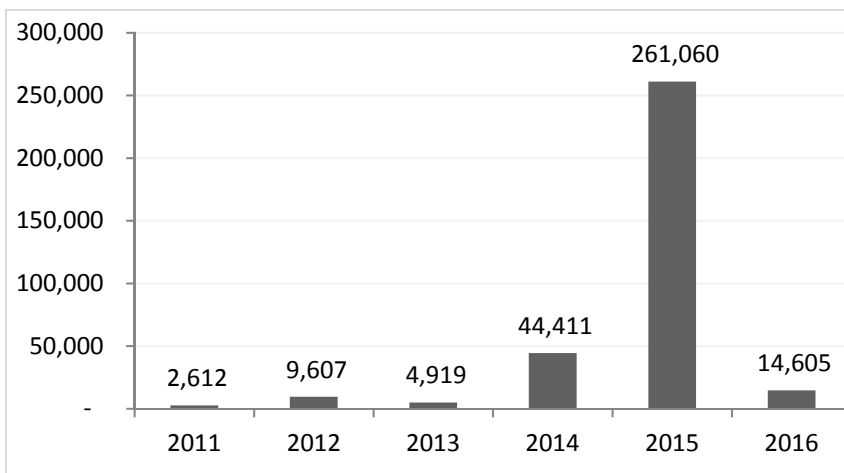
Catatan:\*) sementara, \*\*) target RKP 2016

### **Gambar 10.8 Luas Kawasan Konservasi Laut**

Tujuan 15: melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Upaya pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan tantangan tersendiri. Salah satu indikatornya adalah insidens kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun (lihat Gambar



10.9). Pada tahun 2015, luas kebakaran hutan (berdasarkan laporan dari daerah) merupakan yang paling tinggi dan terburuk sejak 1997 yaitu sebesar 261,060 hektar dengan kerugian sekitar US\$5 milyar (Bank Dunia, 2016). Kerugian yang ditimbulkan meliputi kerusakan hutan beserta area tutupan, keanekaragaman hayati yang hilang, degradasi lahan air, polusi udara yang ditimbulkan di area terdampak dan daerah sekitarnya. Kebakaran hutan yang signifikan menimbulkan kenaikan emisi CO2 yang signifikan serta terganggunya aktivitas sosial ekonomi dan pendidikan daerah terdampak.



Sumber: Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI(sipongi.menlhk.go.id)

\*Luas kebakaran dihitung berdasarkan laporan dari daerah.

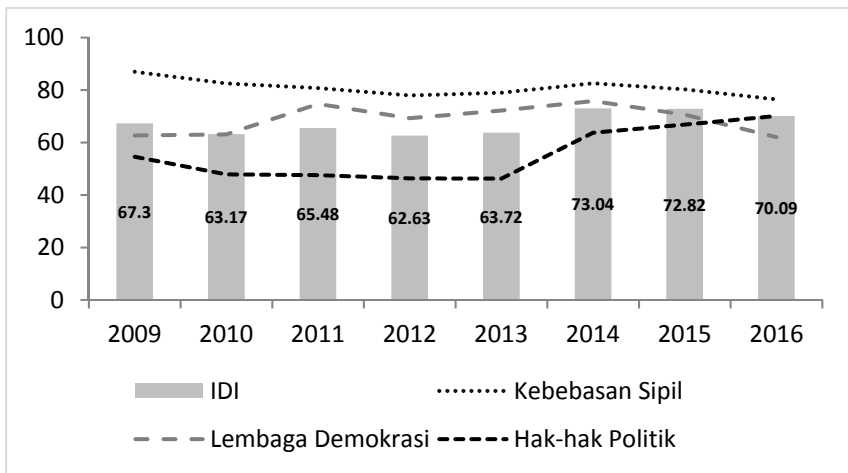
**Gambar 10.9 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Indonesia Tahun 2011-2016**

## Tata Kelola dan Institusi

Indikator pencapaian terkait Tata Kelola dan Institusi direpresentasikan oleh Tujuan 16: menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Bagian dari Target ini, yaitu Target 16.7 menjamin pengambilan keputusan yang

responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. Indikator-indikator nasional sebagai proksi untuk pencapaian target ini adalah antara lain, Indeks Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil, dan Indeks Hak-Hak Politik. Ketiganya terdapat dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai 3 aspek komponen dalam perhitungan IDI tersebut.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan parameter untuk mengetahui berbagai potensi positif maupun kendala dan tantangan dalam melakukan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Angka IDI merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni Kebebasan Sipil, aspek Hak-Hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Secara agregat, terjadi penurunan angka IDI dari besaran 72,82 pada tahun 2015 menjadi 70,09 pada tahun 2016. IDI beserta aspeknya dapat dimaknai secara kategori “baik” apabila indeks lebih dari angka 80, “sedang” apabila indeks berada diantara 60 dan 80, dan “buruk” apabila indeks kurang dari 60.

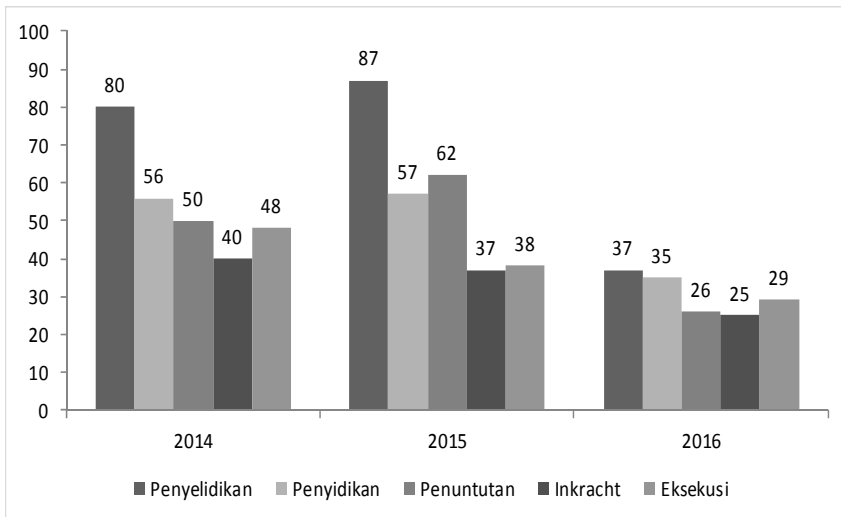


Sumber: BPS, berbagai tahun

**Gambar 10.10 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**

Target 16.5: Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Tindak pidana korupsi merupakan tantangan

tersendiri bagi Indonesia dengan tata kelola dan institusi yang masih belum terbangun dengan baik. Gambar 10.11 memperlihatkan perkembangan penanganan korupsi oleh KPK. Angka ini belum menggambarkan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi, angka ini sekedar menggambarkan jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK. Akhir-akhir ini KPK gencar melakukan upaya pemberantasan korupsi ke tingkat daerah. Beberapa kepala daerah terkena OTT ataupun cukup bukti untuk dijadikan tersangka tindak pidana korupsi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kasus korupsi betul-betul sudah darurat dan merasuki semua lini pemerintahan.



Sumber: Bahan Lampiran Pidato KPK, 2016

Catatan: Angka di tahun 2016 adalah realisasi sampai dengan 31 Mei 2016

**Gambar 10.11 Perkembangan Penanganan Korupsi oleh KPK**

Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Salah satu indikator lainnya untuk menggambarkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Perkembangan opini Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak tahun 2012 hingga 2016 dapat dilihat pada Tabel 10.3 di bawah ini. Pada tahun 2016, pemerintah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan tatakelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara terperinci terdapat 74 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang mendapatkan opini WTP, 8 LKKL opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 6 LKKL mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

**Tabel 10.3 Perkembangan opini Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012-2016**

Opini	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	62	65	62	56	74
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	22	19	18	26	8
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	3	3	7	4	6
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	87	87	87	86	88

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berbagai tahun

## 10.2 Tantangan dan Peluang Pembangunan Jangka Menengah

Sebagaimana yang dibahas di sub-bab terdahulu tentang agenda pembangunan yang masih tersisa, berikut adalah tantangan dan peluang pembangunan Indonesia dalam jangka menengah. Dari tantangan dan peluang pembangunan jangka menengah ini akan diperoleh gambaran Fokus Area bagi komitmen SDGs Indonesia.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Berdasarkan pemikiran yang berkembang dari pemikiran-pemikiran penulis sebelumnya selama 3 tahun terakhir (Alisjahbana, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2015 dan 2016) sebagaimana disampaikan dalam Kuliah Inaugurasi sebagai Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 25 Agustus, 2016 (Alisjahbana, 2016). Penulis memilih penekanan pada tantangan dan peluang, dan tidak secara spesifik menggaris bawahi berbagai pencapaian pembangunan selama periode pasca Reformasi (sejak 1998 sampai dengan saat ini).

*Pertama*, bahwa di tengah-tengah pelambatan ekonomi dunia, Indonesia masih dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, menciptakan kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan.<sup>52</sup> Pertumbuhan ekonomi selama 12 tahun terakhir telah mentransformasikan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama periode 2005-2015, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan sebanyak 6,51 juta jiwa. Jumlah penduduk sangat miskin berhasil dikurangi signifikan, demikian pula dengan kedalaman kemiskinan jauh berkurang. Namun demikian, penduduk hampir miskin (*near poor*) dan rentan miskin masih besar. Selama periode 2009-2015 khususnya, pertumbuhan konsumsi (dan pendapatan) kelompok kaya (20% terkaya) termasuk kelompok menengah (40% menengah) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi kelompok 20% termiskin. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Tanpa penguatan kebijakan dan program *affirmative*, terdapat resiko meningkatnya kesenjangan pendapatan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Perlu diakui, bahwa kenaikan kesenjangan pendapatan yang terjadi sejak tahun 2008, sedikit banyak dipacu oleh "*commodity boom*" dan aliran dana akibat kebijakan *Quantitative Easing* (QE) dari the Fed Amerika Serikat. Investasi di sektor *non-tradable* meningkat pesat sejak tahun 2009/2010, termasuk di sektor keuangan dan properti. Akibat dari semua ini adalah meningkatnya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Termasuk kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih *persistent*. Pertumbuhan ekonomi tetap berpusat di Pulau Jawa dan daerah perkotaan. Kantong-kantong pertumbuhan ekonomi sempat bermunculan di daerah dengan sumber daya alam

---

<sup>52</sup> Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh melambat di tahun 2015, 2015 dan berlanjut sampai dengan tahun 2016, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Bank Dunia, 2016 dan Alisjahbana, 2016). Tingkat kemiskinan dan pengangguran sempat mengalami peningkatan di tahun 2015, yang selanjutnya berhasil kembali pada tren menurun di tahun 2016.

dan komoditi ketika harga komoditi mencapai puncaknya selama tahun 2010-2013, namun sejalan dengan penurunan permintaan dan harga komoditi dunia, pertumbuhan ekonomi daerah-daerah dengan basis ekonomi sumber daya alam ikut menurun.<sup>53</sup>

Peran Kebijakan Fiskal dan Kebijakan di Sektor Keuangan perlu lebih antisipatif untuk memitigasi resiko akibat kenaikan kesenjangan yang dipicu oleh investasi berlebih di sektor-sektor *non-tradables* tersebut. Disamping sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penguasaan aset termasuk aset berupa modal manusia (tingkat pendidikan, ketrampilan dan keahlian). Untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi harus didorong terutama ke daerah-daerah di luar Jawa sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Proses ini harus didukung dengan peningkatan konektivitas, baik udara maupun laut dan sistem logistik nasional yang efisien.

*Kedua*, kerentanan dan ketidakpastian ekonomi masih mewarnai perekonomian kita sebagaimana dijelaskan di atas yang menggambarkan pada dampaknya bagi penciptaan kesempatan kerja. Sektor informal masih besar (sekitar 60%), meskipun dengan tren yang semakin menurun. Tingkat pengangguran terbuka sudah berada di bawah 6% sejak tahun 2014, meskipun masih banyak yang terperangkap bekerja dalam pekerjaan kurang layak terutama kaum perempuan dan kaum muda. Tingkat pengangguran kaum muda berkisar antara dua sampai dengan tiga kali lipat dari rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasional. Demikian pula dengan jumlah pekerja yang bekerja paruh waktu masih hampir 26 juta pekerja.<sup>54</sup> Tenaga kerja terdidik dengan kompetensi dan skill yang memadai masih sangat terbatas. Masih sekitar 60% penduduk yang bekerja

---

<sup>53</sup> Terutama daerah-daerah di Sumatera seperti Propinsi-propinsi: Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan seperti Propinsi-propinsi: Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah.

<sup>54</sup> Tingkat pengangguran terbuka usia 15-19 =22%, usia 20-24=16%. Jumlah pekerja tidak penuh: Setengah penganggur Feb 2015 10,04 juta, Feb 2016 10,46 juta. Jumlah Pekerja Paruh waktu Feb 2015 25,64 juta dan Feb 2016 sebesar 25.87 juta (BPS, Sakernas, Februari, 2016).

hanya berpendidikan SMP atau lebih rendah.<sup>55</sup> Percepatan penciptaan kesempatan kerja yang layak tidak terlepas dari upaya pengentasan kemiskinan, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang menjamin inklusivitas serta kualitas dari sumber daya manusia, tenaga kerja itu sendiri.

*Ketiga*, upaya percepatan pengentasan kemiskinan tetap menjadi perhatian utama yang sangat terkait dengan penciptaan kesempatan kerja serta sistem bantuan dan perlindungan sosial yang komprehensif. Disamping perluasan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, peningkatan pelayanan dan infrastruktur dasar, pengembangan *sustainable livelihood* dan keuangan yang inklusif merupakan kebijakan dan program terobosan yang sangat penting. Tidak ada pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan (*sustainable*) tanpa disertai dengan peningkatan kesejahteraan dari sisi ekonomi melalui penghidupan atau mata pencaharian yang layak. Bagaimana penduduk kelompok miskin dapat bekerja dengan penghasilan memadai yang sesuai dengan keahlian/kemampuan yang mereka punyai. Program-program pembangunan infrastruktur dasar yang dibangun dengan skema *Cash for Work* merupakan skema yang pantas untuk dikembangkan, disamping program *sustainable livelihood* melalui skema kredit mikro.

*Keempat*, memberi perhatian pada “Sumber Pendapatan Baru” dari perekonomian yang saat ini sudah mulai dilakukan dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut ke depan. Sumber pendapatan baru yang pertama adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini merupakan sektor/sumber pendapatan baru perekonomian yang tidak bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam, sehingga lebih ramah lingkungan/hijau dan berkelanjutan. Sumber ekonomi baru ini tidak

---

<sup>55</sup> Penduduk bekerja dengan pendidikan rendah (SMP ke bawah) Feb 2016 sebesar 61,26%, Pendidikan menengah (SMA&SMK) 27,40% dan pendidikan tinggi sebesar 11,34%. Tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah sekitar 45% (BPS, Sakernas, Februari, 2016).

hanya mengandalkan pada *knowledge*/pengetahuan dan keterampilan, namun juga kekayaan keanekaragaman budaya (kuliner, kerajinan, budaya khas/tradisional dsb). Indonesia banyak memiliki kekayaan dan talenta di bidang ini, kaya akan aset budaya, suatu potensi untuk terus dikembangkan.

Sumber pendapatan baru yang kedua adalah ekonomi biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Indonesia adalah salah satu negara terkaya dengan keanekaragaman hayati. Hutan yang selama ini hanya dimanfaatkan kayunya, aset keanekaragaman hayati yang selama ini dimanfaatkan dengan baik oleh para leluhur dan masyarakat adat kita, belum dikembangkan secara optimal. Aset inilah yang perlu kita manfaatkan dengan baik, sebagai sumber ekonomi baru, ekonomi hijau. Selama ini pemanfaatan keanekaragaman hayati masih terbatas pada jamu tradisional dan kosmetik. Meskipun sudah mulai ada pemanfaatan hasil tanaman untuk pembuatan material, misalnya singkong untuk plastik ramah lingkungan, namun masih sangat terbatas volume dan skala usahanya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk produk lain, terutama produk kesehatan (suplemen), dan *leisure* (misalnya produk perawatan/spa) prospektif untuk terus dikembangkan.

Sumber pendapatan baru yang ketiga adalah jasa *knowledge* (sektor jasa/*services sector*) yang melekat pada kegiatan/aktivitas manusia (*consultancy, hospitality*). Kemampuan SDM bangsa Indonesia perlu dihargai dan disusun klasifikasi kompetensi serta sistem sertifikasinya, sehingga akan menjadi lapangan kerja baru bagi SDM terdidik, di pasar dalam negeri dan luar negeri. Berbagai sektor pendapatan baru sebagaimana diuraikan di atas, potensial untuk dikembangkan di daerah kantong-kantong kemiskinan dengan menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan dan inklusif.

Pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik yang berbasis Primer (Pertanian dan Pertambangan), Sekunder (Industri)



dan Tersier (Jasa) termasuk sumber-sumber pertumbuhan baru sebagaimana disebutkan di atas memerlukan dukungan ketersediaan energi yang memadai. Pemanfaatan sumber energi baru seperti gas dan panas bumi harus diperluas; dan sumber energi terbarukan seperti sumber daya air, angin, matahari serta limbah pertanian dan sampah perlu ditingkatkan kontribusinya – untuk memenuhi bauran energi yang lebih baik (diversifikasi); pengembangan energi rendah emisi/ramah lingkungan, serta akses energi yang lebih seimbang di seluruh wilayah Indonesia.

*Kelima*, kuantitas sumber daya manusia Indonesia yang semakin meningkat. Proyeksi penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 memproyeksikan penduduk Indonesia di tahun 2035 menjadi 305,7 juta jiwa. Proyeksi ini dilakukan dengan menggunakan asumsi *Total Fertility Rate* (TFR) menjadi 2,1 pada tahun 2022-2023 dan penduduk tumbuh seimbang atau *Net Reproductive Rate* (NRR) sama dengan 1 pada tahun yang sama (2022-2023). Indonesia sejak tahun 2012 sampai dengan jangka waktu proyeksi penduduk berakhir di tahun 2035 akan mengalami masa Bonus Demografi, dimana persentase penduduk usia produktif lebih besar dari persentase penduduk usia tidak produktif. Periode masa Bonus Demografi ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2028-2030, dimana *dependency ratio* berada pada titik terendah sebelum meningkat kembali. Bonus Demografi memberi peluang dari segi ketersediaan penduduk usia produktif (usia kerja) apabila disertai tingkat produktivitas kerja yang tinggi.<sup>56</sup>

Disamping tantangan pemanfaatan peluang Bonus Demografi, mulai tahun 2020, Indonesia mulai mengalami proses *Ageing* atau penuaan struktur usia penduduk. Mulai tahun 2020, persentase penduduk usia lanjut Indonesia (usia 60+ tahun) akan melewati ambang batas 10

---

<sup>56</sup> Dengan syarat kualitas pendidikan dan derajat kesehatan penduduk usia kerja Indonesia yang memadai. Apabila Indonesia dapat memanfaatkan potensi Bonus Demografi ini, akan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan sampai dengan 1 *percentage point* lebih tinggi, dengan mengacu pada pengalaman dari Negara-negara seperti: Jepang, Korea Selatan dan Taiwan.

persen. Bertambahnya penduduk lanjut usia membawa tantangan di bidang kesehatan, dan pada saatnya beban terhadap kondisi fiskal apabila masalah pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kesehatan tidak terkelola dengan baik. Meskipun demikian, apabila penduduk lanjut usia ini hidup sehat dan dapat beraktivitas, kontribusi mereka terhadap perekonomian masih positif terutama bagi mereka yang memiliki keahlian yang diperlukan.<sup>57</sup>

*Keenam*, kualitas sumber daya manusia yang pada saat ini ditandai dengan rata-rata masa sekolah sebesar 8 tahun, atau belum tamat SMP. Terjadi kesenjangan yang cukup besar antara rata-rata lama sekolah menurut kelompok pendapatan, terutama mereka yang berasal dari kelompok pendapatan 20 persen terendah. Tingkat putus sekolah di kelompok ini masih tinggi, sehingga pencapaian tingkat dan kualitas pendidikan menjadi kendala tersendiri bagi mereka keluar dari jerat kemiskinan. Perlu percepatan perluasan pendidikan universal sampai dengan tingkat pendidikan menengah atas. Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak usia sekolah di jenjang sekolah menengah dari rumah tangga berpendapatan 40% terendah.

Selain masalah akses, kualitas pendidikan untuk penguasaan sains (termasuk matematika), bahasa dan logika berpikir menjadi sangat krusial. Anak-anak yang lulus dari jenjang sekolah menengah atas inilah yang kemudian diharapkan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi baik untuk ketrampilan Politeknik maupun sarjana, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terdidik dan memiliki keahlian (*skilled*). Oleh karenanya terdapat *critical junction* antara lulusan sekolah menengah (atas) dengan jenjang selanjutnya di pendidikan tinggi.

Aspek lain dari kualitas SDM Indonesia tercermin dari kualitas kesehatan manusia Indonesia yang secara rata-rata masih rendah dan

---

<sup>57</sup> Apabila hal ini terealisasi, maka Indonesia dikatakan sebagai memperoleh manfaat dari "Double Demographic Dividend".

belum merata. Indikator-indikator kesehatan yang masih rendah diantaranya: Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), Gizi Buruk, *Stunting*. Prevalensi *Stunting* sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan pada angka 37%, meskipun angka ini bervariasi antar daerah.<sup>58</sup> Kondisi *Stunting* pada Balita khususnya sangat mengkhawatirkan, karena dampaknya terhadap produktivitas generasi yang akan datang. *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Anak dengan *stunting* memiliki kelemahan dan berkorelasi terhadap: IQ yang rendah, tinggi badan dan berat badan tidak sesuai grafik perkembangan, serta rentan terhadap penyakit. Kondisi rata-rata beberapa indikator kesehatan masyarakat yang masih rendah tersebut mengindikasikan perlu diperluasnya implementasi *Continuum of Care* untuk pelayanan kesehatan.<sup>59</sup>

*Ketujuh*, investasi sebagai modal fisik termasuk infrastruktur dasar dan konektivitas harus ditingkatkan. Peran investasi dalam perekonomian yang pada pertengahan tahun 2016 sebesar 33 persen PDB masih mempunyai ruang yang besar untuk ditingkatkan mengarah pada 45 persen PDB dalam jangka panjang. Investasi fisik termasuk di dalamnya investasi untuk pembangunan infrastruktur akan memberikan dorongan yang kuat dan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi infrastruktur dasar seperti: jalan, jembatan, air bersih, sanitasi layak, listrik, yang akan membuka keterisolasian ekonomi, meningkatkan ekonomi lokal, serta mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

---

<sup>58</sup> Data Riskesdas menyajikan prevalensi berat kurang (*underweight*) secara nasional Prevalensi berat kurang tahun 2013 adalah 19,6 %, terdiri dari 5,7% gizi buruk dan 13,9% gizi kurang, sementara angka *Stunting* pada Balita mencapai 37,2% (Riskesdas, 2013). Beberapa daerah mengalami prevalensi *Stunting* yang jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional, seperti: Prop NTB, Prop NTT.

<sup>59</sup> *Continuum of care* atau Pelayanan Kesehatan Berkesinambungan mulai dari Pelayanan terhadap Pasangan Usia Subur untuk keperluan Keluarga Berencana, Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan bagi bayi dan balita. Selanjutnya pelayanan kesehatan bagi anak SD, anak SMP/A dan remaja, serta pada akhirnya Lansia. Pelayanan ini mencakup pelayanan kesehatan Preventif dan Kuratif.

Infrastruktur konektivitas akan mempercepat keterhubungan antar pusat-pusat perekonomian antar daerah serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Urbanisasi dan tren semakin meningkatnya penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, menghendaki pembangunan kota dan perkotaan dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan termasuk di dalam pembangunan infrastruktur perkotaannya.<sup>60</sup>

*Kedelapan*, sejalan dengan peningkatan kualitas SDM, mendorong peningkatan penguasaan Iptek dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi. Upaya ini diperlukan agar nilai tambah bagi perekonomian semakin besar. Untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan Iptek dan Inovasi diperlukan antara lain: peningkatan investasi dalam R&D baik dari pemerintah maupun swasta; peningkatan kolaborasi antara dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah; peningkatan akses terhadap modal ventura; dan proteksi terhadap hak atas kekayaan intelektual. Termasuk strategi pengembangan pendidikan sebagai prasyarat pembangunan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*). Perkembangan dan kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) dalam dua tahun terakhir yang sangat pesat memberi peluang tersendiri bagi Indonesia dengan penduduk usia muda yang produktif dan kreatif.

*Kesembilan*, pembangunan institusi yang lebih baik disertai dengan kepastian dan penegakan hukum. Sumber-sumber daya pembangunan yang luar biasa ini tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh kelembagaan dan tata kelola yang baik. Dalam kaitan ini, reformasi birokrasi dan tata kelola perlu makin ditingkatkan melalui penataan kembali struktur, organisasi, tata laksana instansi pemerintah serta penempatan dan pengelolaan SDM

---

<sup>60</sup> Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia, 2010-2035, persentase penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan mencapai 56,7% di tahun 2015 yang akan meningkat menjadi 66,6% di tahun 2035.

aparatur pemerintahan. Berbagai tumpang tindih regulasi dan kewenangan baik antar sektor maupun antara pusat dan daerah perlu dihilangkan/dikurangi agar inisiatif dan prakarsa masyarakat termasuk dunia usaha dapat berkembang.

Iklim usaha dan iklim ekonomi tidak dapat berkembang dengan baik tanpa dukungan adanya kepastian hukum dan penegakan hukum. Tidak cukup hanya berupa dukungan tersedianya berbagai undang-undang dan regulasi yang mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat. Lebih penting lagi adalah kepastian hukum (*legal certainty*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) sesuai peraturan per undang-undangan yang berlaku, termasuk jaminan terhadap kepemilikan (*property rights*).

### 10.3 Sembilan Fokus Area SDGs Indonesia

Mencermati Visi, Konsepsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi Komitmen Indonesia, disertai dengan analisis tantangan dan peluang pembangunan kita dalam 10 tahun terakhir serta perkiraan *trajectory*-nya ke depan, berikut adalah usulan untuk Sembilan Fokus Area SDGs Indonesia (Alisjahbana, 2016)<sup>61</sup>:

1. Mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan dalam segala bentuk
2. Pendidikan menengah universal yang berkualitas serta penguasaan Iptek dan Inovasi
3. Pelayanan kesehatan berkesinambungan (*continuum of health care*) yang universal
4. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesempatan kerja yang layak
5. Infrastruktur dasar dan konektivitas

---

<sup>61</sup> Dalam kesempatan yang berbeda Professor Jeffrey Sachs (Sachs, 2015) menyampaikan 10 prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia sebagai berikut: 1. *End to poverty*; 2. *Universal health coverage*; 3. *Secondary education for all*; 4. *Reduction of economic inequality*; 5. *Sustainable growth and jobs*; 6. *Sustainable infrastructure*; 7. *Sustainable cities*; 8. *End of human induced climate change*; 9. *Conservation of marine and terrestrial ecosystems*; 10. *Good governance*.

6. Kota dan perkotaan yang berkelanjutan
7. Memerangi perubahan iklim beserta dampaknya
8. Konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan sumber daya laut
9. Institusi dan tata kelola yang baik

Terlepas dari adanya Sembilan Fokus Area SDGs Indonesia, percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mungkin tercapai tanpa stabilitas perekonomian secara makro. Kita tidak bisa *take for granted* stabilitas ekonomi makro kita, terutama dengan semakin tingginya interdependensi perekonomian antar Negara serta dinamika yang cepat di tataran perekonomian global. Pengalaman panjang kinerja perekonomian Indonesia membuktikan hal ini. Selama kurun waktu 2004-2014, tidak kurang dari tiga kali dinamika eksternal perekonomian global berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, tahun 2005, 2008 dan 2013 hingga kini. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi dapat berjalan efektif, apabila fundamental perekonomian terjaga. Ukuran stabilitas fundamental perekonomian tercermin dari kinerja indikator-indikator utama seperti: pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, transaksi berjalan dan defisit anggaran.

Sembilan Fokus Area SDGs Indonesia ini sudah dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan pembangunan berkelanjutan di tingkat global sebagaimana yang dibahas mendalam di bab-bab terdahulu. Tantangan global ini termasuk *Planetary Boundary* atau keterbatasan daya dukung lingkungan, seperti: lahan, air, pertumbuhan dan jumlah penduduk. Faktor dampak perubahan iklim yang memperburuk daya dukung lingkungan di banyak Negara, termasuk di Indonesia.

## **Pentingnya Pendekatan Holistik dan Terintegrasi**

Berbeda dengan MDGs, SDGs merupakan tujuan pembangunan yang tidak hanya lebih holistik dan komprehensif, tetapi yang juga mencerminkan keterkaitan antara satu tujuan dengan tujuan lainnya dan antar target. MDGs yang terdiri dari 8 tujuan dalam pelaksanaannya cenderung terkotak-kotak dan terfragmentasi pada masing-masing tujuan. Pencapaian akhir MDGs yang dirasa kurang maksimal, termasuk di Indonesia, salah satu penyebabnya ditengarai karena pendekatan implementasi yang kurang terintegrasi. Kebijakan, program maupun aksi yang dilakukan kemudian tidak terintegrasi antar tujuan, sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal. Diakui bahwa pendekatan yang holistik dan terintegrasi terhadap tujuan pembangunan global kemudian ditranslasikan ke tingkat nasional hingga lokal, tidaklah mudah. Le Blanc (2015) melakukan studi menggunakan metode *Simple Network Analysis* untuk mengkaji pola keterhubungan antar tujuan dan target dari SDGs.

### **11.1 SDGs dalam Pendekatan Holistik dan Terintegrasi**

Pembahasan dalam sub-bab ini, maupun sub-bab 11.2, 11.3 dan 11.4 menuliskan kembali kajian dan analisis yang dilakukan Le Blanc (2015). Le Blanc (2015) memformulasikan SDGs sebagai jaringan antar target sebagaimana direpresentasikan dalam Gambar 11.1 di

bawah ini. Enam belas tujuan dari SDGs direpresentasikan dalam bentuk lingkaran besar disertai dengan label dari tujuan tersebut, sedangkan target direpresentasikan dalam bentuk lingkaran yang lebih kecil.<sup>62</sup> Gambaran ini merupakan ilustrasi yang memadai terhadap aspek keterkaitan antar Tujuan dan Target dari SDGs yang disepakati sebagai Tujuan Pembangunan Global Pasca 2015. Dari masing-masing tujuan SDGs, beberapa target ada yang hanya terhubung dengan tujuan dari mana target itu berasal, sedangkan beberapa target lainnya terhubung dengan lebih dari satu tujuan. Pola hubungan antar tujuan SDGs melalui target ini memberikan gambaran dari struktur jaringan SDGs.

Dari 107 target yang direpresentasikan pada gambar 11.1, sebanyak 60 target terhubung dengan lebih dari satu tujuan. Sebanyak 19 target diantaranya terhubung dengan lebih dari 3 tujuan. Sebagai contoh, Target 5.1 di bawah SDG 5 (Kesetaraan Gender) yang berisi “Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun”, terhubung pula dengan SDG 10 (Kesenjangan) dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). Seluruh keterkaitan antar tujuan melalui target tersebut tergambarkan secara komprehensif pada Gambar 11.1.

---

<sup>62</sup> Untuk memudahkan dalam membaca, target diberi label dengan nomor sesuai dalam laporan dari *Open Working Group*. Goals, indikator dan target SDGs yang disetujui sebagai Tujuan Pembangunan Global melalui Resolusi PBB pada September, 2015 pada dasarnya mengacu pada hasil dari *Open Working Group* ini.





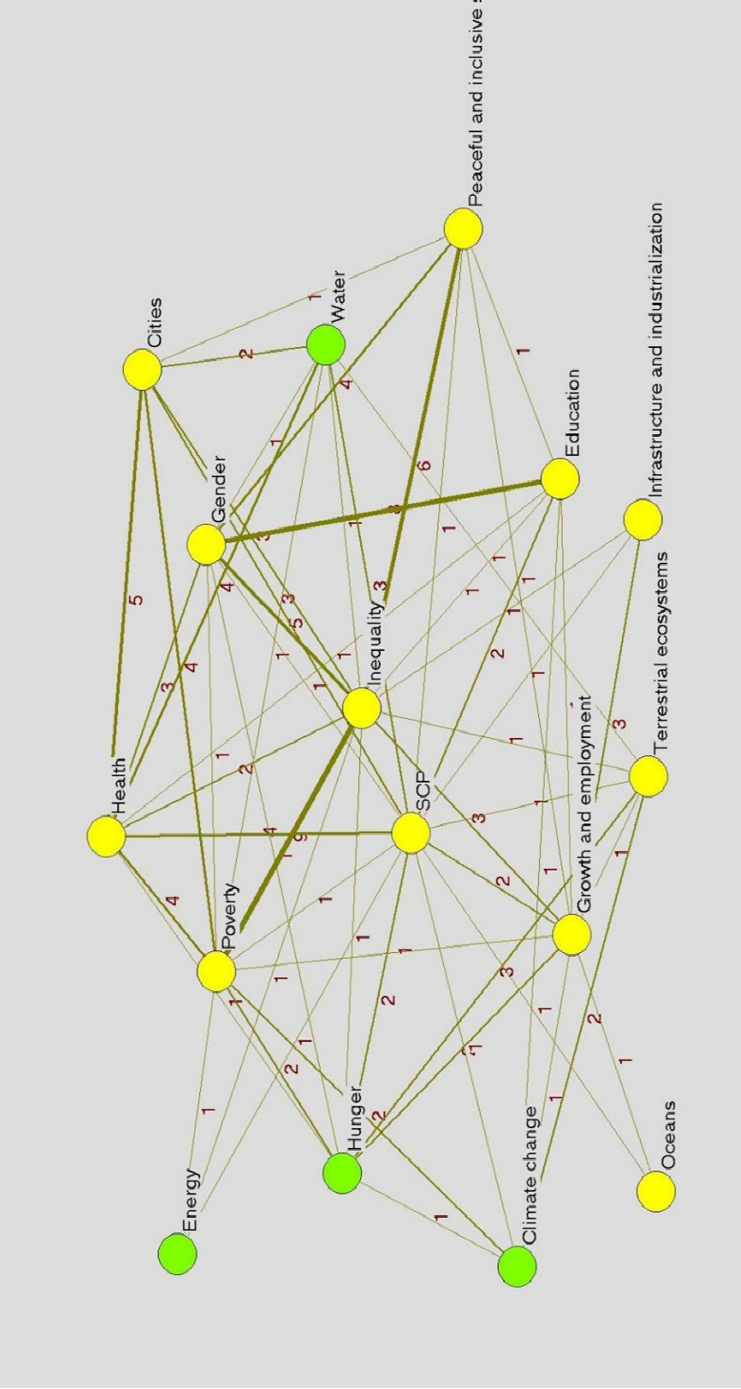
## **11.2 Keterkaitan Tujuan SDGs Melalui Keterhubungan antar Target**

Gambaran agregat tentang keterkaitan antar tujuan SDGs melalui keterhubungan antar target hasil studi Le Blanc (2015) dapat dilihat dalam Tabel 11.1 dan Gambar 11.2.

SDGs sebagai jaringan antar target direpresentasikan pada Gambar 11.2. Enam belas tujuan dari SDGs digambarkan kembali dalam bentuk lingkaran, sedangkan garis yang menghubungkan antar tujuan menggambarkan jumlah target yang terkait antar tujuan SDGs tersebut. Semakin tebal garis yang menghubungkan antar tujuan di dalam Gambar 11.2 menunjukkan semakin banyak jumlah target yang terkait antar dua tujuan tersebut. Garis yang paling tebal adalah garis yang menunjukkan keterkaitan antar tujuan Kesetaraan Gender dan Pendidikan (SDG 4 dan 5), yaitu ada sebanyak 6 target yang saling terkait. Selain daripada itu, Gambar 11.2 menunjukkan pula sentralitas dari SDG 10 dan SDG 12, yaitu Kesenjangan, dan Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan. Kedua tujuan SDGs ini dianggap sebagai tujuan yang paling menentukan dan paling banyak terkait dengan tujuan serta target lainnya.

Tabel 11.1 menempatkan enam belas tujuan SDGs berdasarkan banyaknya jumlah tujuan yang saling terkait antar tujuan SDGs. Berikut adalah tujuan SDGs dengan jumlah keterkaitan antar tujuan tertinggi sampai dengan yang terendah: SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan), SDG 10 (Kesenjangan), SDG 1 (Kemiskinan), dan SDG 8 (Pertumbuhan Ekonomi) mendapati urutan teratas dengan 10 atau lebih tujuan lain yang saling terkait dengan tujuan tersebut. Di urutan terbawah terdapat SDG 7 (Energi) sebanyak 3 keterkaitan, SDG 9 (Infrastruktur dan Industrialisasi) sebanyak 3 keterkaitan, dan SDG 14 (Kelautan) hanya sebanyak 2 keterkaitan. Sentralitas dari SDG 10 (Kesenjangan) dan SDG 12 (Produksi yang Berkelanjutan) terlihat dalam Tabel 11.1.

Le Blanc (2015) dalam kajiannya melihat secara lebih detail untuk SDG 10 (Kesenjangan) sebagai ilustrasi. Gambar 11.3 menunjukkan keterkaitan antara Tujuan 10 tersebut dengan Tujuan lainnya yang terhubung melalui target SDG 10 itu sendiri dan target-target dari tujuan yang lain. Dari kajiannya yang menarik adalah dari 23 target yang terkait dengan isu kesenjangan, sebanyak 16 target merupakan target dari tujuan di luar SDG 10. Keterkaitan yang paling banyak adalah dengan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh), yaitu sebanyak 6 target, termasuk 2 diantaranya adalah target yang terkait pula dengan SDG 5 (Kesetaraan Gender).



Sumber: Le Blanc (2015)

**Gambar 11.2 Keterkaitan antar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Target**

**Tabel 11.1 Keterkaitan antar Tujuan dari SDGs Melalui Target**

<b>Rank</b>	<b>Tujuan (Goal) Pembangunan Berkelanjutan</b>	<b>Jumlah tujuan (Goal) lain yang saling terkait</b>
1	12 - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	14
2	10 - Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara	12
3	1 - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	10
4	8 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	10
5	2 - Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	8
6	3 - Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	8
7	5 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	8
8	4 - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	7
9	6 - Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	7
10	11 - Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	6
11	13 - Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	6
12	15 - Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	6

13	16 - Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	6
14	7 - Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	3
15	9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	3
16	14 - Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	2

Sumber: Le Blanc (2015)



### 11.3 Target Inti (*Core*) dan Target Ikutan (*Extended*)

Selanjutnya Le Blanc (2015) memisahkan antara target inti dan target ikutan. Target inti adalah target yang merupakan bagian dari tujuan dari mana target tersebut berasal. Target inti merupakan bagian untuk mencapai tujuan tertentu. Target ikutan adalah target yang terkait secara tidak langsung dengan tujuan tertentu, namun target ikutan tersebut merupakan bagian dari tujuan yang lain. Tabel 11.2. berikut ini mengambil contoh untuk Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Tujuan 3 terkait kesehatan dengan semua sub-tujuan atau targetnya. Terdapat 9 target inti dari Tujuan 3 tentang Kesehatan (lihat Tabel 11.2). Semua target inti terkait langsung dengan target pencapaian di bidang kesehatan. Sebagai contoh, Target 3.1. tentang Angka Kematian Ibu Melahirkan, ataupun Target 3.2. tentang Angka Kematian Bayi.

Sementara itu target ikutan dapat dilihat pada urutan berikutnya dalam Tabel 11.2. Target-target yang termasuk target ikutan merupakan target dari tujuan lain, namun terkait dengan tujuan kesehatan. Untuk Tujuan 3: Kesehatan, terdapat 7 target ikutan dari 4 Tujuan lainnya. Sebagai contoh, Target 2.2. tentang menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi yang merupakan target dari Tujuan 2: Menghilangkan kelaparan (*hunger*). Contoh lainnya adalah Target 6.1. tentang akses terhadap air bersih yang merupakan bagian dari Tujuan 6: Air bersih dan sanitasi yang layak. Kecukupan gizi dan ketersediaan air bersih merupakan prasyarat mutlak bagi hidup sehat. Demikian pula relevansi dan keterkaitan yang erat antara Target dari Tujuan 11: Perkotaan dan Pemukiman yang layak, dan Tujuan 12: Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Pencapaian Tujuan 3 tentang Kesehatan sudah seharusnya didekati secara komprehensif dengan menjamin kecukupan dari target-target ikutan disamping target-target inti.



Pemetaan keterkaitan antara target dengan tujuan dalam suatu network keterhubungan membawa implikasi kebijakan yang luas. Pemetaan ini memungkinkan pemilihan fokus dari kebijakan dan program yang memiliki daya ungkit serta *positive spill over effect* yang tinggi ke tujuan dan target di luar ruang lingkungannya sendiri. Sebagai contoh: dari pembahasan sebelumnya telah ditunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi layak bermanfaat signifikan dan positif terhadap pencapaian di bidang kesehatan. Kebijakan dan strategi yang efektif untuk pencapaian target-target kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan pada program *preventif* dan kuratif di bidang kesehatan saja. Akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi layak sudah harus tercapai. Integrasi pemikiran dan perumusan kebijakan terintegrasi untuk mencapai Tujuan SDGs Kesehatan di atas perlu didukung oleh sistem *monitoring* dari target inti dan target ikutan kesehatan secara terintegrasi.

**Tabel 11.2 Target Inti (Core) dan Target Ikutan (Extended):  
Contoh dari Tujuan 3**

<b>Target</b>	<b>Isi Target</b>
Target “Inti”: Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah.
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
3.6	Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.

Target	Isi Target
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.
<b>Target "Ikutan": Target dari tujuan lain yang terkait dengan kesehatan</b>	
	Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
	Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
	Tujuan 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, resilien dan berkelanjutan
11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.

Target	Isi Target
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
	Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

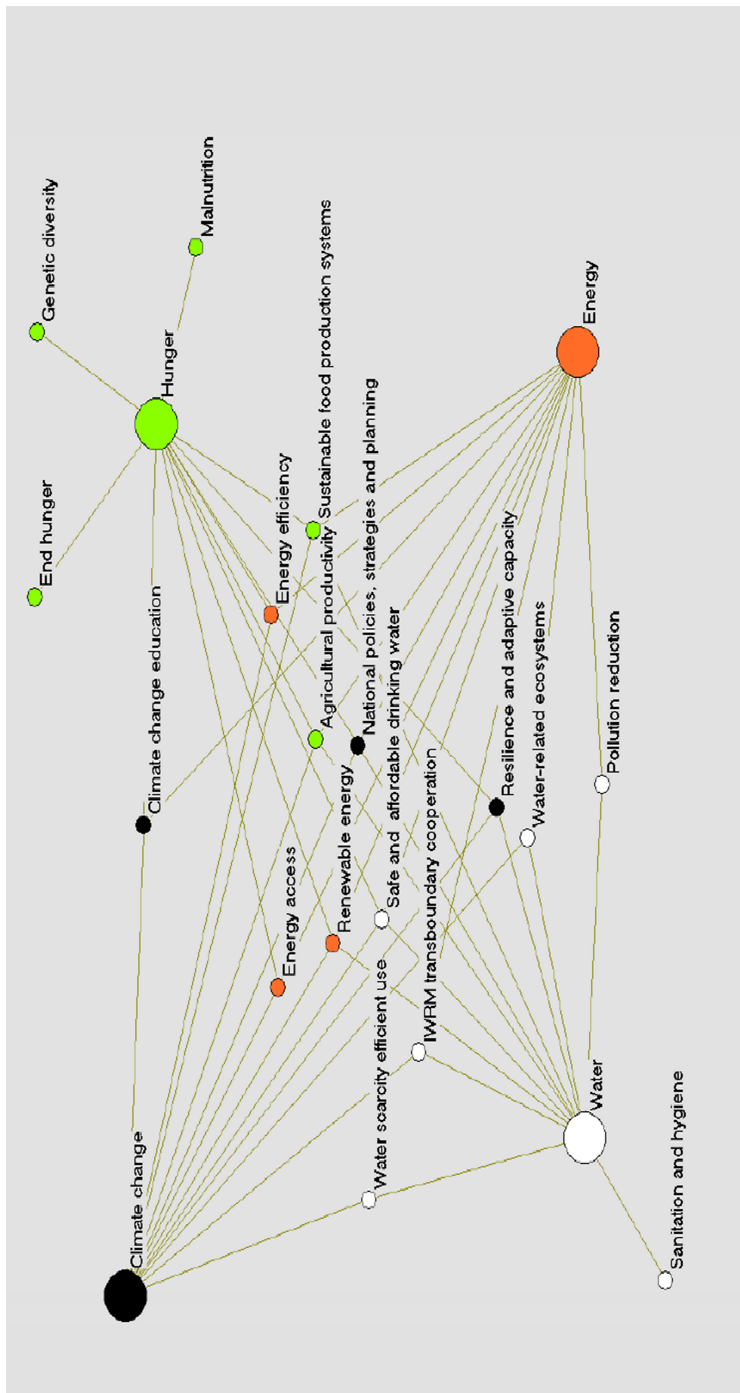
Sumber: Le Blanc (2015)

### 11.4 Catatan untuk Pendekatan Keilmuan (*Scientific Approach*) terhadap SDGs

Le Blanc (2015) mendasarkan studinya murni kepada sistem *network* dan keterkaitan SDGs sebagai suatu outcome dari proses politik di tingkat global dan tidak sepenuhnya mengandalkan keterkaitan berdasarkan pendekatan keilmuan (*scientific approach*). Gambaran keterkaitan yang berbeda diperoleh apabila kita mengambil pendekatan keilmuan sebagai acuan. Sebagai contoh, *ICSU-ISSC Scientific Review of SDGs* tahun 2015 mendapatkan pola keterkaitan antar Tujuan dan target-target dari SDGs sebagaimana terpolakan dalam Gambar 11.4. Sebagai contoh digambarkan pola keterkaitan antar 4 Tujuan SDGs, yaitu: Perubahan Iklim, Energi, Kelaparan dan Air Bersih. Target-target dari setiap Tujuan terletak sesuai dengan pola keterkaitan secara ilmiah dengan empat Tujuan SDGs tsb.

Akan terdapat gap antara pola yang tergambarkan melalui sistem *network* SDGs sebagaimana dalam *Outcome Document* PBB dengan pola keterkaitannya secara ilmiah (Le Blanc, 2015). Tentu seyogyanya yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan adalah keterkaitan antar target dengan Tujuan sesuai dengan pola ilmiah dan empirisnya. Pola keterkaitan antar target dan Tujuan ini akan berbeda antar Negara, dan antar daerah dalam suatu Negara. Keterbatasan sumber

daya yang tersedia, sementara target SDGs yang hendak dicapai sangat banyak menghendaki prioritas program pencapaian SDGs dipertajam dengan bantuan pendekatan keilmuan untuk social network analysis dari target SDGs. Target-target yang menjadi prioritas tinggi adalah target-target dengan dampak *multiplier* dan *spill-over effect positive* yang terbesar.



Sumber: Le Blanc (2015)

Gambar 11.4 Keterkaitan antar Target Menurut ICSU-ISSC Scientific Review of SDGs

## **Pemenuhan Syarat Cukup dan Perlu**

Pengalaman implementasi MDGs selama 15 tahun menunjukkan awal konsolidasi dan koordinasi yang relatif lambat dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Penekanan terlalu pada Kebijakan dan Program Pemerintah (Pusat). Sinkronisasi agenda pembangunan global MDGs ke dalam agenda pembangunan nasional mulai dilakukan pada tahun 2007 melalui MDGs *Second Progress Report*. Agenda pembangunan MDGs mulai disinkronisasikan ke dalam RPJMN 2005-2009 dan Strategi Nasional Pemberantasan Kemiskinan. Bab ini membahas tentang pemenuhan syarat cukup dan perlu, kebijakan dan program pengungkit bagi keberhasilan pencapaian SDGs. Bab ini juga membahas peluang kerjasama dengan swasta dan kerjasama pembangunan global dalam merealisasikan target-target SDGs.

### **12.1 Syarat Cukup dan Perlu (*Necessary and Sufficient Conditions*)**

Dalam periode 2009-2014, implementasi MDGs kemudian dikoordinasikan secara lebih intensif oleh Pemerintah Pusat melalui payung hukum dan sinkronisasi target-target MDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Adapun serangkaian payung hukum dan dokumen perencanaan serta catatan implementasi dan *monitoring* evaluasi MDGs selama periode ini adalah sebagai berikut:

1. Payung hukum (*legal aspect*):  
Inpres no 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan; Tim Koordinasi Percepatan Pencapaian MDGs Nasional 2011-2015; Berbagai peraturan/payung hukum untuk melancarkan koordinasi implementasi MDGs antar instansi pemerintah di tingkat daerah.
2. Perencanaan:  
Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs Tahun 2010-2014, di tingkat Nasional yang kemudian dijabarkan lebih lanjut di tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Disertai dengan pedoman teknis untuk operasional indikator, penyusunan database dan harmonisasi kontribusi dunia usaha melalui CSR.
3. Implementasi:  
Progress dari pencapaian MDGs Nasional maupun Daerah dilaporkan secara tahunan. *Pilot project* percepatan pencapaian MDGs untuk indikator tertentu bidang kesehatan dan pelayanan dasar di beberapa daerah terpilih, bekerjasama dengan UNDP.
4. *Monitoring* dan Evaluasi:  
Monev dilakukan di tingkat Nasional dan Propinsi dilengkapi dengan pengembangan E-Monev. Mulai tahun 2011 juga disusun data untuk indikator MDGs tingkat Kabupaten/Kota. Serta diseminasi (terbatas) MDGs di berbagai media masa.

### **Indikator Capaian MDGs yang *Off-Track*: Peran Masyarakat, Rumah Tangga dan Individu**

Pelajaran yang diperoleh dari implementasi MDGs adalah peran pemerintah, khususnya pemerintah pusat lebih dominan. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota belum sepenuhnya berperan, demikian pula dengan dunia usaha dan masyarakat yang dirasakan sangat kurang peranannya. Apabila kita melihat capaian MDGs yang *off track*, hampir semua berkenaan dengan indikator yang sangat ditentukan keberhasilan pencapaiannya di dua tingkat: tingkat

individu, Rumah Tangga (tingkat Mikro), dan tingkat Makro yang merupakan Kebijakan dan Program Nasional dan Daerah. Kemiskinan, Asupan Kalori, Angka Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan, HIV dan AIDS, Air Minum, Sanitasi Pedesaan, Daerah Kumuh Perkotaan, Emisi CO<sub>2</sub>. Kesenjangan pencapaian target-target MDGs semakin terasa antar kelompok masyarakat berdasarkan pengelompokan sosial-ekonomi dan berdasarkan daerah.

Di antara lembaga pemerintah pusat dan daerah, pencapaian target MDGs masih dilakukan secara parsial, kurang terintegrasi antar instansi di tingkat pusat, maupun koordinasi antara instansi pusat dengan daerah. Pendekatan yang dilakukan masih per tujuan, belum mengadopsi pendekatan tujuan dan target dalam suatu jejaring target (*network of targets*). Misalnya, target pengentasan kemiskinan akan lebih efektif dicapai apabila terdapat keterpaduan intervensi kebijakan dari sisi pembangunan kapasitas SDM, dan penghidupan ekonomi/mata pencaharian yang layak. Partisipasi dari swasta melalui CSR, LSM dan akademisi belum terjadi secara terintegrasi, masih melakukan upaya masing-masing secara tersendiri. Aspek pendanaan diakui sebagai salah satu kendala terbesar dalam pencapaian MDGs, terutama di tingkat daerah.

Sosialisasi secara masif tentang MDGs, serta cara-cara terobosan belum dilakukan secara sistematis. MDGs seyogyanya diperkenalkan dalam bahasa yang mudah dan sederhana disertai contoh-contoh konkrit kepada masyarakat terutama RT dan individu sedini mungkin. Peran kelompok masyarakat, forum partisipasi masyarakat, program-program pendampingan terutama di desa-desa dan kantong-kantong kemiskinan perlu dilakukan secara lebih masif.

Melihat pada indikator dan capaian MDGs yang *off-track* menunjukkan capaian di tingkat Masyarakat, RT dan Individu yang jauh dari maksimal. Pendekatan pembangunan SDGs oleh karenanya perlu dilengkapi dengan syarat perlu (*sufficient conditions*) sebagai berikut:



## **Syarat Perlu (*Sufficient Conditions*)**

Dari pengalaman pelaksanaan MDGs dengan beberapa pencapaiannya yang jauh dari target/komitmen, jelas menunjukkan bahwa apa yang pernah dilaksanakan baru memenuhi syarat cukup (*necessary*) dan belum memasukkan syarat perlu (*sufficient conditions*). Syarat perlu dimaksud meliputi:

1. Sosialisasi yang masif dan membumi dari beberapa target SDGs yang spesifik, menyesuaikan pada target group yang dituju.
2. Peran aktif dan *leadership* (kepemimpinan) dari Pemerintah Daerah, sampai ke tingkat yang paling dekat dengan masyarakat
3. Pemberdayaan masyarakat. Masyarakat di akar rumput, Rumah tangga dan individu merupakan ujung tombak keberhasilan SDGs.
4. Pemberlakuan mekanisme insentif (jika target SDGs berhasil) dan disinsentif jika sebaliknya
5. Kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan seperti: LSM, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi untuk mencari terobosan-terobosan, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat.
6. Perhatian dan fokus pada kelompok kaum muda, karena merekalah yang paling berkepentingan. Mereka pelaku pembangunan di masa depan, dan merekalah yang akan paling terpengaruh dengan hasil pembangunan sampai dengan tahun 2030, masa SDGs berakhir.

## **12.2 Kebijakan dan Program Pengungkit**

Berkaca dari pengalaman pelaksanaan MDGs, terlihat pentingnya peran dari kebijakan dan program yang bersifat sebagai pengungkit bagi tercapainya target-target utama maupun target-target ikutan.

Peran dari kebijakan dan program pengungkit ini menjadi semakin relevan dan urgent untuk pencapaian target-target SDGs. Mengacu kembali pada contoh di Bab 11 terdahulu, Gambar 11.4. menunjukkan keterkaitan antar target Menurut *ICSU-ISSC Scientific Review of SDGs*. Terdapat 4 Target SDGs dalam contoh ini, yaitu yang terkait dengan *Climate Change, Water and Sanitation, Energy* dan *Hunger*. Empat tujuan SDGs ini saling terkait satu sama lain melalui target-target intinya. Untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih komprehensif, berikut ini akan dijelaskan peta keterkaitan antar target dari 4 tujuan SDGs tersebut di atas.

Target-target dari Tujuan terkait *Hunger, Climate Change, Water* dan *Energy*, yang memiliki saling keterkaitan dan dampak *spill-over* ke tujuan lainnya, di luar tujuan diri sendiri. Berikut adalah contoh Tujuan SDGs yang saling terkait antara Tujuan Menghilangkan kelaparan, mengatasi Dampak Perubahan Iklim, akses dan ketersediaan Air bersih, ketersediaan dan akses terhadap Energi bersih:

**Menghilangkan kelaparan (*Hunger*):** Produktivitas pertanian (*Agricultural productivity*); Sistem produksi bahan makanan yang berkelanjutan (*Sustainable food production system*).

**Perubahan Iklim (*Climate change*):** Penurunan dampak perubahan iklim (*Climate change reduction*); Kebijakan nasional, strategi dan perencanaan (*National policies, strategies and planning*); Daya tahan dan kapasitas adaptasi (*Resilience and adaptive capacity*).

**Air (*Water*):** Kerjasama antar Negara untuk air bersih (*IWRM transboundary cooperation*); Air minum layak dan diperjual belikan (*Sale and affordable drinking water*); Ekosistem terkait penyediaan air bersih (*Water related eco-system*).

**Energi (*Energy*):** Akses terhadap energi (*Energy access*); Energi baru terbarukan (*Renewable energy*); Efisiensi energi (*Energy efficiency*).

Dalam Gambar 11.4, misalnya ketersediaan dan akses masyarakat terhadap energi termasuk energi baru terbarukan akan berkontribusi positif terhadap upaya mitigasi dampak perubahan iklim, membantu akses dan ketersediaan terhadap air bersih, serta energi secara langsung berkontribusi terhadap produksi pertanian (bahan pangan) yang akan membantu percepatan pengentasan kelaparan. Contoh lain dari Gambar 11.4 adalah peran Sistem produksi bahan makanan yang berkelanjutan, berkontribusi positif secara langsung terhadap mitigasi dampak perubahan iklim, langsung mengurangi kelaparan, penggunaan energi yang berkelanjutan di sektor pertanian, serta penggunaan air secara efisien dan berkelanjutan.

Contoh-contoh di atas memberi petunjuk tentang pentingnya pendekatan terhadap pencapaian SDGs melalui kebijakan dan strategi yang terintegrasi, melihat keterkaitan antar target dan antar tujuan. Prioritas diberikan kepada target yang memberi dampak langsung dan tidak langsung yang tinggi terhadap pencapaian tujuannya sendiri maupun tujuan lain dari SDGs.

### **12.3 Ketersediaan Pendanaan, Kerjasama dengan Swasta serta Peluang Kerjasama Pembangunan Global**

Tidak kalah pentingnya bagi keberhasilan MDGs maupun SDGs adalah faktor ketersediaan pendanaan. Pendanaan masih perlu didukung langsung dari anggaran pemerintah Pusat dan Daerah, karena sifat investasi yang dibutuhkan adalah investasi pelayanan dasar. Peran pendanaan yang bersifat komplementer dan memperkuat (*leverage*) seharusnya dapat diberikan dari sumber-sumber pendanaan di luar pemerintah seperti: dunia usaha, filantropi dan masyarakat. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian dukungan pendanaan dari sumber non-pemerintah serta tertuju pada prioritas tertinggi, peran pemerintah dalam menjembatani kerjasama sama antar *stakeholder* ini menjadi sangat penting.

Terbuka luasnya kerjasama global untuk percepatan pencapaian SDGs, membuka peluang bagi peran strategis Indonesia. Peluang ini kiranya dapat dimanfaatkan Indonesia dengan sebaik-baiknya, sebagaimana di periode sebelumnya Indonesia dianggap sebagai *Leader* dan *Champion* untuk komitmen-komitmen pembangunan global. Sebagai contoh dalam Agenda memitigasi dampak dari perubahan iklim. Mengutip Professor Jeffrey Sachs (Sachs, 2015), prioritas SDGs Indonesia dapat menjadi acuan dalam negosiasi dengan Negara lain berkenaan dengan inisiatif-inisiatif kerjasama pembangunan global yang diusulkan melalui pembentukan:

1. *Global fund for education to ensure universal quality education.*
2. *Global fund for access in foreign countries.*
3. *Greater financing to avoid deforestation.*
4. *Restore productive lands.*
5. *Funding for global environment facility.*
6. *New funds for farmers.*

Indonesia dapat berpartisipasi dalam kerjasama global ini dengan menawarkan kerangka kerjasama yang dikaitkan dengan pencapaian komitmen serta pemberian fasilitas pendanaan, teknologi transfer, peningkatan kapasitas, dsb yang akan diperoleh.

Tidak hanya kerjasama pembangunan global yang bersifat fisik, pendanaan yang dapat diperoleh, namun *knowledge sharing* merupakan sarana yang akan memberikan manfaat dua arah bagi percepatan pencapaian SDGs. Manfaat bagi Negara yang membagi pengetahuan dan pengalamannya, maupun Negara penerima bantuan berupa pengetahuan dan pengalaman pembangunan dari Negara lain. Indonesia telah memanfaatkan *platform* ini secara aktif beberapa tahun terakhir, terutama sejak didekalarasikannya Indonesia sebagai *Global Knowledge Hub* pada bulan Juli, 2012 di Bali. Demikian pula, Indonesia telah berperan aktif di dalam *Knowledge Sharing* di antara *peer countries* dan melalui *platform South-South and Triangular Cooperation*. Kerjasama semacam ini yang kiranya bisa diperluas,

termasuk pemanfaatan dan replikasinya untuk percepatan pencapaian SDGs di tingkat daerah (*Knowledge Sharing* antar Propinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia).

**BAGIAN V**  
**TANTANGAN KELEMBAGAAN**  
**DAN IMPLEMENTASI**

---

## **Reformasi Kelembagaan SDGs di Tingkat Global**

Tujuan Agenda Pembangunan Global SDGs yang ambisius, holistik dan terintegrasi menghendaki terjadinya pergeseran transformatif dari pendekatan kerjasama pembangunan global. Paradigma baru dalam pembangunan merupakan implikasi dari implementasi prinsip-prinsip SDGs bahwa: Berlaku secara Universal, Ruang lingkup yang menyeluruh, serta Pendekatan yang terintegrasi antar komponen. Transformasi agenda pembangunan global ini, menghendaki reformasi kelembagaan di tingkat global untuk mendukung tercapainya SDGs. Adapun arah reformasi kelembagaan sistem pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa yang diusulkan untuk dilakukan menjadi pembahasan di Bab ini.

### **13.1 SDGs dan Paradigma Baru Pembangunan di Tingkat Global**

Berlaku secara Universal (*Universality*): Agenda Pembangunan 2030 berlaku secara universal, artinya bahwa ke 17 *Goals* dari SDGs adalah *Goals* yang bersifat universal dengan target untuk seluruh Negara di dunia, Target ini berlaku untuk Negara berkembang maupun Negara maju.

Ruang lingkup (*Scope*): Agenda 2030 lebih luas dan ambisius dibandingkan dengan agenda maupun program pembangunan dunia sebelumnya. “Agenda Pembangunan 2030 memiliki ruang lingkup

yang tidak terbatas dan signifikan. Agenda Pembangunan ini jauh melebihi tujuan atau *Goals* dari MDGs, sehingga dikenal sebagai MDGs+. Prioritas pembangunan tidak hanya pemberantasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan nutrisi. Agenda Pembangunan ini meliputi pula tujuan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan secara lebih luas. Agenda Pembangunan ini juga menekankan pentingnya masyarakat yang inklusif dan aman.

Terintegrasi (*Integration*): *Goals* dari SDGs terintegrasi dan berimbang diantara ke tiga dimensi dari Pembangunan Berkelanjutan, dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Termasuk kedalam bagian yang terintegrasi dari SDGs adalah tujuan untuk mencapai tata kelola dan institusi yang baik di semua level. Pendekatan SDGs yang terintegrasi juga berarti banyak elemen dari *Goals* dan *Targets* yang saling terkait.

Tidak ada satu pihakpun yang tertinggal (*Leaving no-one behind*): Agenda SDGs menekankan persyaratan bahwa “tidak ada satu pihakpun yang akan tertinggal atau ditinggalkan”. Hal ini terutama dimaksudkan bagi mereka yang masuk ke dalam kelompok miskin atau tertinggal dari sisi ekonomi dan sosial. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah kaum marginal dan disabilitas. Salah satu tujuan penting dari SDGs adalah memastikan bahwa kelompok marginal dan tertinggal ini dapat meningkat kesejahteraannya serta kesenjangan dalam dan antar Negara menjadi berkurang.

SDGs membawa pengertian baru dari Pembangunan (*New Development Understanding*):

*.....“We commit to making fundamental changes in the ways our societies produce and consume goods and services”, to sustainably manage our planets natural resources. “We will work to build dynamic, sustainable, innovative and people-centered economies, promoting*



*youth employment and women's economics empowerment and decent work for all"*

*"There can be no sustainable development without peace and no peace without sustainable development."*

*"We envisage a world of universal respect for human rights and human dignity, the rule of law, justice, equality and non-discrimination".*

SDGs memberikan peran sentral terhadap "kami adalah rakyat" (*Giving reality to "we the peoples"*): Pelaksanaan SDGs menghendaki keterlibatan semua pemangku kepentingan: pemerintah, parlemen, Sistem PBB and Institusi Internasional lainnya, pemerintah daerah, masyarakat adat, LSM, swasta, komunitas akademik dan ilmiah – dan semua pihak. Proses pencapaian SDGs adalah proses yang bertumpu pada manusia, masyarakat dengan proses yang berkelanjutan, yang merupakan suatu agenda pembangunan yang sangat ambisius. Pelaksanaannya memerlukan pendekatan dan cara yang bukan *Business as Usual*.

SDGs membawa konsekuensi implementasi bagi semua Negara, Negara maju, Negara *Emerging* dan Negara berkembang. Tanggung jawab pelaksanaan dan keberhasilan SDGs ada di masing-masing Negara, serta mengandalkan pada kerjasama antar Negara dan *stakeholders* di tingkat regional dan global. Misalnya, agenda pengentasan kemiskinan tidak hanya merupakan tanggung jawab dari Negara berkembang saja. Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multi-disiplin dan lintas sektor. Implikasi dari pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik terhadap pengentasan kemiskinan, menghendaki indikator atau pengukuran kemiskinan yang multi-dimensi, tidak cukup pengukuran kemiskinan hanya dari sisi pendapatan atau pengeluaran semata. Demikian pula strategi pengentasan kemiskinan yang efektif harus multi kebijakan dan pendekatan. Tidak bisa, misalnya hanya

mengandalkan pada program bantuan sosial saja, Kebijakan dan program yang dijalankan harus meliputi program terkait pendidikan, kesehatan, perubahan mental kaum miskin, sarana dan prasarana untuk kesempatan kaum miskin mendapatkan pekerjaan atau sumber pendapatan yang layak.

Perubahan pendekatan pembangunan menjadi pembangunan berkelanjutan dikehendaki terjadi di semua Negara, mulai dari Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang. Perubahan dalam bagaimana kita memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa; bagaimana kita mengelola kota dan perkotaan serta sumber daya alam kita; bagaimana kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin; teknologi harus meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penciptaan kesempatan kerja yang layak. Isu kesenjangan merebak, meskipun tingkat kesejahteraan secara rata-rata di tingkat global meningkat selama beberapa dekade terakhir.

Negara berkembang, terutama Negara yang termasuk kelompok the *Least Developed Countries* (LDCs) masih terperangkap ke dalam "*Vicious Cycle*", suatu kondisi kemiskinan, krisis dan keterbelakangan dalam pembangunan. Lingkaran setan atau *Vicious Cycle* ini harus dipatahkan dan diubah menjadi "*Virtuous Cycle*". Upaya-upaya yang dilakukan agar keadaan "*Vicious Cycle*" berubah menjadi "*Virtuous Cycle*" termasuk: pendidikan, kesehatan, menghilangkan "kutukan sumber daya alam" bagi Negara yang kaya sumber daya alam, investasi infrastruktur, sebagaimana tercantum dalam *Addis Ababa Action Agenda* (AAAA) terutama terkait isu eksploitasi Sumber Daya Alam, meningkatkan mobilisasi sumber-sumber penerimaan domestik, dan perhatian khusus terhadap SDGs 16 (Masyarakat yang aman – *Peaceful societies*).

Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dan kesepakatan Agenda Global SDGs membawa tantangan tersendiri dalam hal pengembangan

pengetahuan (*knowledge*). Pendekatan terintegrasi serta pelibatan semua pihak, merupakan pengalaman pelaksanaan pembangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terkait daerah-daerah konflik, terdapat tantangan bagaimana memadukan pendekatan pencegahan konflik, respons terhadap konflik, membangun perdamaian, kesemuanya merupakan bagian terintegrasi dari SDGs.

### **13.2 Perubahan Tatanan Pembangunan di Tingkat Global**

Disamping SDGs, tatanan pembangunan di tingkat global banyak mengalami perubahan selama dua dasawarsa terakhir. Perubahan-perubahan ini akan membawa implikasi terhadap Sistem Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa maupun bagaimana kerjasama pembangunan internasional dilaksanakan. Hal yang sama berimplikasi pada Aktor Pembangunan Global lainnya seperti Bank Pembangunan Multilateral (Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dsb), Institusi Kerjasama Pembangunan Bilateral, perusahaan, NGO dan filantropi.

Faktor-faktor yang mengubah tatanan pembangunan global selama dua dasawarsa terakhir diantaranya (Ecosoc, 2016):

Perubahan profil dari kemiskinan dan pembangunan. Kemiskinan tidak hanya banyak terdapat di Negara miskin, tetapi justru jumlah orang miskin terbesar terdapat di Negara emerging seperti RRT dan India. Jumlah penduduk miskin di Negara maju terjadi tren peningkatan karena dampak krisis ekonomi dan masuknya pengungsi di beberapa Negara akibat konflik di daerah asal. Kemiskinan tidak cukup diatasi dengan sistem bantuan dan perlindungan sosial, namun diperlukan aksi global untuk meningkatkan ketahanan kaum miskin dari dampak perubahan iklim, bencana dan *shock* sosial dan lingkungan (Ecosoc, 2016).

Tren peningkatan kesenjangan yang dialami banyak Negara dan antar Negara. Kesenjangan antara Negara *emerging* dengan Negara berkembang misalnya semakin melebar. Kemajuan ekonomi yang didorong oleh sektor-sektor produktif, penguasaan aset yang timpang telah mendorong peningkatan kesenjangan seiring dengan kemajuan ekonomi.

Krisis yang berkepanjangan di beberapa Negara yang mengalami konflik. Negara-negara konflik terhambat proses pembangunannya, bahkan tidak mampu lagi untuk menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakatnya. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan krisis yang tidak berkesudahan dengan dampak ke Negara-negara lain bahkan yang ke Negara-negara yang berada di luar kawasan konflik.

Tantangan untuk mengubah pola konsumsi dan produksi menjadi berkelanjutan, Misalnya tuntutan untuk menggunakan energi bersih serta pola konsumsi dan produksi yang mengurangi dampak perubahan iklim. Energi bersih dapat menghasilkan peluang ekonomi dan bisnis tersendiri apabila dikelola dengan baik. Investasi energi bersih memerlukan dukungan dan kerjasama dengan Negara-negara maju yang memiliki kapasitas dan pendanaan untuk pengembangannya.

Dampak revolusi ICT dan data telah mengubah pola produksi dan konsumsi masyarakat serta sumber pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Beberapa Negara dengan penduduk usia produktif yang dominan berpeluang untuk memanfaatkan kesempatan ini. Revolusi ICT berpotensi mempercepat pembangunan bagi Negara yang dapat memanfaatkan peluang dengan baik, atau berpotensi memperluas kesenjangan ekonomi diantara penduduk yang dapat memanfaatkan peluang ekonomi dengan ICT dan mereka yang tertinggal.

Pada tataran regional dan global terdapat tantangan untuk melakukan aksi kolektif, termasuk untuk penyediaan atau pengelolaan yang

disebut “Barang Publik Global atau *Global Public Goods*”. Contoh dari Barang Publik Global adalah pengelolaan dampak dari kebakaran hutan seperti yang beberapa tahun terakhir terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan yang meluas di sebagian Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya di area gambut di tahun 2015, misalnya telah menyebabkan bencana asap yang parah sampai dengan Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Contoh dari Barang Publik Global adalah dampak negatif dari perubahan iklim. Emisi CO<sub>2</sub> yang tidak terkendali secara keseluruhan di tingkat global akan mengancam kenaikan suhu rata-rata global di atas 2 derajat Celcius. Apabila hal ini terjadi, akan berdampak sangat luas terhadap berbagai segi kehidupan di dunia dan daya dukung lingkungan Negara-negara.

Hadirnya Negara-negara *emerging* yang kuat secara ekonomi, sosial dan politik di panggung internasional dan regional, seperti: RRT dan India. Negara-negara ini bahkan telah mengembangkan program-program kerjasama pembangunan mereka sendiri. RRT beberapa tahun terakhir lebih agresif dalam mengembangkan kerjasama pembangunan dengan Negara-negara berkembang seperti pembangunan infrastruktur dengan skema pinjaman lunak.

Tuntutan dari banyak Negara *emerging* dan Negara berkembang untuk lebih berperan dalam berbagai Institusi Pembangunan Multilateral. Sampai saat ini banyak pimpinan di Institusi Pembangunan Multilateral dikuasai oleh personel dari beberapa Negara berdasarkan kuota suara. Hal ini sudah terjadi sejak awal pendirian institusi-institusi tersebut. Semakin kencang tuntutan dari Negara berkembang dan *emerging* untuk mendapatkan hak suara yang lebih besar.

Tren perkembangan berikutnya yang dicermati akhir-akhir ini adalah bilateralisasi dan fragmentasi dari tatanan pembangunan global serta tantangan merevitalisasi pendekatan dan peran Institusi Multilateral. Banyak Negara besar, seperti RRT, dan AS di bawah Presiden Trump

cenderung melakukan pendekatan dan negosiasi antar Negara yang bersifat bilateral. Kasus terakhir bahkan Amerika Serikat menarik diri dari komitmen terhadap *Paris Climate Agreement*.

Dalam satu dasawarsa terakhir dengan munculnya Negara-negara berkembang yang telah menjadi Negara *emerging*, kerjasama pembangunan Selatan-Selatan (*South-South Cooperation*) berkembang dengan pesat. Pola kerjasama ini bahkan didukung dengan pola *South-South and Triangular Cooperation*. Kerjasama di antara sesama Negara berkembang yang difasilitasi oleh Negara maju atau Institusi Pembangunan Multilateral. Ide dasarnya adalah sesama Negara berkembang belajar dari Negara berkembang lainnya dalam hal *lessons learnt, best practice* dari kebijakan dan program pembangunan yang berhasil (*Peer Learning*). Contoh kerjasama *South-South* dan *Triangular* yang dilaksanakan Indonesia dengan sesama Negara berkembang lainnya adalah Indonesia membagi pengalaman serta melakukan *capacity building* untuk program pengentasan kemiskinan yang dianggap berhasil, yaitu PNPM Mandiri. Contoh lain adalah *sharing* tentang sistem persekolahan Madrasah.

### **13.3 Implikasi Terhadap Sistem Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations Development System*)**

Sejak berdirinya lembaga PBB tahun 1945, Lembaga Dunia ini belum pernah melakukan transformasi kelembagaan secara signifikan. Perkembangan kelembagaan PBB mengikuti dinamika tantangan pembangunan, perdamaian dan keamanan dunia yang berjalan. Bisa dikatakan secara kelembagaan dan mekanisme kerja, perkembangan yang terjadi selama ini mengikuti alur secara alamiah saja. Kajian Reformasi kelembagaan PBB yang dilakukan *Independent Team of Advisors* dengan penugasan khusus PBB, menyimpulkan kelemahan

pada Sistem Pembangunan PBB (*United Nations Development System* atau UNDS) saat ini yang bercirikan (ECOSOC, 2016)<sup>63</sup>:

1. Berorientasi sektoral dan terfragmentasi secara sistem
2. Struktur tata kelola tidak mendukung saling keterkaitan dan integrasi
3. Pengaturan, kapasitas organisasi dan kelembagaan yang terfragmentasi
4. Pengalokasian sumber daya (dalam hal ini keuangan) yang cenderung di *ear marked* sejak awal mengurangi fleksibilitas dan keterkaitan
5. Pengaturan kerjasama (*partnership*) yang kurang optimal
6. Struktur organisasi di tingkat regional yang lemah dan terfragmentasi
7. Struktur organisasi yang seringkali berubah fungsi

Perubahan paradigma, agenda dan tatanan pembangunan global sebagaimana yang dijelaskan pada sub-bab pembahasan terdahulu, menghendaki Sistem Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations Development System* – UNDS) berubah, lebih fleksibel serta dapat:

1. Menterjemahkan azas Universal (*Universality*) dalam implementasi Kebijakan dan Program Pembangunan. Ruang lingkup kegiatan dan support PBB selama ini hanya pada Negara berkembang. Sekarang menjadi harus melingkupi Negara maju dalam menerapkan SDGs.
2. Mengubah pendekatan dari yang bersifat sektoral, parsial menjadi artikulasi kebijakan dan program yang terintegrasi

---

<sup>63</sup> *Independent Team of Advisors* dibentuk oleh ECOSOC PBB pada bulan Februari, 2016 dengan masa penugasan sampai dengan Juli 2016. Tim terdiri dari 14 orang ahli dari berbagai Negara yang dipimpin oleh Mr. Juan Somavia, mantan Dirjen ILO serta Mr. Klaus Toppfer, mantan Direktur Eksekutif UNEP. Adapun mandat *Independent Team of Advisors* ini adalah memberikan rekomendasi terhadap restrukturisasi dan transformasi dari *United Nations Development System* agar menjadi lebih sesuai dengan tuntutan Negara-negara dan PBB dalam merealisasikan komitmen terhadap SDGs.

antara unsur ekonomi, sosial dan lingkungan termasuk bagaimana mengelola adanya *trade-off* diantara ke tiga unsur Pembangunan Berkelanjutan.

3. Mengubah institusi-institusi yang bernaung dalam PBB, sehingga terjadi satu kesatuan pandang dan langkah dengan memanfaatkan pengalaman, keahlian dan konstituen dari setiap organisasi di bawah panduan yang jelas secara organisasi dari PBB.
4. Mendukung program-program dan kegiatan bersama, menghindari fragmentasi, tumpang-tindih dan kompetisi antar program dalam payung program PBB. Program Pembangunan yang didukung PBB adalah program pembangunan sesuai dengan prioritas dari masing-masing Negara, sehingga setiap Negara memiliki *sense of ownership* yang tinggi. Kebijakan dan Program ini sudah sesuai dengan pendekatan SDGs.

### **13.4 Arah Reformasi Sistem Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDS)**

Resolusi PBB no 70/1 "*Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development*" membawa perubahan tidak hanya pada tujuan pembangunan global, tetapi bagaimana merealisasikan komitmen yang sangat ambisius, holistik dan transformatif tersebut. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya realisasi komitmen semua Negara terhadap SDGs, diperlukan pengkajian dan pemutakhiran terhadap Sistem Pembangunan PBB atau yang dikenal sebagai *UN Development System* (selanjutnya disingkat sebagai UNDS). UNDS ini merupakan sistem pembangunan di bawah koordinasi PBB yang terdiri dari Institusi-institusi Pembangunan PBB, serta perangkat sistem yang menyertainya termasuk organisasi dari institusi, personalia atau sumber daya manusia, sarana prasarana serta pendanaan yang tersedia.



Negara-negara secara sukarela melakukan pelaporan atas pelaksanaan SDGs di dalam *High Level Political Forum (HLPF)* yang diselenggarakan oleh *Economic and Social Commission (ECOSOC)*, suatu Forum yang diadakan setiap tahun di PBB. Pelaporan sukarela ini sudah berjalan terkait persiapan dan implementasi dari Negara-negara untuk SDGs sejak tahun 2016 yang lalu. Indonesia termasuk salah satu Negara yang secara sukarela melaporkan kemajuan pelaksanaan SDGs di dalam HLPF. Meskipun secara formal, SDGs telah mulai dilaksanakan oleh Negara-negara, serta mekanisme pelaporan kemajuannya secara sukarela oleh Negara-negara telah mulai berjalan, namun dirasakan adanya keperluan untuk mereformasi UNDS agar dapat lebih efektif memberi fasilitasi dan pengawalan terhadap pelaksanaan SDGs di berbagai Negara yang membutuhkannya.

Komitmen Negara-negara terhadap pelaksanaan SDGs yang berimplikasi terhadap UNDS sebagaimana di bahas di sub-bagian sebelumnya di atas menghendaki adanya transformasi peran, fungsi dan kelembagaan UNDS ke depan sebagaimana yang menjadi usulan dari *Independent Team of Advisors (ITA)* dalam dokumen "*the Future We Want – the United Nations We Need*".<sup>64</sup>

Berikut ini adalah Ringkasan Eksekutif dari Laporan yang disampaikan ITA meliputi topik bahasan: Fungsi, Pendanaan, Struktur Organisasi, Tata Kelola, Kerjasama/*Partnerships*.

**Fungsi.** Fungsi UNDS harus menjadi rujukan bagi strategi dan pengelolaan Pendanaan, Struktur Organisasi, Tata Kelola dan *Partnerships*. ITA merekomendasikan bahwa UNDS harus menyusun ulang prioritas dari masing-masing entitas atau institusi di bawah koordinasi PBB yang melaksanakan mandat pembangunan agar lebih

---

<sup>64</sup> Dokumen yang merupakan hasil dari penugasan terhadap *the Independent Team of Advisors (ITA)* untuk memberi masukan terhadap *ECOSOC Dialogue on longer-term positioning of UN Development System in the context of the 2030 Agenda for Sustainable Development*, 16 June, 2016.

relevan dan efektif dalam membantu Negara-negara anggota PBB. Perlu penajaman mandat dan program kerja dari setiap institusi pembangunan yang berada di bawah koordinasi PBB tersebut, serta menghindari dari terjadinya overlap atau tumpang tindih. Diperlukan adanya *Global Strategic Framework* yang mengintegrasikan aktivitas operasional dari berbagai entitas atau institusi pembangunan tersebut, sehingga menjamin fasilitasi dan bantuan yang dilakukan saling komplementer dan efektif. Kerangka strategis tersebut diharapkan dapat menangkap kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap Negara serta fasilitasi dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan.

**Pendanaan.** Pendanaan dari UNDS banyak yang bersifat *ad-hoc*, tidak tetap, tidak pasti, sukarela, dan *ear-marked* atau penggunaannya ditujukan untuk suatu kegiatan tertentu. Sistem pendanaan seperti ini sangat terfragmentasi serta menimbulkan ketidakpastian. Akibatnya tata kelola dalam pendanaan semacam ini menjadi ikut terfragmentasi, sehingga mengurangi dampak dan efektivitasnya. Adapun rekomendasi dari ITA adalah agar UNDS memiliki dan mengimplementasikan suatu strategi dimana pendanaan di earmarked pada level outcome dan bukan pada level kegiatan. Hal ini dilakukan mengacu pada *global strategic framework* yang sudah disepakati. Sistem ini akan memastikan terjadinya keselarasan antara tujuan strategis dengan program, kegiatan dan proyek yang dilaksanakan. Juga disarankan agar UNDS melakukan *pooling* dari sumber-sumber pendanaannya dikaitkan dengan target-target SDGs yang ingin dicapai. Dengan demikian tercapai *cost efficiency* dan *effectiveness*.

**Struktur Organisasi.** Antara fungsi masing-masing entitas UNDS dan pendanaan terdapat keterkaitan yang sangat erat. Kajian ITA mendapatkan adanya struktur organisasi UNDS yang belum optimal, masih terjadinya biaya *overhead* dan staf yang tinggi, kinerja staf profesional yang masih rendah di berbagai Negara. ITA

merekomendasikan keberadaan UNDS di tingkat Negara secara lebih terintegrasi, tidak terfragmentasi secara sendiri-sendiri. Keberadaan berbagai organisasi dari UNDS ini berada dalam koordinasi yang lebih ketat dari UN *Resident Coordinator* (UN RC).

Beberapa rekomendasi dari ITA terkait struktur organisasi UNDS di tingkat Pusat di PBB diantaranya: *Deputy Secretary General* PBB untuk Pembangunan agar berganti fokus menjadi *Deputy Secretary General* PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (*DSG for Sustainable Development*). *DSG for Sustainable Development* dibantu oleh *Strategic Executive Team* yang terdiri dari *Chief Executives* dari entitas (organisasi-organisasi pembangunan) dari UNDS. Selanjutnya, *DSG* untuk *Sustainable Development* langsung membawahi sistem *Resident Coordinator*. Dengan demikian akan terjadi integrasi dan koherensi dari *global strategic framework* dan Agenda SDGs pada level Negara. ITA juga merekomendasikan efisiensi dan penyederhanaan dari keberadaan entitas UNDS di tingkat Negara melalui kantor bersama dan pengintegrasian berbagai fungsi *back-offices* serta mekanisme pelaporan yang seragam.

**Tata Kelola.** Tata kelola dari UNDS yang berlaku saat ini tidak memungkinkannya berfungsi sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Fungsi, mekanisme tata kelola dan pelaporan dari UNDS terfragmentasi mengikuti masing-masing entitas yang ada. Implementasi Agenda 2030 untuk SDGs menghendaki adanya integrasi dari fungsi, pendanaan dan struktur organisasi dari UNDS. ITA merekomendasikan agar *the Economic and Social Council* (ECOSOC) diperkuat sehingga dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengevaluasi keseluruhan UNDS, dalam mengimplementasikan Agenda Pembangunan 2030. ITA merekomendasikan pendirian *Sustainable Development Board* (SDB) sebagai *Governing Board* dari UNDS, keanggotaannya dipilih oleh ECOSOC. Adapun SDB merupakan merger dari *governing bodies* berbagai entitas UNDS yang ada. SDB

berfungsi untuk memastikan implementasi dari *Global Strategic Framework* dan Anggaran Terkonsolidasi untuk entitas-entitas Organisasi Pembangunan PBB dalam melaksanakan Agenda Pembangunan 2030 dan SDGs.

**Partnerships.** ITA menyoroti perlunya penyusunan ulang strategi kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SDGs terutama diantara: Pemerintah, Swasta, NGOs, akademisi, para ahli dari organisasi-organisasi internasional. Kolaborasi ini dilakukan untuk agenda SDGs secara terintegrasi, tidak terbatas pada hanya satu Tujuan atau Goal tertentu saja. Terkait dengan mandat PBB, tim ITA juga melihat pentingnya keterkaitan antara agenda pembangunan (*development*), bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*) dan agenda keamanan (*security*). Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pembangunan misalnya, maka diperlukan keadaan yang aman (*security*). Tanpa adanya keadaan yang aman, tidak mungkin terlaksana pembangunan secara baik. Demikian pula sebaliknya, tanpa adanya pembangunan yang berhasil dengan baik, keamanan dapat menjadi masalah. Penanganan krisis melalui bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*) adalah sesuatu yang bersifat sementara. Tujuan akhir adalah tercapainya perdamaian. Apakah untuk terlaksananya pembangunan, diperlukan suatu situasi perdamaian terlebih dahulu. Namun sebaliknya, juga disadari bahwa perdamaian yang hakiki sulit tercapai tanpa disertai upaya pembangunan yang berkesinambungan.

Prioritas kolaborasi dan kerjasama pembangunan yang perlu mendapatkan penataan dan koordinasi yang lebih baik baik berhasilnya pelaksanaan SDGs adalah antara entitas-entitas pembangunan dari UNDS dengan berbagai Lembaga Pembangunan Bilateral, Bank Pembangunan Multilateral (*Multilateral Development Bank*) maupun Filantropi. Bank Pembangunan Multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Islam, Bank Pembangunan Latin Amerika, Bank Pembangunan Afrika, Bank Pembangunan Asia,

memiliki tujuan dan fungsi masing-masing yang fokus pada pembiayaan pembangunan di Negara-negara anggotanya. Terutama fokus pada kebutuhan pembiayaan pembangunan di Negara-negara anggota yang masuk ke dalam kelompok Negara berkembang.

Bagaimana bentuk kolaborasi yang optimal antara entitas-entitas UNDS dengan berbagai Bank Pembangunan Multilateral ini misalnya? Apakah perlu ada pembagian secara khusus atukah diatur secara tersendiri tergantung pada keperluan dan prioritas bantuan yang berbeda-beda untuk masing-masing Negara berkembang. Tentu perlu koordinasi yang lebih spesifik di tingkat masing-masing Negara. Ruang lingkup program dan kegiatan yang menjadi prioritas dari entitas UNDS dengan Bank Pembangunan Multilateral dalam banyak hal bisa berbeda. Misalnya untuk pembangunan infrastruktur dan energi, sudah umum menjadi domain dari portfolio kerjasama pembangunan dengan Bank Pembangunan Multilateral, tetapi tidak demikian halnya dengan entitas UNDS. Demikian pula dengan skema pembiayaan. Entitas UNDS tidak memberikan pinjaman, namun berdasarkan skema ODA (*Official Development Assistance*) ataupun berbentuk hibah.

Penting bagi setiap Negara yang melakukan kerjasama pembangunan (*development cooperation*) dengan entitas-entitas UNDS, organisasi pembangunan internasional, dan bank pembangunan multilateral, membuat semacam *Country Partnership Strategy* berisi program prioritas sebagai bagian dari program dan target nasional. Apa yang dikerjakasikan sudah terkoordinasikan dengan baik dari segi program, kegiatan, sasaran, target yang ingin dicapai serta peran dari masing-masing *stakeholder* dalam pencapaian target tersebut. Termasuk ke dalamnya dari sisi pendanaannya.

Dalam beberapa dekade terakhir banyak berkembang Lembaga-lembaga Internasional yang didanai dari sumbangan-sumbangan ataupun filantropi. Lembaga-lembaga Intenasional ini dapat

berbentuk NGO Internasional, misalnya banyak yang bergerak di bidang lingkungan ataupun sosial. Juga banyak berdiri Filantropi berskala internasional, yang mengelola dana dari para Filantropis dengan tujuan bantuan-bantuan yang bersifat sosial. Mereka ini merupakan salah satu pemangku kepentingan yang semakin signifikan bagi keberhasilan implementasi SDGs. Kajian ITA merekomendasikan agar UNDS dapat lebih mensinergikan lagi kerjasama dengan para pemangku kepentingan ini dalam pelaksanaan program, pendanaan, serta keterkaitan program dan kegiatan yang bersifat nasional, regional dan global.

## **Kelembagaan Implementasi SDGs di Indonesia**

Kelembagaan merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sebagaimana dinyatakan dalam *Ministerial declaration of the high-level segment of the 2016 session of the ECOSOC on the Annual theme "Implementating the post-2015 development agenda: moving from commitments to results", July 29, 2016*, setiap Negara tanpa kecuali harus melaksanakan SDGs dan memastikan tidak ada seorang warganyapun yang tertinggal (*no one left behind*). Sehubungan dengan itu, membentuk kelembagaan dalam setiap komitmen global bagi Indonesia sudah merupakan langkah dan kebiasaan yang direncanakan. Langkah ini sangat penting, karena dalam setiap pelaksanaan pembangunan, Indonesia selalu menyertakan partisipasi masyarakat dan menjadikan Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang di dalam RPJPN dan RPJMN sebagai pedoman penjabaran dan pelaksanaan agenda global, termasuk pelaksanaan SDGs di Indonesia.

### **14.1 Kelembagaan SDGs Indonesia**

Kelembagaan SDGs sangat penting untuk melaksanakan komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dimana setiap negara dan masyarakatnya perlu mencapai 17 *Goals*, 169 *Target*, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Tingkat Menteri dalam *High*

*Level Political Forum 2016*<sup>65</sup>. Dalam kaitan dengan pelaksanaan di Indonesia, kelembagaan ini meliputi: dasar hukum pelaksanaan, lembaga pelaksana dan rencana pelaksanaan. Kelembagaan ini penting agar SDGs dilaksanakan semua pemangku kepentingan pembangunan, Pemerintah, dan pelaku non Pemerintah.

Dasar hukum juga diperlukan untuk menjaga pelaksanaan tidak hanya di tingkat nasional, namun juga sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan bahkan sampai pelaksanaan di lapangan. Hal ini untuk menjalankan prinsip bahwa SDGs harus menjangkau seluruh lapisan dan anggota masyarakat, tanpa kecuali (*no one left behind*). Di dalam dasar hukum, ditentukan Sasaran dan Tujuan pelaksanaan TPB; Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB; Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*), Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai turunan dari RAN; Pendanaan dan Tata cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan TPB. Pada tanggal 4 Juli 2017, Dasar Hukum pelaksanaan TPB sudah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selanjutnya, agenda pelaksanaan SDGs dilaksanakan melalui RAN TPB, sesuai dengan agenda pembangunan nasional yang di dalamnya sudah memuat prinsip pembangunan berkelanjutan dengan 3 pilar (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan) serta didukung oleh pilar Tata Kelola (*governance*). Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres 59/2017, yang dicantumkan sebagai Lampiran. Rencana Aksi Nasional ini selanjutnya akan dijabarkan oleh Pemerintah Daerah

---

<sup>65</sup> Ministerial declaration of the high-level segment of the 2016 session of the ECOSOC on the Annual Theme "Implementing the post-2015 development agenda: moving from commitments to results", July 29, 2016



menjadi Rencana Aksi Daerah sebagai dasar pelaksanaan SDGs di wilayahnya masing-masing.

Untuk melaksanakan SDGs secara partisipatif, inklusif dan koordinatif, dibentuk Tim Koordinasi Nasional yang dipimpin oleh Presiden, dengan para wakil yang terdiri dari Wakil Presiden beserta para Menteri Koordinator. Pelaksanaan sehari-hari pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

## **14.2 Format Tim Koordinasi Nasional SDGs: Partisipatif dan Inklusif Seluruh Pemangku Kepentingan**

Sebagaimana disebutkan di atas, Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan MDGs, akan tetapi persiapan pelaksanaan SDGs, khususnya penyusunan RAN AKSI dan Perpres No. 59 tahun 2017 membutuhkan waktu yang lebih lama karena sifatnya yang jauh lebih komprehensif. Prinsip partisipatif dan inklusif dalam SDGs, sudah dilaksanakan sejak keterlibatan Indonesia dalam HLPEP, dan dilanjutkan selama proses *Open Working Group* (OWG) dan *inter-government process*. Proses menjadi lebih lama karena pelaksanaan SDGs memerlukan kerjasama aktif dari aktor non Pemerintah. Pembagian peran secara detail memerlukan waktu dengan karakteristik yang agak berbeda. Di kalangan Pemerintah, peran Kementerian/Lembaga dalam Tim Koordinasi Implementasi SDGs ini diwakili melalui posisi jabatan dari lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab langsung terkait SDGs. Dengan demikian, apabila ada pergantian pejabat, tidak menimbulkan permasalahan, karena pejabat pengganti akan secara otomatis melanjutkan tugas. Sementara itu, di dalam aktor non Pemerintah, masing-masing kelompok perlu melakukan mekanisme pemilihan wakil mereka di dalam Tim Koordinasi Nasional. Hal penting lainnya adalah bagaimana pelaporan kegiatan masing-masing aktor sehingga dapat

tergambarkan secara integratif ke dalam satu laporan, tanpa menghilangkan peran masing-masing yang memiliki perbedaan, keunggulan dan kekhasan.<sup>66</sup>

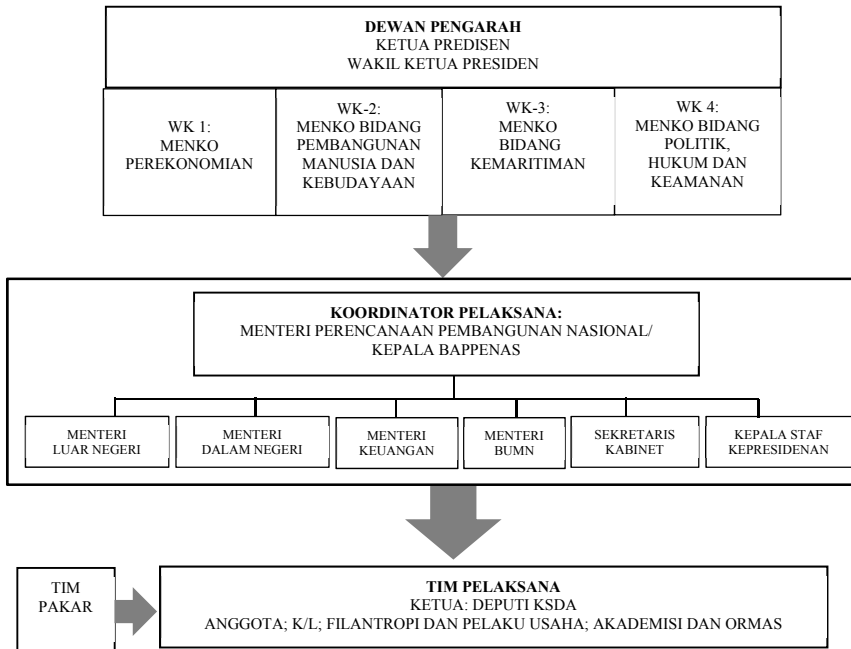
Dengan beragamnya parapihak dalam pelaksanaan SDGs, maka struktur Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan SDGs adalah sebagaimana dalam Gambar 14.1. yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 59/2017. Sebagai Ketua Tim Koordinasi Nasional adalah Presiden, yang menunjukkan adanya komitmen politik yang tinggi dalam pelaksanaan SDGs. Luasnya cakupan SDGs ditunjukkan oleh keterlibatan semua Menko, seluruh Menteri dan Kepala Lembaga dalam kabinet. Sehubungan dengan itu, maka koordinasi yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, beranggotakan Menteri Luar Negeri yang menjadi juru bicara ke dalam forum internasional. Menteri Dalam Negeri yang bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas akan bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan sampai ke tingkat daerah. Menteri Keuangan bertugas menyusun pendanaan sesuai dengan Rencana Aksi Nasional yang sudah disusun dalam RAN TPB. Menteri BUMN mengkoordinasikan peran BUMN dalam pelaksanaan SDGs dan KSP bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas mengkoordinasikan para pihak non pemerintah serta Sekretaris Kabinet yang menjadi penghubung tetap dengan Pimpinan pelaksanaan SDGs yaitu Presiden.

Banyaknya parapihak ini menuntut adanya komitmen masing-masing dalam pelaksanaan SDGs sesuai dengan Rencana Aksi Nasional TPB. Program dan Kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional untuk Periode 2015-2019 disusun sesuai RPJMN 2015-2019 yang setiap tahunnya dirumuskan dalam RKP serta anggarannya ada di dalam UU APBN

---

<sup>66</sup> Menurut INFID, pelaksanaan oleh Pemerintah biasanya unggul dalam cakupan/skala, namun lemah dalam mengikuti keragaman yang ada di daerah-daerah. Sementara itu, Perguruan Tinggi dan LSM biasanya unggul dalam pelaksanaan di tingkat mikro, namun lemah dalam cakupan/skala untuk perluasan dan dampak yang lebih besar.

tahunan. Keselarasan dalam pelaksanaan sangat ditentukan oleh Koordinasi yang dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sehari-harinya secara teknis dibantu oleh Sekretariat SDGs. Selanjutnya, Tim Pelaksana dibantu oleh Tim Pakar yang terdiri dari para ahli dan profesional di bidang-bidang yang terkait dengan pelaksanaan SDGs.



**Gambar 14.1 Struktur Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan<sup>67</sup>**

### 14.3 Tantangan Pelaksanaan dengan Kelembagaan SDGs

Dengan inklusifnya aktor pelaksana SDGs ini maka tantangan yang ada adalah:

<sup>67</sup> Peraturan Presiden RI nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 4 Juli 2017

- a. Penyusunan rencana aksi yang mencerminkan kontribusi kegiatan semua aktor. Tantangannya adalah kegiatan masing-masing direncanakan dalam **kurun waktu berbeda dan siklus** yang mungkin berbeda. Rencana aksi yang berisi program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai SDGs dapat secara komprehensif mencatat, merencanakan kegiatan Pemerintah dan Pemda. Namun demikian, program dan kegiatan yang dilakukan oleh parapihak non pemerintah yang menggunakan dana mereka sendiri (*private*) tidak dapat dicatat dan dicantumkan secara eksplisit dalam Rencana Aksi Nasional dan Daerah. Selain itu, **leveling kegiatan** juga bisa sangat berbeda, untuk Pemerintah mungkin adalah tingkat nasional, untuk LSM dan universitas serta bisnis mungkin di tingkat lokal (provinsi atau Kabupaten/Kota atau bahkan Desa).
- b. **Kolaborasi akan memerlukan pendefinisian** yang memerlukan waktu, karena karakteristik lembaga, pendanaan dan bentuk pertanggungjawabannya juga berbeda. Kegiatan yang terencana dapat disusun oleh Pemerintah dan Pemda. Namun perencanaan oleh Pemerintah dan Pemda juga memiliki *time lag*, karena harus diputuskan melalui proses diskusi dengan Parlemen. Seringkali sistem perencanaan seperti ini tidak dapat memenuhi kebutuhan yang dinamis yang muncul beberapa bulan sebelum pelaksanaan tahun anggaran dimulai. Kebutuhan dinamis ini hanya dapat dipenuhi oleh pihak swasta dan LSM. Kolaborasi antar pemerintah dengan swasta (perusahaan dan LSM) sejak awal dapat menjawab tantangan kebutuhan pendanaan yang bersifat dinamis.
- c. **Monitoring/review dan pelaporan** juga akan memiliki tantangan tersendiri, termasuk apabila dikaitkan dengan **agregasi hasil implementasi untuk dilaporkan di tingkat global**. *Monitoring* dan pelaporan dari nasional ke tingkat global memerlukan kesamaan ukuran/indikator. Bagi

beberapa Negara, 167 target dan lebih dari 241 indikator merupakan tantangan yang sangat besar. Bagi Indonesia yang sudah memiliki 94 target dari 167 target global; dan 85 indikator yang setara dengan indikator global, dan memiliki 71 proksi indikator global, serta 85 indikator yang perlu dikembangkan masih akan memiliki tantangan besar dalam pelaksanaannya. Tantangan lebih besar lagi adalah untuk “menjumlah” capaian yang akan dilakukan oleh swasta dan LSM yang memiliki karakter kegiatan yang berbeda, baik bentuk/definisi kegiatan maupun level kegiatan.

- d. Secara keseluruhan koordinasi pelaksanaan baik secara horizontal di tingkat nasional, maupun di tingkat provinsi dan kab/kota juga akan memerlukan waktu dan penyiapan yang berbeda (dengan MDGs), terutama penyiapan **kapasitas lembaga dan SDM** di setiap tingkat, dan di semua lembaga parapihak (perusahaan dan LSM) agar pelaksanaan akan membawa manfaat di tingkat lokal, namun dapat diintegrasikan secara nasional dan dilaporkan untuk dapat selaras/“conform” dengan pengukuran capaian di tingkat global.
- e. **Pendanaan.** Perkiraan pendanaan pelaksanaan SDGs relatif mudah dikerjakan untuk rencana program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah dan Pemda. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan dilakukan pula oleh swasta, LSM dan masyarakat. Tantangan bentuk dan *leveling* kegiatan masih menyisakan masalah dalam agregasi capaian. Tantangan lebih besar lagi adalah melakukan agregasi “dana” yang dikeluarkan oleh semua parapihak untuk mencapai Goal dan Target tertentu.

Dengan adanya tantangan tersebut, diperlukan mekanisme kerja yang transparan, komunikasi yang terbuka dan kontinu, suasana yang saling menguatkan dan lingkungan yang saling memberi pembelajaran. Namun dengan adanya Tim Koordinasi Nasional serta

Rencana Aksi Nasional yang menjadi wadah koordinasi dan pedoman pelaksanaan SDGs bagi semua parapihak, maka tantangan pelaksanaan di atas akan dapat diatasi bersama-sama. Hal terpenting bukan pada "*perfection*" pengukuran pencapaian, namun lebih kepada proses pelaksanaan bersama secara inklusif, melibatkan semua pihak dan masyarakat tanpa ada yang tertinggal, serta menghasilkan peningkatan kesejahteraan bagi semua.

## Mengintegrasikan SDGs ke Dalam Rencana Pembangunan

Integrasi SDGs ke dalam Rencana pembangunan nasional sangat penting dilakukan dan Indonesia sudah melakukan langkah integrasi beberapa agenda pembangunan global seperti MDGs, perubahan iklim, dan *biodiversity*, ke dalam pembangunan nasional. Langkah integrasi ini dikenal dengan sebutan *mainstreaming*. Dalam beberapa literatur, langkah *mainstreaming* sering digunakan pada gender, yaitu melakukan penyetaraan karena:

*“women and men exhibit distinct differences in their perspectives and priorities concerning environmental quality, natural resources use, and access to energy services. The failure to understand and address gender dimensions within environmental projects risks wasted development resources and negative effect on household welfare, women’s equality and environmental sustainability”.*

Dalam literatur yang lain,<sup>68</sup> *mainstreaming* dilakukan untuk memberikan *“less restrictive environment, inclusion”*. Dalam dunia pendidikan khususnya untuk *disabilities*, langkah ini dilakukan agar

---

<sup>68</sup> M.L. Yell-Pearson Allyin Bacon Prentice Hall. *Least Restrictive Environment, Mainstreaming, and Inclusion*. Updated on July 20,2010. At [www.education.com](http://www.education.com)

*“students with disabilities should be educated to the maximum extent appropriate peers without disabilities”*. Dengan demikian, *mainstreaming* SDGs ke dalam pembangunan nasional dimaksudkan agar SDGs mendapat “perlakuan” yang sama dengan program lainnya dalam rencana pembangunan nasional. Berikut adalah tujuan, manfaat dan proses *mainstreaming* SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional.

## **15.1 Tujuan dan Manfaat *Mainstreaming***

*Mainstreaming* pembangunan global yang sudah menjadi “*Standard Operating Procedures*” bagi Indonesia dalam pelaksanaan setiap agenda global di berbagai bidang pembangunan, merupakan cara untuk menjamin bahwa:

- a. Agenda global sejalan dengan agenda nasional;
- b. Pelaksanaan agenda global menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional, dan bukan agenda sampingan apalagi agenda yang berbeda. Langkah ini terdengar sederhana, namun tidak semua Negara sudah mampu *me-mainstream*-kan agenda global ke dalam agenda pembangunan nasional mereka;
- c. Dengan mengintegrasikan agenda global ke dalam rencana pembangunan nasional, maka akan teridentifikasi program pembangunan yang digunakan untuk melaksanakan agenda global tersebut, terdapat K/L penanggungjawab dan ada jaminan pendanaannya di dalam UU APBN setiap tahunnya;
- d. Pelaksanaan agenda global akan dapat dikoordinasikan dengan parapihak dan dengan pembangunan daerah sejak dari tahap penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporannya.
- e. Dengan *mainstreaming* akan mempermudah koordinasi kerjasama internasional yang berkaitan dengan agenda global tertentu (*international partnership*), mengingat Indonesia



sudah mendeklarasikan *Jakarta Initiative*, yang menyatakan bahwa seluruh kerjasama internasional mengacu pada rencana dan program pembangunan nasional.

## **15.2 Proses *Mainstreaming* SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Nasional**

Proses *mainstreaming* di Indonesia dimulai dengan: (i) Mempelajari agenda pembangunan global dan melakukan *assessment* apakah agenda global tersebut sejalan dengan agenda nasional, atau ada padanannya dengan agenda nasional. Apabila merupakan agenda baru, apakah sejalan dengan visi misi pembangunan nasional; (ii) Mengkaji kebijakan nasional yang akan mendukung pelaksanaan agenda global. Apabila diperlukan kebijakan baru yang harus dilakukan, apakah sejalan dengan visi misi pembangunan jangka menengah dan panjang; (iii) Adakah rencana pembangunan dan targetnya yang sejalan dengan itu dan siap dipadankan untuk melaksanakan agenda global. Apabila target baru perlu disusun (ditambahkan) perlu dilakukan komunikasi dengan para pihak sesuai dengan proses penyusunan rencana pembangunan; (iv) Apakah indikator pencapaian target sesuai dengan indikator yang digunakan dalam pembangunan selama ini – Apabila sudah tersedia, gunakan yang ada atau diskusikan untuk menggunakan target sesuai dengan “mandat” global. Bagaimana ketersediaan data untuk pengukuran capaian sesuai indikator; (v) Mengidentifikasi K/L penanggungjawab dan menelaah peran dan keterlibatan parapihak dalam pelaksanaan agenda tersebut. Identifikasi ini perlu karena dalam penyusunan rencana pembangunan nasional, sudah melalui proses komunikasi dengan para pihak (perencanaan partisipatif). Kemudian dilakukan pendalaman dan perincian lebih lanjut pelaksanaan dari agenda global tersebut ke dalam satu kesatuan dokumen sebagai pedoman bersama, yang biasanya disusun dalam bentuk rencana aksi. Dalam kaitannya dengan *mainstreaming* SDGs ke dalam pembangunan nasional, maka telah dilakukan berbagai langkah.

**Langkah pertama, mengidentifikasi kesesuaian goal dalam SDGs dengan prioritas pembangunan yang ada di dalam RPJMN 2015-2019.** Langkah ini sudah dilakukan bahkan sejak sebelum SDGs resmi menjadi dokumen Deklarasi oleh PBB. Bagi Indonesia, hal ini memungkinkan karena SDGs dan RPJMN 2015-2019 memiliki waktu persiapan yang sama. Sejak setelah KTT Bumi Rio+20 tahun 2012, Indonesia sudah mengantisipasi bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan akan lebih konkrit, dan ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menterjemahkan kebijakan pembangunan secara lebih konkrit sejak proses *background study* RPJMN 2015-2019 dan sampai pada saat penyusunan draft RPJMN 2015-2019.

Secara konkrit, tantangan keberlanjutan sudah tercantum dalam salah satu tantangan pembangunan nasional, yaitu Keberlanjutan Pembangunan,<sup>69</sup> atau pentingnya mewujudkan secara konkrit pembangunan berkelanjutan ke berbagai bidang pembangunan dan daerah. Secara konkrit tantangan ini berupa: (i) perlunya kesamaan dan memperluas pemahaman pentingnya pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek pembangunan: (ii) pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan dan pencerminannya ke dalam kegiatan konkrit; (iii) pengembangan dan dorongan kegiatan ramah lingkungan; (iv) pengembangan tata kelola yang mendorong pengembangan SDM dan teknologi pendukung.

Selanjutnya, identifikasi kesesuaian prioritas nasional dengan agenda SDGs disajikan dalam Tabel 15.1 berikut ini. Dalam Tabel 15.1. nampak bahwa seluruh *Goals* sudah memiliki padanan dalam Prioritas Nasional, artinya terdapat prioritas nasional bagi Indonesia untuk menjalankan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

---

<sup>69</sup> Dokumen RPJMN 2015-2019 halaman 18-19.

**Tabel 15.1 Kesesuaian antara SDGs dengan Prioritas Nasional  
RPJMN 2015-2019**

No	Goal	Prioritas Nasional dalam RPJMN 2015-2019
1	Mengentaskan segala bentuk kemiskinan dimanapun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>• Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penghidupan Berkelanjutan</li> <li>• Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal</li> </ul>
2	Mengentaskan kelaparan, ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pembangunan pertanian yang berkelanjutan	Peningkatan Kedaulatan Pangan
3	Menjamin hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua dan segala usia	Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
4	Menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marjinal
6	Menjamin ketersediaan dan manajemen yang berkelanjutan dari air bersih dan sanitasi untuk semua	Ketahanan Air
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	Kedaulatan Energi
8	Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang menyeluruh, produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional</li> <li>• Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja</li> <li>• Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan</li> </ul>

No	Goal	Prioritas Nasional dalam RPJMN 2015-2019
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta menumbuhkan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan</li> <li>• Penguatan Investasi</li> <li>• Akselerasi Industri Manufaktur</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi</li> </ul>
10	Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antarnegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kawasan Perbatasan</li> <li>• Pembangunan Daerah Tertinggal</li> <li>• Pemerataan pembangunan antar wilayah</li> <li>• Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah</li> </ul>
11	Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan agroindustri, hasil hutan kayu, perikanan dan hasil tambang berkelanjutan</li> <li>• Perbaikan kualitas lingkungan (termasuk perilaku ramah lingkungan)</li> </ul>
13	Membuat langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Penanganan Perubahan iklim dan Penyediaan informasi Iklim dan Kebencanaan
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan laut, samudera, dan sumber daya maritim untuk pembangunan berkelanjutan	Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut;</li> <li>ii. Meningkatkan harkat hidup nelayan dan masyarakat pesisir</li> </ol>
15	Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan yang meliputi keuangan, teknologi, peningkatan kapasitas, perdagangan, kebijakan dan kelembagaan yang koheren, kerjasama	Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan yang meliputi keuangan, peningkatan kapasitas, perdagangan, kebijakan dan kelembagaan yang koheren, kerjasama dengan para pemangku

No	Goal	Prioritas Nasional dalam RPJMN 2015-2019
	dengan para pemangku kepentingan, data, <i>monitoring</i> , dan akuntabilitas	kepentingan, data, <i>monitoring</i> , dan akuntabilitas.
16	Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan yang meliputi keuangan, teknologi, peningkatan kapasitas, perdagangan, kebijakan dan kelembagaan yang koheren, kerjasama dengan para pemangku kepentingan, data, <i>monitoring</i> , dan akuntabilitas	Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan yang meliputi keuangan, teknologi, peningkatan kapasitas, perdagangan, kebijakan dan kelembagaan yang koheren, kerjasama dengan para pemangku kepentingan, data, <i>monitoring</i> , dan akuntabilitas
17	Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan yang meliputi keuangan, teknologi, peningkatan kapasitas, perdagangan, kebijakan dan kelembagaan yang koheren, kerjasama dengan para pemangku kepentingan, data, <i>monitoring</i> , dan akuntabilitas	Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan yang meliputi keuangan, teknologi, peningkatan kapasitas, perdagangan, kebijakan dan kelembagaan yang koheren, kerjasama dengan para pemangku kepentingan, data, <i>monitoring</i> , dan akuntabilitas

Sumber: Tindak Lanjut Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), Kantor Wakil Presiden, 2015

**Langkah kedua**, setelah identifikasi prioritas nasional, maka analisa lebih lanjut adalah **mengidentifikasi sasaran pembangunan nasional yang merupakan padanan dari target SDGs**. Dengan dapat diidentifikasinya sasaran maka dapat diidentifikasi pula Instansi Pelaksana, karena di dalam RPJMN 2015-2019 juga sudah ada penjabaran lebih detil, bahkan sampai ke dalam program dan kegiatannya, sampai dengan K/L pelaksana. Beberapa contoh sasaran prioritas nasional yang relevan adalah:

**Tabel 15.2 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan<sup>70</sup>**

<b>Tujuan Global</b>	<b>Sasaran Global</b>	<b>Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Mengentaskan segala bentuk kemiskinan dimanapun	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7,8% (2015: 11,13%)</li> <li>2. dst</li> </ol>	Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemen PPN/Bappenas Kemensos, KemenDesa, Pemda Provinsi, Pemda Kab/kota.
Mengentaskan kelaparan, ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pembangunan pertanian yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun</li> <li>2. Dst</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya prevalensi kekuarangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013 19,6%)</li> <li>2. Menurunnya proporsi penduduk dg asupan kalori minimum di bawah 1.400 kKal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5% (2015: 17,4%)</li> </ol> <p>2.1. dst</p>	Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemen PPN/Bappenas, Kemen Kesehatan, Kemen Pertanian, Kemen Kelautan & Perikanan, Pemda Provinsi, Pemda Kab/kota

Tabel 15.2 secara lengkap ada di dalam Lampiran Peraturan Presiden No.57/2017 dan lampiran tersebut merupakan Rencana Aksi Nasional Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN SDGs).

<sup>70</sup> Lampiran Peraturan Presiden RI No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, Juli 2017

Dokumen RAN SDGs inilah yang akan menjadi Pedoman terutama bagi K/L untuk melaksanakan agenda global SDGs, bekerjasama dengan parapihak terkait. Pedoman ini juga digunakan oleh lembaga non-K/L dan non pemerintah untuk melaksanakan peran mereka dalam pelaksanaan SDGs sesuai dengan peran masing-masing. Langkah proaktif lembaga non-pemerintah ini penting mengingat sejak penyusunannya lembaga pemerintah yaitu swasta, LSM dan perguruan tinggi sudah terlibat dan dapat menjalankan peran masing-masing. Unsur kritical dalam pelaksanaan ini diperankan oleh Koordinator Tim Koordinasi Nasional yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dan didukung oleh Sekretariat SDGs, sebagaimana diuraikan dalam Bab. 14. Kelembagaan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

**Langkah ketiga**, Koordinator akan membantu dan memfasilitasi Pemda dan lembaga non-pemerintah **menterjemahkan RAN SDGs ke dalam RAD SDGs**. Di dalam Perpres 57/2017 langkah-langkah lanjutan tersusunnya RAN SDGs sudah dijabarkan pula dengan jangkauan waktu penyelesaiannya. Dengan adanya pedoman RAN SDGs ini berarti bahwa SDGs memiliki jaminan akan dilaksanakan oleh setiap K/L dan lembaga non-pemerintah di tingkat pusat (*national*) dan daerah (*sub-national*) yang terkait dengan setiap *Goals*. Langkah ini sangat baik, dan Indonesia merupakan salah satu Negara desentralisasi yang sudah memiliki sistem ini. Langkah penyusunan RAD SDGs ini merupakan contoh baik di tingkat global, yang biasanya dijadikan pembelajaran oleh PBB maupun lembaga internasional lainnya, untuk “ditiru” Negara lain. Dalam konteks pelaksanaan SDGs, langkah ini sangat strategis karena akan dapat menjamin pula penerapan prinsip *no one left behind* secara terencana.

Langkah berikutnya adalah koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi untuk menjamin bahwa memang setiap individu akan dapat menikmati capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemantauan ini memungkinkan karena Indonesia sudah memiliki

landasan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Nasional. Sejalan dengan pemantauan ini, lembaga statistik nasional, Badan Pusat Statistik, terus melakukan perbaikan kualitas agar data survei secara nasional dapat pula di-disagregasikan ke tingkat Kabupaten/Kota. Disagregasi data berdasar gender sudah pula dilakukan sejak awal pelaksanaan *gender mainstreaming*. Disagregasi data selanjutnya, sedang dilakukan perbaikan pendataan nasional agar dapat dilakukan disagregasi data berdasarkan *ethnic group, disability* dsb.

**Langkah keempat** adalah meyakinkan bahwa Koordinator Pelaksanaan Pencapaian Tjuan Pembangunan Berkelanjutan akan melakukan langkah-langkah koordinasi pelaksanaan. Sesuai dengan arahan Perpres No. 59 Tahun 2017, maka Koordinator Tim Pelaksana perlu membentuk Tim Pelaksana dan menentukan tugas dan tata kerjanya (Pasal 14). Selanjutnya, Koordinator perlu pula menyusun mekanisme koordinasi penyusunan RAD SDGs, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya (Pasal 15). Langkah ini dilakukan untuk menjamin adanya pelaksanaan SDGs sampai ke daerah secara terkoordinasi, sehingga dapat dilakukan pemantauan serta pelaporan terintegrasi.

### **15.3 Tindak Lanjut Pelaksanaan SDGs**

Dalam pelaksanaan SDGs, Indonesia memiliki potensi dan peluang besar untuk kesuksesan pelaksanaan SDGs. Beberapa faktor yang mendukung adalah:

- a. Keselarasan SDGs dengan RPJMN 2015-2019 karena penyusunannya bersamaan waktunya dan sudah terjadi proses “komunikasi” diantara keduanya. Hal ini disebabkan keterlibatan K/L penting di dalam Negara Indonesia pada waktu menyiapkan SDGs di tingkat global dan RPJMN 2015-2019 sangat intensif. Dalam kaitan ini kerjasama Kemlu-Kementerian PPN/Bappenas, dua lembaga kunci dalam persiapan ini tidak bisa dianggap remeh. Berbagai



keselarasan sudah diuraikan dalam Bab-Bab sebelumnya. Dengan proses ini, *mainstreaming* dan penyusunan Perpres 57/2017 dan saat ini sedang difinalkan RAN SDGs berjalan mulus. Langkah penyelesaian RAN SDGs saat ini dilakukan untuk menjamin input dari berbagai pihak tidak terlewatkan sehingga prinsip inklusif dan partisipatif dapat dijalankan dengan baik.

- b. Indonesia sudah memiliki mekanisme koordinasi pembangunan nasional, baik secara horizontal di tingkat pusat, maupun secara vertikal dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai tingkat desa. Meskipun hal ini bukan tanpa tantangan, namun sistem dan mekanisme sudah ada, dan sudah ada pengalaman dalam *mainstreaming* dan koordinasi perencanaan pembangunan selama ini. Beberapa tantangan sudah diulas sebelumnya dalam Bab 14.
- c. Indonesia memiliki Basis Data Terpadu untuk program penanggulangan kemiskinan, khususnya kelompok 40% miskin terbawah, yang mendapatkan berbagai program kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial lainnya. Dengan data ini maka salah satu target untuk mencapai tujuan mengatasi kesenjangan didalam Negara dapat dilakukan.
- d. Lebih lanjut lagi, Indonesia sudah memiliki Sensus Penduduk "*head by head*" yang memungkinkan adanya satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi semua individu warganegara Indonesia. Dengan NIK ini maka upaya untuk perbaikan targeting berbagai program bantuan dan perlindungan sosial, dapat dilakukan dengan lebih tepat. Dengan demikian, Indonesia siap menjalankan prinsip penting dalam SDGs yaitu "*no one left behind*".
- e. Selaras dengan itu semua, dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sudah diadakan dialokasikan Dana Desa, langsung dari APBN ke rekening Desa, yang dapat digunakan untuk pembangunan desa sesuai kebutuhan lokal; terutama untuk membangun hal-hal yang tidak dapat dipenuhi oleh dana APBN sektoral dan

dari dana APBD. Dengan adanya Dana Desa, maka upaya untuk betul-betul melayani (*reaching*) satu per satu warga negara terus dilakukan. Kepala Desa memiliki waktu, kesempatan dan dana untuk betul-betul melayani warganya sehingga setiap warga negara dapat memiliki akses layanan dasar secara universal, memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menuikmati hasil pembangunan.

- f. Indonesia sudah memiliki sistem statistik nasional yang selama ini mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk komitmen internasional seperti MDGs dan saat ini SDGs. Keikutsertaan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam forum UNSTAT selama proses penyusunan data SDGs merupakan aset agar BPS juga terus melakukan pemutakhiran tidak saja data namun metodologi yang terbaik dan terbaru. Peran BPS dalam *localizing SDGs indicators* juga sangat besar (dalam penyusunan metadata nasional). Dengan bekal ini, maka sudah ada sistem pengembangan indikator baru untuk SDGs yang berdasarkan data yang sudah ada, maupun rencana pengembangan data baru untuk indikator baru. Dalam kaitan ini, pelaksanaan SDGs dapat menjadi peluang untuk pengembangan sistem pendataan untuk ekonomi hijau dan data lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Keberadaan data ini sangat penting untuk penyusunan sistem fiskal Indonesia yang selama ini belum berpihak pada kegiatan sosial dan ekonomi yang lebih bersih/hijau.
- g. Adanya 4 (empat) *platform stakeholders* (Bab 16), maka pemerintah Indonesia melalui Tim Koordinasi dapat memfasilitasi terjadinya kemitraan antara Pemerintah dengan aktor non Pemerintah dalam melaksanakan SDGs dan mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Semua faktor pendukung tersebut disinergikan untuk kesuksesan pelaksanaan SDGs. Peran Tim Koordinasi Nasional untuk Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan yang didukung oleh Sekretariat SDGs untuk memobilisasi seluruh sumber daya dari berbagai program Pemerintah dan kegiatan dari lembaga non Pemerintah baik di tingkat nasional dan daerah, merupakan kunci untuk keberhasilan pelaksanaan SDGs.

## **Pentingnya Pelibatan Semua Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)**

Sebagaimana tercantum dalam *Ministerial Declaration of the High-Level Political Forum of 2016 ECOSOC*, disebutkan bahwa: “1. *Peldge that no one will be left behind in implementing 2030 Agenda for Sustainable Development. ....It is a plan of action for people, planets and prosperity that also seeks to strengthen universal peace in larger freedom, to be implemented by all countries and stakeholders, acting in collaborative partnership....*”<sup>71</sup> Pernyataan dalam Deklarasi ini secara resmi mengarahkan bahwa pelaksanaan SDGs tidak hanya melibatkan Pemerintah, namun kolaborasi dari semua pemangku kepentingan secara terintegrasi. Hal ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari proses inklusif yang dilakukan sejak awal penyusunan Agenda 2030 (lihat Bab 1). Bab ini akan menguraikan pelibatan semua pemangku kepentingan dalam merealisasikan SDGs di Indonesia.

### **16.1 Pelibatan Semua Pemangku Kepentingan dalam Merealisasikan SDGs**

Langkah pelibatan pemangku kepentingan sudah banyak diterapkan oleh berbagai lembaga internasional. Sebagai salah satu contoh, *United Nations Environmental Program (UNEP)* melakukan pelibatan

---

<sup>71</sup> *E/HLS/2016/1 Ministerial Declaration of the 2016 HLPF on sustainable development, convened under the auspices of the ECOSOC, on the theme “Ensuring that no one left behind”.*

pemangku kepentingan, karena merupakan mandat dari *UNEP's Governing Council*. Pelibatan pemangku kepentingan ini penting karena UNEP menilai bahwa peran pemangku kepentingan, dalam hal ini khususnya LSM yang terkumpul dalam *Major Group*, adalah bahwa: *"they play central role in providing expertise and scientific knowledge, informing governments of local needs and opinions, as well as identifying "on the ground" realities of policy decisions".*<sup>72</sup>

Selanjutnya dinyatakan bahwa pelibatan pemangku kepentingan dilakukan untuk terjadinya transparansi, yang merupakan kunci dari pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* sebagai berikut: yaitu *"Ensure active participation at all relevant stakeholders drawing on best practices and models from relevant multilateral institutions and exploring new mechanism to promote transparency and the effective engagement of civil society"*. Secara konkrit dalam tingkat yang lebih mikro (proyek), pelibatan pemangku kepentingan dinyatakan sebagai: *"the practice of interacting with, and influencing project stakeholders to the overall benefits of the project and its advocates. The succesful completion of a project is usually depends on how the stakeholders view it"*.<sup>73</sup> Terdapat 10 kunci interaksi pelibatan pemangku kepentingan yang sukses, yaitu: (1) *communicate*; (2) *consult, early and often*; (3) *remember, they are only human*; (4) *plan it*; (5) *relationships are key*; (6) *simple but not easy*; (7) *just part of managing risk*; (8) *compromise*; (9) *understand what success is*; (10) *take responsibility*.

Pelibatan Negara dan para pihak dalam SDGs lebih intensif dibandingkan dengan pada waktu penyusunan MDGs, karena PBB ingin menjawab kritik masyarakat atas MDGs yang dinilai disusun secara *top down*. Sehubungan dengan itu, pelibatan Negara dan pemangku kepentingan dilakukan sejak awal. Salah satu hasil

---

<sup>72</sup> *Handbook for Stakeholder Engagement, UNEP-UNGLS, 2015*

<sup>73</sup> *Stakeholders Engagement. Association of Project Management. www.apm.org.uk*

kesepakatan KTT Rio+20 adalah pembentukan wakil-wakil Negara dalam forum *Open Working Group* (OWG) untuk menindaklanjuti mandat dari Rio+20 menyusun Agenda Pasca 2015. Selain itu, sebagaimana diuraikan dalam Bab 1, pelibatan juga dilakukan pada pemangku kepentingan non-pemerintah, yaitu universitas melalui jaringan *Sustainable Development Solution Network (SDSN)*, LSM melalui kelompok *Major Groups* dan swasta, yang sebagian sudah terkumpul dalam *Global Compact*. Penyusunan Agenda Pasca 2015 juga melibatkan Parlemen dari berbagai Negara. Melalui langkah ini diharapkan penyusunan SDGs berproses dari bawah secara *bottom up* dan inklusif, karena semua pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk berperan dan berkontribusi.

## **16.2 Langkah Indonesia Mengelola Pelibatan Para Pemangku Kepentingan**

Sejalan dengan proses di tingkat global, Indonesia juga melakukan pelibatan para pihak sejak awal. Dalam proses *Open Working Group*, sebelum menyampaikan pendapat Indonesia, Tim Indonesia selalu mengadakan pertemuan dan konsultasi untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan kertas posisi. Dalam proses ini, perwakilan parapihak juga diberi kesempatan secara langsung memberikan pendapat melalui jaringan *Major Groups* dalam forum OWG. Setelah pertemuan OWG, perkembangan pertemuan juga dilaporkan kepada forum parapihak di dalam negeri, sampai dengan hasil OWG dilaporkan kepada Sekjen PBB.

Pelibatan pemangku kepentingan ini tidak hanya mengikuti proses di tingkat global, namun juga karena disadari oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut:

*Pertama*, karena sebagaimana diuraikan di atas, tanggung jawab pelaksanaan SDG ada pada semua pihak. Tanggung jawab perubahan ke arah pola hidup berkelanjutan di bidang sosial maupun ekonomi, yang sebagian dari indikator pengukurannya ada di dalam SDGs.

*Kedua*, SDG harus diinternalisasikan ke dalam kegiatan sosial dan ekonomi, yang tidak hanya melibatkan fungsi dan kegiatan lembaga publik serta hanya mencakup kegiatan yang menggunakan pendanaan publik/Negara, namun juga melibatkan pelaku lain baik produsen, konsumen (rumah tangga) maupun masyarakat secara individu pada umumnya. *Ketiga*, dengan keragaman peran dan tanggungjawab tersebut, maka pelibatan pemangku kepentingan menjadi sangat intensif dan memerlukan koordinasi yang lebih intensif pula, sejak perencanaan, pelaksanaan dengan berbagai macam dan tingkat kompleksitasnya maupun pemantauan dan evaluasi yang pasti juga sangat kompleks, namun penting untuk masukan pelaksanaan selanjutnya.

Indonesia mewadahi pelibatan peran pemangku kepentingan dalam suatu *platform* tersendiri karena: (i) Karakteristik masing-masing berbeda; (ii) Peran dan fungsi pelaku juga berbeda; (iii) Bentuk dan proses akuntabilitas masing-masing pelaku juga berbeda. Melalui pengelompokan ini, maka kohesivitas dan kekompakan anggota kelompok akan lebih mudah dilakukan, sehingga akan mempermudah pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi di tingkat sub-nasional maupun nasional.

Sesuai dengan karakteristik para pelaku tersebut, maka kelembagaan pelaksanaan SDG terdiri dari 4 (empat) *platform* yang tidak terpisahkan, dengan masing-masing berfungsi sesuai perannya masing-masing, yaitu: Pemerintah dan Pemda; Universitas; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Bisnis dan Filantropi (Gambar 16.1).



**Gambar 16.1 Empat Platform Pemangku Kepentingan SDGs**

Lembaga Pemerintah, Pemda dengan Parlemen memiliki karakteristik yang sama yaitu dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah dan Negara. Kebijakan untuk pelaksanaan SDGs sebagai bagian dari komitmen Negara kepada masyarakat internasional secara formal dilakukan oleh Negara setelah berkonsultasi dan/atau mendapat persetujuan DPR. Berbagai kebijakan baik di Pusat oleh Pemerintah maupun di daerah oleh Pemda perlu mendapat persetujuan atau berkonsultasi dengan DPR atau DPRD. Sejalan dengan itu, APBN maupun APBD untuk pelaksanaan SDGs juga disetujui bersama antara Pemerintah dengan DPR atau Pemda dengan DPRD. Dengan demikian, peran ketiga lembaga/institusi ini merupakan penanggungjawab formal (mewakili Negara) dalam komunikasi dan pelaksanaan SDGs.

Sementara itu, universitas merupakan pusat para ahli dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Peran universitas untuk menyumbangkan berbagai analisa berbasis ilmiah dan input ilmiah untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan publik menjadi sangat penting. Peningkatan kualitas SDM, kualitas proses dan penyusunan kebijakan publik baik di Pusat maupun di daerah sangat memerlukan peran penting perguruan tinggi. Berkaitan dengan SDGs, mengingat keterkaitan antar *Goals* yang sangat kompleks dan masih terbukanya identifikasi dan pembentukan



berbagai indikator, maka peran universitas bersama lembaga penelitian dan lembaga ilmiah/*scientist (national academic of science)* sangat besar. Dalam proses penyusunan SDGs dan sampai saat ini, di tingkat global, peran SDSN maupun berbagai lembaga ilmiah sudah dan masih sangat besar. *Science based policy, science policy interface* dalam pelaksanaan SDGs sangat dibutuhkan dan diminta oleh *the High Level Political Forum (HLPF)* untuk ditingkatkan baik di level global maupun nasional.

Selanjutnya, kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang sejak awal sudah terlibat juga semakin penting. Karakteristik LSM yang relatif bebas, sehingga bisa dinamis dan menutupi sistem formal yang relatif kaku dari Pemerintah dan Pemda merupakan unsur yang sangat kompatibel. Selain itu, pengalaman LSM di lapangan yang sangat dekat dengan masyarakat, seringkali memberi "*insight*" baru untuk penyempurnaan kebijakan maupun pelaksanaan layanan pemerintah agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. Peran mereka terutama dalam meningkatkan rekognisi/pengakuan terhadap masyarakat tradisional/adat dan upaya-upaya untuk menjangkau (*reaching*) dan menjalankan prinsip *no one left behind* sangat penting.

*Platform* terakhir adalah bisnis dan filantropi. Kelompok ini sangat penting karena kelompok ini adalah kesatuan dari para pebisnis yang menjadi aktor kunci dari terwujudnya Ekonomi Hijau. Internalisasi pembangunan berkelanjutan dalam praktek bisnis yang ada di semua lini/sektor sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Ekonomi Hijau dan tanggungjawab kita semua pada planet bumi. Peran kelompok ini sangat besar untuk melaksanakan bisnis yang bertanggungjawab tidak saja pada pelaku bisnis kecil, namun yang sangat terkait dengan SDGs adalah tanggungjawab bisnis terhadap planet bumi. Aspek lain dari karakteristik bisnis adalah adanya jiwa dan kemampuan filantropis, sumbangan dana untuk kegiatan sosial, sehingga sangat bermanfaat bagi realisasi SDGs.

Masing-masing kelompok ini juga memiliki tata cara dan sumber dana sendiri, sehingga sistem pertanggungjawabannya juga berbeda-beda. Keempat platform berjalan selaras dengan menggunakan satu mekanisme yang disepakati SDGs Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

### **16.3 Perkembangan Aktivitas Masing-masing Platform Parapihak**

Pada saat ini pelaksanaan SDGs sudah memiliki landasan hukum yaitu Perpres 59/2017. Perpres tersebut disusun melalui komunikasi dan kontribusi bersama dari keempat platform tersebut. Komunikasi selama penyusunan Perpres sudah dilakukan secara koordinatif oleh keempat platform tersebut. Untuk pelaksanaan, peran keempat platform juga diperjelas dalam Perpres dan selanjutnya akan dijabarkan oleh Koordinator Pelaksana Perpres yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas. Meskipun demikian, keempat platform terutama kelompok perguruan tinggi, LSM dan bisnis-filantropis juga terus melakukan kegiatan dalam rangka pelaksanaan SDGs sesuai dengan dinamika masing-masing. Beberapa kegiatan mereka diuraikan di sini.

**Pemerintah, Pemda dan Parlemen.** Sebagai penanggung jawab formal Negara dalam melaksanakan SDGs di tingkat nasional dan sekaligus sebagai bagian dari pelaksanaan SDGs di tingkat global, maka Pemerintah merupakan penggerak utama penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi/*review SDGs*. Sampai dengan saat ini, sebagaimana uraian dalam Bab-bab sebelumnya, Pemerintah dengan melibatkan *stakeholders* di ketiga platform lainnya, sudah melakukan banyak hal. *Pertama*, adalah pelibatan *stakeholders* dalam keikutsertaan penyusunan SDGs di tingkat global; sampai SDGs dideklarasikan pada bulan September 2015. *Kedua*, melakukan *mainstreaming SDGs* ke dalam RPJMN 2015-2019. *Ketiga*, melakukan

analisa kesiapan data di Indonesia, sambil menunggu terbitnya indikator SDGs pada bulan Maret 2016. *Keempat*, melakukan penyusunan landasan hukum yang sudah diterbitkan pada bulan Juli 2017 lalu. Selanjutnya, penyelesaian RAN SDGs sesuai ketentuan Perpres 59/2017 serta koordinasi di tingkat regional dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyusunan RAD SDGs. Dalam semua proses tersebut, perwakilan Parlemen juga terlibat termasuk di daerah-daerah. Anggota DPRD menjadi sadar dan paham tentang SDGs serta mendukung peran DPRD dalam rangka *mainstreaming SDGs* ke dalam dokumen perencanaan daerah.

**Universitas.** Dalam rangka meningkatkan pemahaman SDGs di kalangan universitas, Kementerian PPN/Bappenas selaku koordinator *mainstreaming SDGs*, sejak awal sudah melakukan sosialisasi SDGs di kelompok universitas. Secara global, untuk memperluas komunikasi dengan universitas, dilakukan pula kerjasama dengan SDSN, yang di Indonesia dilakukan dengan *United in Diversity Foundation* yang menjadi “perwakilan” SDSN di Indonesia. Sampai saat ini, universitas yang paling aktif melakukan penyebarluasan tentang SDGs dan melakukan analisa tentang SDGs adalah Universitas Padjadjaran. Untuk melakukan langkah lebih terstruktur Universitas Padjadjaran mendirikan *Center of Excellence Sustainable Development Goals Studies* atau dikenal sebagai SDGs Center sejak bulan Mei 2016.

**Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).** Terdapat ratusan LSM yang bergerak di bidang pembangunan nasional dan kaitannya dengan pelaksanaan SDGs. LSM ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu LSM yang secara sendiri-sendiri memang bekerja di tingkat masyarakat di lapangan dan LSM yang bergerak dan ikut terlibat dalam memberikan input terhadap-kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat nasional. Dengan ragam LSM, tersebut, maka dalam kaitannya dengan persiapan dan pelaksanaan SDGs, selain melibatkan LSM yang bergerak di berbagai bidang sejak awal, Pemerintah juga melibatkan *INFID (Indonesia NGO Forum on*

*Indonesian Development*), yang merupakan LSM yang bergerak di bidang penelitian, kajian dan advokasi kebijakan pembangunan. Lembaga ini juga memiliki status konsultatif pada ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial) di PBB.<sup>74</sup>

Dalam kaitannya dengan SDGs, maka sesuai dengan dua kelompok LSM tersebut di atas, maka sebagian besar individu LSM terlibat dalam penyusunan SDGs dan pelaksanaannya di masing-masing pilar (sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola). Sebagian lagi dan terutama INFID, sangat terlibat dalam koordinasi pengelolaan keseluruhan SDGs.

**Bisnis dan Filantropi.** Sebagaimana dijelaskan di atas, peran bisnis sangat besar dalam pelaksanaan SDGs, mengingat pembangunan nasional yang terjadi di masyarakat sekitar 80% dibiayai oleh dana swasta baik skala besar, skala menengah dan skala kecil. Peran kalangan bisnis ini sangat penting tidak saja dalam pencapaian tujuan dan target serta indikator dalam SDGs, namun lebih luas lagi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan peran mereka, kelompok bisnis sebagai pelaku usaha diwakili oleh KADIN, dan untuk itu mereka membentuk unit organisasi yang disebut dengan *Indonesia Business Council for Sustainable Development* (IBSCD). IBSCD telah menyusun agenda sektor bisnis Indonesia dalam mencapai Indonesia Berkelanjutan, melalui *Indonesia Vision 2050*, yang menyajikan tren bisnis yang mempersiapkan perencanaan berjangka panjang. Selanjutnya, Kadin melalui bidang-bidangnya secara sinergi ikut mempromosikan bisnis yang berkelanjutan di tingkat korporasi (*Corporate Sustainability Framework*).

Selain itu, dalam kaitan dengan tanggungjawab sosial oleh perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), Kadin juga telah menerbitkan

---

<sup>74</sup> Ref No. D1035 yang disahkan tahun 2004.

Pedoman KADIN tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan (*CSR*) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pedoman ini menganjurkan agar perusahaan menerapkan SNI ISO 26000 yang menggabungkan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan dari *CSR*. Dalam standar internasional ini ditegaskan bahwa *CSR* bukanlah sekedar donasi atau filantropis semata, namun “merupakan upaya untuk mengelola resiko dan mengelola dampak perusahaan, yang dilakukan di seluruh perusahaan dan diterapkan di setiap relasinya dengan pemangku kepentingan.”<sup>75</sup>

Dalam kaitannya dengan peran filantropi, kelompok bisnis sudah membentuk platform Bisnis-Filantropi untuk Pelaksanaan *SDGs*. Kelompok ini sudah mendirikan *SDG Philanthropy Platform* yang merupakan kerjasama antara Filantropi Indonesia dengan UN Global Compact, KADIN/*IBCSD*. Forum ini beranggotakan 11 asosiasi dan 700 yayasan dan bisnis di Indonesia.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> [www.asean.csr-network.org](http://www.asean.csr-network.org) dan <https://bumntrack.com./kaddin> -dorong-pengusaha-bikin-csr-berkelanjutan

<sup>76</sup> <https://www.sdgphilanthropy.org.group>

## DAFTAR SINGKATAN

AAAA	Agenda Aksi Addis Ababa
AKBA	Angka Kematian Balita
AKB	Angka Kematian Bayi
AKI	Angka Kematian Ibu
AKN	Angka Kematian Neonatal
AMH	Angka Melek Huruf
APM	Angka Partisipasi Murni
ASI	Air Susu Ibu
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BDT	Basis Data Terpadu
BLSM	Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
BOE	<i>Barrel Oil Equivalent</i>
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BPP SPAM	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Bantuan Siswa Miskin
CBDR	<i>Common But Differentiated Responsibility</i>

COP	<i>Conference of the Parties</i>
CSO	<i>Civil Society Organisation</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DAC OECD	<i>Development Action Committee of the Organisation of Economic Cooperation and Development</i>
DSG UN	<i>Deputy Secretary General United Nations</i>
EBT	Energi Baru dan Terbarukan
ECOSOC	<i>Economic and Social Council</i>
FSVA	Food Security and Vulnerability Atlas
GAP	<i>Good Agriculture Practices</i> : suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan/ternak, yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, layak dikonsumsi
GHP	<i>Good Handling Practices</i> : suatu pedoman yang menjelaskan cara penanggulangan penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi
GMP	<i>Good Manufacturing Practices</i> : suatu pedoman yang menjelaskan cara pengolahan hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi
GGGI	<i>Global Green Growth Institute</i>
GNI	<i>Gross National Income</i>
GPEDC	<i>Global Partnership for Effective Development Cooperation</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
GSDR	<i>Global Sustainable Development Report</i>

HACCP	<i>Hazard Analysis Critical Control Point; suatu konsepsi manajemen mutu untuk memberikan jaminan keamanan dari produk pangan dengan menerapkan SNI</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HLPEP	<i>High Level Panel of Eminent Person</i>
HLPF	<i>High Level Political Forum</i>
IAEG SDGs	<i>Inter-agency and Experts Group on SDGs Indicators</i>
IBCSD	<i>Indonesia Business Council for Sustainable Development</i>
IBSAP	<i>Indonesia Bio-diversity and Strategy Action Plan</i>
ICS	<i>International Council of Science</i>
ICT	<i>Information, Communication and Technology</i>
IDI	Indeks Demokrasi Indonesia
IGS	<i>Independent Global Scientist</i>
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
INFID	<i>International NGO Forum on Indonesian Development</i>
IOC	<i>Intergovernmental Oceanographic Commission</i>
ISO	<i>International Standard Organisation</i>
ISPO	<i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i>
ITA	<i>Independent Team of Advisors</i>
IUU Fishing	<i>Illegal, Unreported, Unregulated Fishing</i>
JPOI	<i>Johannesburg Plan of Implementation</i>
KADIN	Kamar Dagang dan Industri



KB	Keluarga Berencana
KIB II	Kabinet Indonesia Bersatu II
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPS	Kerjasama Pemerintah Swasta
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KSP	Kantor Staf Presiden
KSST	Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular
KTТ	Konferensi Tingkat Tinggi
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LDCs	<i>Least Developed Countries</i>
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MBR	Masyarakat Berpendapatan Rendah
MDGs	<i>Millennium Development Goals</i>
MPA	<i>Marine Protected Area</i>
MSY	<i>Maximum Sustainable Yields</i>
MTBM	Manajemen Terpadu Bayi Muda
MTBS	Manajemen Terpadu Bayi Sakit
ODA	<i>Official Development Assistance</i>
ODI	<i>Overseas Development Institute</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OTT	Operasi Tangkap Tangan
OWG-SDGs	<i>Open Working Group on SDGs</i>

PAUD		Pendidikan Anak Usia Dini
PBB		Persatuan Bangsa-bangsa
PDAM		Perusahaan Daerah Air Minum
PDB		Produk Domestik Bruto
PKH		Program Keluarga Harapan
PLTS		Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PNPM Mandiri		Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
PONED		Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
PONEK		Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
PPP		<i>Public Private Partnership</i>
PPSP		Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
PUG		Pengarus Utamaan Gender
QE		<i>Quantitative Easing</i>
RAD MDGs		Rencana Aksi Daerah <i>Millennium Development Goals</i>
RAN GRK		Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca
RISKESDAS		Riset Kesehatan Dasar
RKP		Rencana Kerja Pemerintah
RPJPN	2007-2025	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2007-2025
RPJMN	2015-19	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-19
RRT		Republik Rakyat Tiongkok

RSPO	<i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i>
RUEN	Rencana Umum Energi Nasional
SAKERNAS	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDB	<i>Sustainable Development Board</i>
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDKI	Survei Dasar Kesehatan Indonesia
SDSN	<i>Sustainable Development Solutions Network</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SIDs	<i>Small Island Development</i>
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SNI	Standar Nasional Indonesia
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
STBM	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
STRANAS PPRG	Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender
SUPAS	Survei Penduduk antar Sensus
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFP	<i>Total Fertility Rate</i>
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
3T	Terpencil, Terluar dan Terdepan
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNCED	<i>United Nations Commission on Environment and Development</i>

UNDESA	<i>United Nations Department of Economic and Social Affairs</i>
UNDP	<i>United Nations Development Program</i>
UNDS	<i>United Nations Development System</i>
UNEP	<i>United Nations Environment Program</i>
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UNGA	<i>United Nation General Assembly</i>
UN RC	<i>United Nations Resident Coordinator</i>
UN SDSN	<i>United Nations Sustainable Development Solutions Network</i>
UNSTAT	<i>United Nations Statistics</i>
UU APBN	Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
VMS	<i>Vessel Monitoring System</i>
VNR	<i>Voluntary National Review</i>
WCED	<i>World Commission on Environment and Development</i>
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WHO	<i>World Health Organisation</i>
WPP	Wilayah Pengelolaan Perikanan
WSSD	<i>World Summit on Sustainable Development</i>
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Armida S., 2006, "Kebijakan Fiskal untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, April.
- \_\_\_\_\_, 2013, "*Bioresources for Green Economy Development*", *Dinner Lecture at the Second International Conference on Alfred Russel Wallace and the Wallacea: "Defining Wallacea, Indonesian Academy of Sciences*, November, Wakatobi, Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2014a, "Pembangunan Berkelanjutan dalam Agenda Pasca 2015" Sambutan Kunci pada Dialog Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2019, Jakarta, Indonesia, Januari.
- \_\_\_\_\_, 2014b, "Komitmen Nasional dan Internasional dalam Perubahan Iklim", Sambutan Kunci pada Sarasehan Nasional Perubahan Iklim Dan Peluncuran Dokumen RAN-API, Jakarta, Indonesia, Februari.
- \_\_\_\_\_, 2014c, "Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa", Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-57 Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, September.
- \_\_\_\_\_, 2014d, "Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang yang Inklusif dan Berkelanjutan", Sambutan Kunci pada Seminar Nasional, Kementerian Keuangan RI dan ISEI, Jakarta, Indonesia, September.
- \_\_\_\_\_, 2015, "*Refocusing Indonesia's Economic Growth in a Changing Global Environment*", *Keynote Address, Asia Competitiveness Seminar, National University of Singapore*, September.
- \_\_\_\_\_, 2016, "Kuliah Inaugurasi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI): Dari Komitmen ke Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia". Bandung, 25 Agustus 2016.

- Alisjahbana, Armida S. and Viktor Pirmana, 2016, *“Assessing Indonesia’s Long Run Growth: the Role of Total Factor Productivity and Human Capital”*, *SDGs Center Working Paper Series* no. 201616, Bandung, Indonesia.
- Alisjahbana, Armida S., dkk, 2017. “Menyongsong SDGs: Kesiapan daerah-daerah di Indonesia”. Bandung: Unpad Press.
- Arief A. J: Nasional “Menyongsong SDGs: Kesiapan daerah-daerah di Indonesia”, 26 November, Hotel Arya Duta, Jakarta
- Azis, I.J., 2010. *Pembangunan berkelanjutan: peran dan kontribusi Emil Salim*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- BAPPENAS, 2012. *Langkah Menuju Ekonomi Hijau: Sintesa dan Memulainya*.
- BAPPENAS, 2016. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium di Indonesia 2015*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- BAPPENAS, 2016. *Ringkasan Eksekutif Pencapaian 15 Tahun MDGs di Indonesia (2000-2015)*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- Barbier, E.B., 2010. *A global green new deal: rethinking the economic recovery*. Cambridge University Press.
- Biermann, F., Stevens, C., Bernstein, S., Gupta, A., Kabiri, N., Kanie, N., et al. (2014). *Integrating Governance into the Sustainable Development Goals. POST2015/UNU-IAS Policy Brief*, (3)
- BPS, 2016. *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS, Maret 2015. *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2015*
- Budiono, 2016. *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah*.
- Comim, F., Qizilbash, M. and Alkire, S. eds., 2008. *The capability approach: Concepts, measures and applications*. Cambridge University Press.
- Compilation of metadata IAEG-SDGs, March 2016*
- Darajati, W., Pratiwi, S., Herwinda, E., Radiansyah, A.D., Nalang, V.S., Nooryanto, B., Rahajoe, J.S., Ubaidillah, R., Maryanto, I., Kurniawan, R. and Prasetyo, T.A., 2016. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*. Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah kaca

Draft Rencana Aksi Nasional Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): RAN SDGs, Desember 2017

E/HLS/2016/1 *Ministerial declaration of the high-level-segment of the 2016 session of the Economic and Social Council on the annual theme "Implementing the post-2015 development agenda: moving from commitment to results"*

ECOSOC, 2016. *The Governance of the UN Development System: The Imperatives of Effectiveness and Integration. Draft* 21 April 2016.

Esty, Daniel C. and P.J. Simmons. 2011. *The Green to Gold Business Playbook. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc*

Griggs, D.J., Nilsson, M., Stevance, A. and McCollum, D., 2017. *A guide to SDG interactions: From science to implementation.*

Heckman, J.J., 2006. *Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. Science*, 312(5782), pp.1900-1902.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20170522/78/656004/sumut-listriki-daerah-terpencil-pakai-plts>. Mei 22 / 2017 20:08 WIB  
Oleh : Yoseph Pencawan

<http://thelawdictionary.org/environment/>

[http://wikieducator.org/Science\\_Man\\_and\\_His\\_Environment/What\\_is\\_Environment](http://wikieducator.org/Science_Man_and_His_Environment/What_is_Environment)

<http://www.businessdictionary.com/definition/environment.html>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/environment>

<https://www.sdgphilanthropy.org.group>

Lampiran Peraturan Presiden RI No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, Juli 2017

Le Blanc, D., 2015. *Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets. Sustainable Development*, 23(3), pp.176-187.

Lewis, D. and Kanji, N., 2009. *Non-governmental organizations and development. Routledge.*

Majalah Gatra, 24 Mei 2017

- Ministerial declaration of the high-level segment of the 2016 session of the ECOSOC on the Annual Theme "Implementating the post-2015 development agenda: moving from commitments to results", July 29, 2016*
- National Baseline for SDGs, SDSN, 2015 juga di Nature Geoscience 17 July 2017 (Jeffrey Sachs dkk).*
- Nicolai, S., Hoy, C., Berliner, T. and Aedy, T., 2015. *Projecting progress: Reaching the SDGs by 2030. Flagship Report.*
- Overseas Development Institute (ODI, 2015)*
- Peraturan Presiden RI nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 4 Juli 2017.
- Peraturan Presiden nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah kaca.
- Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, BPS, 2016.
- Reaching the SDGs by 2030, Overseas Development Institute (ODI), 2015.*
- Republic of Indonesia, Voluntary National Review 2017: "Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World"*
- Sachs, J.D., 2015. *The age of sustainable development. Columbia University Press.*
- Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Durand-Delacre, D. and Teksoz, K. (2016): *An SDG Index and Dashboards – Global Report. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN).*
- Sen, A., 1992. *Inequality Reexamined. Clarendon Press.*
- Study presentation by Pavan Sukhdev Biodiversity and Natural Capita, Globe International (<http://globelegislators.org/study-prewswentation-by-pavan-sukhdev>).*
- Sustainable Development Solutions Network (SDSN, 2017)*
- United Nations, The Future We Want" (Resolution 66/288)*  
[http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E)
- United Nations, 2012. Back to our common future: Sustainable development in the 21st century (SD21) project: Summary for policymakers.*



[https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/UN-DESA\\_Back\\_Common\\_Future\\_En.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/UN-DESA_Back_Common_Future_En.pdf)

*United Nations, 2013. A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development. Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda.*

*United Nations, 2015. The Millennium Development Goals Report 2015. New York.*

*United Nations, 2015. The Millennium Development Goals Report 2015: Summary. New York.*

*United Nations Environment Programme, 2017. UN Environment 2016 Annual Report: Empowering People to Protect the Planet.*

*United Nations General Assembly, 2015. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 70/1. Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations, New York.*

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

*Voluntary National Review 2017: "Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World"*

*Voluntary National Reviews and National SDG Reports. Overview Report to Guide Their Preparation. UNDP. Draft in Progress, September 2017.*

*World Bank, 2016. World Development Indicators. (www.databank.worldbank.org)*

*World Health Organization, 2002. The world health report 2002: reducing risks, promoting healthy life. World Health Organization.*

[www.asean.csr-network.org](http://www.asean.csr-network.org) dan [https://bumntrack.com..kaddin -  
dorong-pengusaha-bikin-csr-berkelanjutan](https://bumntrack.com..kaddin-dorong-pengusaha-bikin-csr-berkelanjutan)

Yell, M.L., 2011. *Least restrictive environment, mainstreaming, and inclusion. Updated on July 20,2010.* At [www.education.com](http://www.education.com)

Yusuf, Arief A., dkk, 2018. "Seri Menyongsong SDGs: Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat". Bandung: Unpad Press.

# INDEKS

- 3T  
Terpencil, Terluar dan  
Terdepan, 40, 302
- AAAA  
Agenda Aksi Addis Ababa,  
14, 253, 297
- Air Bersih dan Sanitasi Layak,  
92
- AKB  
Angka Kematian Bayi, 28,  
102, 297
- AKBA  
Angka Kematian Balita, 28,  
297
- AKI  
Angka Kematian Ibu, 222,  
297
- AKN  
Angka Kematian Neonatal,  
28, 297
- AKN  
Angka Kematian Neonatal,  
28
- AKN  
Angka Kematian Neonatal,  
297
- AMH  
Angka Melek Huruf, 33, 297
- Angka Kematian  
di Bawah 5 tahun, 28, 102,  
115, 201, 203, 204, 222,  
235, 243, 297
- Neonatal, 28, 102, 115, 201,  
203, 204, 222, 235, 243,  
297
- APM  
Angka Partisipasi Murni, 24,  
27, 204, 297
- ASI  
Air Susu Ibu, 106, 297
- Bali, 247
- Balita  
dengan berat badan kurus  
dan sangat kurus, 28, 34,  
106, 115, 201, 202, 203,  
204, 222, 243, 297  
dengan tinggi badan pendek  
dan sangat pendek, 28,  
34, 106, 115, 201, 202,  
203, 204, 222, 243, 297
- BAPPENAS  
Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional,  
iii, iv, 23, 24, 32, 37, 41,  
152, 183, 297, 305, 306
- Baseline, 80, 307
- BDT  
Basis Data Terpadu, 32, 40,  
122, 297
- BLSM  
Bantuan Langsung  
Sementara Masyarakat,  
33, 297
- BOE

- Barrel Oil Equivalent*, 30, 297
- BOS  
Bantuan Operasional Sekolah, 33, 297
- BOSDA  
Bantuan Operasional Sekolah Daerah, 33, 297
- BPP SPAM  
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 297
- BPS  
Badan Pusat Statistik, 4, 26, 27, 28, 31, 32, 87, 92, 156, 157, 202, 205, 207, 208, 209, 210, 213, 217, 218, 285, 297, 305, 307
- BSM  
Bantuan Siswa Miskin, 33, 297
- business as usual*, 41, 51, 52, 57, 77, 80, 133, 180, 181, 182
- CBDR  
*Common But Differentiated Responsibility*, 133, 297
- COP  
*Conference of the Parties*, 18, 67, 298
- CSO  
*Civil Society Organisation*, 10, 189, 298
- CSR  
*Corporate Social Responsibility*, 154, 242, 243, 295, 298
- DAC OECD  
*Development Action Committee of the Organisation of Economic Cooperation and Development*, 298
- DKI Jakarta, 209, 319
- DSG UN  
*Deputy Secretary General United Nations*, 298
- EBT  
Energi Baru dan Terbarukan, 160, 298
- ECOSOC  
*Economic and Social Council*, 74, 258, 260, 262, 266, 267, 287, 295, 298, 306, 307, 318
- elektrifikasi, 160
- Energi Bersih dan Terjangkau, xvii, 64, 141
- ESDM  
Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, 35
- FSVA  
Food Security and Vulnerability Atlas, 95, 298
- GAP  
*Good Agriculture Practices*, 159, 298
- GGGI  
*Global Green Growth Institute*, 37, 298
- GHP  
*Good Handling Practices*, 159, 298
- GMP  
*Good Manufacturing Practices*, 159, 298
- GNI  
*Gross National Income*, 16, 17, 150, 298
- GPEDC  
*Global Partnership for Effective Development Cooperation*, 13, 37, 298
- GRK

- Gas Rumah Kaca, 19, 30, 35,  
152, 181, 182, 183, 298
- GSDR  
*Global Sustainable  
Development Report*, 71,  
298
- HACCP  
*Hazard Analysis Critical  
Control Point*, 158, 299
- HAM  
Hak Asasi Manusia, 197, 299
- HLPEP  
*High Level Panel of Eminent  
Person*, 11, 61, 88, 268,  
299
- HLPF  
*High Level Political Forum*,  
70, 84, 85, 91, 94, 260,  
287, 292, 299
- IAEG SDGs  
*Inter-agency and Experts  
Group on SDGs Indicators*,  
73, 74, 76, 299
- IAEG-SDGs, 60, 72, 305
- IBCSA  
*Indonesia Business Council  
for Sustainable  
Development*, 295, 296,  
299
- IBSAP  
*Indonesia Bio-diversity and  
Strategy Action Plan*, 184,  
185, 299, 305
- ICS  
*International Council of  
Science*, 299
- ICT  
*Information, Communication  
and Technology*, 223, 255,  
299
- IDI  
Indeks Demokrasi  
Indonesia, 213, 299
- IGS  
*Independent Global Scientist*,  
70, 299, 319
- IKLH  
Indeks Kualitas Lingkungan  
Hidup, 153, 299
- INFID  
*International NGO Forum on  
Indonesian Development*,  
269, 294, 295, 299
- IOC  
*Intergovernmental  
Oceanographic  
Commission*, 177, 299
- ISO  
*International Standard  
Organisation*, 296, 299
- ISPO  
Indonesia Sustainable Palm  
Oil, 156, 157, 299
- ITA  
*Independent Team of  
Advisors*, 260, 261, 262,  
263, 265, 299
- IUU Fishing  
*Illegal, Unreported,  
Unregulated Fishing*, 95,  
299
- Jawa Barat, 308
- JPOI  
*Johannesburg Plan of  
Implementation*, 10, 299
- KADIN  
Kamar Dagang dan Industri,  
295, 296, 299
- Kalimantan Tengah, 217
- Kalimantan Timur, 217
- KB  
Keluarga Berencana, 28, 35,  
300
- KIB II  
Kabinet Indonesia Bersatu  
II, 13, 300

- KLHK  
Kementerian Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan, 30,  
300
- Konsumsi dan Produksi yang  
Bertanggungjawab, 164, 168
- KPK  
Komisi Pemberantasan  
Korupsi, 214, 300
- KPS  
Kerjasama Pemerintah  
Swasta, 32, 300
- KPU  
Komisi Pemilihan Umum,  
28, 300
- KSP  
Kantor Staf Presiden, 269,  
300
- KSST  
Kerjasama Selatan Selatan  
dan Triangular, 37, 300
- KTT  
Konferensi Tingkat Tinggi,  
7, 8, 11, 12, 61, 182, 277,  
289, 300
- KUR  
Kredit Usaha Rakyat, 33,  
300
- LDCs  
*Least Developed Countries*,  
16, 57, 80, 81, 142, 172,  
175, 177, 178, 253, 300
- LKPP  
Laporan Keuangan  
Pemerintah Pusat, xiii,  
214, 215, 300
- LSM  
Lembaga Swadaya  
Masyarakat, 8, 13, 39, 58,  
60, 66, 123, 243, 244,  
252, 269, 271, 272, 282,  
288, 289, 290, 292, 293,  
294, 295, 300
- MBR  
Masyarakat Berpendapatan  
Rendah, 36, 300
- MDGs  
*Millennium Development  
Goals*, vi, viii, xii, 3, 4, 10,  
13, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
32, 35, 37, 38, 39, 40, 57,  
58, 59, 60, 64, 66, 68, 69,  
70, 72, 73, 74, 77, 79, 86,  
87, 89, 90, 94, 107, 108,  
109, 110, 114, 116, 122,  
149, 168, 200, 210, 226,  
241, 242, 243, 244, 246,  
251, 268, 272, 274, 285,  
288, 300, 305
- Mengurangi Kesenjangan, 65
- MPA  
*Marine Protected Area*, 95,  
300
- MSY  
*Maximum Sustainable Yields*,  
36, 186, 300
- MTBM  
Manajemen Terpadu Bayi  
Muda, 34, 300
- MTBS  
Manajemen Terpadu Bayi  
Sakit, 34, 300
- ODA  
*Official Development  
Assistance*, 16, 17, 66,  
149, 150, 264, 300
- ODI  
*Overseas Development  
Institute*, 79, 80, 81, 300,  
307
- OJK  
Otoritas Jasa Keuangan, 31,  
300
- OTT  
Operasi Tangkap Tangan,  
214, 300

OWG-SDGs  
*Open Working Group on  
 SDGs*, 12, 301

PAUD  
 Pendidikan Anak Usia Dini,  
 103, 106, 301

PBB  
 Persatuan Bangsa-bangsa, i,  
 iv, vi, 3, 8, 9, 10, 11, 12,  
 17, 18, 60, 61, 70, 78, 84,  
 88, 89, 91, 94, 150, 227,  
 238, 252, 257, 258, 259,  
 260, 262, 263, 277, 282,  
 288, 289, 295, 301, 319

PDAM  
 Perusahaan Daerah Air  
 Minum, 36, 41, 301

PDB  
 Produk Domestik Bruto, 25,  
 26, 31, 46, 142, 171, 222,  
 238, 301

Pekerjaan Layak dan  
 Pertumbuhan Ekonomi, 64

Perguruan Tinggi, 27, 244, 269,  
 304

PKH  
 Program Keluarga Harapan,  
 35, 301

PLTS  
 Pembangkit Listrik Tenaga  
 Surya, xvii, 161, 301

PNPM Mandiri  
 Program Nasional  
 Pemberdayaan  
 Masyarakat Mandiri, 33,  
 257, 301

PONED  
 Pelayanan Obstetri  
 Neonatal Emergeni  
 Dasar, 34, 301

PONEK  
 Pelayanan Obstetri  
 Neonatal Emergeni  
 Komprehensif, 34, 301

PPP  
*Public Private Partnership*, 3,  
 22, 26, 301

PPSP  
 Program Percepatan  
 Pembangunan Sanitasi  
 Permukiman, 36, 301

Proyeksi, 220, 223

PUG  
 Pengarus Utamaan Gender,  
 34, 301

QE  
*Quantitative Easing*, 216,  
 301

RAD MDGs  
 Rencana Aksi Daerah  
*Millennium Development  
 Goals*, 301

RAN GRK  
 Rencana Aksi Nasional  
 Penurunan Gas Rumah  
 Kaca, 35, 182, 301

Rasio gini, 209

Rasio Gini, 209

Riau, 217

RISKESDAS  
 Riset Kesehatan Dasar, 203,  
 301

RKP  
 Rencana Kerja Pemerintah,  
 22, 32, 91, 211, 269, 301

RPJMN  
 Rencana Pembangunan  
 Jangka Menengah  
 Nasional, xiv, 22, 32, 86,  
 88, 90, 91, 121, 152, 153,  
 157, 159, 181, 182, 183,  
 185, 196, 197, 201, 210,  
 241, 266, 269, 277, 278,  
 280, 281, 283, 293, 301

RPJPN	203, 205, 209, 215, 224,
Rencana Pembangunan	225, 226, 227, 229, 232,
Jangka Panjang Nasional,	236, 238, 241, 243, 244,
22, 183, 202, 266, 301	245, 246, 247, 250, 251,
RRT	252, 253, 254, 258, 259,
Republik Rakyat Tiongkok,	260, 261, 262, 263, 265,
254, 256, 301	266, 267, 268, 269, 270,
RSPO	271, 272, 273, 274, 275,
<i>Roundtable Sustainable</i>	276, 277, 278, 280, 281,
<i>Palm Oil</i> , xvii, 157, 158,	282, 283, 284, 285, 287,
302	288, 289, 291, 292, 293,
RUEN	294, 295, 296, 299, 300,
Rencana Umum Energi	302, 305, 306, 307, 308,
Nasional, 160, 302	318, 319
SAKERNAS	SDKI
Survei Angkatan Kerja	Survei Dasar Kesehatan
Nasional, 302	Indonesia, 28, 29, 204,
SAKERNAS	302
Survey Angkatan Kerja	SDM
Nasional, 302	Sumber Daya Manusia, 14,
SDB	60, 116, 154, 192, 193,
<i>Sustainable Development</i>	194, 196, 219, 221, 223,
<i>Board</i> , 262, 302	243, 272, 277, 291, 302
SDGs	SDSN
<i>Sustainable Development</i>	<i>Sustainable Development</i>
<i>Goals</i> , i, vi, vii, viii, ix, x, xi,	<i>Solutions Network</i> , 11, 60,
xii, xiii, xiv, xvii, 2, 9, 10,	80, 81, 82, 92, 93, 289,
11, 13, 14, 15, 16, 17, 19,	292, 294, 302, 307
20, 22, 37, 39, 44, 57, 58,	SIDs
59, 60, 61, 63, 64, 66, 68,	<i>Small Island Development</i> ,
69, 70, 72, 73, 74, 76, 77,	302
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,	SJSN
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,	Sistem Jaminan Sosial
92, 93, 94, 95, 98, 107,	Nasional, 95, 302
108, 109, 110, 111, 112,	SNI
114, 115, 116, 119, 120,	Standar Nasional Indonesia,
121, 123, 124, 140, 141,	159, 296, 299, 302
142, 143, 147, 149, 152,	SPAM
162, 163, 164, 166, 167,	Sistem Penyediaan Air
168, 170, 172, 174, 175,	Minum, 36, 302
176, 178, 180, 182, 187,	STBM
188, 189, 190, 191, 194,	Sanitasi Total Berbasis
195, 196, 199, 200, 201,	Masyarakat, 36, 302

STRANAS PPRG  
 Strategi Nasional  
 Percepatan  
 Pengarusutamaan  
 Gender, 302  
 Sumatera Selatan, 217  
 SUPAS  
 Survei Penduduk antar  
 Sensus, 28, 302  
 SUSENAS  
 Survei Sosial Ekonomi  
 Nasional, 26, 27, 28, 31,  
 32, 302  
 Survey Ekonomi Nasional,  
 26, 27, 28, 31, 32, 302  
*Sustainable Development Goals*,  
 iv, v, vi, ix, xii, 2, 9, 10, 12, 13,  
 37, 57, 58, 59, 61, 86, 280,  
 294, 302, 305, 318, 319  
 Tanpa Kelaparan, xii, xvii, 64,  
 111, 112  
 Tanpa Kemiskinan, xii, 64, 109,  
 110  
 TFP  
*Total Fertility Rate*, 302  
 Tier, 76  
 Tingkat pengangguran, 206,  
 217  
 TNP2K  
 Tim Nasional Percepatan  
 Penanggulangan  
 Kemiskinan, 32, 302  
 TPB  
 Tujuan Pembangunan  
 Berkelanjutan, 91, 267,  
 269, 302  
 Tujuan 1  
 Tidak Ada Kemiskinan, xii,  
 xiii, 15, 21, 110, 148, 150,  
 171, 173, 174, 175, 177,  
 178, 195, 196, 209, 211,  
 212, 230, 235, 237, 238  
 Tujuan 10  
 Mengurangi Kesenjangan,  
 xiii, 148, 230  
 Tujuan 11  
 Kota yang Berkelanjutan  
 dan Komunitas, xiii, 171,  
 235, 237  
 Tujuan 12  
 Konsumsi dan Produksi  
 yang Bertanggungjawab,  
 xiii, 173, 235, 238  
 Tujuan 13  
 Tindakan Terhadap Iklim,  
 xiii, 174, 175  
 Tujuan 14  
 Kehidupan di Bawah Air,  
 xiii, 175, 177, 209, 211  
 Tujuan 15  
 Kehidupan di Darat, xiii,  
 178, 209, 211  
 Tujuan 16  
 Perdamaian, Keadilan dan  
 Institusi yang Kuat, xiii,  
 195, 196, 212  
 Tujuan 2  
 Tidak Ada Kelaparan, xii,  
 xvii, 21, 112, 235, 237  
 Tujuan 3  
 Kesehatan dan  
 Kesejahteraan Yang Baik,  
 xii, xiii, xvii, 21, 114, 115,  
 203, 235, 236  
 Tujuan 4  
 Pendidikan Berkualitas, xii,  
 21, 117  
 Tujuan 5  
 Kesetaraan Gender, xii, 21,  
 65, 119  
 Tujuan 6  
 Air Bersih dan Sanitasi, xiii,  
 21, 169, 209, 235, 237  
 Tujuan 7



- Energi Bersih dan Terjangkau, xii, xvii, 21, 141, 142
- Tujuan 8  
Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, xii, 21, 144, 205
- Tujuan 9  
Industri, Inovasi dan Infrastruktur, xiii, 146
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, iv, v, vi, vii, viii, ix, xii, xiv, 2, 10, 13, 15, 19, 44, 58, 59, 61, 91, 92, 152, 164, 187, 189, 190, 196, 201, 203, 224, 266, 267, 268, 270, 277, 281, 282, 285, 286, 293, 302, 304, 305, 306, 307
- UMKM  
Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 302
- UN  
*United Nations*, 11, 12, 13, 59, 61, 73, 84, 126, 259, 260, 262, 296, 303, 306, 308, 318
- UN RC  
*United Nations Resident Coordinator*, 262, 303
- UN SDSN  
*United Nations Sustainable Development Solutions Network*, 303
- UNCED  
*United Nations Commission on Environment and Development*, ii, 9, 302
- UNDESA  
*United Nations Department of Economic and Social Affairs*, 71, 83, 84, 85, 86, 128, 303
- UNDP  
*United Nations Development Program*, 11, 12, 83, 89, 242, 303, 308
- UNDS  
*United Nations Development System*, xi, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 303
- UNEP  
*United Nations Environment Program*, ii, 4, 7, 9, 125, 130, 140, 258, 287, 288, 303
- UNFCCC  
*United Nations Framework Convention on Climate Change*, 9, 17, 18, 175, 303
- UNGA  
*United Nation General Assembly*, 61, 89, 94, 303
- UNSTAT  
*United Nations Statistics*, 71, 72, 84, 88, 90, 285, 303
- UU APBN  
Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 89, 269, 275, 303
- VMS  
*Vessel Monitoring System*, 186, 303
- VNR  
*Voluntary National Review*, 70, 83, 84, 85, 91, 93, 94, 187, 303
- WCED  
*World Commission on Environment and Development*, i, ii, 9, 303
- WDP  
Wajar Dengan Pengecualian, 215, 303
- WHO, 29, 115, 202, 203, 303

*World Health Organisation,*  
29, 115, 202, 203, 303  
WPP  
Wilayah Pengelolaan  
Perikanan, 186, 303  
WSSD

*World Summit on*  
*Sustainable Development,*  
10, 303  
WTP  
Wajar Tanpa Pengecualian,  
214, 215, 303

## TENTANG PENULIS



Armida Salsiah Alisjahbana adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, saat ini bertugas sebagai Direktur *Center for Sustainable Development Goals Studies*, Universitas Padjadjaran dan anggota dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Armida Salsiah Alisjahbana pernah menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014). Pernah pula menjabat sebagai *Co-chair of the Global Partnership for Effective Development Cooperation* untuk periode 2012-2014, serta *Alternate Governor* dari World Bank dan ADB untuk Indonesia pada periode 2009-2014. Profesor Armida menjadi anggota dari *the Independent Team of Advisors on SDGs* bagi *UN ECOSOC* pada tahun 2016. Profesor Armida adalah salah satu *International Advisory Board* di *Bulletin of Indonesian Economic Studies* (BIES). Profesor Armida memiliki banyak publikasi ilmiah dan menempati berbagai posisi anggota *Governing Board*, yang diantaranya di *Economic Research Institute for Asean and East Asia* (ERIA), *Regional Science Association International* (RSAI), *Indonesia Bureau of Economic Research* (IBER). Keahlian beliau adalah pada area Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Publik dan Ekonomi Sumber Daya Manusia.



Endah Murniningtyas lahir di Jogjakarta dan besar di Purwokerto. Pada tahun 1984 lulus S1 dari Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Masuk dan mulai bekerja di Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 1985, sebagai staf di Biro Perdagangan. Menjalani karir sebagai PNS dan menduduki berbagai jabatan antara lain sebagai Direktur Iptek dan Kebudayaan, Direktur Pangan dan Pertanian, dan Direktur Penanggulangan Kemiskinan sebelum akhirnya menjabat sebagai Deputy Bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup 2010-2015. Terakhir menjabat sebagai Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber daya Alam 2015-2016, dan mengajukan pensiun dini pada bulan Juni 2016 setelah bekerja lebih dari 30 tahun di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Yang bersangkutan menyelesaikan *Master of Science* dari *Department of Agriculture and Resource, Oregon State University, Corvallis, Amerika Serikat* pada tahun 1989. Selanjutnya pada tahun 2000 menyelesaikan Ph.D dari *Department of Agriculture and Resource Economics di Colorado State University, Fort Collins Amerika Serikat*. Yang bersangkutan saat ini adalah Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Komda DKI Jakarta, dan salah seorang Ketua PERHEPI. Pada tahun 2014-2015 merupakan wakil Pemerintah Indonesia dalam *the Open Working Group on Sustainable Development Goals at the United Nations*, yang menyelesaikan draft SDGs sebelum akhirnya di Deklarasikan di PBB pada September 2015. Sejak Desember 2017, yang bersangkutan bertugas sebagai *Co-Chairs of the 15-member Independent Group of Scientists/Expert (IGS)* untuk menyusun *Global Sustainable Development Report 2019*.